



ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Cecep Darmawan | Rekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Hukum Pendidikan

Vannesa Gaffar | Model Pendidikan dan Kewirausahaan Berkelanjutan Sebagai Suatu Proses Pembelajaran Sepanjang Hayat di Pendidikan Tinggi

Yudha Munajat Saputra | Arah dan Kebijakan Pembinaan Karir Profesional Guru di Indonesia
Enjang Yusuf Ali
J. Julia

Aan Komariah | Kepemimpinan Abad-21 : Kepiawaian Menerapkan *E-Leadership* di Era 4.0

Syaifullah | Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Yang Holistik dan Berkelanjutan

Ida Kaniawati | Pembelajaran STEM : Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Di Abad 21

Khaerudin Kurniawan | Arah Pengajaran Bahasa Indonesia dan Pemertabatan Jati Diri Bangsa

Leni Anggraeni | Strategi dan Implementasi Peran Perguruan Tinggi Melalui KKN
Muhamad Saeful Akbar | Tematik Membangun Desa Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Baeihaqi

Vina Adriany | Redefinisi Makna Pendidikan

Yuliawan Kasmahidayat | Pengokohan Kebudayaan Nasional Melalui Pendidikan Seni di Era Society 5.0



ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tidak
Diperjualbelikan



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Pengkajian MPR RI

2021

Pengelola Jurnal Majelis

- Penasehat** : H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A
Dr. Ahmad Basarah, M.H
H. Ahmad Muzani
Lestari Moerdijat, S.S., M.M
H. Jazilul Fawaid, SQ., MA
Dr. H. Sjarifuddin Hasan., S.E., M.M., M.B.A
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., M.A
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M
H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
- Pengarah** : Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H
Ir. H. Tifatul Sembiring
Tamsil Linrung
- Penanggung Jawab** : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si
Redaksi Pelaksana : Agip Munandar, S.H., M.H
Andrianto, S.E
Indri Wahyuni, S.IP., M.A
Abdul Rafiq, SE
Euis Karmilah, S.IP
- Editor** : Wahyu F. Riyanto, S.H., LL.M, Bernadetta Widyastuti, S.Sos,
Pradita Devis Dukarno, SS., Otto Trengginas Setiawan, S.Hum., M.M
- Sekretariat** : Dennys Advenino Pulo, S.H., Encep Sunjaya, S.Sos

Alamat Redaksi:

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat, 10270
Telp. (021) 5789.5414 / 5789.5415
E-mail: biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	III
Pengantar Redaksi	V
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	VII
Rekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Hukum Pendidikan <i>Cecep Darmawan</i>	1
Model Pendidikan dan Kewirausahaan Berkelanjutan Sebagai Suatu Proses Pembelajaran Sepanjang Hayat di Pendidikan Tinggi <i>Vannesa Gaffar, Heni Mulyani</i>	35
Arah dan Kebijakan Pembinaan Karir Profesional Guru di Indonesia <i>Yudha Munajat Saputra, Enjang Yusuf Ali, J. Julia</i>	73
Kepemimpinan Abad-21 : Kepiawaian Menerapkan <i>E-Leadership</i> di Era 4.0 <i>Aan Komariah</i>	105
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Yang Holistik dan Berkelanjutan <i>Syaifullah</i>	129
Pembelajaran STEM : Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Di Abad 21 <i>Ida Kaniawati</i>	167
Arah Pengajaran Bahasa Indonesia dan Pemertabatan Jati Diri Bangsa <i>Khaerudin Kurniawan</i>	183

Strategi dan Implementasi Peran Perguruan Tinggi Melalui KKN Tematik Membangun Desa Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa <i>Leni Anggraeni, Muhamad Saeful Akbar, Baeihaqi</i>	217
Redefinisi Makna Pendidikan <i>Vina Adriany</i>	247
Pengokohan Kebudayaan Nasional Melalui Pendidikan Seni di Era Society 5.0 <i>Yuliawan Kasmahidayat</i>	273



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Edisi 2 Tahun 2021 dengan tema bahasan “*Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*” dapat diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari himpunan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “*Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu (a) *memasyarakatkan Ketetapan MPR*, (b) *memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika*, (c) *mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya*, dan (d) *menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kegiatan Penyusunan Naskah Jurnal Majelis dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai “*Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*”, tinjauan dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan Jurnal Majelis Edisi 2 Tahun 2021 ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, setidaknya dapat tampil sebagai referensi atau pemantik gagasan yang inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut dikaitkan dengan konteks terhadap penyusunan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan menjadi rujukan atau arahan (*direction*) bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan bagi penyelenggara negara.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

Dewan Redaksi,



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR melaksanakan penerbitan Jurnal Majelis dengan tema besar “*Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*”. Jurnal terbitan ini lebih banyak menyoroti berbagai persoalan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan memuat arah dan kebijakan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan, ditinjau dari misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu.

Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi, serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI
Ketua,



Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

REKONSTRUKSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENDIDIKAN

Cecep Darmawan¹

Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: cecep darmawan@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021

Reviewed : 18 November 2021

Accepted : 8 December 2021

Published : 15 December 2021

Abstract

Imperatively, the constitution has mandated the importance of educating the nation's life as one of the national goals of the Indonesian nation. The mandate of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly shows the importance of the education sector in the development of the nation. For this reason, the government seeks to organize a national education system as a form of fulfilling obligations for citizens. However, in its implementation, the national education system in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System, has not holistically and comprehensively regulated matters concerning education. The point is that the fundamental rights of citizens in education have not been fulfilled optimally. Therefore, this paper aims to find alternatives to reconstruct the national education system in the perspective of education law. This study uses a literature study in its discussion. One alternative is the formation of the omnibus law model of the national education system. Through this effort, it is expected to form a complete, comprehensive, and holistic national education system that can become the main guideline for education law in Indonesia.

Keywords: *education law, reconstruction, national education system*

Abstrak

Secara imperatif, konstitusi telah mengamanatkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. Amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, secara eksplisit menunjukkan betapa pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, pemerintah berupaya menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagai wujud pemenuhan kewajiban asasi bagi warga negara. Akan tetapi, dalam implementasinya, sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, belum secara holistik dan komprehensif mengatur hal-hal ikhwal pendidikan. Konsekuensinya ialah hak-hak fundamental warga negara dalam pendidikan belum terpenuhi secara optimal. Oleh karenanya,

tulisan ini bertujuan untuk mencari alternatif guna merekonstruksi sistem pendidikan nasional dalam perspektif hukum pendidikan. Kajian ini menggunakan studi literatur dalam pembahasannya. Salah satu alternatif pembentukan undang-undang sistem pendidikan nasional model *omnibus law*. Melalui upaya ini, diharapkan dapat membentuk satu sistem pendidikan nasional yang utuh, komprehensif, dan holistik yang dapat menjadi pedoman utama bagi hukum pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci : hukum pendidikan, rekonstruksi, sistem pendidikan nasional

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang amat penting dalam kemajuan bangsa. Bahkan, pentingnya pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan eksistensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia. Amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah menyebutkan jika salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat dalam pembukaan konstitusi tersebut kemudian diderivasikan ke dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 terkait pendidikan. Secara imperatif, pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemenuhan hak dan kewajiban negara dan warga negara di bidang pendidikan.

Hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan diatur oleh beberapa pasal yakni Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Kemudian dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Betapa pentingnya pendidikan, konstitusi secara khusus mencantumkan Bab tentang pendidikan, yakni BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka kewajiban pemerintah memberikan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Selain itu, kewajiban konstitusional negara tercantum dalam Pasal 31 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sektor pendidikan telah memiliki atensi yang sangat serius. Bahkan persoalan pendanaannya pun diatur secara tegas dalam konstitusi yakni dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan satu-satunya sektor pembangunan nasional yang alokasi anggarannya ditentukan secara langsung dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara. Tidak ada sektor lain yang dicantumkan prosentase menganggarkannya dalam konstitusi. Atas amanat konstitusi itu, maka pemerintah harus memiliki perhatian yang sangat serius untuk memenuhinya.

Di samping itu, kewajiban konstitusional negara dalam sektor pendidikan pun ditunjukkan pada Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini menarik untuk dicermati mengingat bahwa pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Persoalannya adalah sudahkan kita selaku bangsa memiliki satu sistem pendidikan sebagaimana amanat konstitusi? Meski kita telah memiliki UU Sisdiknas, apakah UU tersebut sudah merupakan satu kesatuan sistem pendidikan? Faktanya masih terdapat sejumlah regulasi dalam level UU yang mengatur pendidikan selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, semisal UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru Dosen, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan lain lain

Berikutnya, Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewajiban konstitusional negara yakni “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (5) ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memajukan iptek bagi warga negaranya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Artinya bagaimana memajukan iptek selama ini apakah sudah berbasis nilai-nilai agama dan persatuan bangsa? Begitu pun, apakah memajukan iptek selama ini telah mengakselerasi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia? Itulah sekelumit pertanyaan yang menarik untuk dijawab.

Berbagai amanat konstitusi tersebut, khususnya Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Adanya ketentuan konstitusi

dan peraturan tersebut menjadi landasan bagi konsep hukum pendidikan di Indonesia. Cecep Darmawan menjelaskan bahwa “hukum pendidikan tidak lain adalah hukum yang berkenaan dengan hal ikhwal atau seluruh aspek pendidikan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional.”¹

Jika diklasifikasikan berdasarkan kajian bidang hukum maka hukum pendidikan merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bersifat wajib. Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa “semua aspek pengaturan dan penetapan hukum dalam rangka pelayanan umum (*public services*) oleh para pejabat administrasi publik atau pejabat administrasi negara (*public administration*) dalam bidang-bidang tersebut merupakan persoalan hukum administrasi negara.”²

Cecep Darmawan pun menjelaskan bahwa “pendidikan merupakan barang atau jasa publik yang wajib disediakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pendidikan merupakan domain negara dan ranah publik sekaligus tanggung jawab pemerintah ataupun negara untuk menyelenggarakannya.”³ Dengan demikian, adanya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah merupakan wujud nyata dari negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya. Pendidikan pun harus dapat dijangkau oleh seluruh kalangan.

¹ Cecep Darmawan, “Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2, (2020): 61-67, hlm. 64.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 87.”

³ Cecep Darmawan, “Dampak Potensial Pajak Pendidikan”, 16 Juni 2021, <https://koran.tempo.co/read/opini/465594/opini-dampak-potensial-pajak-pendidikan-oleh-cecep-darmawan?>, diakses pada 04 Oktober 2021.

Dengan pendidikan yang berkualitas, kita sedang menyiapkan generasi berikutnya lebih imersif dan terpersonalisasi melalui proses pendidikan yang tercerahkan

Akan tetapi, dalam implementasinya, sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah mengalami berbagai problematika, baik dalam tataran konseptual maupun praksis kebijakan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Darmawan terkait “Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) Dalam Perspektif Hukum Pendidikan” menunjukkan bahwa “ketentuan UUGD yang menyebutkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka sehingga berpotensi terjadinya diskriminatif terhadap profesi guru. Selain itu, dalam implementasinya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan UUGD yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya *pertama*, Undang-Undang Guru dan Dosen mengamanatkan kepada pemerintah selama sepuluh tahun sejak UUGD berlaku, para guru di seluruh Indonesia sudah harus tersertifikasi. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan sejumlah guru yang belum tersertifikasi sampai dengan tahun 2020. *Kedua*, pemerintah masih mengangkat guru-guru yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kondisi ini merupakan bentuk inkonsistensi dari pemerintah dan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UUGD”⁴, sebagai salah satu landasan yuridis bagi hukum pendidikan di Indonesia.

Penelitian ataupun kajian terkait problematika kebijakan pendidikan dalam konteks sistem pendidikan nasional memang telah banyak diteliti

⁴ Cecep Darmawan, *Op.cit*, hlm. 62-63 dan 66-67.

dan dikaji oleh peneliti terdahulu. Namun, belum banyak yang terfokuskan pada perspektif hukum pendidikan sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, kajian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional dalam perspektif hukum pendidikan? Dalam kajian ini, penulis berupaya untuk mengkaji berbagai problematika kebijakan pendidikan dan sistem pendidikan nasional dalam tataran konseptual maupun praksis. Di samping itu, dalam kajian ini pun akan melakukan perbandingan bagaimana *best practices* sistem pendidikan nasional di berbagai negara. Diharapkan juga dalam kajian ini pun akan memberikan alternatif dalam rangka perbaikan dunia pendidikan melalui rekonstruksi sistem pendidikan nasional dalam perspektif hukum pendidikan.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan (*libray research*), dengan berupaya mengkaji berbagai sumber literatur mulai dari buku-buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional dalam perspektif hukum pendidikan.

Pembahasan

Problematika Pendidikan di Indonesia

Pendidikan telah mengalami distrupsi yang luar biasa. Bahkan adanya pandemi *covid-19*, mempercepat distrupsi pendidikan tersebut. Pendidikan harus dirancang dan disiapkan agar menjadi artefak masa depan yang

melahirkan generasi baru yang memiliki iman takwa, karakter baik, *legacy*, dan kecerdasan.

Pada tahun 2045, Indonesia akan mencapai era bonus demografi atau era Indonesia Emas. Untuk menggapai kesuksesan di era itu, tentu dibutuhkan perencanaan dan upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkarakter, berkualitas, profesional, dan berintegritas. Untuk itu, pembangunan SDM perlu ditopang oleh kualitas sistem pendidikan nasional yang handal. Pendidikan pun mesti berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU Sidiknas).

Akan tetapi, Cecep Darmawan mengungkapkan bahwa “Pascareformasi, belum ada perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam bidang pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan tonggak utama yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju era bonus demografi 2045. Pendidikan merupakan instrumen utama untuk membentuk sumber daya manusia unggul yang akan mengisi era Indonesia Emas 2045.”⁵ Hal ini ditandai oleh banyaknya problematika pendidikan di Indonesia yang tengah terjadi hingga saat ini. Bahkan semakin hari, problematika

⁵ Cecep Darmawan, “*Trial and Error* Kebijakan Pendidikan”, 14 September 2021, <https://mediaindonesia.com/opini/432457/trial-and-error-kebijakan-pendidikan>, diakses pada 04 Oktober 2021.

pendidikan di Indonesia justru semakin kompleks dengan berbagai kebijakan pendidikannya yang kerap kontroversial.

Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI telah merangkum beberapa pokok persoalan pendidikan yang tengah terjadi di Indonesia sebagai berikut.

1. Pemerintah belum memiliki panduan pembangunan pendidikan jangka panjang yang bersifat permanen;
2. Ketiadaan peta jalan pendidikan membuat kebijakan pendidikan bergerak tanpa arah;
3. Sistem Pendidikan Nasional yang ada saat ini belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa;
4. Persoalan klasik pendidikan masih ditemukan dan belum menemukan jalan keluar penyelesaian seperti:
 - a. Tumpang tindih tata kelola pendidikan (pusat dan daerah),
 - b. Semakin lunturnya karakter kebangsaan peserta didik,
 - c. Kesejahteraan dan sumber daya pendidik/dosen masih rendah,
 - d. Belum meratanya kualitas pendidikan khususnya di daerah 3T,
 - e. Inkonsistensi kurikulum,
 - f. Standar evaluasi pendidikan berubah-ubah,
 - g. Lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan,
 - h. Amanat undang-undang anggaran 20% untuk pendidikan di APBD belum dilaksanakan,
 - i. Angka partisipasi pendidikan rendah,
 - j. Belum adanya titik temu antara pendidikan dengan dunia kerja (DU/DI),
 - k. Pelayanan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas,
 - l. Partisipasi masyarakat untuk pendidikan yang rendah,

- m. Ketidakakuratan data pendidikan yang digunakan sebagai pemetaan per jenjang, jalur dan jenis pendidikan.
5. Ketidaksiapan Sistem Pendidikan Nasional menghadapi tantangan dunia kerja Revolusi Industri 4.0;
 6. Penerapan teknologi informasi (*Internet of Things*) belum terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran;
 7. Relevansi RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional;
 8. Pemerintah telah menerbitkan Konsep Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020- 2035 namun belum memiliki landasan hukum pelaksanaan dan kajian yang komprehensif (naskah akademik).⁶

Begitu pun dengan Cecep Darmawan juga mengidentifikasi beberapa problematika pendidikan di Indonesia secara umum di antaranya, yaitu: *Pertama*, Indonesia masih belum dapat mentransformasikan filosofi pendidikan nasional secara membumi. *Kedua*, negara kita masih belum memiliki *road map* atau *blue print* pendidikan dalam lima puluh tahun atau seratus tahun ke depan sebagai acuan utama penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. *Ketiga*, masih adanya inkonsistensi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Keempat*, masih adanya problematika dalam hal otonomi pendidikan serta adanya tarik ulur kewenangan dan urusan pendidikan baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. *Kelima*, belum proporsional dan efisiennya anggaran pendidikan di Indonesia. *Keenam*, program wajib belajar sembilan tahun belum tuntas, terbukti dengan masih adanya angka siswa yang putus sekolah. *Ketujuh*,

⁶ DPR RI, *Laporan Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, 9 Februari 2021*, (Jakarta: DPR RI, 2021), hlm. 13-14.

rata-rata lama sekolah (RLS) secara nasional yang masih belum lulus SMP, serta angka partisipasi kasar (APK) dari SMA ke Perguruan Tinggi yang masih rendah. *Kedelapan*, masih adanya problematika profesi guru. *Kesembilan*, adanya disparitas pendidikan antardaerah, seperti akses dan pemerataan pendidikan yang masih relatif terbatas. *Kesepuluh*, belum idealnya konsepsi dan implementasi *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri.”⁷

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, setidaknya dapat ditarik benang merahnya yakni

- 1) Sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya mendeskripsikan sistem pendidikan berbasis falsafah bangsa yakni Pancasila. Secara yuridis pun, regulasi sistem pendidikan nasional belum menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan komprehensif. Begitu pun secara sosiologis, sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya mengantisipasi revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*.
- 2) Dalam aspek regulasi, masih banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ihwal pendidikan yang belum sinkron dan harmonis. Begitu pun dalam aspek kebijakan pendidikan, masih terjadi tarik menarik kewenangan urusan pendidikan dan kebijakan pendidikan yang dibentuk pun belum mencerminkan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan atau berkesinambungan.
- 3) Sampai saat ini, Bangsa Indonesia masih belum memiliki peta jalan pendidikan nasional yang menjadi arah dan landasan dalam pembangunan pendidikan.

⁷ Cecep Darmawan, “Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Hukum Pendidikan”, dalam Mohammad Ali, dkk (eds.), *Pendidikan Menuju Indonesia Emas*, (Bandung: UPI Press, 2020).

- 4) Sumber Daya Manusia pendidikan (guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan) masih mengalami disparitas dari aspek pemerataan maupun kualitasnya.
- 5) Perbaikan sistem pendidikan nasional saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan optimalisasi delapan standar nasional pendidikan yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.
- 6) Tripusat Pendidikan (Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan), belum menopang sidiknas yang kuat
- 7) Perbaikan sistem pendidikan nasional masih terkesan bersifat instan, kurang sistematis, rekatif, dan praktis, serta parsial atau belum komprehensif.
- 8) Sistem pendidikan nasional masih belum ditunjang dengan pembagian urusan dan kewenangan yang adil dan harmonis, sebagai pedoman untuk mengatur pembagian uruasan pendidikan di Indonesia.
- 9) Indeks sumber daya manusia Indonesia masih di bawah negara-negara lainnya.⁸

Dengan demikian, perlu adanya upaya secara fundamental untuk merekonstruksi sistem pendidikan nasional dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di Indonesia.

Problematika Regulasi Sistem Pendidikan Nasional

Selama ini, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional memiliki landasan yuridis utama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁸ Cecep Darmawan, “Dampak Potensial....”, *Op.cit.*

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, regulasi sistem pendidikan nasional tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan sebagai berikut.

Pertama, belum terintegrasinya sistem pendidikan dari berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional yang utuh.

Kedua, tidak berimbangya tripusat pendidikan yakni pendidikan formal, informal, dan nonformal (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dalam sistem pendidikan nasional. UU Sisdiknas yang saat ini berlaku memiliki kesan terlalu dominan mengatur terkait pendidikan formal semata. Padahal pada dasarnya, dalam Pasal 1 Angka 3 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”

Ketiga, adanya disharmoni dan inkonsistensi antara regulasi pendidikan dengan regulasi lainnya. Misalnya ialah adanya pasal yang bertentangan antara UU Sisdiknas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam Pasal 50 Ayat (5) UU Sisdiknas menyebutkan “Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.” Sedangkan dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda telah mengubah kewenangan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi, sebagai bentuk pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib. Problematika terkait pembagian kewenangan urusan pendidikan pun

belum sepenuhnya dijawab oleh adanya NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).

Terkait inkonsistensi regulasi sistem pendidikan nasional ini, tidak hanya antar peraturan perundang-undangan, melainkan dalam UU Sisdiknas pun terdapat ketentuan yang inkonsisten. Misalnya ialah inkonsistensi terkait pengertian pendidik dan tenaga kependidikan dalam UU Sisdiknas. Dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.” Di samping itu, dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Sementara itu, pengaturan yang berbeda ditunjukkan oleh Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2003 bahwa “Ayat (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lalu Ayat (2) bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”

Keempat, terdapat sejumlah pasal dalam UU Sisdiknas yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terdapat ketentuan yang berubah akibat adanya putusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Misalnya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011/PUU-III/2005 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lalu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa:

- a. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, “... bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapny menjadi, “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Selain itu, sepanjang frasa, “... bertanggung jawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “... ikut bertanggung jawab”.
- b. Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 12 ayat

- (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”.
- c. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.
- d. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terakhir ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat.

Kelima, masih adanya pasal residu terkait pendidikan dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Cecep Darmawan menjelaskan bahwa “ketentuan ini berbahaya karena memiliki potensi menarik pendidikan menjadi lahan bisnis dengan pintu perizinan usaha. Jika pendidikan dimasukkan ke dalam domain usaha, maka bertentangan dengan konstitusi dan akan merusak sistem pendidikan di tanah air.”⁹

⁹ Cecep Darmawan, “Merekonstruksi Ulang Sisdiknas”, *Harian Umum Pikiran Rakyat*, 13 Oktober 2020, hlm. 11.

Di samping itu, Cecep Darmawan pun menjelaskan persoalan lainnya terkait regulasi sistem pendidikan nasional yakni UU Sisdiknas masih belum secara komprehensif mengatur berbagai kebijakan pendidikan, termasuk tarik ulur kewenangan pendidikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya ialah terkait kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Apakah PPDB itu kewenangan pusat atau daerah? Bukankah pendidikan itu merupakan urusan yang diotonomikan ke daerah? Jadi, terkait PPDB selayaknya menjadi kewenangan daerah. Selain itu, UU Sisdiknas pun belum memberikan pengaturan yang cukup dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ)¹⁰ yang tengah berjalan di era pandemi seperti saat ini. PJJ pun belum secara komprehensif memiliki standar digitalisasi pendidikan. Padahal adanya pandemi telah memberikan hikmah akan pentingnya digitalisasi pendidikan.

Sementara itu, Munirah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa:

“sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini tampak ada kesenjangan antara keinginan dan realita. Secara makro dapat dilihat dalam aspek pengelolaan, peran pemerintah dan masyarakat, kurikulum atau materi ajar, pendekatan dan metodologi pembelajaran, sumber daya manusia, lingkungan kampus atau sekolah, dana, dan akreditasi. Kesenjangan dalam sistem pendidikan tersebut disebabkan karena faktor politik, ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman.¹¹”

Dengan demikian, di samping berbagai problematika pendidikan secara umum, dalam aspek regulasi sistem pendidikan nasional pun masih menyisakan berbagai persoalan. Untuk itu, perlu adanya upaya terobosan (*breakthrough*) hukum guna menyelesaikan benang kusut regulasi sistem

¹⁰ *Ibid*, Cecep Darmawan, hlm. 11.

¹¹ Munirah, “Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita”, *Jurnal Auladuna 2*, No. 2, (2015): 233-245, hlm. 244.

pendidikan nasional di Indonesia yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Perbandingan Sistem Pendidikan Nasional di Beberapa Negara

Melihat problematika pendidikan di atas, negara Indonesia perlu mempelajari berbagai *best practices* sistem pendidikan di berbagai negara. Hal ini penting sebagai upaya untuk memberikan alternatif baru sistem pendidikan nasional di Indonesia. Meskipun tentu tidak serta merta mencontoh secara penuh, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai karakter budaya masyarakat Indonesia. Berikut beberapa contoh penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di beberapa negara.

Pertama, ialah negara Finlandia. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Maulana Amirul Adha, dkk., menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Finlandia (1) mengedepankan prinsip kesetaraan, (2) tidak ada sistem tinggal kelas dan perangkingan, (3) jam pelajaran +/- 30 jam per minggu, (4) mengedepankan metode *problem solving*, (5) tidak membebani peserta didik dengan tugas yang banyak, (6) kualifikasi guru minimal S2 (Master), dan (7) kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun.¹²

Kedua, ialah negara Belgia. Sistem pendidikan di negara Belgia ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Novalita bahwa dalam sistem pendidikan Belgia, kebebasan pendidikan dijamin oleh konstitusi Belgia. Sistem pendidikan yang ada di negara Belgia berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama, memerangi

¹² Maulana Amirul Adha, dkk., "Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia", *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 3, No. 2, (2019): 145-160, hlm. 145-146.

diskriminasi, dan mencegah kegagalan sekolah. Pendanaan pendidikan di negara belgia mendapat subsidi dari negara. Mayoritas siswa mendapat bantuan hibah dalam melanjutkan pendidikan. Biaya sekolah di negara Belgia terbilang murah. TK dan Pendidikan Dasar (6-18 tahun) gratis. Sistem Perkuliahan di Belgia sama dengan di beberapa negara lain sesama anggota uni Eropa, yakni berdasarkan ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*). Pada dasarnya evaluasi pendidikan di Belgia menerakan hampir seluruh sistem ujian yang diterapkan di Indonesia.¹³

Ketiga, ialah negara Jepang. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Aniswita, dkk., menunjukkan bahwa sistem pendidikan di negara Jepang ialah sebagai berikut: 1) Filsafat pendidikan Jepang dipengaruhi ajaran konfusianisme dan karakteristik Kekaisaran Jepang yang dilandasi nilai luhur dan kekal; 2) Karakteristik pendidikan Jepang lebih desentralisasi yakni adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan orang tua; 3) Tujuan pendidikan Jepang secara umum yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan Jepang lebih rinci dan memuat cukup banyak karakter yang harus dimiliki anak-anak Jepang; 4) Jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar 9 tahun (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama), pendidikan menengah atas 3 tahun (umum dan kejuruan) serta pendidikan tinggi; 5) Kurikulum Jepang lebih fleksibel dan kurikulum disusun dibawah arahan kementerian dan memberi peluang sekolah untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah; 6) Pendanaan sekolah dasar dan menengah ditanggung Negara dan sumber lain; 7) Kualifikasi personalia pendidikan sangat profesional dan guru merupakan profesi yang sangat dihargai begitu juga

¹³ Rahmi Novalita, "Perbandingan Pendidikan Negara Belgia Dengan Negara Indonesia", *Jurnal Spasial* 4, No. 3, (2017): 1-10, hlm. 9.

dengan kesejahteraannya sangat diperhatikan; 8) Ujian termasuk ujian nasional ditiadakan di tingkat SD sampai SLTA, tetapi untuk masuk SLTA ada ujian yang dikenal cukup sulit; dan 9) *Best Practice* sistem pendidikan Jepang yaitu karakter tidak dipisahkan dari pendidikan, terintegrasi antara teori dan praktek.¹⁴

Keempat, ialah negara Belanda. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Aulia Anggita Putri, dkk., menunjukkan bahwa hal yang paling menonjol dalam sistem pendidikan di Belanda ialah penjurusan sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis dari siswa yang bersangkutan. Adapun secara umum, sistem penjurusan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Pendidikan tingkat dasar dan lanjutan (*primary en secondary education*) 2. Pendidikan tingkat menengah kejuruan (*senior secondary vocational education and training*) 3. Pendidikan tingkat tinggi (*higher education*).¹⁵

Itulah berbagai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di berbagai negara yang dapat dijadikan model bagi upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia dapat mengambil praktik baik terkait berbagai aspek meliputi pendidikan karakter, proses belajar mengajar atau pembelajaran, kualifikasi minimal dari pendidik, kurikulum pendidikan, jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, pendanaan pendidikan, sampai pada bagaimana kebijakan pendidikan diterapkan di berbagai negara tersebut. Dengan

¹⁴ Aniswita, dkk., "Sistem Pendidikan Jepang: Studi Komparatif Perbaikan Pendidikan Indonesia", *Jurnal Dewantara* 11, No. 1, (2021): 1-16, hlm. 15.

¹⁵ Aulia Anggita Putri, dkk., "Melihat Sistem Pembelajaran Berdasar Negara Belanda", *Current Research in Education: Conference Series Journal* 1, No. 1, (2021): 1-7, hlm. 5.

demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional, sehingga dapat membawa negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.

Pembentukan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Baru Model *Omnibus Law*

Salah satu upaya untuk merekonstruksi sistem pendidikan nasional ialah dengan membentuk undang-undang sistem pendidikan nasional baru dengan model *omnibus law*.

Secara yuridis, gagasan pembentukan UU Sisdiknas baru model *omnibus law* ini telah memiliki landasan konstitusional yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Amanat konstitusi tersebut secara eksplisit dapat dimaknai jika hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Secara ideal sebaiknya hanya ada satu undang-undang yang mengatur berbagai hal ikhwal terkait pendidikan yang merupakan satu kesatuan dan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai peraturan di tataran undang-undang yang mengatur terkait persoalan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, di luar undang-undang sistem pendidikan nasional. Padahal yang menjadi landasan utama bagi hukum pendidikan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Cecep Darmawan telah merangkum dari berbagai literatur yang menghimpun undang-undang tentang pendidikan yang berpotensi terjadi disharmoni dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut.¹⁶

Pertama, dari Laporan Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI, sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Undang-Undang tentang Pendidikan Menurut Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI

Menurut Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

¹⁶ Cecep Darmawan, “Pembentukan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Baru Model *Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Pendidikan”, makalah disampaikan pada *Kegiatan Diskusi di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, Bandung, Rabu, 18 Agustus 2021, hlm. 5-7.

- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Sumber: Cecep Darmawan (2021).¹⁷

Kedua, dari Ferdiansyah, sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Undang-Undang tentang Pendidikan Menurut Ferdiansyah

Menurut Ferdiansyah
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

¹⁷ *Ibid*, Cecep Darmawan, hlm. 5-7.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- q. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- r. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- s. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Sumber: Cecep Darmawan (2021).¹⁸

Di samping amanat konstitusi di atas, upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional melalui pembentukan UU Sisdiknas baru model *omnibus law* pun mengikuti perkembangan politik hukum pendidikan di Indonesia. Dalam konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dengan demikian, adanya amanat UU Sisdiknas ini menjadi latar belakang mengapa diperlukan adanya upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, komprehensif, dan holistik.

Selain itu, Cecep Darmawan pun menyebutkan beberapa alasan mengapa perlu pembentukan UU Sisdiknas baru dengan model *omnibus law*, di antaranya: *Pertama*, UU Sisdiknas sudah 17 tahun berjalan dan

¹⁸ *Ibid*, Cecep Darmawan, hlm. 5-7.

perlu penyesuaian dengan konteks kekinian, termasuk persoalan disrupti pendidikan dan tantangan era pandemi. *Kedua*, dalam rangka penguatan desentralisasi pendidikan, khususnya implementasi kewenangan konkuren pada urusan pemerintahan wajib layanan dasar. *Ketiga*, UU Sisdiknas yang berlaku saat ini dipandang masih parsial dan belum mengatur sebuah sistem pendidikan yang komprehensif. *Keempat*, terdapat sejumlah regulasi berbentuk UU di luar UU Sisdiknas yang substansinya tentang pendidikan. *Kelima*, perlu harmonisasi dan sinkronisasi bidang pendidikan agar tidak terjadi inflasi regulasi pendidikan yang tumpang tindih.¹⁹

Akan tetapi, terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU Sisdiknas baru model *omnibus law*, sebagai berikut. *Pertama*, perlu dirumuskan bagaimana model *omnibus law* yang ideal seperti apa yang dapat diterapkan dalam pembentukan UU Sisdiknas yang baru. Dalam konteks ini, Cecep Darmawan merekomendasikan beberapa model dalam upaya rekonstruksi UU Sisdiknas yakni 1) model *omnibus law* yang berupaya membuat suatu UU yang dapat mencabut atau mengamandemen beberapa UU yang mengatur pendidikan sekaligus; 2) revisi UU Sisdiknas dengan model amandemen yakni mengubah pasal-pasal atau ketentuan yang ada secara parsial. Artinya, hanya beberapa pasal yang diubah sesuai kebutuhan; dan 3) model moderat yakni pembentukan peraturan perundang-undangan dengan model biasa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁰

¹⁹ Cecep Darmawan, "Menggagas "Omnibus Law" Sisdiknas", 01 Oktober 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/01/menggagas-omnibus-law-sisdiknas/>, diakses pada 05 Oktober 2021.

²⁰ Cecep Darmawan, "Merekonstruksi Ulang", *Op.cit.*

Sementara itu, Ahmad Redi menyebutkan berbagai metode simplifikasi regulasi di samping metode *omnibus law*, seperti metode *guillotine approach*, metode *one-in, one-out rule*; *one-in, two-out rule*; *one-in, three-out rule*, metode *the red tape challenge*, metode *sunset clause*, dan metode *rulemaking moratorium*.²¹

Metode *guillotine approach* merupakan upaya reformasi regulasi yang terjadi di Korea Selatan dengan memangkas 50 persen regulasi terkait pelayanan publik. Sementara itu, metode *one-in, one-out rule*; *one-in, two-out rule*; *one-in, three-out rule*, artinya membentuk satu undang-undang mencabut satu atau lebih undang-undang yang berkaitan. Sedangkan metode *the red tape challenge* merupakan memangkas peraturan untuk kepentingan bisnis. Lalu metode *sunset clause* merupakan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan masa berlaku peraturan tersebut, biasanya diakhir atau dalam ketentuan peralihan. Terakhir ialah metode *rulemaking moratorium* yakni menanggukhan atau menunda pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai model di atas, Cecep Darmawan menilai jika model *omnibus law* yang ideal untuk melakukan penataan regulasi bidang pendidikan ialah dengan membentuk undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang sistem pendidikan nasional baru model *omnibus law* tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan

²¹ Ahmad Redi, "Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional." *Bahan tayang disajikan dalam Kegiatan Bedah Buku di UNNESA*, Surabaya, 2020, hlm. 2.

pengaturan baru secara terbatas dari berbagai undang-undang bidang pendidikan maupun nonpendidikan.²²

Kedua, pembentukan UU Sisdiknas baru model *omnibus law* ini harus dilakukan secara hati-hati, teliti, cermat, dan penuh pertimbangan dan kajian atau naskah akademik yang komprehensif. Jangan sampai terjadi hal-hal kecerobohan seperti yang pernah dipraktikkan dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

Ketiga, perlu dibuka partisipasi publik secara luas dari seluruh elemen pendidikan untuk merumuskan pembentukan UU Sisdiknas baru model *omnibus law* ini.

Keempat, harus menghasilkan produk UU Sisdiknas baru yang lebih komprehensif, holistik, relevan dengan perkembangan zaman, serta memberikan jaminan hak-hak pendidikan warga negara, menjamin profesi pendidik, dan mendorong akselerasi peningkatan kualitas pendidikan nasional, serta memacu akselerasi pemenuhan berbagai standar nasional pendidikan.

Kelima, hal-hal ikhwal terkait pengaturan pendidikan yang sudah baik harus dipertahankan dan bahkan diperkuat seperti rumusan tujuan pendidikan nasional. *Keenam*, harus memperkuat ruh pendidikan dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Jangan sampai memisahkan pendidikan dengan ruh agama dan budaya bangsa. *Ketujuh*, harus memberikan jaminan 20% anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.

Dengan demikian, berbagai hal pertimbangan tersebut harus diperhatikan agar pembentukan UU Sisdiknas baru model *omnibus law* ini dapat menciptakan produk undang-undang baru yang lebih baik. Bukan

²² Cecep Darmawan, “Pembentukan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional....”, *Op.cit.* hlm. 4.

sebaliknya justru kontraproduktif dan bahkan menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Solusi Terhadap Problematika Pendidikan

Adanya berbagai problematika pendidikan di Indonesia tentunya menjadi hambatan bagi kemajuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berkarakter, profesional, dan berintegritas. Untuk itu, diperlukan berbagai alternatif guna mendorong perbaikan melalui upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional, di antaranya ialah.

1. Merekonstruksi sistem pendidikan nasional dengan memperkuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya.
2. Menata regulasi dan melakukan audit terhadap berbagai kebijakan pendidikan.
3. Merumuskan peta jalan pendidikan yang mampu memberikan arah bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional.
4. Memperkuat kualitas karakter SDM melalui pendidikan karakter dan pendidikan bela negara.
5. Melakukan reorientasi pengembangan karir dan kompetensi SDM pendidikan.
6. Meningkatkan kompetensi, karir, dan kesejahteraan guru.
7. Membenahi sistem pendidikan guru baik jalur akademik maupun jalur profesinya (PPG).
8. Optimalisasi dan konsistensi delapan standar nasional pendidikan.
9. Mensinergikan tripusat pendidikan (jalur, jenjang, dan jenis pendidikan).
10. Menghindari dan mengikis budaya instan pendidikan.

11. Memperbaiki manajemen pendidikan dan pemenuhan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
12. Meningkatkan sinergi kelembagaan dan kewenangan pendidikan yang konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan membentuk NSPK secara detail dan rinci.
13. Merevitalisasi implementasi manajemen berbasis sekolah dalam konsepsi otonomi sekolah.
14. Meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara lain dengan memperbaiki indeks pembangunan manusia Indonesia.
15. Menambahkan standar digitalisasi pendidikan.
16. Merevitalisasi pendidikan vokasi agar tercipta *link and match* pendidikan.

Itulah berbagai alternatif yang dapat menunjang bagi perbaikan pendidikan di Indonesia, sehingga upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta optimal.

Di samping itu, adanya wacana untuk menerapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai kewenangan MPR RI tentu perlu disambut baik. Terlepas dari dinamika politik hukum yang terjadi, jika wacana tersebut terealisasikan, maka perlu didorong agar dalam PPHN memuat substansi bidang pendidikan yang lebih filosofis dan strategis, termasuk di dalamnya mengamankan pembentukan undang-undang sistem pendidikan nasional yang terintegrasi (model *omnibus law*).

Kesimpulan

Upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional dalam perspektif hukum pendidikan harus mampu menjawab tantangan disrupsi

pendidikan. Untuk itu, perbaikan sistem pendidikan nasional tidak boleh dilakukan secara parsial menyangkut aspek-aspek tertentu saja. Sebaliknya, upaya perbaikan sistem pendidikan nasional harus dilakukan secara komprehensif dan holistik mencakup berbagai komponen dan delapan standar nasional pendidikan.

Upaya rekonstruksi sistem pendidikan nasional pun harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional. Perbaikan sistem pendidikan nasional pun harus mampu menjawab tantangan dan perubahan zaman, sehingga dibutuhkan sebuah *grand design, road map, blue print*, atau peta jalan pendidikan nasional sebagai pemandu arah pendidikan di masa depan. Perlu adanya sinergitas dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik RPJP, RPJM, maupun peta jalan pendidikan nasional, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Di samping itu, dibutuhkan juga *political will* dari setiap pemangku kebijakan yang harus cerdas dan cermat dalam membentuk kebijakan pendidikan. Dibutuhkan paradigma pembentukan kebijakan pendidikan dengan kreativitas dan terobosan (*breakthrough*). Bahkan diperlukan keberanian untuk meninggalkan paradigma lama yang mengelola pendidikan dengan prinsip *business as usual*. Dengan demikian, sangatlah dibutuhkan adanya politik hukum pendidikan yang mampu menjadi pedoman jangka Panjang sekaligus memberikan arah, dan pemandu jalan bagi pembangunan pendidikan nasional di masa depan. Pembangunan sistem pendidikan di masa depan pun mesti diiringi oleh adanya politik hukum pendidikan yang visioner, futuristik, dan progresif, sehingga mampu mencapai tujuan nasional pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Cecep Darmawan, “Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Hukum Pendidikan”, dalam Mohammad Ali, dkk (eds.), *Pendidikan Menuju Indonesia Emas*. Bandung: UPI Press, 2020.
- DPR RI. *Laporan Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, 9 Februari 2021*. Jakarta: DPR RI, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Jurnal

- Aniswita, dkk., “Sistem Pendidikan Jepang: Studi Komparatif Perbaikan Pendidikan Indonesia”, *Jurnal Dewantara* 11, No. 1, (2021): 1-16.
- Aulia Anggita Putri, dkk., “Melihat Sistem Pembelajaran Berdasar Negara Belanda”, *Current Research in Education: Conference Series Journal* 1, No. 1, (2021): 1-7.
- Cecep Darmawan, “Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2, (2020): 61-67.
- Maulana Amirul Adha, dkk., “Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia”, *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 3, No. 2, (2019): 145-160.
- Munirah, “Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita”, *Jurnal Auladuna* 2, No. 2, (2015): 233-245.
- Rahmi Novalita, “Perbandingan Pendidikan Negara Belgia Dengan Negara Indonesia”, *Jurnal Spasial* 4, No. 3, (2017): 1-10.

Makalah

- Ahmad Redi, “*Omnibus Law*: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional.” *Bahan tayang disajikan dalam Kegiatan Bedah Buku di UNNES, Surabaya, 2020*.
- Cecep Darmawan, “Pembentukan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Baru Model *Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Pendidikan”, makalah disampaikan pada *Kegiatan Diskusi di Badan*

Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Bandung, Rabu, 18 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Artikel

Cecep Darmawan, “Merekonstruksi Ulang Sisdiknas”, *Harian Umum Pikiran Rakyat*, 13 Oktober 2020, hlm. 11.

Cecep Darmawan, “Menggagas “Omnibus Law” Sisdiknas”, 01 Oktober 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/01/menggagas-omnibus-law-sisdiknas/>, diakses pada 05 Oktober 2021.

Cecep Darmawan, “Dampak Potensial Pajak Pendidikan”, 16 Juni 2021, <https://koran.tempo.co/read/opini/465594/opini-dampak-potensial-pajak-pendidikan-oleh-cecep-darmawan?>, diakses pada 04 Oktober 2021.

Cecep Darmawan, “*Trial and Error* Kebijakan Pendidikan”, 14 September 2021, <https://mediaindonesia.com/opini/432457/trial-and-error-kebijakan-pendidikan>, diakses pada 04 Oktober 2021.

Model Pendidikan Kewirausahaan Berkelanjutan sebagai suatu Proses Pembelajaran Sepanjang Hayat di Pendidikan Tinggi

Vanessa Gaffar dan Heni Mulyani
Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: vanessa@upi.edu; henimulyani@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021
Reviewed : 18 November 2021
Accepted : 8 December 2021
Published : 15 December 2021

Abstract

The higher the number of unemployed will have a negative impact on the environmental, social, economic, and political development of a country. Moreover, the phenomenon that occurs in our country is the large number of educated unemployed. Government policies regarding the direction and policies of national development in education and culture include, among others, promoting general welfare. In this case, universities play a role in overcoming the number of unemployed by creating entrepreneurs from among students. The purpose of writing this article is to examine national education policies in the field of entrepreneurship education and provide alternative solution in the development of entrepreneurship education in higher education in the form of a sustainable entrepreneurship education model in higher education. The method used in this study is the desk research method by reviewing policies and various previous studies. The government needs to issue policies that regulate educational institutions to develop sustainable entrepreneurship education by implementing a partnership and collaboration strategy based on the pent helix concept which includes elements of the government, industry, community, media and of course the educational institution itself. This partnership strategy is combined with the entrepreneurship education process, which is seen from the aspects of curriculum, materials, methods, media and learning evaluation so that it can produce entrepreneurial students. It is hoped that the development of this sustainable entrepreneurship education model can make a positive contribution to reducing the number of unemployed in Indonesia, especially from educated unemployment.

Keywords: entrepreneurship education, higher education, entrepreneurial students, partnership strategy, learning model

Abstrak

Jumlah pengangguran yang semakin tinggi akan membawa dampak negatif terhadap pembangunan lingkungan, sosial, ekonomi dan politik pada suatu negara. Terlebih lagi fenomena yang terjadi di negara kita adalah banyaknya jumlah pengangguran terdidik. Kebijakan pemerintah tentang arah dan kebijakan pembangunan nasional Pendidikan dan kebudayaan antara lain mencakup memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini perguruan tinggi berperan untuk mengatasi jumlah pengangguran dengan mencetak wirausaha dari kalangan mahasiswa. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kebijakan pendidikan nasional dalam bidang pendidikan kewirausahaan dan memberikan solusi alternatif dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi berupa model pendidikan kewirausahaan yang berkelanjutan di pendidikan tinggi. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah *desk research method* dengan mengkaji kebijakan dan berbagai penelitian terdahulu. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mengatur insitusi pendidikan agar mengembangkan pendidikan kewirausahaan yang berkelanjutan dengan menjalankan strategi kemitraan dan kolaborasi berdasarkan konsep pentahelix yang meliputi unsur pemerintah, dunia industri, komunitas, media dan tentunya institusi pendidikan itu sendiri. Strategi kemitraan ini dipadukan dengan proses pendidikan kewirausahaan yang dilihat dari aspek kurikulum, materi, metode, media serta evaluasi pembelajaran sehingga dapat menghasilkan mahasiswa wirausaha. Diharapkan dengan dikembangkannya model pendidikan kewirausahaan yang berkelanjutan ini dapat memberikan kontribusi positif untuk pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia khususnya dari pengangguran terdidik.

Kata Kunci : pendidikan kewirausahaan, pendidikan tinggi, mahasiswa wirausaha, stategi kemitraan, model pembelajaran

PENDAHULUAN

Arah dan kebijakan pembangunan nasional pada bidang pendidikan dan kebudayaan ditinjau dari misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum

menjadi salah satu fokus mengingat begitu banyaknya isu mengenai kesejahteraan yang menimbulkan banyak permasalahan, dimana salah satunya adalah masalah pengangguran. Seperti kita ketahui bahwa jumlah pengangguran di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi. Jumlah pengangguran yang semakin tinggi akan membawa dampak negatif terhadap pembangunan lingkungan, sosial, ekonomi dan politik pada suatu negara. Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah pengangguran di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga masih menunjukkan angka yang tinggi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 berada pada angka 9,77 juta orang atau sebesar 7,07%. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 1,84 poin dibandingkan dengan Agustus 2019 yaitu sebanyak 7,07 juta orang atau 5,30%. Jika dilihat dari kategori jumlah pengangguran, maka dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pengangguran musiman, pengangguran murni

dan pengangguran terdidik. Hal ini dapat ditunjukkan dari gambar berikut ini.

Tingkat Pendidikan	Tingkat Setengah Pengangguran		
	2018	2019	2020
Tidak Pernah Sekolah	6.47	5.74	8.50
Sekolah Dasar	7.10	6.97	9.96
Sekolah Menengah	5.82	5.45	9.56
Sekolah Tinggi	3.56	3.89	7.21

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional BPS, 2020

Gambar 2. Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan 2018-2020

Dari Gambar 2 diatas terlihat bahwa jika diakibatkan antara tingkat setengah pengangguran dengan tingkat pendidikan, kontribusi dari tingkat pendidikan yang berasal dari sekolah tinggi mengalami kenaikan yang terus menerus. Angka menunjukkan terjadinya kenaikan hingga 3,32 persen dari tahun 2019 sebesar 3,89% menjadi 7,21% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran terdidik memang berkontribusi terhadap tingginya jumlah pengangguran. Pengangguran terdidik yaitu mereka yang tidak bekerja walaupun memiliki latar belakang pendidikan. Banyak dari pengangguran terdidik ini berasal dari lulusan pendidikan tinggi dan bahkan menyandang gelar sarjana. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat seharusnya dengan berbekal pendidikan yang cukup, mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kebanyakan para lulusan dari pendidikan tinggi ini masih memiliki orientasi untuk mencari pekerjaan padahal jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang ditawarkan.

Disinilah institusi pendidikan tinggi, yang menghasilkan lulusan dengan berbagai gelar sekaligus menghasilkan pengangguran terdidik, seharusnya berperan. Bagaimana peran dari institusi pendidikan tinggi merubah mindset dari para mahasiswa sehingga mereka dapat menjadi *agent of change* dengan memiliki mindset tidak hanya menjadi *job seeker* tetapi menjadi *job creator*. Hal ini tentunya harus didukung oleh kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan kewirausahaan di pendidikan tinggi.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang di dalam peta jalan pendidikan tahun 2020-2035 yang dipengaruhi oleh perubahan teknologi, sosial budaya dan lingkungan. Dengan masuknya era revolusi industri 4.0 dan semakin tingginya tuntutan ke arah transformasi digital membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan. Pandemi Covid19 menyebabkan terjadinya banyak perubahan baik dilihat dari aspek pendidikan dan dunia kerja. Aspek pendidikan mencakup pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan meningkatnya tekanan finansial bagi institusi pendidikan. Sedangkan dilihat dari dunia kerja perlunya percepatan akses digital di semua industri, semakin meningkatnya tuntutan untuk memperbaiki keterampilan agar tetap kompetitif serta peran pelaku wirausaha dalam membantu pemulihan ekonomi negara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Dalam menghadapi perubahan perekonomian Indonesia, perubahan sosiokultural dan demografi, keberagaman gambaran pasar kerja Indonesia, serta visi Indonesia 2045, maka pendidikan Indonesia harus bisa menyesuaikan. Sesuai dengan visi pendidikan Indonesia 2035

“Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, maka diperlukan SDM yang unggul, terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Hal ini juga tertuang di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 yang menyebutkan bahwa terdapat 6 profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan diantara peserta didik saat ini yaitu kebhinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri serta beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020a)

Terkait dengan hal ini maka yang harus dipersiapkan adalah tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan, masyarakat yang memiliki nilai luhur dan nasionalis serta etos kerja yang baik, tenaga kerja yang lebih sehar, fleksibel dan adaptif, pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi, peningkatan kontribusi sains dan teknologi untuk pembangunan, pendidikan vokasi, kewirausahaan dan karakter yang lebih baik, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kebermanfaatan lulusan pendidikan melalui penyiapan wirausahawan pada sistem Pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat pada peta jalan pendidikan dimana Kemendikbud telah memetakan dengan cukup luas gambaran masa depan dari dunia kerja, serta pasar kerja dari perekonomian yang sedang bertransformasi. Peta jalan mengasumsikan bahwa masa depan Indonesia akan ditandai digitalisasi dunia kerja, kewirausahaan dan ekonomi jasa, otonomi kerja, serta transformasi ke arah

kerja berbasis fleksibilitas dan teknologi. Sebuah dunia kerja yang kompetitif, kreatif, dan otonom mewarnai asumsi tentang pasar kerja tersebut.

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dilakukan melalui pengembangan *technical skills* dan *soft skills*, penanaman *values* budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha yang diintegrasikan pada kurikulum pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja. Pendidikan kewirausahaan sebagai salah satu program untuk meningkatkan SDM unggul menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dalam hal ini institusi pendidikan tinggi perlu menjadikan pendidikan kewirausahaan ini sebagai salah satu program unggulan untuk mencetak SDM unggul. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewirausahaan perlu disinergikan dengan pembelajaran dan pendidikan kewirausahaan di institusi pendidikan. Institusi pendidikan perlu diberikan keleluasaan dan fleksibilitas dalam menerapkan pendidikan kewirausahaan dengan didukung oleh program-program pemerintah untuk mempercepat terbentuknya mahasiswa wirausaha sebagai *agent of change*. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, serta pengembangan kelembagaan sehingga akan menjamin tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas. Melalui strategi tersebut, diharapkan akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha. Dengan meningkatnya jumlah pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting pemulihan ekonomi dalam menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jika dilihat dari fenomena yang ada saat ini belum sepenuhnya institusi pendidikan memahami akan pentingnya pendidikan kewirausahaan yang dikembangkan di kampus. Padahal hal ini tercantum dalam Indeks Kinerja Utama dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyatakan adanya jumlah mahasiswa yang berwirausaha sebagai salah satu indikator kinerja. Kendala lain juga terlihat pada proses pembelajaran kewirausahaan itu sendiri. Masih banyak dosen yang mengajarkan kewirausahaan hanya berlandaskan teori saja, sehingga menimbulkan kejenuhan dari para mahasiswa. Selain itu kurangnya kolaborasi dengan pihak lain dalam hal ini adalah industri termasuk pelaku UMKM. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang terpusat mengenai strategi pengembangan pendidikan kewirausahaan di pendidikan tinggi. Perlu adanya suatu ekosistem kewirausahaan yang tertata dengan baik yang menghubungkan antara dunia industri, pelaku usaha, sistem pembelajaran kewirausahaan serta pihak lain yang dapat memperkuat peran institusi pendidikan tinggi terkait program kewirausahaan mahasiswa di lingkungan kampus. Seperti kita ketahui bahwa ekosistem kewirausahaan merupakan seperangkat aktor dan faktor-faktor yang terkait dan terkoordinasikan dengan baik dari suatu wirausaha mulai dari tahap awal sampai pengembangan usaha untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing (Haratua dan Wijaya, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirasakan perlu untuk mengkaji kebijakan pendidikan dalam bidang kewirausahaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat dan juga menawarkan satu solusi model pendidikan kewirausahaan berkesinambungan yang dapat diterapkan di pendidikan tinggi. Oleh karena itu maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam bidang kewirausahaan di pendidikan tinggi
2. Untuk mengajukan reformasi kebijakan pemerintah dalam bidang kewirausahaan melalui model pendidikan kewirausahaan yang berkelanjutan di pendidikan tinggi

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *desk research*. Menurut Johnston (2014) metode desk research dilakukan dengan menggali data dari berbagai sumber data sekunder. Penelitian ini melakukan kajian terhadap studi sebelumnya untuk mengeksplorasi pernyataan dalam penelitian ini untuk kemudian dianalisis dan ditafsirkan (Creswell, 2014). Data sekunder yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis memberikan kenyamanan kepada penulis terutama di era pandemi ini. Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel jurnal dan prosiding, dokumen perundang-undangan serta dokumen yang relevan lainnya. Adapun teknik dari *desk research* ini mencakup internal dan eksternal *desk research*.

Internal desk research merupakan awal mula dari suatu penelitian di dalam suatu organisasi. Begitu banyak informasi yang didapat secara internal yang dapat digunakan untuk penelitian ini. Selain itu manfaat dilakukannya internal desk research adalah melibatkan sumber daya internal organisasi dalam mengelola pengumpulan data sehingga tidak hanya efisien tetapi juga bermanfaat. *External desk research* melibatkan kegiatan penelitian yang dilakukan diluar organisasi untuk mendapatkan berbagai informasi yang relevan. Terdiri dari *online desk research*, data

pemerintah yang dipublikasikan, serta desk research untuk pelanggan. Penelitian ini dilakukan dari bulan September- Oktober 2021 dengan lebih banyak menggunakan *external desk research* yang merupakan kebijakan pemerintah, buku, penelitian terdahulu yang terdapat dalam artikel jurnal serta sumber lainnya.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi saat ini yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan kewirausahaan
2. Menentukan tujuan dari penelitian untuk kemudian memberikan solusi permasalahan seputar strategi kebijakan pendidikan kewirausahaan
3. Mengkaji kebijakan pemerintah yang terkait dengan program kewirausahaan
4. Menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran kewirausahaan di pendidikan tinggi
5. Melakukan sintesis dan memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan nasional dalam bidang kewirausahaan.
6. Mengembangkan model pendidikan kewirausahaan berkelanjutan pada pendidikan tinggi

PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam bidang kewirausahaan dan untuk mengajukan reformasi kebijakan pemerintah dalam bidang kewirausahaan melalui ekosistem pendidikan

kewirausahaan yang berkelanjutan di pendidikan tinggi. Maka pembahasan ini akan dimulai dengan tujuan penelitian kesatu.

1. Kajian Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kewirausahaan di Pendidikan Tinggi

Sebagaimana telah dicanangkan sebelumnya bahwa untuk menekan jumlah pengangguran pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung kewirausahaan. Hal ini terlihat dari berbagai program yang ditawarkan oleh pemerintah dibawah kementerian yang berbeda. Sebagai contoh program kewirausahaan yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Program kewirausahaan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan pokok bahasan yang masuk ke dalam peta jalan pendidikan nasional dimana dalam menciptakan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif dan kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan 2045 salah satunya adalah melalui pendidikan kewirausahaan yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengembangan budaya kewirausahaan dimulai tahun 1995 dan terus berkembang sampai sekarang. Instruksi dari Presiden RI saat itu kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia adalah untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Sehingga gerakan pendidikan kewirausahaan diprogramkan oleh berbagai institusi Pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, dan Pendidikan tinggi. Sejak tahun 1997 Dikti telah memfasilitasi pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dengan

adanya program pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi yang menawarkan berbagai kegiatan yaitu Kuliah Kewirausahaan, Magang Kewirausahaan, Kuliah Kerja Usaha, Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja, dan Inkubator Wirausaha Baru. Dalam perkembangannya Dikti menawarkan program yang dikemas sebagai program kreativitas mahasiswa (PKM) yang memfasilitasi mahasiswa untuk berkreasi dalam berbagai bidang meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, artikel ilmiah, gagasan tertulis, karsa cipta, dan kewirausahaan. Selanjutnya, sejak tahun 2009 Dikti menyediakan skim bagi mahasiswa yang berminat sebagai job creator melalui program mahasiswa wirausaha (PMW). Semua kebijakan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, membangun kerja sama tim maupun mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi diantaranya adalah membentuk insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha.

Perguruan Tinggi menghasilkan lulusan dengan berbagai profesi. Pendidikan tinggi bertujuan (1) membentuk insan yang (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (b) sehat, berilmu, dan cakap; (c) kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta (d) toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan

bertanggung jawab dan (2) menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan (Peraturan Pemerintah No. 17/2010: 61-62). Dengan demikian, perguruan tinggi menyiapkan lulusan dengan berbagai profesi yang memiliki karakter antara lain adalah berjiwa wirausaha. Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi harus dirancang untuk membentuk karakter lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha. Lulusan yang memiliki percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi ke depan, dan orisinalitas (Meredith, 2016). Karena kewirausahaan adalah proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.

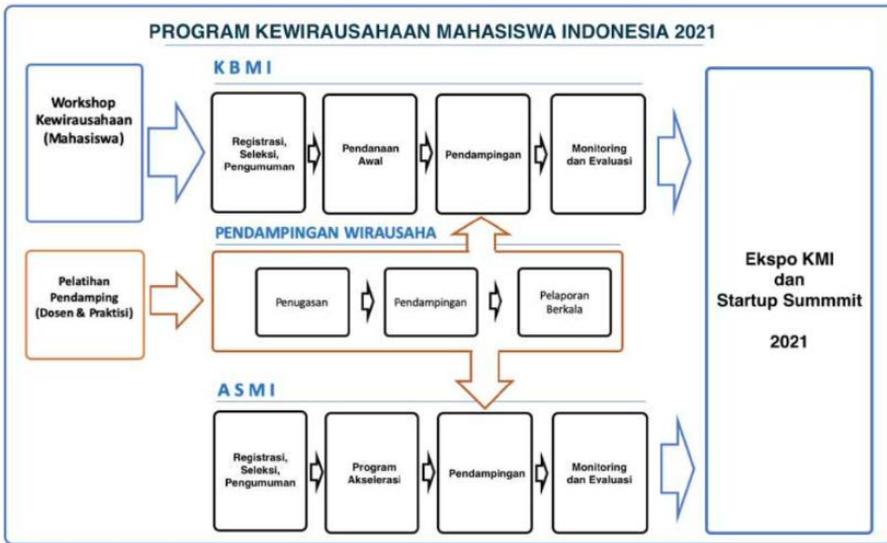
Paada tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi telah menyediakan program kewirausahaan untuk mahasiswa Indonesia (PKMI). Program kewirausahaan ini menjadi bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di bawah Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan mendukung percepatan ekonomi digital pada revolusi industri 4.0. Mahasiswa merupakan bagian dari sumber daya manusia yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian bangsa. Minat dan potensi dari mahasiswa ini perlu didukung dan difasilitasi melalui program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. Adapun tujuan dari penyelenggaraan program kewirausahaan mahasiswa ini adalah untuk menangani permasalahan pengangguran terdidik dari kalangan sarjana

serta untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih awal dan terbimbing (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021).

Program kewirausahaan mahasiswa Indonesia ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia (ASMI), serta Pendampingan Wirasaha Mahasiswa Indonesia (PWMI). KBMI ditujukan untuk mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha sehingga dengan program ini diharapkan terdapat pengembangan wirausaha baru dari kalangan mahasiswa dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Program ini juga diharapkan dapat menghasilkan karya kreatif dan inovatif dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan kuliahnya. Jadi mindset mahasiswa dirubah bukan hanya sebagai job seeker tetapi juga sebagai job creator. Berbagai kategori usaha yang dapat diajukan dalam program KBMI ini mencakup usaha makanan dan minuman, jasa dan perdagangan, industri kreatif, produksi/budidaya serta teknologi terapan. Program berikutnya adalah program ASMI yaitu program kewirausahaan yang ditujukan kepada mereka yang telah memiliki startup khususnya yang nantinya akan diarahkan kepada startup berbasis teknologi. Diharapkan dengan berkembangnya berbagai startup berbasis teknologi ini dapat menawarkan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Program ini mendukung program pemerintah Indonesia yang telah menargetkan lebih dari seribu startup baru yang lahir dari kampus seluruh Indonesia. Perguruan tinggi banyak mengembangkan inkubator bisnis yang diharapkan dapat membina kewirausahaan mahasiswa yang memiliki ide besar yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Dengan program ini diharapkan dapat mendukung

mahasiswa untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Selain program KBMI dan ASMI, program yang juga ditawarkan oleh kementerian adalah program pendampingan kewirausahaan atau PMWI. Program ini ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki usaha dimana ada kalanya usaha itu naik atau turun sehingga memerlukan pendamping untuk membantu mahasiswa dalam menganalisis masalah yang dihadapi serta memberikan solusi permasalahan. Pendamping ini juga berguna untuk memberikan motivasi disaat usaha mahasiswa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Adapun pendamping dalam program ini adalah dosen yang ditugaskan serta praktisi dari industri yang memiliki latar belakang usaha yang serupa.

Program kewirausahaan mahasiswa Indonesia ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2020). Mahasiswa memiliki berbagai manfaat dalam mengikuti program ini dimana mereka akan mendapatkan pembelajaran dari pengalaman praktis langsung berwirausaha. Kegiatan pengalaman pembelajaran di luar kampus ini nantinya dapat dikonversi senilai jumlah SKS tertentu di institusi pendidikannya masing-masing. Secara keseluruhan maka Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber: Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2021

Gambar 3. Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2021

Peserta yang terpilih dari ketiga program kewirausahaan yang ditawarkan baik dari KBMI maupun ASMI akan berhak untuk mengikuti ekspo KMI dan Startup Summit sebagai wujud apresiasi terhadap peserta program yang terbaik.

Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam bidang kewirausahaan melalui berbagai programnya sangat baik untuk diterapkan. Mahasiswa diberi peluang, kesempatan, stimulus, serta berbagai motivasi untuk berwirausaha. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk membentuk minat mereka dalam berwirausaha bagi mereka yang belum memiliki usaha serta dapat memberikan motivasi untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola usaha bagi mereka yang sudah memiliki usaha startup. Namun demikian yang perlu diperhatikan disini

adalah keberlanjutan dari program ini. Karena program ini adalah berdasarkan pengajuan per tahun anggaran, apa yang akan terjadi setelah mahasiswa mengikuti program ini mengingat tujuan dari berwirausaha adalah bukan untuk jangka pendek tetapi bagaimana menjaga keberlanjutan usaha secara jangka panjang. Perlu dipikirkan tindak lanjut dari program ini yang tidak hanya berakhir di expo atau summit pada tahun pengajuan itu saja tetapi bagaimana mereka yang sudah dibina dengan mengikuti program ini dapat terus bertahan dan bahkan dapat menularkan serta memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa lain. Hal ini dapat dilakukan melalui dibentuknya wadah “alumni” bagi yang telah mengikuti program ini serta perjanjian dengan industri dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa para mahasiswa yang telah mengikuti program ini masih dapat dipantau dan dibina hingga beberapa tahun ke depan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan konversi program ini ke dalam mata kuliah yang disetarakan dengan sejumlah sks tertentu. Program konversi ini bukanlah perkara mudah mengingat hal ini terkait dengan kurikulum yang ada di setiap program studi yang ada di tiap-tiap institusi pendidikan. Program MBKM yang memberikan kebebasan mahasiswa untuk belajar di luar program studinya menimbulkan berbagai permasalahan pada pelaksanaannya, seperti:

1. Program yang begitu banyak yang terkadang waktu pelaksanaannya datang secara bersamaan
2. Jumlah total sks yang dapat diambil mahasiswa untuk pembelajaran di luar prodi cukup besar (hingga mencapai 60 sks)

3. Proses konversi yang memerlukan kehati-hatian untuk menghindari terambilnya kurikulum inti prodi sebagai penciri lulusan dari prodi tersebut (LO)
4. Koordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan MBKM
5. Sistem pendukung yang belum siap untuk pelaksanaan program MBKM ini.

Oleh karena itu hendaknya pemerintah perlu menerapkan kebijakan program MBKM ini secara bertahap sehingga pada saat pelaksanaannya institusi pendidikan sudah siap menghadapinya. Edukasi dan sosialisasi dari pemerintah hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan hingga institusi pendidikan pelaksana program ini betul-betul siap untuk menjalankannya dengan didukung oleh sistem dan infrastruktur yang sudah ‘ajeg’. Program yang ditawarkan pemerintah hendaknya tidak dilakukan secara bersamaan atau berdekatan melainkan secara bergiliran. Jikalau program MBKM ini dilaksanakan secara mandiri oleh institusi pendidikan, akan dapat terlaksana dengan lebih baik disaat mereka sudah paham dan siap dalam menjalankannya. Program yang terlalu banyak ini menimbulkan kebingungan tidak hanya di kalangan dosen dan pengelola prodi tetapi juga di kalangan mahasiswa. Persyaratan mahasiswa yang mengikuti program ini adalah untuk semester 5 ke atas, dimana mahasiswa sudah mendapatkan kurikulum inti prodi sehingga mereka bisa memperoleh pengayaan dalam bidang lain di luar keilmuan di prodinya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya pemetaan mahasiswa mana yang akan mengikuti program apa sehingga mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan dalam jumlah

tertentu ini tidak akan dibingungkan oleh informasi dan kegiatan yang begitu banyak. Mengingat jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa di luar prodi cukup besar atau mencapai 60 sks, maka hendaknya kebijakan mengenai memasukkan program MBKM ke dalam kurikulum harus dilakukan. Mungkin saja restrukturisasi kurikulum harus dilakukan terkait dengan sebaran mata kuliah inti prodi yang sebaiknya ditawarkan di semester awal hingga semester kelima dan menempatkan mata kuliah pilihan setelah semester 5. Hal ini agar proses konversi matakuliah lebih mudah dan tidak menyebabkan hilangnya atau tidak diambilnya kurikulum inti prodi yang membentuk learning outcome dari prodi tersebut. Masih terkait dengan proses konversi, mengingat beberapa kegiatan MBKM seperti kewirausahaan dapat dikonversi ke dalam maksimal 20 sks maka hendaknya prodi memiliki pemetaan konversi mata kuliah untuk tiap kegiatan MBKM. Hal ini untuk menghindari kebingungan prodi dalam pengkonversian mata kuliah tersebut mengingat proses konversi ini akan sangat individual berdasarkan mahasiswa karena tiap mahasiswa dimungkinkan untuk mengambil mata kuliah dan kegiatan MBKM yang berbeda. Mengingat kegiatan MBKM ini melibatkan banyak pihak, maka hendaknya koordinasi yang baik antar pihak baik eksternal maupun internal dapat dilakukan. Hal ini dapat terjadi jika sudah ada suatu alur proses yang jelas yang berisi mengenai berbagai fungsi, deskripsi kerja serta peran dari tiap-tiap pihak yang terlibat. Sistem yang mumpuni dan siap digunakan pun harus dipikirkan dengan matang sebelum pelaksanaan berbagai program ini mengingat khususnya program yang ditawarkan oleh kementerian dan diakses oleh semua orang dari seluruh Indonesia. Sistem yang baik didukung dengan infrastruktur yang mumpuni akan menjadi pendukung kesuksesan pelaksanaan program MBKM ini.

2. Model pendidikan kewirausahaan yang berkelanjutan di pendidikan tinggi

Untuk menciptakan pendidikan kewirausahaan yang berkelanjutan di pendidikan tinggi, diperlukan adanya suatu ekosistem yang baik yang mendukung proses keberlanjutan ini. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pendidikan kewirausahaan diperlukan untuk menyiapkan mahasiswa melalui pemberian pengetahuan mengenai kewirausahaan (Fayolle, & Gailly, 2015). Permasalahan yang umumnya timbul dari mahasiswa terkait dengan kewirausahaan adalah kurangnya minat berwirausaha karena minimnya pengetahuan terhadap konsep kewirausahaan, kurang percaya diri, serta kurang memahami kompetensi kewirausahaan (Soputan et.al, 2019). Banyak penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha (Bao et.al, 2014; Entrialgo & Iglesias, 2016).

Untuk itu diperlukan suatu program pengembangan kewirausahaan mahasiswa yang terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan di pendidikan tinggi yang tertuang di dalam model pendidikan kewirausahaan yang terintegrasi mulai dari sisi input, proses serta outputnya. Input berkaitan dengan mahasiswa, dosen, serta praktisi dari pihak industri yang terlibat. Proses terdiri dari kurikulum, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Output itu sendiri berkaitan dengan hasil pencapaian dari tahapan proses pembelajaran. Ini akan menciptakan suatu ekosistem pendidikan kewirausahaan yang berkelanjutan sebagai pembelajaran sepanjang hayat.

2.1 Input

Input terkait dalam pendidikan kewirasauhaan ini terdiri dari mahasiswa, dosen, praktisi serta sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Mahasiswa artinya calon pelaku usaha yang memiliki minat untuk berwirasuaha atau sudah memiliki usaha namun belum maksimal. Dosen yaitu fasilititor yang akan menyampaikan berbagai materi tentang pembelajaran kewirusahaan. Praktisi dari pihak industri adalah mereka mendampingi mahasiswa wirasuaha ini dengan memeberikan masukan-masukan yang praktis. Sarana dan prasarana adalah segala hal yang berkaitan dengan pendukung pembelajaran seperti ruang perkuliahan dan laboratorium.

2.2 Proses

Proses berkaitan dengan proses pembelajaran kewirusahaan yang akan dilaksanakan. Terdiri dari kurikulum, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.

2.2.1 Kurikulum

Sudah banyak institusi pendidikan yang menawarkan mata kuliah kewirusahaan dan memasukan mata kuliah ini ke dalam kurikulumnya. Bahkan sebagian ada yang membuat mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib yang harus ada di setiap prodi. Hal ini berkaitan juga dengan IKU dari pemerintah mengenai jumlah mahasiswa yang berwirusaha. Untuk lebih mengefektifkan pembelajaran kewirusahaan, hendaknya mata kuliah ini disampaikan tidak di semester yang terlalu awal. Untuk mahasiswa yang berasal dari prodi yang berlatar ekonomi, manajemen atau bisnis, mata kuliah ini sebaiknya ditawarkan setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah pengantar ekonomi, pengantar bisnis, pengantar manajemen, manajamen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen

SDM serta manajemen operasi. Hal ini untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa pada saat mereka mengambil mata kuliah kewirausahaan. Untuk mahasiswa yang berasal bukan dari yang berlatar ekonomi, manajemen dan bisnis, mata kuliah ini dapat ditawarkan setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah dasar dari prodinya masing-masing. Hal ini disebabkan agar mereka mendapatkan juga pengetahuan dan keterampilan dasar yang mungkin akan dapat dikembangkan dalam mata kuliah kewirausahaan.

2.2.2 Materi Pembelajaran

Terkait dengan materi pembelajaran, masih banyak institusi pendidikan yang mengajarkan kewirausahaan itu hanya berdasarkan teori di kelas saja. Berbagai referensi dan buku teks dipergunakan namun muatan praktisnya sangatlah kecil. Hal ini akan menyebabkan tidak akan optimalnya proses pembelajaran. Untuk menjadi seorang wirausaha diperlukan tidak hanya teori tetapi juga muatan parktis yang dapat memberikan pengalaman bagi mashasiwa tersebut untuk berwirausaha meskipun masih dalam lingkup yang sangat kecil. Konsep learning by doing disini perlu ditekankan sehingga dengan mengkombinasikan antara teori dan praktik, maka pengatahuan yagn diterima oleh mahasiswa akan bisa lebih optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Gaffar dan Hendrayati (2014) menghasilkan suatu bentuk materi pembelajaran dalam kewirausahaan yang mengkombinasikan antara teori dengan praktik. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Rincian Materi Pembelajaran Kewirausahaan

Pertemuan Ke	Materi yang Diberikan	Keterangan
1	Penjelasan Silabus House of Rules	<input type="checkbox"/> Pembagian kelompok
2	Pengenalan Konsep Kewirausahaan	<input type="checkbox"/> Pemberian materi untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep kewirausahaan <input type="checkbox"/> Pada minggu ini masing-masing kelompok sudah mulai berdiskusi mengenai usaha apa yang akan mereka jalankan
3	Cara Mendirikan Usaha	<input type="checkbox"/> Pemberian materi untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep kewirausahaan
4	Business Plan	<input type="checkbox"/> Pemberian materi untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep kewirausahaan <input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok ditugaskan untuk merancang business plan
5	Perancangan Business Plan	<input type="checkbox"/> Asistensi business plan yang sudah mereka buat
6	Presentasi Business Plan	<input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok mempresentasikan business plan yang telah dirancang
7	UTS	<input type="checkbox"/> Evaluasi terhadap konsep kewirausahaan serta business plan yang telah dibuat
8	Praktek Lapangan	<input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok sudah mulai turun ke lapangan untuk mempraktekkan usaha yang mereka buat sesuai dengan business plan yang diajukan
9	Praktek Lapangan	<input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok sudah mulai turun ke lapangan untuk mempraktekkan usaha yang mereka buat sesuai dengan business plan yang diajukan

Pertemuan Ke	Materi yang Diberikan	Keterangan
10	Praktek Lapangan	<input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok sudah mulai turun ke lapangan untuk mempraktekkan usaha yang mereka buat sesuai dengan business plan yang diajukan
11	Progress Report	<input type="checkbox"/> Tiap kelompok membuat progress report untuk kemudian dievaluasi oleh tim dosen. Termasuk di dalamnya jalannya praktik, tantangan dan hambatan yang dihadapi serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana.
12	Praktek Lapangan	<input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok kembali ke lapangan untuk meneruskan praktik kewirausahaan berdasarkan masukan dari tim dosen (berdasarkan progress report yang diberikan kepada tim dosen) <input type="checkbox"/> Pembagian kuesioner niat berwirausaha setelah mereka menjalani praktik kewirausahaan
13	Praktek Lapangan	<input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok kembali ke lapangan untuk meneruskan praktik kewirausahaan berdasarkan masukan dari tim dosen (berdasarkan progress report yang diberikan kepada tim dosen)
14	Praktek Lapangan	
15	Praktek Lapangan	<input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok kembali ke lapangan untuk meneruskan praktik kewirausahaan berdasarkan masukan dari tim dosen (berdasarkan progress report yang diberikan kepada tim dosen)

Pertemuan Ke	Materi yang Diberikan	Keterangan
16	Presentasi Akhir	<input type="checkbox"/> Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil akhir dari praktik kewirausahaan yang telah dilaksanakan

Sumber: Gaffar dan Hendrayati (2014)

2.2.3 Metode Pembelajaran

Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan keberwirausahaan lulusan sangat penting, terutama dalam meningkatkan minat dan kemampuan lulusan untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Wirausaha adalah suatu proses atau cara melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan cara memproduksi, menjual atau menyewakan suatu produk barang atau jasa. Di perguruan tinggi diberikan mata kuliah kewirausahaan untuk membekali mahasiswa agar setelah lulus dapat berwirausaha. Mata kuliah kewirausahaan masih belum efektif karena proses pembelajaran yang berlangsung belum optimal. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan dosen masih didominasi oleh metode ceramah (Lotulung, Chrisant Florence; Ibrahim, Nurdin; Tumurang, Hetty, 2018). Demikian juga dengan pendekatan pedagogik tradisional yang diterapkan pada pendidikan kewirausahaan membatasi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku kewirausahaan. Jika kebutuhan untuk meningkatkan tingkat kewirausahaan lulusan harus dipenuhi, penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif. Pergeseran paradigma yang berasal dari filosofi humanis menyarankan pendekatan pembelajaran bersama di mana pembelajar dan pendidik berpartisipasi dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan (Hannon, Lorna, and Alison, 2005).

Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan memerlukan metode yang sesuai untuk mencapainya. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan demikian harus didasarkan kepada tujuan yang harus dicapai, serta karakteristik materi pembelajaran dan mahasiswa. Pembelajaran kewirausahaan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengalaman melalui proses learning by doing (Welsh, William, and Hamid; 2016). Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan khususnya pada metode pembelajaran serta pengorganisasian pembelajaran. Metode pembelajaran dalam pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi harus dirancang tidak hanya dalam kerangka pengembangan ilmu, tetapi juga harus diarahkan pada pengalaman yang memungkinkan mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap lingkungan bisnisnya (Ille Carrier, 2007).

Diantara metode atau model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran kewirausahaan adalah project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran inovatif, berfokus pada konsep dan prinsip-prinsip utama suatu disiplin ilmu, memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan tugas-tugas bermakna lainnya, pembelajaran berorientasi pada mahasiswa, dan menghasilkan produk nyata. Karakteristik Project-based Learning diantaranya yaitu mahasiswa dihadapkan pada permasalahan konkret, mencari solusi, dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut.

Pembelajaran kewirausahaan dengan menggunakan project-based learning, maka proyek dilakukan secara kolaboratif dan inovatif, unik,

fokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa atau kebutuhan masyarakat atau industri lokal. Proyek yang dirancang terkait dengan penumbuhan nilai-nilai kewirausahaan dan kemampuan merancang produk kreasi baru. Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan project-based learning adalah membuat pengalaman belajar menjadi lebih menarik dan bermakna bagi mahasiswa. Dalam pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa menjadi terdorong lebih aktif dalam belajar, dosen hanya sebagai fasilitator, mengevaluasi produk hasil kinerja mahasiswa yang meliputi outcome yang mampu ditampilkan dari hasil proyek yang dikerjakan. Tugas proyek dapat dikerjakan secara berkolaborasi dengan mahasiswa lainnya ataupun dengan dosen. Melalui kolaborasi tersebut, dapat mengembangkan keterampilan merencanakan, mengorganisasikan, negosiasi, dan membuat konsensus tentang tugas yang dikerjakan, pembagian tugas, dan bagaimana cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam berinvestigasi.

Project-Based Learning menekankan kegiatan belajar yang relatif berdurasi panjang, holistik-interdisipliner, berpusat pada mahasiswa, dan terintegrasi dengan praktek dan isu-isu dunia nyata. Melalui pembelajaran ini diharapkan kemampuan peserta didik mengenai kewirausahaan dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Disamping itu pembelajaran ini akan menghasilkan cara belajar peserta didik menjadi lebih aktif, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator. Langkah-langkah pembelajaran kewirausahaan dengan menggunakan project-based learning adalah: (1) pembelajaran dimulai dengan penentuan pertanyaan mendasar atau pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan mahasiswa dalam melakukan suatu aktivitas, (2) mendesain

perencanaan proyek yang akan dilakukan secara kolaboratif, menyusun rencana kerja, memilih aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek, (3) menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek, yang terdiri atas a) membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (b) membuat batas waktu penyelesaian proyek, (c) merencanakan cara yang baru, (d) membuat penjelasan tentang pemilihan suatu cara, (4) menguji hasil untuk mengukur ketercapaian standar, (6) mengevaluasi pengalaman dan melakukan refleksi terhadap aktivitas serta hasil proyek yang sudah dilaksanakan (Kokotsaki, Dimitra, Victoria Menzies, and Andy Wiggins, 2016)

Selama pengerjaan proyek, dosen dapat melakukan monitoring aktivitas mahasiswa dan kemajuan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi mahasiswa pada setiap proses. Dengan demikian dosen dapat berperan menjadi mentor bagi aktivitas mahasiswa dan membuat rubrik untuk merekam aktivitas mahasiswa selama mengerjakan proyeknya.

Selain project-based learning, metode yang dapat digunakan pada pembelajaran kewirausahaan adalah magang (*internship*). Magang menggabungkan pelatihan dan pengalaman pada pekerjaan dengan instruksi yang didapatkan di dalam tempat tertentu untuk subyek-subyek tertentu (Simamora, 2005). Magang sebagai proses *learning by doing* memiliki makna suatu proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan cara melibatkan diri dalam proses

pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaannya.

Pendidikan kewirausahaan melalui magang dapat menjadi upaya seseorang untuk memiliki sikap, keterampilan, dan jiwa wirausaha melalui pengenalan produk, pengelolaan dan penggalian sumber-sumber baru untuk keperluan ekonomi. Magang kewirausahaan sebagai metode pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai dasar budaya belajar-bekerja, menjadi konsep dasar magang sebagai bentuk proses pembelajaran di masyarakat atau di tengah-tengah keluarga, seperti yang berkembang dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat pengrajin (*home industry*). Saat ini, program magang sudah banyak ditawarkan baik oleh pemerintah sebagai kegiatan MBKM ataupun oleh industri.

Selain melalui magang, Pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan melalui metode *co-operative education* dalam bentuk program kerjasama perguruan tinggi dengan institusi/dunia usaha/UKM, seperti program *Co-operative Academic Education (Co-op)* yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan. Berbeda dengan magang yang dirancang pada kurikulum reguler dan hanya terjadi satu kali selama menempuh studi, maka *co-operative education* adalah program pilihan yang dapat diikuti berkali-kali selama masa studi dan dalam sekuensi yang terstruktur (Sari, 2020). Implementasi *co-operative education* akan melibatkan lima pihak yang berkepentingan, yaitu 1) institusi sebagai pengelola program, 2) mahasiswa sebagai pelaku magang, 3) industry sebagai tempat magang, 4) pendidik sebagai penggerak perubahan kurikulum, dan 5) pemerintah sebagai pendorong kebijakan.

Mahasiswa dapat mengikuti program ini melalui proses seleksi oleh perguruan tinggi dan perusahaan/industri dimana mahasiswa akan melaksanakan program Co-op. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada mahasiswa atas pekerjaan yang mereka lakukan, serta surat keterangan bekerja setelah mahasiswa menyelesaikan program tersebut dengan baik.

Co-operative education tersebut pada intinya adalah pembelajaran kewirausahaan dengan cara belajar sambil bekerja terpadu (Jones, 2007), sehingga program ini dapat diadopsi sebagai metode pembelajaran kewirausahaan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman nyata bekerja di perusahaan/industri yang bisa dilakukan secara terstruktur selama masa studinya. Melalui pengalaman bekerja di industri diharapkan menumbuhkan motivasi dan kreativitas mahasiswa dalam menciptakan peluang berwirausaha. Perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan industri/perusahaan/UKM untuk melaksanakan metode ini. Persyaratan dan kualifikasi mahasiswa dapat ditentukan melalui kesepakatan perguruan tinggi dengan perusahaan.

2.2.4 *Media Pembelajaran*

Proses pembelajaran tidak terlepas dari pemanfaatan pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran (Ramdhani & Muhammadiyah, 2015). Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran kewirausahaan ditujukan untuk memberikan kreativitas bagi mahasiswa dalam hal menumbuhkan sikap dan perilaku wirausaha dan memberikan pengalaman langsung dalam setiap proses pembelajaran yang positif. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran

kewirausahaan sehingga memberikan penguatan pembelajaran kewirausahaan yang berorientasi pada pembentukan karakter wirausaha, menyiapkan layanan pembelajaran kewirausahaan berbasis proyek atau praktik bisnis, menyiapkan rintisan teaching industry, dan menyiapkan lulusan untuk menjadi wirausaha.

Media pembelajaran digunakan untuk memberikan kreatifitas bagi mahasiswa dalam hal menumbuhkan sikap dan perilaku wirausaha dan memberikan pengalaman langsung dalam setiap proses pembelajaran (Bell, 2015). Media pembelajaran yang tepat dapat membuat mahasiswa menjadi lebih antusias dalam belajar kewirausahaan dan dapat membuat siswa lebih semangat dalam mencapai tujuan belajarnya. Mahasiswa dapat memanfaatkan segala media pembelajaran semaksimal mungkin baik media audio, visual dan audio visual. Aktifitas belajarpun akan menyenangkan karena mahasiswa akan semakin antusias dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses pembelajaran.

Perkembangan informasi dan teknologi dapat dimanfaatkan dalam pengembangan media pembelajaran, seperti media game simulasi berbasis android atau computer-based simulations, dan behavioral simulation. Melalui media yang interaktif dan melibatkan siswa secara langsung, akan memberikan pengalaman kontekstual yang menggambarkan dunia nyata yang akan dihadapi mahasiswa. Simulasi memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman situasi baru. Dan tentu saja yang paling penting adalah memilih latihan simulasi yang tepat untuk meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa (Ille Carrier, 2007). Pilihan latihan simulasi juga harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, ada sejumlah kriteria untuk memandu pengembangan atau pilihan latihan simulasi, termasuk

diantaranya adalah skenario yang relevan dan kredibel, komunikasi yang jelas terkait dengan aspek yang berbeda, fungsi yang disesuaikan dengan materi pendukung teknis, dan analisis *cost-benefit* berdasarkan kriteria di atas dan tujuan latihan. Simulasi harus disesuaikan dengan konteks bisnis yang berlaku pada saat diberikan kepada kelompok mahasiswa sehingga terjadi partisipasi yang maksimal.

Media pembelajaran yang lebih sederhana masih dapat digunakan untuk media penyampaian informasi dalam pembelajaran pada materi tertentu, seperti video yang menayangkan success story dari para wirausahawan. Hal ini dapat menumbuhkan minat berwirausaha yang akan mendorong mahasiswa mempunyai keyakinan diri untuk menjadi wirausaha. Media pembelajaran yang paling nyata bagi mahasiswa pada pembelajaran kewirausahaan adalah bisnis dan industri, dimana mahasiswa bisa secara langsung mendapatkan pengalaman belajarnya terkait teori dan praktik wirausaha.

2.2.5 *Evaluasi Pembelajaran*

Evaluasi sebagai sebuah proses mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu tujuan yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan dapat pula untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaannya (Sudijono, 2013), atau secara umum dapat diartikan bahwa evaluasi pendidikan sebagai suatu kegiatan penilaian yang dilakukan didalam dunia pendidikan. Karena evaluasi yang dirancang untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, maka instrument evaluasi harus sesuai dengan rancangan pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pembelajaran kewirausahaan yang dirancang dengan menggunakan model atau metode *project-based learning*, maka evaluasi harus mampu menilai apakah proyek yang dihasilkan mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan sehingga tujuan bisa dinyatakan tercapai (Boss & Krauss, 2014). Rubrik penilaian sebagai instrument evaluasi disusun sesuai dengan proyek yang direncanakan, kriteria keberhasilan mahasiswa menyusun rencana proyek dan merealisasikannya harus dapat teridentifikasi dalam rubrik tersebut. Sama halnya dengan magang atau bekerja sambil belajar, rubrik penilaian diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai indikator kinerja mahasiswa pada kegiatan belajar tersebut.

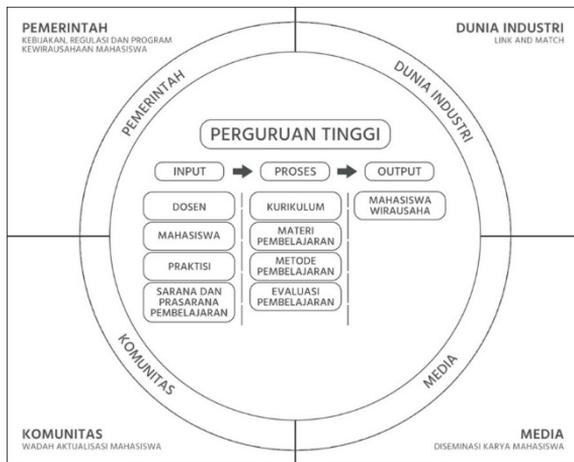
Evaluasi harus mampu menilai apakah mahasiswa memperoleh manfaat dari pengalaman belajarnya dan mengalami peningkatan kualitas *soft skills* dan *hard skill*nya (Cimatti, 2016). Hasil evaluasi juga dapat memberi *feedback* sehingga bermanfaat bagi perguruan tinggi yaitu terbuka kesempatan untuk membuka hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja sehingga memungkinkan perguruan tinggi untuk memperbaiki kurikulum maupun materi pembelajarannya. Selain itu, untuk kegiatan yang melibatkan pembimbing dari perguruan tinggi maupun perusahaan, maka dosen akan mendapat kesempatan untuk memahami kebutuhan hakiki dunia kerja, mendapatkan umpan balik untuk dapat mengadaptasi keahlian, teknik, aplikasi, dan keterampilan mutakhir yang dibutuhkan industri ke dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Sedangkan pemerintah melalui kebijakan dan program penguatan kelembagaan yang mendorong peningkatan aktivitas berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha-wirausaha baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman (Sari, 2020).

Hasil evaluasi yang tepat, akan memberikan manfaat bagi kelima pihak yang berkepentingan tersebut, salah satunya saling ketergantungan positif (*positive indenpendency*) untuk mewujudkan tujuan Pendidikan kewirausahaan yaitu pemerolehan pengalaman kerja langsung di tempat kerja, meningkatkan keterampilan krusial di dunia kerja, kemampuan berkomunikasi, kemampuan beradaptasi, memecahkan masalah, keterampilan menciptakan solusi kreatif dan efisien.

2.3 Output

Output tidak lain adalah mahasiswa yang berwirausaha yang diperoleh dari hasil input yang telah melalui berbagai proses sehingga akhirnya terbentuklah mahasiswa wirausaha. Proses pembentukan mahasiswa wirausaha ini bukanlah proses instan tetapi memerlukan waktu dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka keseluruhan model pembelajaran kewirausahaan di pendidikan tinggi terangkum dalam gambar berikut ini:



Gambar 4. Model Pendidikan Kewirausahaan Berkelanjutan di Pendidikan tinggi

Gambar di atas menunjukkan bahwa pendekatan pentahelix diperlukan untuk menghasilkan mahasiswa wirausaha. Kolaborasi antara insitusi pendidikan dengan pemerintah, dunia industri, komunitas serta media diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari seorang mahasiswa wirausaha. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi khususnya terkait dengan pendidikan kewirasusahaan di pendidikan tinggi. Pemerintah juga yang dapat memberikan berbagai macam fasilitas program kewirasusahaan mahasiswa. Dunia industri dalam hal ini berperan sebagai media untuk link and match kurikulum di institusi pendidikan khususnya terkait dengan *knowledge* dan *skills* yang dibutuhkan mahasiswa khususnya dalam mengembangkan usaha. Peran komunitas juga tidak kalah penting sebagai wadah aktualiasi mahasiswa wirausaha untuk belajar, berbagi dan menyalurkan berbagai ide kreatifnya. Dan tentunya peran media sangat penting dalam mendiseminasikan dan mempromosikan hasil karya mahasiswa wirausaha ini.

KESIMPULAN

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendidikan nasional yang berkaitan dengan pendidikan kewirasusahaan dan memberikan berbagai macam fasilitas kepada mahasiswa melalui institusi pendidikan. Namun demikian kebijakan ini perlu dikembangkan berdasarkan analisis dan kajian dalam implementasinya. Mahasiswa sebagai agent of change perlu dimotivasi untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif untuk berwirausaha sehingga dapat berkontribusi untuk menekan jumlah pengangguran khususnya yang berasal dari pengangguran terdidik. Perlu adanya suatu model pendidikan kewirasusahaan yang holistic dan terintegrasi dengan

berdasarkan kepada pendekatan penathelix agar program kewirausahaan mahasiswa ini dapat berkelanjutan sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bae, T. J., Qian, S., Miao, C., & Fiet, J. O. The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 38(2) (2014): 217-254
- Bell, Robin. "Developing the next generation of entrepreneurs: Giving students the opportunity to gain experience and thrive." *The International Journal of Management Education* 13, no. 1 (2015): 37-47
- Boss, Suzie, and Jane Krauss. Reinventing project-based learning: Your field guide to real-world projects in the digital age. *International Society for Technology in Education*. (2014)
- Cimatti, Barbara. "Definition, development, assessment of soft skills and their role for the quality of organizations and enterprises." *International Journal for quality research* 10, no. 1 (2016)
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). Los Angeles; London; New Dehli; Singapore; Washington DC: Sage Publications. (2014)
- Entrialgo, M., & Iglesias, V. The moderating role of entrepreneurship education on the antecedents of entrepreneurial intention. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 12(4) (2016): 1209-1232
- Fayolle, A., & Gailly, B. The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Attitudes and Intention: Hysteresis and Persistence. *Journal of Small Business Management*, 53(1) (2015)
- Gaffar, V & Hendrayati, H. The Development of Experiential Learning Model in Entrepreneurship Course. Proceeding WALIS International Conference : Becoming Reflective Educators and Professionals of Learning (2014)
- Hannon, Paul D., Lorna A. Collins, and Alison J. Smith. "Exploring graduate entrepreneurship: a collaborative, co-learning-based

- approach for students, entrepreneurs and educators." *Industry and Higher Education* 19, no. 1 (2005): 11-23
- Haratua, A., dan Wijaya, C., Membangun Eksosistem Kewirausahaan untuk Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur, 2020, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli (2020) : 36-47
- Ille Carrier, Cam. "Strategies for teaching entrepreneurship: What else beyond lectures, case studies and business plans." *Handbook of Research in Entrepreneurship Education: A general perspective 1* (2007): 143.
- Johnston, M. P. Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come Melissa. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)*, 3, (2014): 619–626
- Jones, Jeela. "Connected Learning in Co-Operative Education." *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education* 19, no. 3 (2007): 263-273.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*. (2020a)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020-2035* (2020b)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2021* (2021). Diakses melalui <https://sim-pkmi.kemdikbud.go.id/portal/panduan-pkmi-tahun-2021-edisi-revisi/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020* (2020). Diakses melalui <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf>
- Kokotsaki, Dimitra, Victoria Menzies, and Andy Wiggins. "Project-based learning: A review of the literature." *Improving schools* 19, no. 3 (2016): 267-277.
- Lotlung, Chrisant Florence, Nurdin Ibrahim, and Hetty Tumurang. "Effectiveness of Learning Method Contextual Teaching Learning (CTL) for Increasing Learning Outcomes of Entrepreneurship Education." *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET* 17, no. 3 (2018): 37-46.
- Meredith, George. *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: PPM. (2002).
- Peliz et.al. *Involve project: Desk Research Project from Portugal*. (2020)
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 (2010)

- Ramdhani, Muhammad Ali, and Hilmi Muhammadiyah. "The criteria of learning media selection for character education in higher education." (2015): 174-182.
- Sari, Faizah. *Co-operative Education Program*. Nas Media Pustaka, (2020).
- Soputan, G. J., Mamuaja, N. C., Ohy, J., & Krisnanda, M. Program Pengembangan Kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, 24(14) (2019): 100–108.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2013)
- Susilaningsih, Susilaningsih. "Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Pentingkah untuk Semua Profesi?." *Jurnal Economia* 11, no. 1 (2015): 1-9.
- Welsh, Dianne HB, William L. Tullar, and Hamid Nemati. "Entrepreneurship education: Process, method, or both?." *Journal of Innovation & Knowledge* 1, no. 3 (2016): 125-132.

Arah dan Kebijakan Pembinaan Karir Profesional Guru di Indonesia

Yudha Munajat Saputra¹, Enjang Yusup Ali², J. Julia³

Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3}

E-mail: yudhamsaputra@upi.edu¹, enjang@upi.edu², juli@upi.edu³

Article History:

Received : 12 November 2021

Reviewed : 18 November 2021

Accepted : 8 December 2021

Published : 15 December 2021

Abstract

Teachers have the right to improve their professional careers, both in employment status and promotions and functional positions on a regular basis. However, periodically increasing ranks and functional positions, let alone changing the status from honorary teachers to ASN teachers, is a long-standing problem for teachers. This study aims to trace and investigate the career development of teachers through the certification process, promotions and positions, administrative requirements, and career satisfaction. The method and design used is a mixed-method to explore data through quantitative and qualitative approaches. Data collection both quantitative and qualitative is done through surveys. Participants who participated in filling out the survey were 1010 teachers, consisting of honorary teachers and ASN teachers. The results showed that teachers experienced various obstacles to accelerate career development, ranging from administrative problems, information system support and leadership, welfare and satisfaction, personal skills, and division of working hours.

Keywords: *teacher career, teaching profession, career development, promotion, honorary teacher career, ASN teacher career*

Abstrak

Guru memiliki hak untuk meningkatkan karir keprofesiannya, baik dalam status kepegawaian maupun kenaikan pangkat dan jabatan fungsional secara berkala.

Namun, meningkatkan pangkat dan jabatan fungsional secara berkala apalagi mengubah status dari guru honorer menjadi guru ASN menjadi masalah berkepanjangan bagi kalangan guru. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menginvestigasi pengembangan karir guru melalui proses sertifikasi, kenaikan pangkat dan jabatan, persyaratan administratif, dan kepuasan berkarir. Metode dan desain yang digunakan adalah mixed-method untuk menggali data melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif dilakukan melalui survei. Partisipan yang berpartisipasi mengisi survei berjumlah 1010 guru, yang terdiri atas guru honorer dan guru ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengalami berbagai kendala untuk melakukan percepatan pengembangan karir, mulai dari masalah administratif, dukungan sistem informasi dan pimpinan, kesejahteraan dan kepuasan, keterampilan pribadi, dan pembagian jam kerja.

Kata Kunci : karir guru, profesi guru, pengembangan karir, kenaikan pangkat, karir guru honorer, karir guru ASN

Pendahuluan

Mengukur perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari keberhasilan peserta didik saja dalam menyelesaikan jenjang pendidikannya, akan tetapi mesti berbanding lurus dengan keberhasilan para pendidiknya dalam memperoleh hak-haknya sebagai guru (Al Rasyid 2017; Seknun 2018) untuk turut maju dan berkembang dalam karirnya. Di provinsi Jawa Barat, guru-guru masih mengeluhkan perkembangan karirnya yang telat bahkan sulit berkembang. Bahkan, banyak pula yang tanda tanya bagaimana dengan nasibnya sebagai guru honorer yang kian hari belum ada juga kepastian untuk pengangkatan sebagai ASN. Indikasi kurang baiknya perkembangan karir guru di Jawa Barat khususnya, dapat menjadi suatu representasi dari buruknya manajemen atau sistem pengembangan karir yang berlaku di negara Indonesia. Demikian pula kurangnya kepuasan guru dalam mendapatkan kesejahteraan dalam pendapatan menjadi salah satu faktor menghilangnya guru-guru berprestasi dari jajaran pendidik yang berkualitas dan berkelanjutan (Tang

et al. 2018; Xuehui 2018; Firestone 1994; Garcia, Slate, and Delgado 2009). Oleh karena itu, pengembangan terhadap karier guru diperlukan supaya guru dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal dan profesional berdasarkan jenjang tugasnya (Dewi and Rusdinal 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan karir guru tidak dapat dilepaskan dari kinerja profesional guru yang juga bersentuhan dengan faktor pribadi seperti motivasi dan orientasi tujuan (Chesnut 2017). Yu, Jiang, and Kei (2021) melihat bahwa pengembangan karir guru dipengaruhi oleh komitmen profesional guru yang dapat dilihat perubahannya dari waktu ke waktu. Komitmen profesional guru dapat berkurang dan dapat pula bertambah seiring dengan kondisi yang dihadapinya, sehingga memerlukan dukungan kelembagaan untuk dipromosikan secara berkala. Sementara itu, Maani and Otaala (2019) menemukan bahwa sikap positif guru terhadap karirnya dipengaruhi oleh jumlah pendapatan, dukungan kepala sekolah, dan layanan dari pemerintah.

Penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan menginvestigasi bagaimana perkembangan karir guru jika dilihat dari proses sertifikasi, kenaikan pangkat dan jabatan, persyaratan administratif, dan kepuasan berkarir. Guru memiliki hak untuk berkembang dan naik pangkat/jabatan fungsional dari waktu ke waktu sesuai dengan masa kerja yang telah ditentukan. Namun, tidak sedikit guru yang mengeluhkan dan kesulitan untuk naik pangkat/jabatan fungsional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan karir guru agar dihasilkan solusi-solusi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang konstruktif agar guru lebih cepat berkembang, lebih profesional, dan bisa naik pangkat atau jabatan sesuai dengan masa kerjanya.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian mixed-method untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi permasalahan melalui dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif (Hesse-Biber 2015; Tavakoli and Baniasad-Azad 2017; Johnson, Onwuegbuzie, and Turner 2007). Permasalahan guru-guru memerlukan pengkajian bukan saja dari sudut pandang kuantitatif, melainkan juga perlu diungkap melalui sudut pandang kualitatif untuk mengungkap informasi-informasi yang berkaitan dengan realitas dan perasaan para guru di lapangan. Pendekatan kualitatif bermanfaat untuk mendapatkan rincian yang rumit tentang fenomena seperti perasaan, proses berpikir, dan emosi yang sulit untuk digali atau dipelajari melalui metode konvensional (Corbin and Strauss 2014; Creswell 2002).

Partisipan

Partisipan yang terlibat dalam pengumpulan data kuantitatif terdiri atas 1010 guru dari provinsi Jawa Barat. Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara purposif, dengan kriteria yang ditetapkan antara lain: guru-guru yang aktif dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) atau aktif dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), atau guru-guru yang aktif dalam pelatihan-pelatihan peningkatan profesionalisme guru. Partisipan yang mengisi survei dalam jangka waktu yang ditetapkan berjumlah 1013, namun tiga partisipan tidak dilibatkan dalam analisis karena memberikan jawaban ganda. Seluruh partisipan mengisi data demografi yang terdiri atas gender, status kepegawaian, status jabatan, status sertifikasi, dan

jenjang pekerjaan. Sebaran data demografi partisipan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Demografi Partisipan

Keterangan	Jumlah	%
Gender:		
Pria	297	29.4
Wanita	713	70.6
Status Kepegawaian:		
PNS	503	49.8
Honorar	507	50.2
Status Jabatan:		
Guru	976	96.6
Kepala Sekolah	34	3.4
Status Sertifikasi:		
Telah Tersertifikasi	443	43.9
Belum Tersertifikasi	567	56.1
Jenjang Pekerjaan:		
SD	759	75.1
SMP	251	24.9

Untuk partisipan yang dilibatkan dalam pengumpulan data kualitatif, dipilih 50 orang guru yang memberikan jawaban secara lebih komprehensif. Dengan kata lain, peneliti memilih partisipan untuk data kualitatif yang dipandang memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai kondisi guru, memiliki kepedulian lebih tinggi dan memiliki aspirasi yang lebih kuat untuk memperjuangkan perbaikan kondisi guru. Hal ini dapat dilihat dari para jawaban partisipan yang memberikan informasi secara lengkap dan memperlihatkan keseriusan, atau tidak berbicara secara singkat.

Pengumpulan Data

Baik data kuantitatif maupun data kualitatif dikumpulkan dengan cara menyebarkan survei melalui Google Form. Data kuantitatif dikumpulkan

melalui instrumen skala Likert. Peneliti menyajikan 12 pernyataan untuk dipilih oleh partisipan dengan pilihan 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Ragu), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju). Instrumen diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu kepada 60 partisipan. Hasil uji validitas memperlihatkan bahwa semua pernyataan termasuk pada kategori valid dan reliabel. Tabel 2 menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Item	Obs	Sign	item-test correlation	item-rest correlation	average interitem covariance	alpha
p1	60	+	0.5882	0.4657	.2803441	0.7212
p2	60	+	0.6382	0.5270	.2726194	0.7137
p3	60	+	0.4543	0.2897	.3002311	0.7446
p4	60	+	0.4376	0.2810	.304227	0.7446
p5	60	+	0.6683	0.5761	.2739034	0.7105
p6	60	+	0.3323	0.1556	.323282	0.7618
p7	60	+	0.6391	0.5174	.2683256	0.7137
p8	60	+	0.6418	0.5341	.2732049	0.7133
p9	60	+	0.4443	0.2905	.3032512	0.7432
p10	60	+	0.6532	0.5395	.2677093	0.7113
p11	60	+	0.4033	0.2608	.3117257	0.7454
p12	60	+	0.3101	0.2419	.3335028	0.7463
Test scale					.2926939	0.7483

Tabel 2 menunjukkan bahwa instrumen penelitian termasuk pada kategori valid karena nilai *item-test correlation* di atas nilai r_{tabel} (0,2542). Begitu juga dengan reliabilitas instrumen memperlihatkan bahwa instrumen termasuk reliabel karena nilai alpha adalah 0,7483. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel.

Sementara itu, data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pertanyaan terbuka. Kepada partisipan disajikan pertanyaan-pertanyaan agar mereka memberikan informasi berdasarkan pengalaman

dan perasaan mereka. Empat pertanyaan diberikan untuk menggali informasi mengenai proses menjadi PNS, proses naik pangkat/jabatan fungsional, kepuasan sebagai guru, dan rekomendasi para guru untuk kebijakan pendidikan.

Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan bantuan SPSS 26. Analisis deskriptif meliputi analisis frekuensi dan kros tabulasi untuk mengetahui kondisi respon dari setiap pernyataan yang diberikan kepada partisipan. Melalui 12 pernyataan yang disajikan, peneliti menganalisis kuantifikasi setiap butir pernyataan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh para guru. Sementara itu, untuk data kualitatif dianalisis dengan menggunakan bantuan Nvivo 12. Proses analisis data kualitatif meliputi pembuatan kategorisasi dan pengkodean, untuk selanjutnya dilakukan pembuatan tema sebagai bahan pembahasan.

Pembahasan

Temuan dan Pembahasan Kuantitatif

Sebanyak 12 butir pernyataan disajikan kepada guru-guru atau para partisipan terkait dengan karir dan profesionalisme mereka. Jawaban dari 1010 partisipan disajikan dari tabel 3 sampai tabel 26. Tabel dikategorisasikan ke dalam dua jenis analisis dari setiap butirnya, yaitu analisis frekuensi dan kros tabulasi.

1. Masa Tunggu Sertifikasi Guru

Butir 1 survei menyajikan pernyataan bahwa masa tunggu untuk memperoleh sertifikat pendidik (sertifikasi guru) terlalu lama. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Frekuensi Jawaban Masa Tunggu Sertifikasi Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	100	9.9	9.9	9.9
	Tidak Setuju	164	16.2	16.2	26.1
	Ragu	127	12.6	12.6	38.7
	Setuju	245	24.3	24.3	63.0
	Sangat Setuju	374	37.0	37.0	100.0
	Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 4. Kros Tabulasi Jawaban Masa Tunggu Sertifikasi Guru

			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
Status Kepegawaian	Honorir	Count	59	37	36	111	264	507
		% of Total	5.8%	3.7%	3.6%	11.0%	26.1%	50.2%
	PNS	Count	41	127	91	134	110	503
		% of Total	4.1%	12.6%	9.0%	13.3%	10.9%	49.8%
Total	Count	100	164	127	245	374	1010	
	% of Total	9.9%	16.2%	12.6%	24.3%	37.0%	100.0%	

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas guru (setuju 24,3% dan sangat setuju 37%) berpandangan bahwa masa tunggu untuk memperoleh sertifikat pendidik (sertifikasi guru) terlalu lama. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 4, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan setuju dan sangat setuju berasal dari kalangan guru honorir (11% dan 26,1%) dan guru PNS (13,3% dan 10,9%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa masa tunggu untuk sertifikasi perlu dilakukan akselerasi, agar para guru dapat lebih cepat menjadi guru profesional atau tersertifikasi.

2. Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Butir 2 survei menyajikan pernyataan bahwa guru sulit untuk naik pangkat/jabatan fungsional. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Frekuensi Kesulitan Naik Pangkat/Jabatan Fungsional

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	106	10.5	10.5	10.5
	Tidak Setuju	180	17.8	17.8	28.3
	Ragu	185	18.3	18.3	46.6
	Setuju	254	25.1	25.1	71.8
	Sangat Setuju	285	28.2	28.2	100.0
	Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 6. Kros Tabulasi Kesulitan Naik Pangkat/Jabatan Fungsional

			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
Status Kepegawaian	Honorer	Count	59	59	95	134	160	507
		% of Total	5.8%	5.8%	9.4%	13.3%	15.8%	50.2%
	PNS	Count	47	121	90	120	125	503
		% of Total	4.7%	12.0%	8.9%	11.9%	12.4%	49.8%
Total	Count	106	180	185	254	285	1010	
	% of Total	10.5%	17.8%	18.3%	25.1%	28.2%	100.0%	

Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas guru (setuju 25,1% dan sangat setuju 28,2%) berpandangan bahwa guru sulit untuk naik pangkat/jabatan fungsional. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 6, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan setuju dan sangat setuju berasal dari kalangan guru honorer (13,1% dan 15,8%) dan guru PNS (11,9% dan 12,4%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa proses untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional perlu dilakukan akselerasi yang disertai dengan kemudahan, agar para guru dapat lebih cepat naik pangkat atau jabatan sesuai dengan masa kerjanya.

3. Masa Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Butir 3 survei menyajikan pernyataan bahwa guru sekali naik pangkat/jabatan fungsional bisa lebih dari 10 tahun. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 7 dan 8.

Tabel 7. Frekuensi Masa Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	269	26.6	26.6
	Tidak Setuju	263	26.0	52.7
	Ragu	223	22.1	74.8
	Setuju	140	13.9	88.6
	Sangat Setuju	115	11.4	100.0
	Total	1010	100.0	100.0

Tabel 8. Kros Tabulasi Masa Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total	
Status Kepegawaian	Honorer	Count	120	98	126	85	78	507
		% of Total	11.9%	9.7%	12.5%	8.4%	7.7%	50.2%
	PNS	Count	149	165	97	55	37	503
		% of Total	14.8%	16.3%	9.6%	5.4%	3.7%	49.8%
Total	Count	269	263	223	140	115	1010	
	% of Total	26.6%	26.0%	22.1%	13.9%	11.4%	100.0%	

Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas guru (tidak setuju 26% dan sangat tidak setuju 26,6%) berpandangan bahwa guru sekali naik pangkat/jabatan fungsional tidak lebih dari 10 tahun. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 8, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju berasal dari kalangan guru honorer (9,7% dan 11,9%) dan guru PNS (16,3% dan 14,8%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa kenaikan pangkat guru pada umumnya tidak melebihi sepuluh tahun,

meskipun sebagian kecil terindikasi mengalami kenaikan pangkat atau jabatan lebih dari sepuluh tahun.

4. Keterampilan Guru

Butir 4 survei menyajikan pernyataan bahwa kendala untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional terdapat pada keterampilan guru. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 9 dan 10.

Tabel 9. Frekuensi Kendala Keterampilan Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	106	10.5	10.5	10.5
	Tidak Setuju	181	17.9	17.9	28.4
	Ragu	261	25.8	25.8	54.3
	Setuju	279	27.6	27.6	81.9
	Sangat Setuju	183	18.1	18.1	100.0
	Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 10. Kros Tabulasi Kendala Keterampilan Guru

			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
Status Kepegawaian	Honorer	Count	54	71	126	139	117	507
		% of Total	5.3%	7.0%	12.5%	13.8%	11.6%	50.2%
	PNS	Count	52	110	135	140	66	503
		% of Total	5.1%	10.9%	13.4%	13.9%	6.5%	49.8%
Total		Count	106	181	261	279	183	1010
		% of Total	10.5%	17.9%	25.8%	27.6%	18.1%	100.0%

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar guru (25,8%) meragukan bahwa kendala untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional terdapat pada keterampilan guru. Namun, sebagian besar lainnya (27,6%) menyetujui hal tersebut. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 10, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan ragu dan setuju berasal dari kalangan guru honorer (12,5% dan 13,8%) dan guru

PNS (13,4% dan 13,9%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa keterampilan guru bisa menjadi masalah guru saat mengajukan kenaikan pangkat, sekalipun sebagian guru juga meragukan hal tersebut.

5. Kesulitan Persyaratan Administratif

Butir 5 survei menyajikan pernyataan bahwa masalah untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional terdapat pada persyaratan administratif. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 11 dan 12.

Tabel 11. Frekuensi Kesulitan Persyaratan Administratif

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	42	4.2	4.2
	Tidak Setuju	97	9.6	13.8
	Ragu	193	19.1	32.9
	Setuju	392	38.8	71.7
	Sangat Setuju	286	28.3	100.0
	Total	1010	100.0	100.0

Tabel 12. Kros Tabulasi Kesulitan Persyaratan Administratif

		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total	
Status Kepegawaian	Honorer	Count	38	111	188	148	507	
		% of Total	2.2%	3.8%	11.0%	18.6%	14.7%	50.2%
	PNS	Count	20	59	82	204	138	503
		% of Total	2.0%	5.8%	8.1%	20.2%	13.7%	49.8%
Total	Count	42	97	193	392	286	1010	
	% of Total	4.2%	9.6%	19.1%	38.8%	28.3%	100.0%	

Tabel 11 menunjukkan bahwa mayoritas guru (setuju 38,8% dan sangat setuju 28,3%) berpandangan bahwa masalah untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional terdapat pada persyaratan administratif. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 12, dapat diketahui

bahwa guru-guru yang menyatakan setuju dan sangat setuju berasal dari kalangan guru honorer (18,6% dan 14,7%) dan guru PNS (20,2% dan 13,7%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa persyaratan administratif menjadi salah satu masalah bagi guru untuk menaikkan pangkat dan jabatan, sehingga diperlukan pengkajian ulang secara administratif agar para guru dapat lebih cepat naik pangkat dan jabatan.

6. Kekurangan Jam Mengajar

Butir 6 survei menyajikan pernyataan bahwa kesulitan guru dalam naik pangkat/jabatan fungsional karena kekurangan jam mengajar. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 13 dan 14.

Tabel 13. Frekuensi Kekurangan Jam Mengajar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	179	17.7	17.7	17.7
	Tidak Setuju	293	29.0	29.0	46.7
	Ragu	220	21.8	21.8	68.5
	Setuju	185	18.3	18.3	86.8
	Sangat Setuju	133	13.2	13.2	100.0
	Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 14. Kros Tabulasi Kekurangan Jam Mengajar

			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
Status Kepegawaian	Honorer	Count	68	99	122	120	98	507
		% of Total	6.7%	9.8%	12.1%	11.9%	9.7%	50.2%
	PNS	Count	111	194	98	65	35	503
		% of Total	11.0%	19.2%	9.7%	6.4%	3.5%	49.8%
Total		Count	179	293	220	185	133	1010
		% of Total	17.7%	29.0%	21.8%	18.3%	13.2%	100.0%

Tabel 13 menunjukkan bahwa sebagian besar guru (21,8%) meragukan bahwa kesulitan guru dalam naik pangkat/jabatan fungsional karena kekurangan jam mengajar. Bahkan, sebagian besar lainnya (29%) tidak menyetujui hal tersebut. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 14, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan ragu dan tidak setuju berasal dari kalangan guru honorer (12,1% dan 9,8%) dan guru PNS (9,7% dan 19,2%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa pemenuhan jam mengajar tidak terlalu menjadi masalah bagi guru untuk persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan.

7. Kekurangan Sertifikat Kegiatan

Butir 7 survei menyajikan pernyataan bahwa kesulitan guru dalam naik pangkat/jabatan fungsional karena kekurangan sertifikat kegiatan. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 15 dan 16.

Tabel 15. Frekuensi Kekurangan Sertifikat Kegiatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	104	10.3	10.3	10.3
	Tidak Setuju	204	20.2	20.2	30.5
	Ragu	258	25.5	25.5	56.0
	Setuju	283	28.0	28.0	84.1
	Sangat Setuju	161	15.9	15.9	100.0
	Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 16. Kros Tabulasi Kekurangan Sertifikat Kegiatan

Status Kepegawaian			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
		Count						
Honorer		Count	49	75	136	149	98	507
		% of Total	4.9%	7.4%	13.5%	14.8%	9.7%	50.2%
PNS		Count	55	129	122	134	63	503
		% of Total	5.4%	12.8%	12.1%	13.3%	6.2%	49.8%

	Count	104	204	258	283	161	1010
Total	% of Total	10.3%	20.2%	25.5%	28.0%	15.9%	100.0%

Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar guru (25,5%) meragukan bahwa kesulitan guru dalam naik pangkat/jabatan fungsional karena kekurangan sertifikat kegiatan. Namun, sebagian besar lainnya (28%) menyetujui hal tersebut. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 16, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan ragu dan tidak setuju berasal dari kalangan guru honorer (13,5% dan 14,8%) dan guru PNS (12,1% dan 13,3%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa pemenuhan sertifikat kegiatan menjadi salah satu masalah untuk kenaikan pangkat dan jabatan, meskipun sebagian lainnya meragukan hal tersebut.

8. Karya Tulis

Butir 8 survei menyajikan pernyataan bahwa kesulitan guru dalam naik pangkat/jabatan fungsional karena kekurangan karya tulis. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 17 dan 18.

Tabel 17. Frekuensi Kekurangan Karya Tulis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	78	7.7	7.7	7.7
	Tidak Setuju	151	15.0	15.0	22.7
	Ragu	208	20.6	20.6	43.3
	Setuju	345	34.2	34.2	77.4
	Sangat Setuju	228	22.6	22.6	100.0
	Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 18. Kros Tabulasi Frekuensi Kekurangan Karya Tulis

		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
Honorer	Count	45	74	117	157	114	507

Status Kepegawaian	PNS	% of Total	4.5%	7.3%	11.6%	15.5%	11.3%	50.2%
		Count	33	77	91	188	114	503
		% of Total	3.3%	7.6%	9.0%	18.6%	11.3%	49.8%
Total		Count	78	151	208	345	228	1010
		% of Total	7.7%	15.0%	20.6%	34.2%	22.6%	100.0%

Tabel 17 menunjukkan bahwa mayoritas guru (setuju 34,2% dan sangat setuju 22,6%) berpandangan bahwa kesulitan guru dalam naik pangkat/jabatan fungsional karena kekurangan karya tulis. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 18, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan setuju dan sangat setuju berasal dari kalangan guru honorer (15,5% dan 11,3%) dan guru PNS (18,6% dan 11,3%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa budaya literasi guru harus ditingkatkan agar masalah karya tulis dapat diselesaikan untuk pemenuhan kenaikan pangkat dan jabatan.

9. Kewajiban Menulis

Butir 9 survei menyajikan pernyataan, jika kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru mewajibkan memiliki karya tulis, maka seyogianya guru diberikan kewajiban untuk membuat karya tulis setiap tahunnya agar terbiasa menulis. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 19 dan 20.

Tabel 19. Frekuensi Kewajiban Menulis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	76	7.5	7.5	7.5
	Tidak Setuju	156	15.4	15.4	23.0
	Ragu	213	21.1	21.1	44.1
	Setuju	328	32.5	32.5	76.5
	Sangat Setuju	237	23.5	23.5	100.0
	Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 20. Kros Tabulasi Kewajiban Menulis

			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
Status Kepegawaian	Honorer	Count	45	61	109	159	133	507
		% of Total	4.5%	6.0%	10.8%	15.7%	13.2%	50.2%
	PNS	Count	31	95	104	169	104	503
		% of Total	3.1%	9.4%	10.3%	16.7%	10.3%	49.8%
Total	Count	76	156	213	328	237	1010	
	% of Total	7.5%	15.4%	21.1%	32.5%	23.5%	100.0%	

Tabel 19 menunjukkan bahwa mayoritas guru (setuju 32,5% dan sangat setuju 23,5%) berpandangan, jika kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru mewajibkan memiliki karya tulis, maka seyogianya guru diberikan kewajiban untuk membuat karya tulis setiap tahunnya agar terbiasa menulis. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 20, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan setuju dan sangat setuju berasal dari kalangan guru honorer (15,7% dan 13,2%) dan guru PNS (16,7% dan 10,3%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa budaya meneliti dan menulis perlu dijadikan sebagai kewajiban guru atau dharma guru setiap tahun agar relevan dengan persyaratan administratif untuk kenaikan pangkat dan jabatan.

10. Birokrasi Kenaikan Pangkat Guru

Butir 10 survei menyajikan pernyataan bahwa masalah guru dalam naik pangkat/jabatan fungsional karena birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 21 dan 22.

Tabel 21. Frekuensi Birokrasi Kenaikan Pangkat Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	63	6.2	6.2	6.2
	Tidak Setuju	156	15.4	15.4	21.7
	Ragu	251	24.9	24.9	46.5

Setuju	273	27.0	27.0	73.6
Sangat Setuju	267	26.4	26.4	100.0
Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 22. Kros Tabulasi Birokrasi Kenaikan Pangkat Guru

			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
Status Kepegawaian	Honorer	Count	29	61	145	137	135	507
		% of Total	2.9%	6.0%	14.4%	13.6%	13.4%	50.2%
	PNS	Count	34	95	106	136	132	503
		% of Total	3.4%	9.4%	10.5%	13.5%	13.1%	49.8%
Total		Count	63	156	251	273	267	1010
		% of Total	6.2%	15.4%	24.9%	27.0%	26.4%	100.0%

Tabel 21 menunjukkan bahwa mayoritas guru (setuju 27% dan sangat setuju 26,4%) berpandangan bahwa masalah guru dalam naik pangkat/jabatan fungsional karena birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 22, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan setuju dan sangat setuju berasal dari kalangan guru honorer (13,6% dan 13,4%) dan guru PNS (13,5% dan 13,1%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa jalur birokrasi kenaikan pangkat dan jabatan guru perlu dievaluasi, agar para guru memperoleh jalur yang efektif dan efisien.

11. Jenjang Kuliah Guru

Butir 11 survei menyajikan pernyataan bahwa jenjang kuliah guru menjadi faktor penentu peningkatan karir guru. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 23 dan 24.

Tabel 23. Frekuensi Jenjang Kuliah Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	56	5.5	5.5	5.5

Tidak Setuju	87	8.6	8.6	14.2
Ragu	184	18.2	18.2	32.4
Setuju	367	36.3	36.3	68.7
Sangat Setuju	316	31.3	31.3	100.0
Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 24. Kros Tabulasi Jenjang Kuliah Guru

			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	Total
Status Kepegawaian	Honorer	Count	28	35	88	162	194	507
		% of Total	2.8%	3.5%	8.7%	16.0%	19.2%	50.2%
	PNS	Count	28	52	96	205	122	503
		% of Total	2.8%	5.1%	9.5%	20.3%	12.1%	49.8%
Total	Count	56	87	184	367	316	1010	
	% of Total	5.5%	8.6%	18.2%	36.3%	31.3%	100.0%	

Tabel 23 menunjukkan bahwa mayoritas guru (setuju 36,3% dan sangat setuju 31,3%) berpandangan bahwa jenjang kuliah guru menjadi faktor penentu peningkatan karir guru. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 24, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan setuju dan sangat setuju berasal dari kalangan guru honorer (16% dan 19,2%) dan guru PNS (20,3% dan 12,1%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa guru memerlukan kemudahan untuk meningkatkan jenjang kuliah agar para guru dapat meningkatkan karirnya secara kontinyu.

12. Beasiswa untuk Guru

Butir 12 survei menyajikan pernyataan bahwa guru perlu difasilitasi untuk melanjutkan kuliah dengan bantuan beasiswa. Respon para guru dapat dilihat pada tabel 25 dan 26.

Tabel 25. Frekuensi Bantuan Beasiswa untuk Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	22	2.2	2.2	2.2
	Tidak Setuju	27	2.7	2.7	4.9
	Ragu	67	6.6	6.6	11.5
	Setuju	253	25.0	25.0	36.5
	Sangat Setuju	641	63.5	63.5	100.0
	Total	1010	100.0	100.0	

Tabel 26. Kros Tabulasi Bantuan Beasiswa untuk Guru

Status Kepegawaian		Sangat Tidak Setuju					Total
		Count	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	
Honorer	Count	16	14	45	120	312	507
	% of Total	1.6%	1.4%	4.5%	11.9%	30.9%	50.2%
PNS	Count	6	13	22	133	329	503
	% of Total	0.6%	1.3%	2.2%	13.2%	32.6%	49.8%
Total	Count	22	27	67	253	641	1010
	% of Total	2.2%	2.7%	6.6%	25.0%	63.5%	100.0%

Tabel 25 menunjukkan bahwa mayoritas guru (setuju 25% dan sangat setuju 63,5%) berpandangan bahwa guru perlu difasilitasi untuk melanjutkan kuliah dengan bantuan beasiswa. Ketika dikroscek melalui status kepegawaian pada tabel 26, dapat diketahui bahwa guru-guru yang menyatakan setuju dan sangat setuju berasal dari kalangan guru honorer (11,9% dan 30,9%) dan guru PNS (13,2% dan 32,6%). Melalui dua analisis frekuensi dan kros tabulasi, dapat diidentifikasi bahwa guru perlu difasilitasi dengan bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi.

Temuan dan Pembahasan Kualitatif

Tema 1: Rekrutmen CPNS/ASN PPPK Belum Berpihak pada Guru Honorer

Dalam proses rekrutmen CPNS/ASN PPPK guru ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai sekolah. Berikut ini dipaparkan temuan-temuan yang menjadi masalah bagi para guru honorer.

1. Masih ada para guru yang sudah berusia lanjut sekitar 50 tahunan masih belum menjadi CPNS/ASN PPPK guru, padahal sudah mengabdikan cukup lama, yakni puluhan tahun menjadi seorang guru.
2. Batas skor hasil ujian/Passing Grade (PG) yang harus dicapai oleh para peserta dalam seleksi CPNS/ASN PPPK guru terlalu tinggi khususnya untuk materi kompetensi teknis.
3. Tipe soal yang diberikan dalam seleksi CPNS/ASN PPPK guru adalah soal yang termasuk kategori HOTS. Materi soal yang diberikan juga banyak yang tidak sesuai dengan kisi-kisi materi dari SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Keberkelanjutan). Ditambah dengan durasi waktu yang disediakan terlalu cepat sehingga untuk menjawab satu soal saja, rata-rata harus dijawab maksimal dalam waktu satu menit per butir soal.
4. Adanya moratorium selama kurang lebih 10 tahun, tidak ada lagi perekrutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk formasi CPNS/ASN PPPK guru. Ketika sudah ada perekrutan kembali untuk penerimaan CPNS/ASN PPPK guru, kesempatan yang diberikan sangat terbatas dan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah. Akibatnya, pihak sekolah banyak mengangkat guru-guru honorer yang dibutuhkan sekolah dan perekrutan guru-guru honorer tersebut tidak ada regulasi atau pengawasan dari pihak dinas terkait sehingga terjadi perekrutan

guru honorer yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau tidak liner antara ijazah dengan bidang mata pelajaran yang diampu.

5. Terjadinya penumpukan guru honorer yang menunggu untuk direkrut menjadi CPNS/ASN PPPK guru dari berbagai sekolah.

Berikut beberapa pendapat yang diutarakan oleh para guru terkait dengan proses rekrutmen CPNS/ASN PPPK guru.

“Dengan bertambah usia guru honorer, sekalipun sudah di adakan lagi pendaftaran CPNS guru honorer, yang sudah tua tidak bisa ikut daftar tes CPNS guru karena terganjal usia yang sudah melampaui batas persyaratan. Jadi menurut saya itulah salah satu yang menjadi permasalahan guru honorer sampai sekarang belum diangkat menjadi PNS” (Partisipan).

“Seandainya penerimaan guru PNS dilihat berdasarkan masa kerja (pengalaman) dan usia, kemungkinan jumlah guru honorer disetiap masanya akan semakin berkurang, dan keadilan buat guru honorer terpenuhi” (Partisipan).

“Seharusnya, pemerintah ada pertimbangan, masa kerja yang sudah melebihi belasan tahun mengabdikan, jadi honorer di sekolah negeri dan usia yang 50 tahun lebih dijadikan bahan pertimbangan” (Partisipan).

Tema 2: Terhalang Administrasi Kenaikan Pangkat

Para guru mengalami kesulitan untuk mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatan. Berbagai persoalan yang dikeluhkan oleh para guru, dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Guru tidak begitu memahami POB/SOP terkait kenaikan pangkat, kapan naik pangkat, bagaimana cara proses naik pangkat, apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa naik pangkat, persyaratan administrasi yang belum siap, dan tidak terpenuhinya persyaratan naik pangkat.

2. Kurang maksimalnya sosialisasi dari pemerintah melalui dinas terkait prosedur kenaikan pangkat kepada para guru.
3. Para guru banyak yang belum mampu dalam membuat PTK atau karya tulis ilmiah hasil buatan karya sendiri yang merupakan salah satu syarat dalam kenaikan pangkat, sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan kepada para guru sampai karya tulisnya terbit dalam sebuah jurnal yang terakreditasi.
4. Kesulitan mengumpulkan bukti penunjang persyaratan kenaikan pangkat dan banyaknya persyaratan yang harus terpenuhi oleh para guru, seperti mengumpulkan sertifikat kegiatan dengan kegiatan yang benar-benar nyata dilaksanakan.
5. Proses layanan birokrasi yang diberikan oleh pihak dinas sangat lambat dan prosesnya menjadi berbelit-belit sehingga tidak efektif dan efisien.
6. Kurangnya kepedulian dari atasan terkait kenaikan pangkat para gurunya.
7. Pekerjaan administrasi guru terlalu banyak menyita waktu sehingga menghambat guru untuk berkarya.

Berikut beberapa pernyataan dari para guru terkait permasalahan kenaikan pangkat atau jabatan.

“Sepengetahuan saya, salah satu kesulitannya adalah dalam sistem administrasi yang kadang bertele-tele dan lama. Selain itu, sebaiknya ada bimbingan agar guru terbiasa membuat karya tulis ilmiah, sehingga guru tidak kesulitan ketika memenuhi syarat kenaikan pangkat/jabatan” (Partisipan).

“Guru kadang tidak tahu, kapan dan bagaimana caranya dirinya bisa naik pangkat. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa naik pangkat” (Partisipan).

“Pangkat guru bisa tertahan pada golongan ruang tertentu akibat tidak terpenuhinya persyaratan untuk naik pangkat setingkat di

atasnya. Ini akan berdampak pada menurunnya kinerja para guru” (Partisipan).

“Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Guru bisa naik pangkat minimal dua tahun sekali setelah memenuhi angka kredit jabatan guru yang dipersyaratkan. Guru yang memiliki dedikasi dan kreativitas yang tinggi akan mampu mencapai jenjang kepangkatan maksimal. Bahkan, bukan mustahil guru akan meraih jenjang kepangkatan IV/b atau IV/c menjelang masa pensiun” (Partisipan).

Tema 3: Kepuasan Sulit Dicapai

Para guru mengeluhkan bahwa dalam pekerjaan sebagai guru cukup sulit untuk dapat mencapai kepuasan. Hal ini disinyalir menjadi dampak dari kurangnya kebijakan pemerintah yang memerhatikan kesejahteraan seluruh lapisan guru. Apa yang menjadi permasalahan guru terkait kepuasan dalam bekerja dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Gaji guru honorer di Indonesia masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) atau UMK, ada yang hanya mendapatkan gaji Rp 150.000,- perbulan, itu pun dibayar pertiga bulan menunggu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dibayarkan. Gaji guru honorer tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, tingkat kebutuhan setiap tahun meningkat.
2. Belum banyak penghargaan dari pemerintah kepada para guru yang mempunyai prestasi.
3. Pembayaran tunjangan sertifikasi guru selalu terlambat pembayarannya dan dibayarkan selalu pertiga bulan. Padahal, info dari pusat dibayarkan persatu bulan di awal bulan, karena untuk kalangan profesi yang lain seperti tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan profesi yang lainnya juga dibayarkan perbulan.

4. Belum adanya pemberian fasilitas pendukung kepada para guru seperti laptop, tablet, modem, atau alat lainnya untuk meningkatkan kemampuan IT para guru dalam menambah wawasan dan keilmuan kekinian.
5. Belum adanya kebijakan untuk meningkatkan kemampuan para guru dengan adanya pemberian beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan magister dan doktor.
6. Belum adanya kegiatan rutin dalam pemberian pelatihan dan pendampingan kepada para guru terkait pembuatan karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh para guru sendiri.
7. Proses kenaikan pangkat masih dirasakan sulit dengan susah mendapatkan akses informasi, layanan birokrasi lambat, dan bahkan tidak didukung oleh atasan dalam proses perijinannya.
8. Tidak adanya kegiatan sosialisasi jemput bola dari pihak dinas terkait adanya notifikasi atau *information reminder* melalui sistem yang dikirim melalui email atau via sms kepada para guru bahwa para guru tersebut sudah boleh mengajukan naik pangkat.
9. Tidak adanya *help desk* atau bagian informasi yang membantu para guru dalam proses kenaikan pangkatnya.
10. Belum ada aturan dari pemerintah yang mewajibkan bahwa pembuatan karya tulis oleh para guru wajib dilakukan minimal satu tahun sekali, supaya para guru terbiasa dalam membuat karya tulis hasil karya sendiri, bukan pabrikan, terhindar dari plagiasi dan hasil karyanya bisa diakses secara terbuka.

Berikut beberapa pernyataan dari para guru terkait kepuasan para guru dalam menjalankan pekerjaannya sebagai guru.

“Masih banyak guru honorer yang mendapat upah hanya sekitar Rp. 150.000 hingga Rp. 300.000 perbulan dengan beban kerja yang sangat berat” (Partisipan).

“Harapannya sih pemerintah menaikkan kembali gaji guru minimal setahun sekali. Pertimbangannya karena kebutuhan hidup setiap tahunnya meningkat terus” (Partisipan).

“Berikan kesejahteraan yang bertujuan memberikan penguatan positif terhadap peningkatan kinerja pegawainya. Kesejahteraan guru menjadi faktor yang dominan mempengaruhi kinerja guru. Sementara permasalahan kesejahteraan guru hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Kita masih sering menjumpai guru yang bergaji jauh di bawah UMR” (Partisipan).

“Sebaiknya pemberian tunjangan sertifikasi guru diberikan perbulan disatukan dengan gaji yang diterima setiap bulannya, kalau diberikan per tiga bulan sekali, tidak menutup kemungkinan adanya penumpukan anggaran tunjangan tersebut di daerah. Padahal, dana sentralisasi itu sudah diberikan ke daerah, dalam hal ini ke setiap propinsi dan dari propinsi di distribusikan ke kabupaten, yang jadi masalah dari kabupaten/kotamadya sering lama mencairnya padahal dari pusat sudah ditransfer per anggaran per tahunnya” (Partisipan).

Pembahasan dari Temuan Data Kuantitatif dan Kualitatif

Beberapa poin penting yang cukup krusial untuk dibahas berdasarkan temuan-temuan dari hasil analisis survei adalah sebagai berikut. Pertama, permasalahan administratif menjadi kendala yang dihadapi oleh para guru untuk mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional. Analisis menunjukkan adanya ketidak merataan dalam pelayanan, perhatian, pendampingan, dan informasi kepada guru yang meliputi bagaimana cara menaikkan pangkat/jabatan, kapan saatnya menaikkan pangkat/jabatan, dan bagaimana dukungan pimpinan agar para guru segera mengusulkan dan mengurus kenaikan pangkat/jabatannya. Suplai informasi yang diterima oleh guru untuk kenaikan pangkat/jabatan juga perlu ditingkatkan, sehingga perlu dibangun sebuah sistem yang memudahkan para guru untuk

mendapatkan informasi awal untuk kenaikan pangkat/jabatan, dan informasi saat diproses kenaikan pangkat/jabatannya. Diperlukan sebuah sistem sebagaimana sudah terjadi pada kenaikan pangkat/jabatan dosen yang sudah menggunakan aplikasi Selancar PAK yang dapat diakses melalui smartphone dan juga memperoleh notifikasi untuk status proses kenaikan pangkat/jabatannya. Pemberian akses teknologi juga dapat meningkatkan guru untuk lebih melek teknologi (Julia et al. 2020; Dawson 2012).

Kedua, terjadi penumpukan guru yang tidak bisa naik pangkat/jabatan karena tidak sinkronnya antara aturan kenaikan pangkat/jabatan dengan kewajiban guru dalam hal pembuatan karya tulis. Menulis dinilai sebagai alat untuk pengembangan diri dan keprofesionalan (Rathert and Okan 2015). Guru tidak diwajibkan untuk membuat karya tulis dalam pekerjaannya, sementara itu, guru diwajibkan memiliki karya tulis untuk syarat kenaikan pangkat/jabatannya. Akibatnya, banyak terjadi pembuatan karya tulis dengan cara memesan/membeli kepada pihak-pihak tertentu karena guru tidak mampu menulis atau meneliti. Oleh sebab itu, perlu pembiasaan pada guru untuk menulis dan meneliti, karena prinsipnya bisa karena terbiasa, sehingga terbangun sikap inkuiri pada guru untuk selalu mengembangkan diri melalui proses meneliti dan menulis (Wong 2014; Teng 2016). Sebagai perbandingan, kalangan dosen yang memiliki kewajiban meneliti dan menulis masih banyak yang kesulitan untuk menulis dan publikasi di jurnal-jurnal terakreditasi atau bereputasi (Julianto 2019), apalagi guru yang tidak memiliki kewajiban untuk meneliti dan menulis. Maka, solusinya perlu diberlakukan kebijakan untuk guru agar wajib menulis dan meneliti minimal satu tahun sekali. Melalui kebijakan ini, maka dapat mengubah pula pola pekerjaan guru yang selama

ini dikenal terlalu disibukkan dengan pekerjaan administratif. Pekerjaan guru dapat berubah kepada hal-hal yang lebih produktif dan kontributif untuk diri sendiri dan institusinya.

Ketiga, kesejahteraan dan kepuasan guru baik guru ASN yang belum tersertifikasi maupun guru honorer perlu diperhatikan lebih tinggi. Sekolah tidak bisa dilepaskan dari guru honorer, namun keberadaan guru honorer belum mendapatkan perhatian yang layak. Di berbagai negara, kepuasan guru seringkali dikaitkan dengan nilai tes siswa (Smith and Holloway 2020). Namun, di Indonesia kepuasan perlu dimulai dari kesejahteraan, karena kesejahteraan dapat berdampak pula pada kualitas guru (Yontz and Wilson 2021). Apabila pemerintah tidak mampu mengangkat semua guru honorer menjadi ASN, maka perlu dibentuk sebuah kebijakan yang mampu menempatkan guru honorer kepada tempat yang lebih jelas dan bermartabat, dan memperoleh gaji atau tunjangan yang layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil mengajar. Apabila guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak melalui suatu kebijakan, maka guru honorer tidak perlu menunggu-nunggu untuk diangkat menjadi ASN yang diiringi dengan ketidakpastian, bahkan sampai akhir hayatnya.

Keempat, ruang kreativitas dan intelektualitas guru perlu diperluas. Tidak sedikit guru yang memiliki potensi untuk lebih maju dalam berkarya. Namun, kreativitas guru terisolir karena tugas administratif yang cenderung menumpuk, sehingga kesempatan untuk menimba ilmu baik melalui pendidikan formal ataupun pelatihan-pelatihan tidak teralokasikan dengan baik. Ditambah lagi kurangnya dukungan dari pimpinan dan pemerintah dalam bentuk perizinan untuk melanjutkan pendidikan dan penyediaan bantuan-bantuan beasiswa untuk perkuliahan, karena program beasiswa dapat meningkatkan kapasitas guru secara signifikan (Galosy

and Gillespie 2013; Hill, Corey, and Jacob 2018). Oleh karena itu, ruang kreativitas dan intelektualitas guru perlu diperluas agar guru lebih kreatif, produktif, dan reflektif untuk selalu meningkatkan kapasitas diri melalui berbagai pendidikan atau pelatihan. Guru perlu melakukan adaptasi untuk berkreasi sesuai dengan pengalamannya dalam mengajar (Jaggil, Muhamad Suhaimi, and Norazah Mohd 2021). Apalagi, setiap waktu jaman terus berubah dimana pengetahuan dan keterampilan guru juga perlu diupdate setiap saat agar tidak tertinggal dalam setiap perkembangannya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan karir guru terpusat pada empat masalah utama. Pertama, terletak pada informasi dan dukungan yang diberikan kepada para guru, baik dukungan dalam teknologi informasi maupun dukungan moril dari para pimpinan. Kedua, persyaratan administratif untuk mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan khususnya dalam melaksanakan penelitian dan membuat karya tulis. Ketiga, status kepegawaian guru yang memengaruhi tingkat kesejahteraan dan kepuasan sehingga menghambat guru untuk berkarir lebih cepat dan lebih tinggi. Keempat, ruang kreativitas dan intelektualitas yang masih terkungkung oleh pekerjaan administratif. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu: bangun sebuah sistem untuk pengusulan kenaikan pangkat/jabatan guru seperti Selancar PAK, buat kebijakan bagi guru untuk menjadi guru peneliti sehingga guru terbiasa menulis, buat kebijakan untuk menetapkan guru honorer sebagai guru yang juga diberikan gaji bulanan atau tunjangan yang layak, dan redesain jam kerja guru agar memiliki waktu untuk berkarya.

Daftar Pustaka

- Al Rasyid, Harun. "Fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Pengembangan Keprofesionalan Guru Sekolah Dasar." *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan* 24, no.2 (2017): 143-150.
- Chesnut, Steven R. "On the measurement of preservice teacher commitment: Examining the relationship between four operational definitions and self-efficacy beliefs." *Teaching and Teacher Education* 68, no.11 (2017): 170-180.
- Corbin, Juliet, and Anselm Strauss. *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Sage publications, 2014). Reprint.
- Creswell, John W. *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative*. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ, 2002). Reprint.
- Dawson, Kara. "Using action research projects to examine teacher technology integration practices." *Journal of Digital Learning in Teacher Education* 28, no.3 (2012): 117-123.
- Dewi, Asnita Putri, and Rusdinal Rusdinal. "Perkembangan Karir Guru." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 5, no.1 (2020): 8-13.
- Firestone, William A. "Redesigning teacher salary systems for educational reform." *American Educational Research Journal* 31, no.3 (1994): 549-574.
- Galosy, Jodie A., and Nicole M. Gillespie. "Community, Inquiry, Leadership: Exploring Early Career Opportunities That Support STEM Teacher Growth and Sustainability." *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas* 86, no.6 (2013): 207-215. <https://doi.org/10.1080/00098655.2013.826485>.
- Garcia, Cynthia Martinez, John R Slate, and Carmen Tejada Delgado. "Salary and Ranking and Teacher Turnover: A Statewide Study." *International Journal of Education Policy and Leadership* 4, no.7 (2009): 1-8.

- Hesse-Biber, Sharlene. "The problems and prospects in the teaching of mixed methods research." *International Journal of social research Methodology* 18, no.5 (2015): 463-477.
- Hill, Heather, Douglas Lyman Corey, and Robin T Jacob. "Dividing by zero: Exploring null results in a mathematics professional development program." *Teachers College Record* 120, no.6 (2018): 1-42.
- Jaggil, Apak, Taat Muhamad Suhaimi, and Suki Norazah Mohd. "Measuring Teacher Creativity-Nurturing Behavior and Readiness for 21st Century Classroom Management." *International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE)* 17, no.3 (2021): 52-67.
<https://doi.org/10.4018/IJICTE.20210701.oa4>.
- Johnson, R Burke, Anthony J Onwuegbuzie, and Lisa A Turner. "Toward a definition of mixed methods research." *Journal of mixed methods research* 1, no.2 (2007): 112-133.
- Julia, J, Herman Subarjah, M Maulana, Atep Sujana, I Isrokatun, Dadan Nugraha, and Dewi Rachmatin. "Readiness and Competence of New Teachers for Career as Professional Teachers in Primary Schools." *European Journal of Educational Research* 9, no.2 (2020): 655-673.
- Julianto, Very. "Faktor-Faktor Penghambat Meningkatnya Kemampuan Publikasi di Program Studi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Jurnal Psikologi Integratif* 6, no.2 (2019): 131-140.
- Maani, John S, and Justine Otaala. "Teacher Professionalism in Uganda: An Outcome of a Myriad of Factors." *CICE Series*, no.6 (2019): 211-222.
- Rathert, Stefan, and Zühal Okan. "Writing for publication as a tool in teacher development." *ELT Journal* 69, no.4 (2015): 363-372.
<https://doi.org/10.1093/elt/ccv029>.
- Seknun, M Yusuf. "Kedudukan Guru Sebagai Pendidik." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 15, no.1 (2018): 120-131.

- Smith, William C, and Jessica Holloway. "School testing culture and teacher satisfaction." *Educational Assessment, Evaluation and Accountability* 32, no.4 (2020): 461-479.
- Tang, Yipeng, Wenjie He, Laura Liu, and Qiong Li. "Beyond the paycheck: Chinese rural teacher well-being and the impact of professional learning and local community engagement." *Teachers and Teaching* 24, no.7 (2018): 825-839.
- Tavakoli, Mansoor, and Somayeh Baniasad-Azad. "Teachers' conceptions of effective teaching and their teaching practices: a mixed-method approach." *Teachers and Teaching* 23, no.6 (2017): 674-688.
- Teng, Lin Sophie. "Changes in teachers' beliefs after a professional development project for teaching writing: two Chinese cases." *Journal of Education for tEaching* 42, no.1 (2016): 106-109.
- Wong, Jocelyn L. N. "How does writing for publication help professional development of teachers? A case study in China." *Journal of Education for Teaching* 40, no.1 (2014): 78-93.
<https://doi.org/10.1080/02607476.2013.864019>.
- Xuehui, An. "Teacher salaries and the shortage of high-quality teachers in China's rural primary and secondary schools." *Chinese Education & Society* 51, no.2 (2018): 103-116.
- Yontz, Brian D, and Rachel E Wilson. "Teacher Salary Differentials and Student Performance: Are They Connected?" *Journal of Educational Issues* 7, no.1 (2021): 168-183.
- Yu, Shulin, Lianjiang Jiang, and Wan Soi Kei. "Early career English teachers' professional commitment change: a Macau study." *Asia-Pacific Journal of Teacher Education* 49, no.3 (2021): 319-333.

Kepemimpinan Abad-21: Kepiawaian Menerapkan *E-Leadership* di Era 4.0.

Oleh:

Aan Komariah

Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan
Indonesia, aan_komariah@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021

Reviewed : 18 November 2021

Accepted : 8 December 2021

Published : 15 December 2021

Abstrak

Kepemimpinan abad 21 adalah pemimpin dan pengikut yang beradaptasi dengan situasi baru yang menjadikan teknologi informasi sebagai kekuatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Penelitian ini mengkaji kepemimpinan abad 21 sebagai e-leadership dengan karakteristik terbuka dengan perubahan, berinteraksi intensif melalui teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan pelibatan pengikut dengan prinsip empatik guna meningkatkan kinerja dan daya saing. Penelitian ini merupakan langkah awal metode penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada para pemimpin di Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan abad 21 adalah pemimpin yang menerapkan dengan ekspresi impresif empatik dalam pemberdayaan/pelibatan personal. Kesimpulan dari penelitian awal ini adalah kepemimpinan abad 21 adalah pemimpin yang piawai menerapkan e-leadership dengan perilaku otentik dan transformatif.

Kata Kunci: *e-leadership, kepemimpinan authentic, Kepemimpinan abad 21, kepemimpinan transformative.*

Pendahuluan

Berada dalam era baru dan pernah merasakan abad sebelumnya, merupakan suatu keberuntungan sekaligus tantangan yang lebih memerlukan adaptasi dengan usaha yang tidak gampang. Abad 21

merupakan era keterbukaan yang dipengaruhi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Era ini sangat dominan dalam pemanfaatan teknologi dan menimbulkan persaingan global yang ketat dalam perjuangan memenangkan kehidupan. Globalisasi terjadi pada berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali bidang pendidikan. Hal ini menuntut intelektual pendidikan memiliki banyak kreatifitas untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Pendidikan saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat sehingga bidang ini menjadi paling esensial dalam menetapkan arah dan tujuan pendidikan. Arah dan tujuan kebijakan pendidikan menjadi haluan bagi implementasi pendidikan yang sesuai dengan kepribadian bangsa sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi penanda utama abad 21 yang jauh berbeda dengan abad sebelumnya. Suatu realitas yang menuntut setiap insan memiliki kompetensi yang dibutuhkan guna menghadapi berbagai perubahan di era globalisasi. Sumber daya manusia professional yang tidak saja memiliki kemampuan tetapi juga dapat beradaptasi secara lebih efektif dan empatik dalam mengatasi berbagai

tantangan yang sedang dan akan terjadi. Tantangan bidang pendidikan abad 21 ialah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dengan mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen tanpa mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki bangsa kita (Kadarisman, 2012).

Bidang pendidikan selain menerima keuntungan dari perkembangan teknologi abad 21, juga yang paling bekerja keras membangun benteng pertahanan untuk mencegah dampak negatif dari derasnya arus informasi abad 21. Bidang pendidikan mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berbagai kompleksitas permasalahan yang terjadi di abad 21 sebagai megatren social yang menjadi bagian perhatian pendidikan dalam menyusun kebijakan pendidikan. Heike Brugger, Wolfgang Eichhammer, Nadezhda Mikova, Ewa Dönitz (2021) mengelompokkan empat tren kehidupan era 21, yaitu: 1) digitalisasi ekonomi dan kehidupan pribadi; 2) model sosial dan ekonomi baru, termasuk ekonomi berbagi dan prosumaging (kombinasi dari produksi, konsumsi dan manajemen energi); 3) transformasi industri, termasuk dekarbonisasi proses industri dan ekonomi melingkar; dan 4) perubahan kualitas hidup, termasuk dampak kesehatan, urbanisasi dan regionalisasi.

Hal senada diungkapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (2010) menjelaskan beberapa karakteristik abad 21 yaitu: 1) perhatian yang semakin besar terhadap masalah lingkungan hidup, 2) dunia kehidupan akan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi, 3) ilmu pengetahuan akan semakin converging, 4) kebangkitan pusat ekonomi dibelahan Asia Timur dan Tenggara, 5) perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia kearah ekonomi berbasis pengetahuan, 6) perhatian yang semakin besar pada industri kreatif

dan industri budaya, 7) budaya akan saling imbas mengimbas dengan tekno-sains, 8) perubahan paradigma universitas, dari “Menara Gading” ke “Mesin Penggerak Ekonomi”.

Sistem pendidikan harus dapat menjawab tantangan ditengah tuntutan masyarakat dan tingginya penggunaan teknologi yang sangat pesat. *Artificial Intelligence* diklaim sebagai disrupsi teknologi yang mengubah cara kerja orang selama abad 21 (Ahmad, M. F., & Wan Abdul Ghapar, W. R. G., 2019). Kemajuan teknologi yang sangat dahsyat yang dikenal sebagai disrupsi menyebabkan sebagian besar tenaga manusia digantikan oleh mesin, sementara manusia akan lebih banyak bergelut dengan tugas-tugas yang bersifat kreatifitas intelektual.

Mengiringi disrupsi teknologi adalah terjadinya informasi yang bebas tak tersaring yang mengancam nilai-nilai, harkat dan martabat manusia yang menjadi concern bidang pendidikan. Mengutip dari Jack Ma dalam pertemuan tahunan *World Economic Forum* 2018 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar-mengajar, 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Zhou dkk (2015), menyebutkan lima tantangan besar yang akan dihadapi yaitu aspek pengetahuan, teknologi, ekonomi, social, dan politik. Ini menjadi tantangan nyata dunia pendidikan yang secara operasional berpengaruh terhadap cara-cara pengelolaan pendidikan.

Pada abad 21 proses terobosan pemikiran (*breakthrough thinking process*) dimulai dari pemimpin pendidikannya. Chowdhury: 2005 menyatakan bahwa organisasi pada abad 21 akan tergantung pada 3 pilar utama yaitu 1) kepemimpinan, 2) proses, dan 3) organisasi. Kepemimpinan merupakan pilar utama organisasi pendidikan beradaptasi

dengan perkembangan zaman. *E-leadership* merupakan tuntutan kepemimpinan abad 21 dimana para pemimpin melaksanakan praktik kepemimpinan dengan mempertimbangkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi, media dan informasi, keterampilan memimpin pembelajaran dan inovasi serta keterampilan hidup dan karir.

Kepemimpinan yang responsive dengan situasi baru, mampu berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan dalam pengembangan organisasi dan staff serta memanfaatkan teknologi untuk memudahkan mencapai tujuan adalah paradigma baru yang diharapkan muncul di era disrupsi inovasi ini. Implementasinya ada pada para pemimpin yang berkomitmen untuk menerapkan *e-leadership* (Roman et al (2019).

E-Leadership adalah tentang memadukan teknologi dan komunikasi tradisional seperti halnya menggunakan lebih banyak komunikasi yang dimediasi teknologi informasi dan komunikasi (Eraslan Yalcin, M., & Kutlu, B. (2019). Pemimpin yang mengarahkan orang-orang dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. *E-leadership* menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan, menemukan model baru cara-cara mengarahkan dan menginspirasi dari jauh melalui komunikasi dengan personil lain melalui media elektronik.

Praktek *e-leadership* tidak hanya sebatas melayani dari jauh untuk melakukan tugas memimpin dalam merumuskan visi, membuat keputusan strategis, serta mengarahkan semua sumber daya untuk mewujudkan visi, tetapi lebih jauh dari itu adalah membangun komitmen bersama untuk tetap bersemangat dalam situasi krisis untuk saling membangun dan memberdayakan dengan kepercayaan satu sama lain tanpa kehadiran secara fisik.

Makalah ini merupakan bagian dari penelitian e-leadership yang dapat diterapkan secara efektif pada situasi krisis. Makalah ini merupakan tahap penelitian awal dengan terdeskripsikannya secara teoritik berdasarkan kajian literatur tentang e-leadership.

Kepemimpinan Abad 21

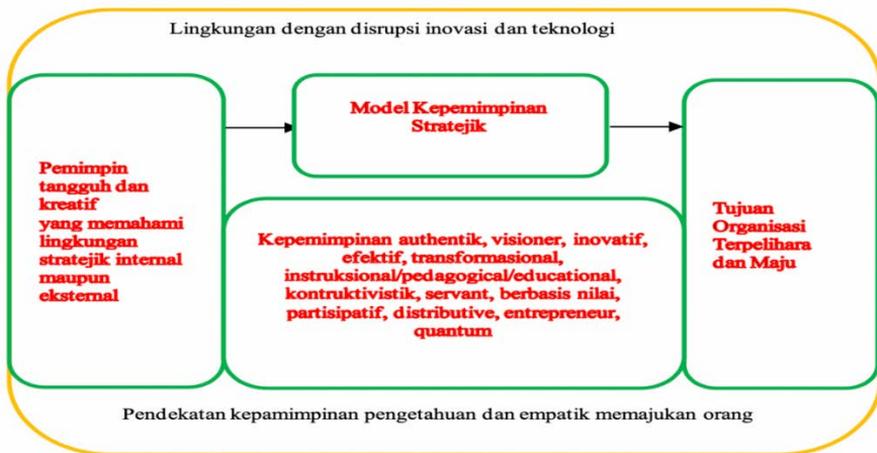
Pada abad ke 21 ini, kepemimpinan menegaskan arti pemimpin sebagai orang yang memberi pengaruh pada pengikut untuk mencapai tujuan organisasi dengan jalan komunikasi yang empatik dan dengan mempertimbangkan lingkungan secara cermat (Komariah, A., Kurniady, DA., 2021). Kepemimpinan abad 21 adalah pemimpin yang memiliki adaptasi terhadap setiap tantangan dan keterampilan abad 21 yaitu tantangan serba digital yang perlu dibekali dengan keterampilan komunikasi, kolaborasi, *critical thinking*, kreativitas dan *artificial intelegence* yang dapat mendorong dan memotivasi setiap bawahannya untuk melakukan perubahan. Peningkatan keunggulan bersaing dilakukan dengan tawaran nilai yang lebih atas kinerja perguruan tinggi sebagai indicator kinerja tambahan yang paling menguntungkan, dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.

Tantangan kepemimpinan abad 21 berkaitan dengan *knowledge worker*, yang memerlukan paradigma kepemimpinan baru, strategi baru, pemimpin perubahan, tantangan informasi, produktivitas pegawai berbasis pengetahuan, dan kemampuan mengelola diri sendiri (Drucker, 1999). Berangkat dari pemikiran ini, maka karakteristik kepemimpinan abad 21 memunculkan suatu sosok kepemimpinan yang adaptif dengan perubahan, menguasai *human relation*, *aware* dengan kemajuan pengikut dan fokus dengan tujuan melalui kinerja inovatif. Ciri kepemimpinan abad-21 menunjukkan adanya: 1) Adaptasi dengan perubahan, 2) kepedulian pada

para pengikut, 3) memiliki *power* kepemimpinan juga kemampuan manajerial, 4) memiliki jiwa *entrepreneur, corporative*, integritas, dan *developer*, 5) tidak pernah berhenti belajar, 6) selalu bekerja, menemukan dan melakukan inovasi, 7) memiliki “*think-tank*” sebagai tim yang diandalkan, dan 8) melakukan kolaborasi. Di masa krisis, Alma Harris (2020) menunjukkan praktik kepemimpinan abad 21, yaitu: 1) peduli (*caring*), 2) *teamwork*, bekerja untuk menanamkan kepercayaan (*Work on fostering trust*), 4) kepemimpinan kreatif dan menggunakan platform digital (*Creative leadership and learning using digital platform*), 5) tangguh dan memiliki daya tahan yang kuat (Resilience), 6) menciptakan masyarakat pembelajar (*A learning community and learning country*).

Kepemimpinan abad 21 adalah kepemimpinan kualitas dan kepemimpinan virtual yang memiliki keunggulan *competitive*. Kepemimpinan kualitas dapat ditelusuri dari berbagai jenis kepemimpinan yaitu kepemimpinan autentik, visioner, transformatif, instruksional, konstruktivistik, berbasis nilai, pelayanan, partisipatif, distributive, efektif. Sedangkan kepemimpinan virtual adalah pemimpin yang aware dengan teknologi sehingga berbasis teknologi yaitu e-leadership. Abad ke-21 dengan ciri utamanya informasi, komunikasi, otomasi dan komputasi melahirkan kepemimpinan virtual yang didesak terutama oleh otomasi dan komputasi. Kepemimpinan kompetitif adalah pemimpin unggul yang memiliki inovasi dan kreatifitas serta mampu bersaing dengan pemimpin lain. Pemimpin kompetitif adalah pemimpin yang percaya diri, antusias dan kompeten dalam pergaulan kepemimpinannya.

Jika divisualisasikan, terlihat konfigurasi dari kepemimpinan abad 21 seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Model Kepemimpinan Abad 21
 Sumber: Aan Komariah, Dedy Achmad Kurniady (2021)

Paradigma kepemimpinan abad 21 menekankan pada kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mengembangkan orang-orang untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), kemampuan mencipta dan membaharui (*Creativity and Innovation Skills*), kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*), kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*), dan kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak.

E-Leadership

Beberapa istilah yang merujuk pada *e-leadership* yaitu *e-Leadership* (kepemimpinan elektronik), kepemimpinan virtual (*virtual leadership*),

kepemimpinan dari jauh (*remote leadership*), *tele-leadership*, memimpin dari jarak jauh (*leading remotely*), memimpin melalui telekomunikasi (*leading via telecommunications*), memimpin melalui teknologi informasi dan komunikasi (*leading via ICT*), memimpin organisasi virtual (*leading virtual organizations*), memimpin tim virtual (*leading virtual teams*), dan tenaga kerja virtual terkemuka (*leading virtual workforce*).

E-leadership pertama kali dimunculkan oleh Avolio, Kahai, dan Dodge (2000), yaitu proses pengaruh sosial yang dimediasi oleh AIT (*Advanced Information Technology*/teknologi informasi canggih) untuk menghasilkan perubahan dalam sikap, perasaan, pemikiran, perilaku, dan/atau kinerja dengan individu, kelompok, dan/atau organisasi. *E-leadership* didefinisikan sebagai pengaruh proses sosial yang dimediasi oleh teknologi informasi untuk menghasilkan perubahan sikap, perasaan, pemikiran, perilaku, dan/atau penampilan individu, kelompok, dan/atau organisasi (Garcia, 2010).

E-leadership dapat dipraktikkan pada semua level dari menteri ke para dirjen, dari kepala dinas ke para kepala sekolah, dari kepala sekolah pada guru-guru dan orang tua, dari guru-guru ke para siswa. *E-leadership* dapat melibatkan interaksi satu-ke-satu (*one to one*) dan satu-ke-banyak (*one to many*) di dalam dan di seluruh unit maupun organisasi besar atau lingkup luas. *E-leadership* bukan tentang menghubungkan teknologi, tetapi tentang menghubungkan orang-orang dengan cara terbaik.

E-leadership adalah konsep yang baru dibangun, menekankan pada kemampuan pemimpin untuk mengatasi paradoks, dilema, kompleksitas perilaku dalam berkomunikasi dengan anggota tim dan membangun iklim sosial yang sesuai dan untuk dapat menyampaikan keterampilan interpersonal yang patut dicontoh melalui teknologi (Gurr, 2004). *E-*

leadership adalah kepemimpinan dalam lingkungan yang dimediasi teknologi. Menerapkan e-leadership adalah bagaimana membuat individu bekerja secara kolektif untuk menciptakan budaya yang memungkinkan semua suara kepemimpinan didengar oleh para pengikut dengan batasan teknologi yang memisahkan sekaligus menyatukan. Memisahkan karena interaksi tidak bisa terlihat penuh dan utuh tetapi diwakili gestural dari jauh dan dibatasi layer atau gadget. Menyatukan karena yang jauh menjadi dekat dan yang sulit dijangkau menjadi mudah karena teknologi. E-leadership mengelola dan mengeliminir jarak antara pemimpin dan yang dipimpin baik jarak fisik maupun jarak social.

Kriteria penerapan e-leadership agar dapat dipraktikkan secara utuh, Garcia (2010) mencatat empat kriteria yang dibutuhkan e-leadership, yaitu: 1) pengetahuan yang luas tentang mata pelajaran terkait pendidikan jarak jauh, 2) pengalaman dalam mengelola pendidikan jarak jauh, 3) mampu bernegosiasi dan mengkomunikasikan proses pengelolaan pembelajaran jarak jauh, dan 4) visi luas pendidikan jarak jauh. Sementara itu Ulrich (1998) lebih menjelaskan secara lebih spesifik dalam interaksi pemimpin dan yang dipimpin dengan menggunakan teknologi yaitu: 1) menjadi rekan yang stratejik, 2) menjadi seorang pakar, 3) menjadi seorang pekerja ulung, dan 4) menjadi seorang “agent of change”.

Garcia (2010) mengembangkan strategi e-leadership untuk meningkatkan pekerjaan, kehidupan, dan survive dalam kehidupan organisasi. Strategi yang dimaksud adalah: 1) kembangkan E-karisma, 2) kembangkan keahlian E-trust yang mencakup empati dan pemberdayaan, 3) kembangkan e-budaya dan keterampilan e-komunikasi, 4) kembangkan keterampilan membuat keputusan elektronik dan kembangkan e-

extraordinare, 5) gunakan keterampilan e-motivasi, dan 6) manfaatkan e-visioning dalam organisasi dan kelola e-team secara efektif. Visualisasi untuk strategi ini terlihat pada gambar 2.

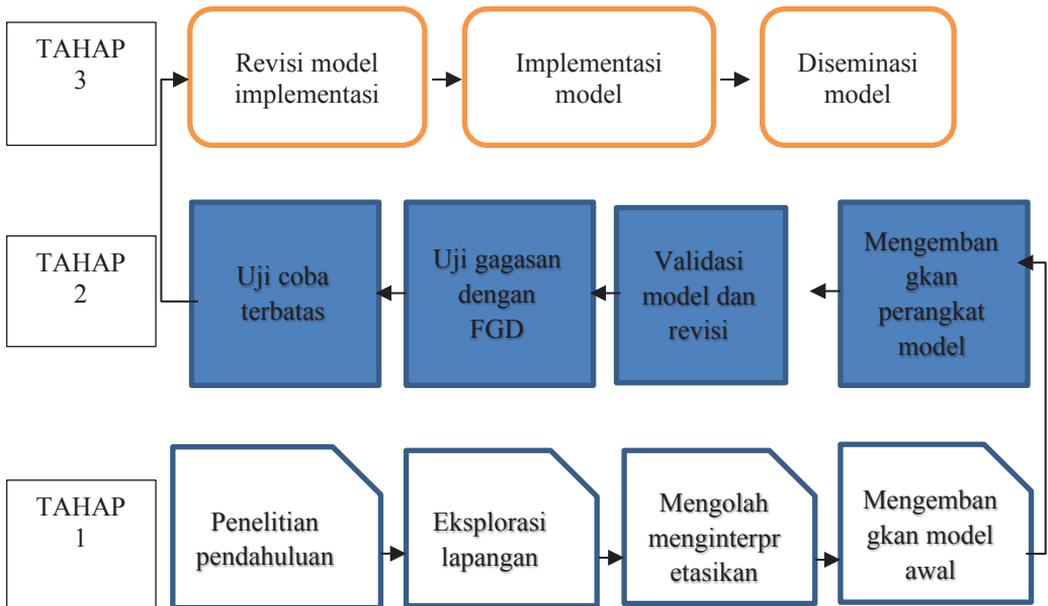


Gambar 2: Strategi *E-Leadership* untuk memperbaiki dan meningkatkan Pekerjaan, Kehidupan, dan Organisasi.
Sumber: Garcia (2010)

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model e-leadership abad 21 untuk meningkatkan daya saing pendidikan. Secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan adalah penelitian pendahuluan, perumusan model awal, validasi expert revisi model, uji coba skala kecil, revisi model, uji coba skala besar, perumusan model akhir, evaluasi, dan

desiminasi. Langkah-langkah kegiatan penelitian tersebut, secara garis besar dapat dipaparkan sebagaimana tervisualisasikan dalam gambar 3



Gambar 1. Alur Penelitian

Kerangka umum alur penelitian pengembangan dapat dipaparkan dalam tiga tahapan, yaitu tahap penelitian awal, tahap pengembangan model, dan tahap pengujian model. Terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam penelitian awal, yaitu: (1) penelitian pendahuluan dengan menelaah hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang sedang berkembang; (2) melakukan eksplorasi lapangan tentang praktik kepemimpinan di universitas dan sekolah; (3) melakukan pengumpulan data lapangan, dan mengolah serta menginterpretasi data; (4) mengembangkan model awal. Penelitian awal dilakukan di Sekolah Pascasarjana UPI dengan jumlah sampel 27 orang, terdiri atas 24 Kaprodi, seorang direktur, dan dua orang wakil direktur. Berdasarkan hasil penelitian awal, selanjutnya dilakukan

penelitian untuk menghasilkan model e-leadership abad 21 untuk peningkatan daya saing pendidikan.

Penelitian tahap satu menghasilkan model awal e-leadership abad 21 dalam peningkatan daya saing, kemudian dilanjutkan dengan penelitian tahap dua yang ditempuh melalui Langkah-langkah: 1) mengembangkan perangkat model e-leadership abad 21 dalam peningkatan daya saing, 2) memvalidasi dan merevisi model (Validasi model dilakukan dengan mengadakan uji ahli melalui teknik Delphi), 3) melakukan uji gagasan komprehensif melalui FGD, dan 4) melakukan uji coba terbatas sebagai upaya pengujian model secara empirik di lapangan melalui eksperimen pada Departemen Administrasi Pendidikan dan Prodi S2 S3 Administrasi Pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan abad 21

Kepemimpinan abad 21 adalah kepemimpinan authentic yang transformatif dengan ciri hebat. Kata kunci yang muncul dari pernyataan tersebut adalah kepemimpinan autentik, kepemimpinan transformative, dan hebat. Meskipun pernyataan tersebut memiliki arti secara holistic, tetapi masing-masing kata kunci juga memiliki makna tersendiri. Untuk hebat, maknanya berasal dari gabungan dari masing-masing huruf yaitu: **H** (*Heartily*), **E** (*Emphaty*), **B** (*Brave*), **A** (*Active*), **T** (*Teacher*).

Kepemimpinan Autentik mengembangkan tujuh dimensi kepemimpinan Autentik, yaitu 1) Berorientasi pada visi dan tujuan (*purpose*), 2) kesadaran diri sebagai pemimpin abad 21 (*self awareness*), 3) disiplin diri yang tinggi (*self discipline*), 4) Berbasis Nilai moral dan etika (*Value/Moral/Ethic*), 5) Pengolahan yg seimbang dan adil (*Balancing*

Processing), 6) Transparansi Hubungan (*Tranparency/Relationship*), dan 7) Membangun jejaring (*networking*). Berorientasi pada tujuan dan *Self Awareness* adalah dimensi yang paling diharapkan muncul dalam diri pemimpin abad 21 sedangkan *Tranparency/Relationship* masih perlu ditingkatkan dalam hal mendengar, menginterpretasikan, dan mengolah informasi negatif dan positif secara objektif sebelum keputusan.

Hasil studi menunjukkan bahwa dari dimensi-dimensi yang menjadi ciri khas kepemimpinan autentik, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah berorientasi pada visi dan tujuan serta kesadaran diri untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang dirujuk menjadi kinerja nyata. Kesadaran diri pemimpin untuk membuat berhasil para pengikutnya, merupakan ciri dari pemimpin autentik. Untuk keberhasilan para pengikutnya, pemimpin autentik menunjukkan karakteristik intinya berupa percaya diri, penuh harapan, optimisme, dan ulet dalam bekerja yang akan mempengaruhi sikap kerja pengikut dan selanjutnya memengaruhi perilaku untuk tercapainya kinerja yang tinggi. Dengan demikian, pemimpin autentik melalui kesadaran dirinya yang ditunjukkan dengan disiplin kerjanya dapat memengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja pengikut. Perilaku pimpinan yang menunjukkan orientasi pada tujuan dan kesadaran diri akan berdampak pada a) munculnya kepercayaan diri guru, b) harapan untuk meningkatkan produktivitas kerja, c) optimisme dalam mencapai tujuan yang direncanakan, dan d) ketekunan dalam melaksanakan tugas-tugas profesional para pengikut.

Kepemimpinan Transformasional menstimulasi pengikut untuk bergerak menjalankan misi organisasi secara produktif dengan cara pemimpin transformasional mengartikulasikan visi menjadi aksi, program menjadi kegiatan yang berarti, dan impian menjadi kenyataan. Para

pemimpin buka seorang yang berwacana, pasif dan kaku, tetapi memiliki pemimpin yang memiliki kapasitas self-discipline untuk mengartikulasikan visi menjadi kegiatan yang realistic. Praktiknya dibarengi dengan pelibatan penuh dari para pengikut karena tujuan utamanya adalah bersama pengikut mewujudkan tujuan organisasi lebih efektif. Menstimulasi bawahan dengan cara yang intelek, dan menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bawahannya.

Pemimpin transformatif adalah pemimpin yang mampu merubah perilaku pengikut menjadi lebih positif, mengubah performa iklim organisasi dari komunikasi yang kaku menjadi cair, dari performa biasa menjadi excellent. Seorang pemimpin transformasional adalah pembelajar dan pengajar yang empatik. Dia adalah seseorang yang kharismatik yang mampu “menyihir” bawahan untuk bereaksi mengikuti pimpinan. Seorang pemimpin kharismatik dapat dikenali dari perilakunya yang menunjukkan pemahaman dan memelihara visi dan misi organisasi, mempunyai pendirian yang kukuh, komitmen dan konsisten terhadap setiap keputusan yang telah diambil, dan menghargai bawahan sehingga ia menjadi *role model* yang dikagumi, dihargai, dan diikuti oleh bawahannya.

Sebagai seorang yang transformatif, pemimpin adalah seorang motivator yang bersemangat untuk terus membangkitkan antusiasme dan optimisme pengikut. Pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan dan dapat mendemonstrasikan komitmennya. Upaya menunjukkan komitmen untuk perubahan dilakukan dengan mempraktekkan inovasi-inovasi. Sikap dan perilaku kepemimpinannya didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara

intelektual ia mampu menerjemahkannya dalam bentuk kinerja yang produktif.

Dalam kaitannya dengan interaksi pemimpin dan pengikut, pemimpin transformatif adalah seorang pemimpin yang sabar dan merefleksikan dirinya sebagai seorang yang penuh perhatian dalam mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan, ide, harapan-harapan, dan segala masukan yang diberikan staf. Pemimpin transformasional adalah seorang guru yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pengikut, dan berusaha mendorong mereka untuk dapat mengembangkan karir.

Kepemimpinan HEBAT adalah tipe pemimpin abad 21 yang mengedepankan pelayanan dengan sepenuh hati. 1) Heartily atau sepenuh hati melaksanakan kepemimpinan pendidikan dengan hati, ini menunjukkan praktik *self awareness* dalam kepemimpinan authentic. Empathy adalah ukuran seseorang yang mampu memberikan solusi pada situasi-situasi yang dihadapi secara organizational terutama secara individual. Brave atau berani yang menunjukkan bahwa pemimpin tidak cukup menjadi orang baik, dia harus mengambil posisi sebagai orang yang mampu membuat keputusan inovatif yang menantang. Active yaitu seorang pemimpin yang gesit dalam mengarahkan kegiatan dan menangkap peluang. Teacher atau guru yang memiliki banyak ilmu, pemimpin abad 21 senantiasa terus belajar untuk terus mentransformasi.

Hasil penelitian yang mengungkap munculnya istilah kepemimpinan authentic, kepemimpinan transformative, kepemimpinan hebat, dan e-leadership dalam praktik kepemimpinan abad 21 ditegaskan oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya yang juga memberikan beberapa istilah pemimpin, yaitu pemimpin digital (Mihardjo & Rukman, 2018), pemimpin

virtual (Arti Trivedi., Jay Desai, 2012), dan pemimpin transformasional (Farahnak, Ehrhart, Torres, & Aarons, 2019). Kepemimpinan abad 21 adalah kepemimpinan authentic yang transformatif dengan ciri hebat. Penelitian yang dilakukan Dedy Achmad dan Komariah (2020) menyimpulkan bahwa empati merupakan atribut tertinggi pemimpin abad 21, selain ciri-ciri lain sebagai pemimpin inovatif, terbuka, dan aktif.

E-Leadership (Kepemimpinan Virtual)

Kepemimpinan virtual abad 21 sudah terlihat dalam pengaturan pembelajaran yang ditrigger oleh adanya pandemic. Para pemimpin telah memulai memimpin rapat dan membuat keputusan atas interaksi secara virtual. Para pemimpin perlu mengubah pola memimpin dari interaksi langsung pada komunikasi virtual dengan penggunaan platform yang dikuasai, seperti WA, WAG, line, line group, zoom dan sejenisnya. Membalas WA dan email bukan lagi sebagai selingan, tetapi menjadi tools bagi pengarahan, pemberdayaan, dan pengembangan personil.

Kepemimpinan bertujuan untuk menciptakan sifat kepemimpinan pada yang dipimpin yaitu orang-orang yang mampu menentukan arah tujuan organisasi, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang cermat, mampu menanggung resiko, dan memiliki sikap aktif proaktif dalam melaksanakan tugas. Kepemimpinan virtual adalah tugas kepemimpinan dalam meraih visi, melakukan motivasi, menjadi inspirasi, dan membangun kepercayaan dengan media baru yaitu computer atau gadget lainnya (handphone) secara synchronous maupun asynchronous.

Sebagai mode baru dalam cara-cara memimpin. Beberapa platform belum banyak digunakan karena masih terbatas dalam penguasaannya. Zoom merupakan aplikasi yang sangat populer digunakan para pemimpin dalam kepemimpinannya terutama dalam hal penetapan jadwal, permulaan kuliah, dan kegiatan akademik seperti webinar. Zoom dan platform virtual lainnya belum secara optimal digunakan para pemimpin untuk melakukan upaya kepemimpinan terutama yang berkaitan dengan membangun intensitas interaksi pemimpin-pengikut dalam pengembangan diri masing-masing individu.

E-leadership sebagai kekuatan kepemimpinan abad 21 berdasarkan data yang digali dengan menggunakan delphy method memiliki karakteristik berikut: 1) adaptif dengan perubahan, 2) sangat peduli dengan pengikutnya, 3) mempunyai *power* kepemimpinan yang diimbangi kemampuan manajerial, 4) memiliki jiwa *entrepreneur*, *corporative*, integritas, dan *developer*, 5) tidak pernah berhenti belajar, 6) selalu bekerja, menemukan dan melakukan inovasi, 7) memiliki “*think-tank*” sebagai tim yang diandalkan.

Pandemi covid-19 adalah situasi yang memaksa para pemimpin mengakselerasi penggunaan teknologi dalam kepemimpinan. Abad 21 dengan ciri utama pada pesatnya perkembangan teknologi, telah betul-betul diwujudkan keberadaannya dengan adanya batasan fisik yang ditimbulkan pandemi. Para pemimpin beralih dari cara memimpin melalui interaksi langsung tanpa dibatasi layar, menjadi seorang pemimpin yang memaksimalkan fungsinya dengan memanfaatkan teknologi. Di sini teknologi mengubah struktur dan cara kerja, dan tentu saja mengubah pemimpin menjadi orang yang harus adaptif dengan perubahan. S. Khan,

2016; S. J. Berman, 2012; C. Gorton, 2016 menjelaskan enam ciri kepemimpinan di era digital, yaitu:

- 1) Menyadari bahwa digital tidak selalu tentang proyek yang mencolok, ini tentang mengubah orang dan cara kerja.
- 2) Mengembangkan keterampilan digital di seluruh organisasi.
- 3) Mengintegrasikan proses dan teknologi digital untuk melayani dan membentuk strategi organisasi.
- 4) Memberi para pemimpin mandat dan anggaran untuk menguji dan menanamkan teknologi digital dan cara kerja yang gesit.
- 5) Memulai semua program dengan menggunakan riset dan kebutuhan pengguna, dan memperhatikan tanggapan terhadap umpan balik.
- 6) Menginspirasi tim tentang manfaat transformasi digital dengan bukti konsep yang nyata, dan jika perlu dengan percobaan skala kecil.

E-leadership yang juga disebut kepemimpinan digital adalah pemimpin dengan tingkat digitalisasi yang tinggi (Ohain, 2019). *E-leadership* menyadari adanya perubahan mendasar dalam cara para pemimpin dan pengikut berinteraksi satu sama lain, saling support dan memajukan dalam kondisi berbeda tempat secara geografis. Esensinya adalah pemimpin dapat menembus kaca dan menyentuh hati serta semangat yang dipimpinya. Pemimpin dapat memimpin seluruh program dari kejauhan dan berinteraksi dengan pengikut atau anggota tim hanya melalui teknologi informasi. *E-leader* harus membangun iklim sosial yang sesuai melalui komunikasi yang berkelanjutan, dan mampu menyampaikan keterampilan interpersonal yang patut dicontoh melalui teknologi.

E-leadership lebih bergantung pada pembinaan daripada pengawasan, namun dalam praktik *e-leadership* awal, dimana relasi kita belum sepenuhnya paham dengan *platform* teknologi, adakalanya pesan-pesan tidak sampai dan terabaikan. Sangat diperlukan sistem monitoring dan pengawasan yang dapat diandalkan untuk anggota tim terhubung dengan kepemimpinan. Meskipun setelah itu, ketergantungan kepada monitoring harus sedikit demi sedikit dilepaskan dan tumbuh ikatan *intrinsic*, *self-efficacy*, dan *self-determined leading* pada para pengikut. Hamilton dan Scandura (2003) meneliti konsep *e-mentoring* di dunia digital sebagai konsekuensi yang diperlukan untuk *e-leadership*; mengidentifikasi potensi manfaat dan tantangan; dan membahas peluang untuk memperluas teknologi untuk menangani pembangunan dan pemeliharaan hubungan.

Komariah, dan Kurniady (2021) memaparkan *e-leadership* yang efektif, dimana para pemimpin harus menyiapkan seperangkat kemampuan, yaitu:

- 1) berkomunikasi langsung dengan para pengikut yang bisa terjadi sampai ribuan orang (zoom 1000, plus tersiar youtube). Perhatian pengikut penuh pada pendengaran sehingga pemilihan kata/pesan menjadi sangat diperhatikan.
- 2) menargetkan kepuasan pelanggan yang lebih baik dengan menyediakan layanan 24x7 menggunakan "*follow the sun*", sehingga tidak ada istilah, maaf nanti saya jawab saat *weekday*.
- 3) mengkomunikasikan *enthusiasme* yang dapat menembus kaca
- 4) membangun kepercayaan dengan seseorang yang mungkin tidak pernah melihat pemimpinnya
- 5) menginspirasi anggota tim yang sangat jauh

- 6) memantau dan mengendalikan rasa malas pengikut
- 7) mencegah kurangnya kompetensi teknis yang mempengaruhi kinerja
- 8) menjaga keseimbangan kehidupan kerja dalam paradigma baru 24x7

Lebih lanjut Komariah & Kurniady (2021) menjelaskan komponen kepemimpinan yang perlu diperhatikan pemimpin *e-leadership*, yaitu:

- 1) Jenis pengaruh: menembus kaca antusiasme, pesan-pesan yang disampaikan harus meresonansi pengikut. Bagaimana pemimpin yang terpisahkan monitor laptop dapat menyentuh hati, kesadaran, dan motivasi untuk bekerja pada pengikutnya.
- 2) Jenis komunikasi: Keterampilan komunikasi yaitu *REACH* (merangkul semua) (*Respect-Empaty-Audibbe-Clearly-Humble*) dan memahami keterampilan jejaring sosial. *E-leadership* meminta leaders berkomunikasi dengan menggunakan media yang tersedia dalam smartphonenya, seperti email, WA, line, facebook, twitter, instagram, telegram, signal, dan lain sebagainya.
- 3) Sifat Pelayanan: Pahami sensitivitas anggota. Sensitivitas terhadap pola pikir pengikut dalam arti menjadi pemimpin yang paham dengan karaktersitik, perbedaan, kebutuhan, dan keinginan para pengikut yang beragam.
- 4) Kualitas Keterampilan: kemampuan untuk menggunakan TIK, kemampuan untuk meyakinkan orang lain tentang manfaat dari teknologi baru, inovatif dan kreatif.
- 5) Konteks Global: bekerja melintasi batas waktu, batas ruang, dan rintangan budaya di mana pengawasan dan interaksi langsung tidak dimungkinkan, pola pikir global dan multikultural, memantau dan mengelola pekerjaan virtual secara efektif.

- 6) Sifat Pengendalian: menggunakan berbagai *platform* sinkronous maupun asinkronous untuk tetap terhubung dan saling menyemangati serta berbagi program. Pastikan instrumen yang tepat dan terisi untuk tetap dapat menyentuh secara administratif. Memahami bit.ly, googleform sebagai tool bagi absensi dan angket yang akan disampaikan untuk njajak pendapat.

Kesimpulan

Kepemimpinan abad 21 menegaskan arti pemimpin sebagai orang yang memberi pengaruh pada pengikut untuk mencapai tujuan organisasi dengan jalan komunikasi yang empatik, mempertimbangkan lingkungan secara cermat dan dengan teknologi sebagai media utamanya. Kepemimpinan yang terbangun atas adanya empat unsur, yaitu pemimpin, kondisi masyarakat termasuk orang-orang yang dipimpin, perkembangan lingkungan nasional dan internasional senantiasa mengalami perubahan, dan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Menilik urgensi unsur lain yang digerakan oleh pemimpin, maka persyaratan yang diperlukan bagi kepemimpinan abad 21 yang efektif dalam menghadapi kompleksitas perkembangan dan dinamika perubahan abad 21 yaitu dengan kompetensi *e-leadership*.

E-Leadership untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif didasari kompetensi berikut: 1) berpikiran terbuka dan beradaptasi dengan perubahan, 2) kepedulian yang tinggi kepada pengikutnya dengan “impressive emphatic”, 3) mempunyai *power* kepemimpinan sekaligus kemampuan manajerial, 4) memiliki jiwa *entrepreneur, corporative*, integritas, dan *developer*, 5) tidak pernah berhenti belajar, 6) selalu

bekerja, menemukan dan melakukan inovasi, 7) memiliki “*think-tank*” sebagai tim yang diandalkan, dan 7) mampu bertahan dengan kondisi kritis dan tidak mudah menyerah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. F., & Wan Abdul Ghapar, W. R. G. (2019). The Era of Artificial Intelligence in Malaysian Higher Education: Impact and Challenges in Tangible Mixed-Reality Learning System toward Self Exploration Education (SEE). *Procedia Computer Science*, 163, 2–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.12.079>*Partnership for 21st Century Learning*, 201
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Laporan BSNP 2010. [Online]. Diakses dari <http://www.bsnp-indonesia.org/id/wpcontent/uploads/2012/04/Laporan-BSNP-2010.pdf>. (diakses tanggal 7 Oktober 2021).
- Berman, S. J. (2012). Digital transformation: opportunities to create new business models. *Strategy & Leadership*.
- Chowdhury, S. (ed). (2005). *Organisasi Abad 21*. Alihbahasa: Ati Cahayani. Jakarta: Indeks
- Drucker, P. F. (1999), *Management Challenges for the 21st Century*. New York: Harper Business.
- Eraslan Yalcin, M., & Kutlu, B. (2019). Examination of students' acceptance of and intention to use learning management systems using extended TAM. *British Journal of Educational Technology*, 50(5), 2414-2432.
- Farahnak, L. R., Ehrhart, M. G., Torres, E. M., & Aarons, G. A. (2019). The Influence of Transformational Leadership and Leader Attitudes on Subordinate Attitudes and Implementation Success. *Journal of Leadership & Organizational Studies*.
- Garcia, Ingrid. (2015) Emergent leadership: is e-leadership importance in the quality of virtual education ?. RIED: Ibero-American *Journal of Distance Education*, vol.18, n.1, 2015, p. 25-44. ISSN: 1138-2783, EISSN: 1390-3306
- Gorton, C. (2018). *Building digital leadership and resilience in the UK's Cultural sector*.
- Gurr, David. (2004). ICT, Leadership in Education and E-leadership. Discourse: *Studies in the Cultural Politics of Education*, Vol 25. Issue 1, (2010). P.113-124

- Heike Brugger, Wolfgang Eichhammer, Nadezhda Mikova, Ewa Dönitz. (2021). Energy Efficiency Vision 2050: How will new societal trends influence future energy demand in the European countries?. *Energy Policy, Volume 152*.
- Komariah, A., Kurniady, DA. (2021). *Model Kepemimpinan Pendidikan Abad 21*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Kadarisman, M. (2012). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mihardjo, L. W., & Rukman, R. A. (2018). Does Digital Leadership Impact Directly or Indirectly on Dynamic Capability: Case on Indonesia Telecommunication Industry in Digital Transformation?. *The Journal of Social Sciences Research*.
- Ohain, B. P. (2019). Leader Attributes for Successful Digital Transformation . *ICIS Conference Proceedings. AIS elibrary*.
- Roman, A. V., Van Wart, M., Wang, X., Liu, C., Kim, S., & McCarthy, A. (2019). Defining e-leadership as competence in ICT-mediated communications: an exploratory assessment. *Public Administration Review, 79(6)*, 853-866.
- S. Khan, (2016). *Leadership in The Digital Age – A Study on the Effects of Digitalisation on Top Management Leadership*. Stockholm: Stockholm University.
- Trivedi, Arti and Desai, Jay, A Review of Literature on E-Leadership (November 7, 2012). Shri Chimanbhai Institute Working Paper No. CPI/MBA/2012/0004, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2172577> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2172577>
- Ulrich, Dave. (1998). *A New Mandate for Human Resources*. Harvard Business Review, January February
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zhou, K., Taigang L., & Lifeng, Z. (2015). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. In Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD). *IEEE 12th International Conference*, 2147-2152.

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG HOLISTIK DAN BERKELANJUTAN

Oleh :

Syaifullah
Universitas Pendidikan Indonesia
syaifulsyam@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021
Reviewed : 18 November 2021
Accepted : 8 December 2021
Published : 15 December 2021

Abstract

The development of holistic and sustainable education is needed in order to improve the quality of human resources in supporting national development to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The problems analyzed are the characteristics of holistic and sustainable education development, the obstacles faced in its implementation, the obstacles faced, and the efforts made in the development of education in a holistic and sustainable manner, using the literature review method that is relevant to the main problem. The results of the study show that holistic and sustainable development of education and culture has distinctive characteristics, namely being adaptive to change, strengthening the value of piety to God Almighty, implementing 21st century learning platforms, global-minded materials, based on the development of national culture, and developing democratic principles and values.

Keywords: *Sustainable, Holistic, Educational Development, National Development*

Abstrak

Pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam

mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan yang dianalisis adalah karakteristik pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan dalam pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan, dengan menggunakan metode kajian literatur yang relevan dengan masalah pokok. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara holistik dan berkelanjutan memiliki karakteristik khas yakni adaptif terhadap perubahan, mengokohkan nilai ketakwaan kepada Tuhan YME, menerapkan platform pembelajaran abad 21, materi berwawasan global, berbasis pada pengembangan budaya bangsa, dan mengembangkan prinsip dan nilai demokrasi.

Kata kunci : Berkelanjutan, Holistik, Pembangunan Pendidikan, Pembangunan nasional

Pendahuluan

Pembangunan nasional mensyaratkan adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, agar mampu berperan dalam kedudukannya sebagai pelaku dalam kegiatan pembangunan nasional. Salah satu upaya strategis untuk mengembangkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan, Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi universal, artinya hak yang harus diterima oleh semua warga negara di dunia. Dengan pendidikan yang memadai atau berkualitas, maka mendorong terwujudnya kualitas SDM yang diharapkan dalam berkiprah secara optimal dalam pembangunan nasional.

Memasuki abad 21 dewasa ini, pendidikan dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, baik secara internal maupun secara eksternal. Tantangan internal berasal dari keadaan atau kondisi bangsa itu sendiri, sedangkan tantangan eksternal berasal dari interrelasi bangsa dan negara di dunia ini secara global yang berimplikasi terhadap pendidikan. Sebagaimana

dinyatakan oleh Patrick Griffin (2012) yakni *“Education faces a new challenge; to provide the populace with the information skills needed in an information society. Education system must adjust, emphasising information and technological skills, rather than production-based”*.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa pendidikan dihadapkan pada sebuah tantangan baru yakni untuk menyediakan warga masyarakat dengan keterampilan informasi yang dibutuhkan dalam masyarakat informasi. Sistem pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tantangan tersebut yang lebih menekankan kepada keterampilan teknologikal dan informasi yang harus dimiliki oleh warga masyarakat. Sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi saat ini yang sangat akseleratif, akan berimplikasi positif dalam mendorong terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas serta berdaya saing tinggi. Sebaliknya, jika sistem pendidikan tersebut lambat dalam merespon dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di era revolusi industri 4.0 dewasa ini, maka pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas serta berdaya saing tersebut akan mengalami banyak kendala.

Dalam dokumen *Sustainable Development Goal's (SDGs)* khususnya pada bidang pendidikan yakni tujuan 4 SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Terdapat tujuh target yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan 4 SDGs dalam bidang pendidikan tersebut yakni:

1. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut

biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

2. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap menempuh pendidikan dasar.
3. Menjamin akses yang sama bagi semua anak perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
4. Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
5. Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
6. Menjamin semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
7. Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap

keanekaragaman budaya dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sudah barang tentu bangsa Indonesia harus proaktif berperan serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang pendidikan dengan tujuh target yang hendak dicapai tersebut, melalui pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang terarah dan terprogram dengan baik dan berkualitas. Hal ini dilakukan karena saat ini pendidikan di negara kita masih dalam kondisi yang belum ideal, dengan kata lain masih banyak kelemahan mendasar yang harus diperbaiki secara serius. Berdasarkan survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh PISA (*Programme International Student Assesment*) pada Desember 2019 menunjukkan peringkat Indonesia pada posisi 72 dari 77 negara yang disurvei. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara itu, *Education Index* dari *Human Development Report* (2017) menempatkan posisi Indonesia pada peringkat ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622. Sementara itu skor tertinggi diraih oleh Singapura (0,832), Malaysia (0,719), Brunei Darussalam (0,704), Thailand dan Filipina memiliki skor yang sama yakni 0,661. Bercermin dari data tersebut menunjukkan pendidikan di negara kita masih harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa kita, baik di level regional ASEAN, dan lebih-lebih di level internasional yang kian hari kian kompetitif.

Bertolak dari uraian tersebut, maka dalam pandangan penulis, sangat penting untuk mengkaji tentang pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini tidak lepas dari tantangan saat ini dan ke depan yang

dipandang tidak ringan dalam pembangunan nasional, khususnya tantangan globalisasi yang makin penetratif terhadap berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana dikemukakan Hermes (2003) sekurang-kurangnya terdapat tujuh aspek yang dihadapi oleh pendidikan, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan dalam pemerataan pendidikan, kemiskinan, marginalisasi dan eksklusivitas pendidikan, (2) mengukuhkan hubungan yang lebih baik antara dunia pendidikan dan sektor ekonomi, dan antara pendidikan dengan dunia kerja, (3) mencegah berkembangnya pendidikan dan penelitian yang dikendalikan oleh pasar terutama dunia industri, (4) menjamin bahwa riset menekankan aspek pengembangan keilmuan oleh ilmunannya, (5) mengurangi dampak negatif dari “*brain drain*” dari negara miskin ke negara kaya, dari daerah tertinggal ke daerah maju serta pasar untuk siswa yang mengglobal, (6) mengarahkan dampak dari prinsip-prinsip pemasaran, perubahan peran negara terhadap pendidikan atas perencanaan dan manajemen pendidikan (pembuatan kebijakan), dan (7) menggunakan sistem pendidikan tidak hanya untuk membuat batang tubuh keilmuan (*body of science*) tetapi mewariskan budaya dunia, bahasa, seni, gaya hidup yang semakin homogen. Dalam pandangan Fattah (2012), selain ketujuh aspek tersebut, kebijakan pendidikan perlu memperhatikan pemerataan mutu pada setiap jenjang, pendidikan multibudaya dan multi etnis dalam masyarakat, dan sepatutnya pendidikan memperhatikan para lanjut usia agar tetap sehat dan produktif. Terkait dengan kebijakan pendidikan, penting untuk memahami tiga isu strategis sebagaimana dikemukakan oleh Power, Edward, dalam Fattah, (2012) yakni: (1) *racial inequalities*, (2) *inequalities based on sex*, dan (3) *inequalities due to social and economic status*.

Tulisan ini akan menguraikan pentingnya arah dan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang harus segera ditentukan dan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang mendukung ke arah perwujudan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Fokus permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini meliputi empat hal pokok, yakni: (1) karakteristik pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang holistik dan berkelanjutan; (2) kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang holistik dan berkelanjutan; tantangan dalam pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan; dan (4) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang holistik dan berkelanjutan.

Metode

Untuk menjawab empat permasalahan yang sangat penting tersebut, penulis menggunakan kajian literatur yang relevan baik dalam bentuk hasil-hasil penelitian yang dimuat dalam artikel-artikel jurnal terkini dengan temuan-temuan yang terbaru, maupun buku-buku teks keilmuan yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan masalah yang diangkat dalam artikel ini. Dengan demikian diharapkan pembahasan masalah dapat dilakukan secara memadai berdasarkan fakta, data dan informasi serta teori-teori yang diperoleh melalui kajian literatur tersebut. Selanjutnya berdasarkan pembahasan tersebut dapat diperoleh beberapa hal-hal pokok sebagai simpulan dari masalah yang dikaji tersebut, dan beberapa rekomendasi atau saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan.

Pembahasan

Merujuk kepada permasalahan pokok dalam artikel ini, berikut ini akan diuraikan secara rinci terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini berturut-turut sebagai berikut:

1. Karakteristik Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Holistik Dan Berkelanjutan.

Pendidikan holistik menurut Ali (2012) merupakan suatu pendekatan pendidikan yang mengedepankan keterpaduan dalam pembangunan manusia secara utuh. Keterpaduan ini dapat dimaknai sebagai keterpaduan antara pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual pada satu sisi, dan pengembangan berbagai kemampuan akademik, vokasional dan pengembangan karakter pada sisi lain. Sementara itu dalam pandangan Miller (2005) mengatakan bahwa dalam perspektif pendidikan, holistik dapat diartikan sebagai integratif. Hal ini berarti bahwa pendidikan holistik dapat dimaknai sebagai pendidikan integratif. Implikasi dari makna ini adalah bahwa suatu sistem tidak dapat ditentukan ataupun dijelaskan dengan cara menjelaskan semua komponen dari sistem itu, melainkan suatu sistem secara keseluruhan dapat menjelaskan bagaimana komponen-komponen sistem itu berperilaku. Ali (2012) menganalogikan pendidikan holistik dengan konsep *gestalt* yang menyatakan, bahwa keseluruhan yang bersifat terpadu lebih bermakna dari pada jumlah dari seluruh bagian-bagiannya. Jadi pada intinya, konsep pendidikan holistik terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang

mengintegrasikan berbagai aspek dalam upaya agar peserta didik dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Pendidikan holistik bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi dari setiap peserta didik dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui pendidikan seperti ini peserta didik diharapkan dapat memperoleh kebebasan psikologis, dapat mengambil keputusan yang baik, dapat belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya, sehingga dapat mengembangkan karakter yang positif dan memperoleh kecakapan sosial yang diperlukan dalam kehidupannya (Miller, 2006). Dalam pandangan penulis, pendidikan holistik tentu tidak semata-mata dalam konteks pembelajaran saja, melainkan dalam konteks yang lebih luas, yang terkait dengan komponen-komponen dalam sistem pendidikan secara utuh, baik terkait dengan *raw input*, maupun *instrumental input*, dan *environmental input*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *raw input* adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut meliputi potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa, dan sebagainya. Kualitas siswa ini merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Sementara itu, *instrumental input* yakni semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pembelajaran, alat evaluasi pembelajaran, fasilitas atau sarana prasarana pembelajaran, dan termasuk pendidik, dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *environmental input* adalah semua faktor yang berasal dari unsur lingkungan yang akan memberikan

pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pendidikan. Semua faktor tersebut sudah barang tentu harus ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar berkontribusi secara signifikan dalam mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.

Sementara itu pendidikan dan kebudayaan berkelanjutan dalam pandangan penulis merujuk kepada pengertian bahwa pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan dengan berorientasi tidak hanya untuk kepentingan saat ini atau berjangka waktu pendek, melainkan untuk kepentingan masa yang akan datang atau bersifat futuristik. Meskipun telah berganti kepemimpinan dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan, tidak lantas kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan mudah berganti kebijakan, melainkan tetap fokus kepada arah dan kebijakan yang telah ditentukan secara matang dan penuh pertimbangan sebelumnya. Manakala program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan tidak secara berkelanjutan, maka beberapa implikasi yang muncul antara lain, yaitu: (1) tujuan pendidikan dan kebudayaan tidak akan dapat dicapai secara utuh, melainkan bersifat parsial. Hal ini sudah barang tentu akan menyulitkan untuk mengoptimalkan kontribusi pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan nasional, (2) kompetensi atau kemampuan SDM tidak dapat berkembang secara maksimal. Padahal kompetensi ini sangat penting dalam rangka mendorong partisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Griffin (2012) bahwa terdapat 10 jenis keterampilan abad 21 yang harus dipelajari dan dikuasai oleh manusia yang disebut dengan *21 Century Skills*. Untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan

tersebut, pendidikan berperan penting. Kecakapan tersebut terdiri atas: (1) *Ways of Thinking*: (a) *creativity and innovation*; (b) *critical thinking, problem solving, decision making*, (c) *learning to learn; metacognition*. (2) *Ways of working*: (a) *communication*, (b) *collaboration*, (3) *Tools of working*: (a) *information literacy*, (b) *ICT literacy*, (4) *Living in the world*: (a) *Citizenship (local and global)*, (b) *life and career*, (c) *personal and social responsibility, cultural awareness and competencies*. Keterampilan-keterampilan itulah yang harus dikembangkan melalui pendidikan yang berkualitas dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan jaman yang sangat akseleratif saat ini.

Pada era digital ini atau era masyarakat industri 4.0 dan menyongsong masyarakat 5.0, pendidikan dihadapkan pada tantangan yang tidak bisa dikatakan ringan, melainkan cukup berat karena terjadinya perubahan yang sangat cepat dan menjangkau berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia. Hal ini sudah barang tentu harus direspon secara proporsional, dengan mempersiapkan berbagai faktor yang bertali-temali dengan pendidikan. Dalam pandangan penulis, pendidikan holistik dan berkelanjutan merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pendidikan saat ini dan masa depan. Salim (2021), mengemukakan tentang pendidikan yang berubah, yang ditandai beberapa hal berikut: (1) Ketergantungan kepada TIK: Pemerataan akses dan kesetaraan dan mengikis marginalisasi; (2) Membangun daya kritis, dialog, memerdekakan, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas; (3) Perubahan pola dalam pendidikan: pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk masyarakat berkelanjutan; (4) Globalisasi dan disrupsi

teknologi; (5) Katastrofe atau bencana; (6) Perhatian terhadap HAM, gender, dan perdamaian; (7) *Entrepreneuership*; (7) Mentalitas untuk peduli terhadap kesejahteraan keluarga, komunitas, dan masyarakat global; (8) Berbasis nasional dan kultural; dan (9) Membangun empati, solidaritas, dan kemanusiaan.

Dalam perspektif penulis, terdapat beberapa karakteristik pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang holistik dan berkelanjutan yang harus diperhatikan dalam rangka penentuan arah dan kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan dan kebudayaan:

a. Responsif terhadap perkembangan yang terjadi

Tak dapat disangkal, bahwa saat ini telah terjadi perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari implikasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu dari ciri yang menandai terjadinya globalisasi. Globalisasi diakui telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai bidang atau aspek kehidupan manusia, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Sudah barang tentu perubahan-perubahan tersebut mesti direspon melalui sistem pendidikan yang adaptif, yakni pendidikan yang senantiasa menyesuaikan atau mensenafaskan dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, maka penyesuaian kurikulum menjadi sebuah keharusan agar konten kurikulum tersebut senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terjadi, khususnya di era digital saat ini. Namun yang patut disadari adalah bahwa penyesuaian kurikulum tersebut tidak

selalu dimaknai dengan perubahan kurikulum secara total sehingga berpotensi membingungkan di kalangan guru sebagai ujung tombang pelaksana kurikulum di lapangan. Penyesuaian kurikulum dilakukan setelah dilakukan kajian terlebih dahulu untuk melihat segi-segi yang harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Kurikulum pendidikan saat ini hendaknya menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi saat ini yakni era industri 4.0 dan menyongsong masyarakat 5.0, yang tentu sangat membutuhkan kompetensi SDM yang berkualitas baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang adaptif terhadap tuntutan yang terjadi. Penyesuaian kurikulum hendaknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan berbagai aspek yang menyertainya, seperti kondisi masyarakat, daya dukung sarana prasarana, kompetensi guru, keadaan siswa, dan lainnya. Jika penyesuaian kurikulum tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan berorientasi untuk kebutuhan jangka pendek, maka ongkos sosial dan ekonomi yang harus dibayar terlalu mahal, karena akan menjadi pertaruhan dalam mempersiapkan SDM bangsa Indonesia ke depan, bukan untuk lima tahun ke depan, namun sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun ke depan yang tantangan semakin kompleks dan tidak terduga (*unpredictable*) sebelumnya. Kebijakan penyesuaian kurikulum berdasarkan hasil kajian secara komprehensif yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus menunjukkan pentingnya pengambilan kebijakan berdasarkan bukti (*evidence-based policy*) agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi untuk mewujudkan keadilan pendidikan di tanah air.

- b. Memperkokoh nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka harus diaktualisasikan dalam pembangunan bidang pendidikan kebudayaan. Dalam kaitan ini, Sastrapratedja (2015) mengatakan adanya nilai-nilai Pancasila sebagai arah pendidikan, yakni: (1) hormat terhadap keyakinan religius setiap orang; (2) hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi (*persona*), yakni sebagai subjek yang tak pernah boleh direduksi menjadi obyek, (3) kesatuan sebagai bangsa yang mengatasi segmentasi-segmentasi sempit, (4) demokrasi atas dasar kedaulatan di tangan rakyat, dan (5) keadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat setiap orang (*equality*) dan pemerataan (*equity*). Memang dalam kurikulum 2013 sudah terdapat rumusan kompetensi inti yang salah satunya sikap spiritual. Namun tentu saja tidak hanya cukup sampai di situ, melainkan harus diperkokoh dalam bentuk kebijakan pendidikan dan implementasinya yang merefleksikan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di era digital ini, tidak sedikit tantangan yang dihadapi khususnya oleh pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, antara lain merebaknya paham radikalisme, intoleransi, vandalisme, kenakalan remaja, narkoba, *cyber bullying*, ujaran kebencian, pembunuhan karakter (*chacacter assasination*), menyebarkan berita bohong (*hoax*), dan lainnya. Dengan menguatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui proses pendidikan, maka diharapkan berbagai tantangan tersebut dapat diantisipasi dan diminimalisir sehingga tidak berdampak lebih luas yang mengancam masa depan generasi muda kita khususnya dan mengancam

kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Patut kita sadari dengan berbagai tantangan tersebut cepat atau lambat, akan dapat memperlemah pendidikan bangsa kita, dan dengan keadaan pendidikan bangsa kita yang lemah tersebut, maka akan sangat mudah bagi bangsa-bangsa lain untuk mengendalikan bangsa Indonesia. Tentu kondisi ini sangat tidak diinginkan, oleh karena itu, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan merupakan hal yang harus terus dilakukan melalui berbagai macam kegiatan konstruktif yang mengusung penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi insan pendidikan di tanah air kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Dalam hal ini, Nasrudin (2012) menegaskan bahwa basis religi adalah fondasi yang paling kokoh untuk membangun sistem pendidikan nasional. Dengan basis religi yang disuratkan dalam “Ketuhanan Yang Maha Esa” menghendaki sistem pendidikan dibangun atas landasan nilai-nilai religi. Demikian pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan sistem kebangsaan kita termasuk di dalamnya sistem pendidikan berbasis pada nilai-nilai ketuhanan yang terformalisasi dalam nilai-nilai religi atau keagamaan.

c. Menerapkan *platform* pembelajaran abad 21

Meskipun hal ini sudah diterapkan namun efektivitasnya perlu terus ditingkatkan secara terus menerus. Dalam hal ini, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan (*conditio sine qua non*). Platform pembelajaran abad 21 meliputi 4 C yakni: (1) *Critical thinking and problem solving*, (2) *Creativity*, (2) *Communication*, (4) *Collaboration*. Keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah sangat penting untuk dikuasai oleh siswa, sebagai bekal dalam kehidupan masyarakat yang dihadapkan pada masalah yang sangat kompleks. Hal ini dilakukan antara lain melalui penerapan model atau metode pembelajaran yang mendorong siswa berfikir kritis analitis, seperti *problem based learning*, *project based learning*, *Higher Order Thinking Skill (HOTS)* baik dalam evaluasi maupun dalam evaluasi pembelajarannya. Di era saat ini terjadi apa yang disebut *VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity, Ambiguity)* menuntut adanya kompetensi setiap komponen bangsa, terlebih kalangan pendidik dan siswa agar dapat menghadapinya dengan bijaksana dan proporsional. *Volatility* menggambarkan keadaan yang seringkali berubah secara cepat di era digital saat ini yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang akseleratif. Sementara itu, *Uncertainly* menggambarkan keadaan yang menunjukkan ketidakpastian sebagai implikasi dari perubahan yang terjadi begitu cepat. Selanjutnya, *complexity* berkenaan dengan ruang lingkup atau cakupan dari perubahan yang terjadi meliputi bidang dan aspek yang luas dan kompleks. Terakhir, *Ambiguity*, menunjukkan bahwa berbagai hal

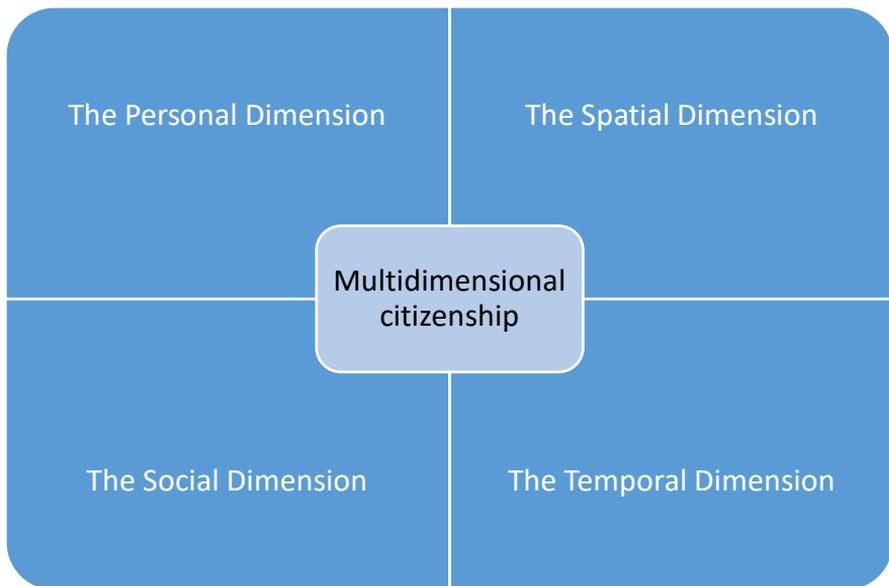
yang terjadi itu seringkali bersifat ambigu atau mendua, sehingga harus secara cermat untuk dipahami dengan baik.

Dengan penerapan *platform* pembelajaran abad 21 tersebut melalui model pembelajaran yang sesuai, maka akan mendorong siswa dapat memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai untuk merespon berbagai perubahan yang akseleratif dan simultan tersebut. Namun, jika masih menerapkan metode yang konvensional dalam pembelajaran dimana menempatkan guru sebagai sosok yang sangat dominan dalam kegiatan pembelajaran, sementara siswa dalam posisi yang pasif, maka upaya untuk mengembangkan potensi dan kompetensi siswa yang sesuai dengan tuntutan abad 21 sulit untuk direalisasikan dengan baik.

Pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS (*Higher Order Thinking Skill*) merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang mendorong kemampuan peserta didik untuk dapat berfikir tingkat tinggi, yakni berfikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah yang dihadapi tidak hanya dalam pembelajaran, melainkan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata (*the real world*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran HOTS antara lain diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* atau *Project Based Learning* maupun model pembelajaran lain yang sejatinya mendorong keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran secara aktif, kreatif, dan kritis. Dengan model pembelajaran tersebut, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi, yang sangat penting dimiliki untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan era industri 4.0 dan menyongsong masyarakat 5.0.

d. Materi berwawasan global

Terkait dengan materi, dalam pendidikan holistik dan berkelanjutan harus berwawasan global, baik pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Namun dalam penyajian materinya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi yang berwawasan global diharapkan dapat mengembangkan kompetensi warga negara yang adaptif dengan tuntutan era global saat ini. Dalam perspektif Cogan dan Derricot (1998), warga negara yang sesuai untuk abad 21 disebut dengan *multidimensional Citizenship*, dengan empat dimensi di dalamnya sebagaimana divisualisasikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1

Dimensi utuh warga negara multidimensi (Cogan & Derricot, 1998) Dalam dimensi personal terdapat empat kompetensi yakni: (1) kemampuan untuk berfikir kritis dan sistematis, (2) memahami dan peka terhadap isu perbedaan budaya, (3) bertanggungjawab,

bekerjasama, dan memecahkan konflik secara damai, serta menyelesaikan masalah, dan (4) kemaun untuk peduli dan memelihara lingkungan, menghargai HAM, dan berperan serta untuk kepentingan publik. Selanjutnya dalam dimensi sosial ditandai dengan kompetensi untuk berinteraksi dalam masyarakat. Adapun dimensi spatial ditandai dengan kedudukan warga negara sebagai keanggotaan dari komunitas yang saling tumpang tindih yakni lokal, nasional, regional, dan multinasional. Dalam konteks ini persoalan yang dihadapi dalam abad 21 menuntut pemecahan masalah yang bersifat *cross-national solutions*. Dalam kewarganegaraan multidimensional membutuhkan warga negara yang harus mampu tinggal dan bekerja pada tingkatan yang saling terhubung, mulai dari tingkatan lokal hingga multinasional. Sementara itu dimensi temporal terkait dengan kemampuan warga negara untuk memahami kehidupan masa lalu dan masa yang akan datang. Dalam konteks ini pendidikan sangat penting untuk mengaitkan antara pengalaman masa lampau dengan masa yang akan datang, agar masa depan lebih baik dari masa lampau atau masa sebelumnya.

Dengan pendidikan yang berwawasan global dalam pandangan penulis akan memperoleh banyak keunggulan antara lain sebagai berikut: (a) Mendorong kemampuan atau kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah global dengan pendekatan berfikir global dan bertindak secara lokal (*think globally but act locally*); (b) Mengembangkan kemampuan saling menerima dan menghargai perbedaan dalam kehidupan masyarakat global, dimana hal ini sangat penting dalam mendukung terwujudnya kehidupan global yang damai; (c) Mendorong

kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah global yang terjadi dengan pendekatan dan strategi yang sesuai, yakni mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian dan kemanusiaan secara universal; dan (d) Mendorong kemampuan berfikir kreatif dan inovatif, yang menjadi tuntutan dalam kehidupan di era global saat ini, agar dapat berkontribusi secara optimal dalam kehidupan yang sangat kompetitif ini.

e. Berakar Pada Pengembangan Budaya Bangsa.

Tak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya sebagai kekayaan bangsa yang patut dibanggakan dan dipelihara dengan baik oleh seluruh komponen bangsa. Melalui kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi pada pengembangan budaya bangsa, maka akan semakin memperkokoh eksistensi bangsa Indonesia ditengah persaingan global saat ini, dimana unsur kebudayaan merupakan entitas yang sangat penting di dalamnya. Dalam pandangan penulis, kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi pada pengembangan budaya bangsa antara lain diwujudkan dengan upaya konstruktif antara lain dengan cara mempromosikan keunikan atau kekhasan budaya daerah atau kearifan lokal, sehingga eksistensi budaya daerah atau kearifan lokal semakin memperkokoh budaya nasional bangsa Indonesia.

Kemajuan di era digital saat ini sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan kearifan lokal bangsa Indonesia dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti melalui internet dan media sosial dengan konten-konten yang informatif dan edukatif tentang kekayaan budaya bangsa Indonesia

terutama budaya daerah yang sangat beragam dan memiliki keunikan masing-masing. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya konstruktif untuk meng-*counter* berbagai budaya luar yang masuk melalui berbagai macam media terutama melalui internet dan media sosial. Dengan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat akan semakin memperkokoh kebudayaan nasional meskipun terpaan dan hegemoni budaya luar begitu kuat.

f. Mengembangkan prinsip dan nilai demokratis

Dalam kaitan ini, Nasrudin (2012) mengatakan bahwa secara substantif, pendidikan demokratis adalah membawa semangat demokrasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Intinya adalah bahwa pendidikan demokratis itu akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau semua *stakeholder* sekolah, sehingga semua unsur tersebut memahami pengembangan sekolah, berbagai problem yang dihadapinya, serta langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh. Dalam pelaksanaan pendidikan demokratis, diperkuat dengan perhatian terhadap hak-hak asasi manusia, yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang tidak diskriminaif atas dasar perbedaan agama, ras, etnis atau warna kulit. Nasrudin lebih lanjut menegaskan bahwa terdapat tiga

keunggulan model sekolah demokratis yakni: (a) akuntabilitas, (b) *student oriented*, dan (c) keterlibatan masyarakat.

Dengan spirit nilai-nilai demokrasi yang diaktualisasikan baik dalam perencanaan, pengelolaan atau pelaksanaan, maupun dalam evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan di negara kita, diyakini akan dapat mendorong perwujudan sistem pendidikan secara berkelanjutan, dalam arti berorientasi tidak hanya untuk kepentingan kekinian saja, melainkan lebih jauh dari itu yakni untuk kepentingan jangka panjang. Pendidikan ideal yang hendak dikembangkan dan dituju oleh pemerintah kita adalah pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Agar fungsi pendidikan tersebut dapat diwujudkan dengan baik, penerapan prinsip dan nilai demokratis dalam pendidikan merupakan suatu keniscayaan oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah melainkan keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya secara konsisten dan bertanggungjawab.

2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang holistik dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara holistik dan berkelanjutan, harus diakui akan dihadapkan kepada berbagai kendala yang harus diantisipasi sedini mungkin. Kendala-kendala tersebut antara lain: (a) kerjasama berbagai komponen masyarakat belum memadai; (b) pembiayaan yang belum optimal, (c) partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pembangunan pendidikan kurang memadai; (d) sarana dan prasana pendidikan yang belum memadai; (e) kompetensi pendidik belum sesuai harapan. Kendala-kendala tersebut sejatinya harus diantisipasi agar dapat diminimalisir implikasi negatifnya yang berpotensi akan menghambat terwujudnya pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara holistik dan berkelanjutan. Dalam pandangan Gaffat (2012) bahwa secara operasional manajerial, unsur-unsur yang menentukan mutu pendidikan antara lain adalah: guru, sarana prasaran pendidikan, peserta didik, manajemen, kepemimpinan, *quality control system*, dan biaya pendidikan. Sedangkan terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Guru yang kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi;
- b. Infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, rusak, dan tidak memadai dari segi jumlah dan mutu, yang tidak mendukung proses pembelajaran yang efektif;
- c. Alokasi dana yang tidak terfokus pada aspek yang sangat penting, tetapi tersebar sedemikian rupa sehingga sulit

ditentukan pencapaian yang nyata dari perbaikan infrastruktur dan guru;

- d. Manajemen yang lemah, yang berbentuk “alakadarnya” untuk menjalankan fungsi pokok pendidikan;
- e. Sumber belajar yang belum memadai atau tidak tersedia secara merata bagi sekolah yang tersebar di seluruh tanah air.

Untuk memberikan analisis terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam pendidikan yang holistik dan berkesinambungan, penulis akan menguraikan secara rinci sebagai berikut:

Kendala pertama yakni belum memadainya kerjasama berbagai komponen masyarakat. Kita menyadari bahwa kerjasama merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, lebih-lebih hal ini menyangkut pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kerjasama komponen masyarakat ini meliputi pihak pemerintah, keluarga, masyarakat, dan institusi (sekolah atau lembaga lainnya). Pihak pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai regulator, tentunya dituntut untuk mampu menentukan dan menetapkan kebijakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi atau ekspektasi masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menentukan kebijakan berbasis kepada bukti (*evidence based policy*) melalui kajian atau riset secara komprehensif sehingga rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan realitas di masyarakat atau berdasarkan bukti konkret bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak diperkuat dengan bukti empirik (*empirical evidence*) di masyarakat. Sosialisasi regulasi merupakan kebutuhan yang mendesak

dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat, agar regulasi tersebut diketahui dan dipahami secara komprehensif oleh masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi sasaran dari regulasi tersebut. Sebagai contoh, rencana untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, harus diawali dengan melakukan kajian secara komprehensif melalui riset atau penelitian dan melakukan penyerapan aspirasi dari berbagai komponen masyarakat terutama dari kalangan akademisi.

Kendala yang kedua yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan yakni terkait dengan pembiayaan yang belum optimal. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Juga pada Pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun, pada kenyataannya, pembiayaan pendidikan tetap masih menjadi kendala yang tak terelakkan, karena banyak aspek-aspek yang perlu dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan disamping untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai yakni guru dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang menyentuh langsung kualitas pendidikan seperti kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan, pengadaan media pembelajaran untuk mendukung kualitas pembelajaran, peningkatan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku teks pembelajaran, pengadaan jaringan internet

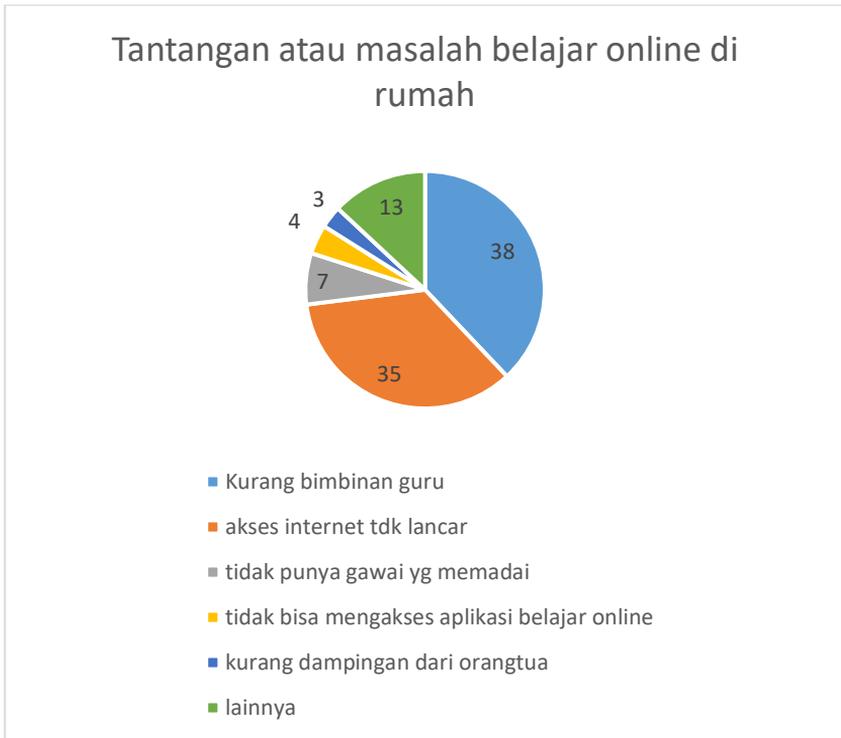
untuk kegiatan pembelajaran, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu dan berprestasi, serta kegiatan pendidikan lainnya, seyogiaynya menjadi prioritas untuk memperoleh pembiayaan pendidikan dalam rangka mendukung kualitas pendidikan.

Keterlibatan perusahaan baik milik pemerintah atau swasta dalam mendukung pendidikan bermutu dapat direalisasikan antara lain dalam bentuk pemberian bantuan hibah dana kepada lembaga pendidikan yang digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan kebutuhan, seperti bantuan biaya pendidikan bagi pendidik yang ingin melanjutkan studi, bantuan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perbaikan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya. Dengan cara demikian, ketergantungan kepada sumber biaya dari pemerintah mulai bisa dikurangi secara bertahap, sehingga alokasi untuk subsektor pendidikan lainnya yang penting dan mendesak dapat terpenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Kendala selanjutnya yakni terkait dengan masih kurang memadainya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan. Padahal kita menyadari bahwa peran masyarakat untuk mewujudkan pendidikan bermutu sangat diperlukan, apapun bentuknya, baik dilakukan secara perorangan maupun berkelompok melalui wadah tertentu seperti komunitas. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, sudah barang tentu memiliki peran penting dalam mendorong warga masyarakat lainnya untuk memiliki kepedulian dalam membangun

pendidikan yang bermutu. Dengan keteladanan dari para tokoh tersebut, diharapkan warga masyarakat lainnya akan terketuk hatinya sehingga termotivasi untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan pembelajaran daring atau *online* di masa pandemi Covid-19, tak terbantahkan peran serta masyarakat terutama keluarga sangatlah besar. Orang tua di rumah harus memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya agar mengikuti pembelajaran daring tersebut dengan baik dan lancar. Hal ini antara lain dilakukan dengan memberikan pengawasan secara intensif agar pembelajaran daring anaknya benar-benar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Pendampingan oleh orangtua kepada anaknya dalam kegiatan pembelajaran daring merupakan bentuk partisipasi langsung dalam mendukung proses pendidikan agar berjalan dengan baik.

Data hasil survei yang dirilis oleh Saeful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan rentang waktu 5- 8 Agustus 2020 tentang pendidikan online di masa pandemi Covid-19 menunjukkan, 92% peserta didik mengalami banyak masalah dalam mengikuti pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 merebak. Beberapa kendala muncul dalam pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 sebagaimana ditunjukkan dalam diagram sebagai berikut:



Sumber: Survei SRMC, 2020

Tantangan tersebut tentu harus direspon oleh semua kalangan, terutama kalangan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan untuk terlibat secara aktif dan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi Covid-19 yang hingga kini masih berlangsung.

Kendala selanjutnya adalah kurang memadainya dukungan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga hal ini berimplikasi pada capaian kualitas pembelajaran. Keadaan fasilitas sekolah masih banyak yang belum dilengkapi dengan fasilitas belajar yang standar, seperti adanya jaringan internet yang dapat diakses oleh peserta didik untuk mencari sumber-sumber belajar. Demikian juga dengan keadaan perpustakaan sekolah terutama koleksi bukunya dan sumber-sumber lainnya yang

perlu terus dikembangkan. Perlengkapan atau media pembelajaran di kelas seperti infokus dan *screen* untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih interaktif, masih merata dimiliki oleh setiap sekolah karena keterbatasan anggaran untuk membelinya. Padahal ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk penyelenggaraan pendidikan sangat penting. Tanpa dukungan fasilitas pembelajaran yang memadai, akan berimplikasi salah satunya mempengaruhi minat atau motivasi belajar peserta didik.

Demikian juga dengan kompetensi pendidik yang saat ini masih menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tidak lain karena kompetensi pendidik masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Data menurut UNESCO dalam *Global Education Monitoring (GEM)* tahun 2016 menempatkan pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan yaitu guru menempati peringkat ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 rata-rata nasional hanya 44,5, jauh di bawah nilai standar yakni 75. Sementara itu, dari 3,9 juta guru saat ini, masih terdapat 25% yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% belum memiliki sertifikat profesi. (Dektiknews. 2017). Tantangan tersebut mesti direspon secara proporsional dengan cara menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi guru secara bertahap agar kompetensi guru terus mengalami peningkatan secara signifikan, karena peran guru begitu sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ho Chi Min yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Vietnam,- *No Teacher No Education. And No Education No Social and Economic*

Development (Tidak ada guru maka tidak ada pendidikan. Tidak ada pendidikan maka tidak pembangunan sosial dan ekonomi).

3. Tantangan Dalam Pembangunan Pendidikan yang Holistik dan Berkelanjutan

Mengingat begitu pentingnya pembangunan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan, maka tantangan utama yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Globalisasi yang semakin penetratif terhadap berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya kehidupan era industri 4.0 dan menyongsong peradaban *society 5.0*.
- b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai macam saluran atau media yang harus direspon dengan baik dan bijak, agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kualitas pendidikan, terutama kualitas pembelajaran dengan digitalisasi dalam pendidikan.
- c. Tuntutan dan kebutuhan demokratisasi dan keterbukaan informasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Meningkatnya kerjasama internasional yang dilakukan antarnegara dalam pengembangan sumber daya manusia.
- e. Meningkatnya daya kritis masyarakat dalam merespon berbagai pelaksanaan program pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan.
- f. Semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi.

- g. Merefleksi dari kasus pandemi Covid-19 yang terjadi tanpa diprediksi sebelumnya, menunjukkan pentingnya adaptasi masyarakat terhadap perkembangan yang terjadi dalam tataran kehidupan global, seperti melakukan pembelajaran secara daring atau *blended learning*.

Sementara itu, Gaffar (2012) mengemukakan beberapa tantangan utama membangun pendidikan untuk membangun masyarakat Indonesia baru, yaitu:

- a. Karena harus dapat berfungsi sebagai instrumen yang efisien, diperlukan perbaikan terhadap pendidikan itu sendiri, sehingga memiliki kekuatan untuk melakukan fungsinya secara optimal.
- b. Pendidikan adalah suatu proses yang amat kompleks dan rumit, karena itu perubahan tidak mudah untuk dilakukan.
- c. Pendidikan merupakan suatu tugas nasional yang amat besar yang memerlukan sistem manajemen yang efisien dan efektif yang saat ini sistem tersebut masih sentralistik dan tidak efisien.
- d. Masyarakat Indonesia sangat pluralistik, dimana pendidikan mengandung misi untuk membangun masyarakat pluarlistik sehingga menjadi bangsa yang bersatu dan kuat. Untuk mewujudkan tujuan itu dipandang sebagai sesuatu yang amat rumit karena jumlah penduduk yang besar dan beranekaragam.
- e. Untuk menjadikan pendidikan melakukan perannya dengan efisien, diperlukan *political support* dan *political commitment* yang kuat.

Itulah beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka membangun pendidikan secara holistik dan berkelanjutan. Tentu saja tantangan

tersebut harus direspon dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang holistik dan berkelanjutan.

Berbagai kendala sebagaimana telah diuraikan di atas sudah barang tentu harus dapat diatasi dengan cepat dan tepat sehingga persoalan tersebut tidak berlarut-larut yang akan menurunkan kualitas pendidikan di negara kita. Upaya yang dilakukan hendaknya bersifat komprehensif yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling membantu atau berkontribusi. Beberapa unsur tersebut yakni: pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas atau masyarakat, dan media, yang dikenal dengan Pentahelix.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain: (a) menyusun peta jalan (*roadmap*) pendidikan yang digunakan sebagai arah atau tujuan pembangunan pendidikan untuk jangka panjang, tidak hanya cukup dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah); (b) melakukan penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran mampu senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang terjadi begitu cepat saat ini di era digital; (c) menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi guru secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru; (d) memberikan dana bantuan atau hibah kepada lembaga-lembaga pendidikan terutama untuk penyediaan fasilitas

pembelajaran agar lebih memadai terutama media teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan saat ini; (e) secara bertahap meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang diberikan dalam memajukan pendidikan.

Gaffar (2012) mengemukakan strategi yang harus dilaksanakan agar pendidikan memberikan peluang dan peran secara efisien dan efektif sebagai berikut:

- a. Membangun politik pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan sebagai prioritas nasional dalam membangun SDM Indonesia sebagai infrastruktur pembangunan masyarakat Indonesia baru;
- b. Menyusun *platform* reformasi pendidikan yang mencakup tiga pilar pendidikan nasional, yakni: filosofi, tujuan, dan sistem manajemen pendidikan nasional yang mampu tampil beda dari wajah dan citra pendidikan nasional saat ini;
- c. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat membentuk kekuatan pendobrak yang sangat kuat untuk membuka kesempatan kepada pendidikan dalam perannya sebagai unsur pembangunan masyarakat madani;
- d. Menetapkan politik pembiayaan pendidikan hingga mencapai 5% dari GDP untuk mendukung pembangunan pendidikan nasional;
- e. Membangun persepsi bahwa pendidikan itu tidak hanya sebuah proses sepanjang hayat, tapi lebih penting daripada itu adalah pendidikan itu melekat dengan kehidupan setiap orang dan

merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar untuk mengangkat martabat dan kualitas hidup manusia;

- f. Masyarakat madani adalah sebuah tatanan sosial dengan berbagai aspek dasar kehidupan masyarakat yang menyatu di dalamnya. Pendidikan harus diposisikan agar memiliki kekuatan untuk membangun seluruh aspek mendasar ini melalui pembangunan SDM yang merupakan kunci strategis pembangunan masyarakat madani secara keseluruhan;
- g. Membersihkan pendidikan dari berbagai praktek KKN dan menjadikan pendidikan sebagai bagian penting dari upaya membangun *clean government* yang dipercaya oleh rakyat Indonesia.

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh akademisi? Sesuai dengan profesinya, tentu saja kalangan akademisi tidak bisa tinggal diam untuk membangun pendidikan nasional yang holistik dan berkesinambungan tersebut, melainkan justru harus mampu memberikan kontribusi maksimal yang dapat dilakukan dengan melaksanakan tugas dan peran untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yakni: (a) melakukan kajian dalam bentuk riset atau penelitian dimana temuan penelitiannya dapat dijadikan dasar memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan sistem pendidikan; (b) menerapkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, dalam hal tentang upaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan profesi masing-masing; (c) memberikan keteladanan kepada mahasiswa tentang pentingnya

disiplin, belajar mandiri, tekun belajar, dan berbagai karakter positif lainnya; (d) menyampaikan saran atau masukan yang konstruktif kepada pemerintah terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan, dengan memanfaatkan berbagai saluran seperti media massa, baik cetak maupun elektronik.

Sementara itu, komunitas atau masyarakat juga memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam rangka pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan. Hal ini karena pembangunan pendidikan tidak semata-mata bergantung kepada pihak pemerintah saja, melainkan mesti ada kontribusi dari komunitas atau masyarakat. Berbagai komunitas yang ada di masyarakat saat ini yang memiliki perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan, harus secara terus menerus didorong untuk berkiprah secara optimal dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan pendekatan yang dilakukan oleh komunitas yang biasa lebih *soft* diharapkan mampu menyentuh dan menggerakkan masyarakat untuk berkiprah dalam meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.

Sementara itu, pihak pengusaha memiliki peran yang sangat penting dalam membangun mutu pendidikan, antara lain dilakukan antara lain dengan cara memberikan bantuan dana atau berdonasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, seperti untuk pengadaan alat dan media pembelajaran, pemberian bea siswa untuk peserta didik yang kurang mampu dan berprestasi, perbaikan gedung sekolah agar lebih memadai untuk kegiatan pembelajaran, bantuan untuk guru-guru dan tenaga kependidikan yang masih berstatus honorer dengan pengabdian yang sudah cukup lama. Terakhir, media massa, baik cetak

maupun elektronik, memiliki peran strategis dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, terutama dalam hal penyebarluasan informasi kepada khalayak umum atau masyarakat terkait dengan program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Sekarang ini, dengan pengguna internet yang cukup besar di masyarakat kita, juga pengguna media sosial dengan pemanfaatan yang intensif oleh masyarakat, menjadi peluang positif bagi media dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini tentu saja dilakukan dengan cara muatan atau konten berita yang benar-benar memberikan pencerahan kepada masyarakat, yakni konten yang informatif, rekreatif, dan edukatif.

Penutup

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara holistik dan berkelanjutan memiliki karakteristik, yaitu: (a) responsif terhadap perkembangan yang terjadi dewasa ini yang amat cepat; (b) memperkokoh nilai-nilai Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (c) menerapkan *platform* pembelajaran abad 21; (d) materi berwawasan global; (e) berakar pada pengembangan budaya bangsa, dan (e) mengembangkan prinsip dan nilai demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan antara lain meliputi faktor-faktor, yaitu: (a) kerjasama berbagai komponen masyarakat belum memadai; (b) pembiayaan yang belum optimal, (c) partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pembangunan pendidikan kurang memadai; (d)

sarana dan prasana pendidikan yang belum memadai; (e) kompetensi pendidik belum sesuai harapan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan adalah: (a) Globalisasi yang semakin penetratif terhadap berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya kehidupan era industri 4.0 dan menyongsong peradaban *society 5.0*; (b) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai macam saluran atau media yang harus direspon dengan baik dan bijak, agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kualitas pendidikan, terutama kualitas pembelajaran dengan digitalisasi dalam pendidikan; (c) Tuntutan dan kebutuhan demokratisasi dan keterbukaan informasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (d) Meningkatnya kerjasama internasional yang dilakukan antarnegara dalam pengembangan sumber daya manusia; (e) Meningkatnya daya kritis masyarakat dalam merespon berbagai pelaksanaan program pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan; (f) Semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi; dan (g) Merefleksi dari kasus pandemi Covid-19 yang terjadi tanpa diprediksi sebelumnya, menunjukkan pentingnya adaptasi masyarakat terhadap perkembangan yang terjadi dalam tataran kehidupan global, seperti melakukan pembelajaran secara daring atau *blended learning*.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan kendala dalam pembangunan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan

yakni melibatkan berbagai komponen masyarakat dan bangsa secara komprehensif atau utuh menyeluruh yakni meliputi pemerintah, akademisi, komunitas, pengusaha, dan media massa.

Daftar Rujukan

- Ali, Muhammad, “Pendidikan Holistik: Sebuah Wacana” dalam Syamsul Hadi Senen, dkk, *Membangun Pendidikan Nasional Masa Depan Untuk Menyongsong Tahun 2035*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (2012). Hlm. 102-116.
- Fattah, Nanang. “Alternatif Strategis dalam Pengalokasian Sumber Daya Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Nilai (values) Religius”. Dalam Syamsul Hadi Senen, dkk, *Membangun Pendidikan Nasional Masa Depan Untuk Menyongsong Tahun 2035*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (2012). Hlm. 91-94.
- Gaffar, Muhammad Fakry *Dinamika Pendidikan Nasional. Isu, Tantangan dan Perspektif Masa Depan*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2012. Hlm. 59
- Griffin, Patrick, et.al. *Assesment and Teaching of 21st Century Skills*, New York: Springer.
- Miller, R. *Holistic Education: A Response to the Crisis of Our time*. A Paper Presented at The Institute of Values Education in Istanbul, Turkey in November 2005.
- Nasrudin, Endin. “ Pendidikan Nasional Religius, Humanis, dan Demokratis”. Dalam Syamsul Hadi Senen, dkk. *Membangun Pendidikan Nasional Masa Depan Untuk Menyongsong Tahun 2035*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2012. Hlm. 2012-2016.
- Salim, Satriwan. *Restorasi Sosial Menuju Society 5.0 (Sebuah Perspektif Pedagogis)*. Makalah Ramusmat Dewan Ketahanan Nasional. 2021.
- Sastrapratedja, M. (2015). *Pendidikan Sebagai Humanisasi*. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila.

PEMBELAJARAN STEM: UPAYA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DI ABAD 21

Oleh: Ida Kaniawati

Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: kaniawati@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021

Reviewed : 18 November 2021

Accepted : 8 December 2021

Published : 15 December 2021

ABSTRACT

Today, education in Indonesia is moving and adapting to technological developments. Moreover, at the beginning of the Covid-19 pandemic, learning in Indonesia seemed to be forced to change the culture in the learning system, which was originally face-to-face to online. These efforts are made because the activities to educate the nation's life must continue. Moreover, 21st-century education also requires every student to have various skills. In this case, learning is needed that can meet these demands and is closely related to technology because the pandemic conditions require everyone to be able to coexist with technology. One alternative that can be used to answer these challenges is learning based on Science, Technology, Engineering, and Mathematics (SETEM). STEM learning that is closely related to technology is considered relevant to use, especially in the new normal era like now. Thus, this article will build ideas about the use of STEM in answering the challenges of the 21st century, as an effort to educate the nation's life. Based on the information obtained from student responses about interests, careers, and content in STEM, sequentially shows positive results. In addition, STEM learning can also increase conceptual understanding, creativity, and solving problems in everyday life.

Keyword: *Education, 21st-Century Skills, SETEM Learning*

Dewasa ini, pendidikan di Indonesia sedang bergerak dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Terlebih, di awal masa pandemi Covid-19, pembelajaran di Indonesia seperti dipaksa untuk merubah kebudayaan dalam sistem pembelajaran, yang mulanya tatap muka menjadi dalam jaringan (daring). Upaya tersebut dilakukan karena kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa harus terus berjalan. Terlebih, pendidikan abad 21 juga menuntut setiap siswa untuk memiliki berbagai keterampilan. Dalam hal ini, dibutuhkan pembelajaran yang dapat memenuhi tuntutan tersebut dan erat kaitannya dengan teknologi karena kondisi pandemi menuntut setiap orang supaya dapat berdampingan dengan teknologi. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah pembelajaran berbasis *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (SETEM). Pembelajaran STEM yang erat dengan teknologi dianggap relevan untuk digunakan, terutama di masa *new normal* seperti sekarang. Sehingga artikel ini akan membangun pemikiran tentang penggunaan STEM dalam menjawab tantangan abad 21, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan informasi yang didapat dari tanggapan siswa tentang minat, karir, dan konten dalam STEM, secara berurutan menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, pembelajaran STEM juga dapat meningkatkan pemahaman konsep, kreativitas, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pendidikan, Keterampilan Abad 21, Pembelajaran SETEM

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan secara langsung tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan mengeluarkan Peraturan

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Pasal 2a bahwa “PIP bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun” (Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai kendala sering ditemui seperti pada saat pandemi Covid-19.

Pandemi Covid -19 telah melanda berbagai negara di seluruh dunia. Di Indonesia, pandemi ini telah dimulai sejak Maret 2020 (Djalante et al., 2020). Keadaan ini tentunya berpengaruh terhadap berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Selama pandemi Covid-19, pendidikan di Indonesia dipaksa untuk merubah kebiasaan atau budaya dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Sebelum pandemi melanda di Indonesia, proses pembelajaran dalam jaringan (daring) masih asing untuk dilakukan. Namun, untuk saat ini pembelajaran daring menjadi salah satu kebiasaan baru, bahkan pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pun diselenggarakan melalui pembelajaran daring (Solekhah, 2020). Pembelajaran dilakukan menggunakan berbagai aplikasi yang sebelumnya telah ditentukan oleh pihak sekolah dan dikoordinasikan kepada orang tua siswa (Nasution & Nandiyanto, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi telah menjadi konsumsi untuk semua kalangan di berbagai bidang. Sehingga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat menjadi salah satu alternatif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di masa *new normal* seperti saat ini.

Pembelajaran secara daring yang dilakukan di setiap tingkat pendidikan membuat semua pihak harus beradaptasi dengan cepat. Bahkan, setelah saat ini baru diuji cobakan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. PTM terbatas merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pembelajaran akan kembali menjadi full daring jika penyebaran virus Corona masih belum terkendali. Keadaan ini membuat pendidik atau guru, yang bertugas sebagai garda pertama dalam dunia pendidikan harus dapat menyiapkan pembelajaran yang dapat dilakukan di semua keadaan. Hal tersebut karena perubahan sistem pembelajaran sangat dirasakan oleh guru, terlebih pada mata pelajaran yang memiliki praktikum di dalamnya, seperti fisika .

Di tingkat SMA, mata pelajaran fisika menjadi salah satu mata pelajaran yang sulit untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring. Hal tersebut karena sering dimukannya kendala dalam penyampaian konsep, terlebih jika harus disampaikan dengan bantuan praktikum. selain itu, sebelum pembelajaran daring dilakukan, sebaiknya guru mempertimbangkan keadaan psikologis siswa (Zhao et al., 2020). Padahal, pendidikan di abad 21 ini menuntut siswa untuk memiliki empat keterampilan dasar (Handajani et al., 2018). Empat keterampilan (4C) yang dibutuhkan adalah Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah, Kreativitas dan Inovasi, serta Komunikasi (kemampuan berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca dengan menggunakan berbagai media) dan Kolaborasi. Tentunya, kemampuan tersebut menjadi semakin sulit karena kondisi *new normal* seperti saat ini. Sehingga perlu upaya yang dilakukan oleh guru dalam memenuhi tuntutan tersebut, yang secara

langsung dikaitkan dengan pengembangan atau penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (SETEM).

Pembelajaran berbasis STEM relevan untuk digunakan, terlebih pada situasi *new normal* (Rochman et al., 2020), dimana teknologi menjadi salah satu hal yang harus dipelajari dan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, berkenaan dengan lulusannya, penggunaan STEM menjadi penting karena beberapa alasan, diantaranya, kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan di bidang industry, dan pembelajaran matematika yang masih berupa hafalan dan tidak mempraktekannya langsung (Kaniawati et al., 2021). Sehingga, pembelajaran STEM menjadi cukup populer dan telah digunakan di berbagai negara. Sementara, pembelajaran STEM di Indonesia masih jarang digunakan.

Berdasarkan studi pendahuluan di salah satu sekolah, pembelajaran STEM masih dilakukan satu kali dalam satu semester. Namun, pelaksanaannya masih terpisah dari penyampaian materi. Pelaksanaan pembelajaran STEM dilakukan pada akhir semester dengan mengambil tema yang sesuai dengan komposisi materi pada semester tersebut. Pembelajaran STEM dilakukan dengan menyediakan LKS yang diunduh dari internet dengan tema membuat kulkas sederhana. Berdasarkan wawancara guru, LKS khusus belum dibuat oleh guru atau dari sekolah. Tema kulkas sederhana jika dianalisa, pembuatannya tidak melatih kemampuan engineering yang tepat. Desain terlalu sederhana untuk membuat lemari es dari busa stereo buatan balok dengan menambahkan es batu di busa stereo dan satu es krim untuk menguji berapa lama es akan bertahan beku di lemari es sederhana. Sehingga perlu adanya inovasi

bahan ajar STEM yang mampu melatih kemampuan engineering siswa. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis STEM tersebut, diperlukan informasi perspektif siswa tentang STEM, baik dari segi minat, karier, dan konten tentang STEM, serta kaitannya dengan pemahaman konsep, kreativitas, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

PEMBAHASAN

Pembelajaran STEM telah diterapkan di sejumlah negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dalam karir STEM. Pada tahun 2018, 9 dari 10 pekerjaan yang berkembang pesat membutuhkan lulusan yang memiliki kapasitas signifikan di bidang matematika, sains, teknik (Hidayah et al., 2020). Selain itu, pemahaman konsep, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah menjadi pembahasan yang akan dibahas pada bagian ini.

1. Minat, Karir, dan Konten STEM

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk mengejar suatu kegiatan tertentu. Minat STEM adalah kecenderungan siswa untuk menekuni STEM. Minat berpengaruh signifikan terhadap pilihan melanjutkan studi dan karir STEM (Kaniawati et al., 2021). Minat belajar pada mata pelajaran tertentu merupakan motivasi yang berkaitan dengan prestasi dalam pelajaran tersebut. Misalnya, siswa yang tertarik pada komputer biasanya memperoleh nilai yang lebih baik daripada siswa yang tidak memiliki minat yang sama. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan minat individu dapat dikelompokkan menjadi faktor internal (faktor fisik, kematangan fisik, dan faktor fisiologis yang bersifat bawaan) faktor eksternal (faktor sosial meliputi keluarga dan lingkungan

sekolah, faktor budaya. seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor lingkungan fisik seperti fasilitas perumahan, iklim), dan terakhir adalah faktor spiritual (Kaniawati et al., 2021).

Sementara, karir STEM adalah serangkaian sikap dan perilaku yang didasarkan pada pola pengalaman belajar yang dialami oleh siswa. Karir STEM juga merupakan pekerjaan dalam lingkup sains, teknologi, teknik, dan matematika (Laforce et al., 2017). Di angkatan kerja Amerika Serikat, bidang STEM dianggap sebagai krisis oleh banyak orang di bidang pendidikan, pemerintahan, dan industri (Kaniawati et al., 2021). Masih relatif sedikit siswa SMA yang termotivasi untuk memilih karir di bidang STEM. Dengan demikian, perlu dipersiapkan untuk memasuki karir STEM di masa depan. Pilihan karir dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor intrinsik yang mempengaruhi pilihan karir antara lain minat, kemampuan, dan kepribadian serta faktor ekstrinsik yang mempengaruhi pilihan karir. Mereka termasuk orang tua, guru, dan teman-teman. Sekolah dapat menginspirasi dan memperkuat karir siswa di STEM. Adapun mata pelajarannya meliputi matematika, sains, teknik dan atau teknologi, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan setiap bidang studi, dimana karirnya seperti fisikawan, kimiawan, ilmuwan, matematikawan, dokter hewan, dan teknisi.

Adapun konten STEM adalah konten sains yang diajarkan menggunakan pendekatan STEM (Çevik, 2017). Konten STEM dapat dilihat dari kandungan materi IPA dan matematika yang terdapat pada buku teks siswa yaitu buku IPA dan matematika. Pemerintah telah mengembangkan buku ajar yang digunakan siswa. Buku ini disusun oleh ahli substansi materi, ahli pembelajaran, dan ahli lain yang terlibat. Buku

Kurikulum 2013 telah digunakan oleh siswa dan guru di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Dari pemaparan tersebut, secara umum perspektif siswa tentang minat, karir, dan konten STEM termasuk dalam kategori positif. Sedangkan perspektif siswa terhadap minat STEM berada pada kategori kurang positif dengan persentase 20%. Perspektif mahasiswa terhadap karir STEM berada pada kategori kurang positif dengan persentase 19% serta perspektif mahasiswa terhadap konten STEM berada pada kategori kurang positif sebanyak 38%. Menurut (Kaniawati et al., 2021) minat secara signifikan mempengaruhi studi STEM dan pilihan karir, serta kinerja siswa di STEM. Siswa yang tidak tertarik dengan STEM tidak akan dapat menyelesaikan STEM dengan baik. Minat belajar pada mata pelajaran tertentu (misalnya fisika, matematika, bahasa Inggris) berkaitan dengan prestasi pada setiap siswa. Misalnya, siswa yang tertarik pada komputer biasanya mendapatkan nilai yang lebih baik daripada siswa yang tidak memiliki minat yang sama. Jika dianalisis dari hasil ulangan harian pada pelajaran IPA, rata-rata skor siswa sebelum dan sesudah pembelajaran STEM berubah. Berdasarkan bukti nilai harian dan hasil wawancara dengan guru, rata-rata nilai ulangan harian siswa setelah penerapan pembelajaran STEM mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki minat, karir, dan konten STEM yang baik.

2. Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep merupakan salah satu hal penting dalam pembelajaran fisika (Somroob & Wattanakasiwich, 2017). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui proyek STEM. Siswa diminta untuk membuat

proyek jembatan hidrolik sederhana yang merupakan salah satu produk teknologi yang dapat memecahkan masalah dunia nyata (Rachmayati et al., 2020). Dalam hal ini, siswa yang tidak memiliki pemahaman akan mengalami kesulitan dalam merancang dan membangun sebuah *prototype*, sehingga terhindar dari pembelajaran yang bermakna yang diberikan oleh proyek STEM.

Namun, secara umum, pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan dan berdasarkan hasil analisis N-gain diperoleh indeks gain 0,64 yang menunjukkan peningkatan penguasaan konsep. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan proyek STEM berdampak positif terhadap pemahaman konsep siswa. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran diarahkan pada pengetahuan awal siswa yang lebih mendalam sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilannya dalam memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan. Dalam pembelajaran STEM siswa diberi kesempatan untuk memperoleh pembelajaran yang lebih realistis dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Rachmayati et al., 2020). Siswa juga dapat mengembangkan kemampuannya dalam menghubungkan sains, teknologi, teknik dan matematika yang dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa menjadi lebih baik. Dalam implementasinya, STEM menyatukan penyelidikan ilmiah dan desain rekayasa melalui empat disiplin ilmu di mana penyelidikan ilmiah melibatkan pertanyaan yang dapat dijawab melalui penyelidikan, sedangkan desain rekayasa melibatkan perumusan masalah yang dapat diselesaikan dengan membangun dan menguji prototipe selama proses desain. Desain dan inkuiri ilmiah secara rutin digunakan bersama sebagai solusi rekayasa dalam memecahkan masalah dunia nyata (Rachmayati et al., 2020). Selain itu, proyek yang dipandu oleh pertanyaan akan

mendorong siswa untuk melakukan eksperimen dan memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan yang mereka dapatkan ke dalam proyek.

3. *Kreativitas*

Pada abad ke-21, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat sehingga mempengaruhi kehidupan dan jenis pekerjaan masyarakat saat ini. Pergeseran jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 pun secara bertahap mulai digantikan oleh mesin. Sebaliknya kebutuhan akan pemikiran ahli dan komunikasi yang kompleks semakin meningkat. Kemandirian, fleksibilitas, komunikasi, dan kreativitas adalah kata kunci yang menggambarkan ekspektasi pekerjaan mereka di masa depan. Menyadari hal tersebut, sistem pendidikan Indonesia berupaya mempersiapkan generasi penerus untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 dan mengembangkan pendidikan kreatif menuju “Indonesia Kreatif 2045” (Mayasari et al., 2016). Namun, proses pembelajaran masih didominasi oleh hafalan dan ceramah sebagai strategi pengajaran utama. Sehingga kegiatan untuk mengasah kreativitas siswa masih sulit untuk dilakukan.

Kegiatan kreativitas merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki dengan standar kompetitif di abad 21 dalam memasuki era informasi dan pengetahuan (Egan et al., 2017). Namun, secara umum kreativitas siswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan pembuatan produk kreatif dengan mengintegrasikan pengetahuan STEM. Selain itu, pembuat produk kreatif dengan mengintegrasikan pengetahuan STEM juga mampu mempengaruhi tingkat kreativitas siswa ditinjau dari empat unsur kreativitas (person, process, product, dan press). Urutan unsur-unsur

keaktivitas yang dikurangi dari penelitian ini: proses, pers, produk, dan orang. Selanjutnya, siswa juga dapat menunjukkan respon positif dari kegiatan membuat produk kreatif dengan mengintegrasikan pengetahuan STEM. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran STEM dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan kreativitas siswa.

4. *Memecahkan Masalah*

Guru dapat merancang STEM untuk meningkatkan pemecahan masalah siswa, mengevaluasi rencana dan pengambilan keputusan (Priemer et al., 2020). Selain itu, pembelajaran STEM mendorong peserta didik untuk berlatih dalam situasi dunia nyata. Dengan cara ini, peserta didik dapat meninjau dan menggabungkan pemahaman dan penerapan STEM dengan cara yang lebih bermakna.

Pembelajaran STEM dinilai dapat menjadi inovasi dan mampu melatih memecahkan masalah sehari-hari yang tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi dan inovasi (Apriyani et al., 2019). Secara khusus, melalui integrasi teknik, mahasiswa dapat memiliki kesadaran dalam peran dan kehadirannya di masyarakat dan dapat menerapkan proses desain teknik untuk menemukan solusi dari masalah dunia nyata. Pembelajaran fisika yang terintegrasi dengan STEM akan memudahkan siswa dalam membuat desain produk. Pembelajaran STEM dengan desain engineering akan melatih siswa untuk menggunakan pengetahuan ilmiah dan matematis dalam membuat produk. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna dalam mengatasi masalah nyata.

Namun, secara umum pembelajaran STEM berpotensi meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Kemampuan dalam memecahkan masalah ini dilakukan dalam lima tahapan: 1)

Memfokuskan permasalahan; 2) Mendeskripsikan masalah kedalam konsep fisika; 3) Merancang solusi; 4) Merealisasikan rancangan solusi, dan; 5) Mengevaluasi hasil jawaban. Pembelajaran fisika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran STEM disarankan untuk digunakan dalam mata pelajaran listrik dinamis, agar kemampuan memecahkan masalah siswa meningkat.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran STEM merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan abad 21. Selain itu, tantangan tersebut semakin berat dengan keadaan *new normal*, karena pembelajaran dilakukan menjadi daring. Hal tersebut membuat proses pembelajaran harus selalu berdampingan dengan teknologi. Sehingga, penggunaan STEM menjadi semakin relevan untuk digunakan. Terlebih, pembelajaran STEM memberikan dampak positif pada minat, karir, dan konten STEM, pemahaman konsep, kreativitas, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih dapat dilakukan, meskipun dalam kondisi *new normal* seperti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, R., Ramalis, T. R., & Suwarma, I. R. (2019). Analyzing Student's Problem Solving Abilities of Direct Current Electricity in STEM-based Learning. *Journal of Science Learning*, 2(3), 85–91. <https://doi.org/10.17509/jsl.v2i3.17559>
- Çevik, M. (2017). Content analysis of stem-focused education research in Turkey. *Journal of Turkish Science Education*, 14(2), 12–26. <https://doi.org/10.12973/tused.10195a>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Egan, A., Maguire, R., Christophers, L., & Rooney, B. (2017). Developing creativity in higher education for 21st century learners: A protocol for a scoping review. *International Journal of Educational Research*, 82, 21–27. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2016.12.004>
- Handajani, S., Pratiwi, H., & Mardiyana, M. (2018). The 21st century skills with model eliciting activities on linear program. *Journal of Physics: Conference Series*, 1008(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1008/1/012059>
- Hidayah, D. N., Kaniawati, I., & Anwar, S. (2020). Implementation of STEM Book in Earthquake Themes. *4th Asian Education Symposium (AES 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200513.039>
- Kaniawati, I., Rayuni, S., Suwarma, I. R., Imansyah, H., & Suhendi, E. (2021). An Analysis of Student Perspectives on STEM Through Science Learning in Bandung City , Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(6), 4340–4346.
- Laforce, M., Noble, E., & Blackwell, C. (2017). Problem-based learning (PBL) and student interest in STEM careers: The roles of motivation and ability beliefs. *Education Sciences*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/educsci7040092>
- Mayasari, T., Kadarohman, A., Rusdiana, D., & Kaniawati, I. (2016). Exploration of student's creativity by integrating STEM knowledge

- into creative products. *AIP Conference Proceedings*, 1708. <https://doi.org/10.1063/1.4941191>
- Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2016_Nomor019.pdf, 2–5. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/727.bpkp&ved=2ahUKEwj6PCipczsAhVZwjgGHZsXBm0QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw28ZK0JWPXJ5N-h7ZBooulK>
- Nasution, A. R., & Nandiyanto, A. B. D. (2021). Utilization of The Google Meet and Quiziz Applications in The Assistance and Strengthening Process of Online Learning During The Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Educational Research and Technology*, 1(1), 21–31. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJERT/article/view/33367>
- Priemer, B., Eilerts, K., Filler, A., Pinkwart, N., Rösken-Winter, B., Tiemann, R., & Zu Belzen, A. U. (2020). A framework to foster problem-solving in STEM and computing education. *Research in Science and Technological Education*, 38(1), 105–130. <https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1600490>
- Rachmayati, D. A., Kaniawati, I., & Hernani, H. (2020). Enhancing concept mastery of students through STEM-project in scientific inquiry learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1469(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1469/1/012149>
- Rochman, C., Nasrudin, D., Rokayah, R., Mulyani, S., Pertiwi, C. S. R., & Ginanjar, G. (2020). DISTANCE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: STRENGTHENING OF CHARACTER, PRODUCTIVITY, AND STEM COMPETENCY. *Jurnal Pena Sains*, 7(2), 130–140. <https://doi.org/10.21107/jps.v7i2.8261>
- Solekhah, H. (2020). Distance Learning of Indonesian Early Childhood Education (PAUD) during the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Emerging Issues in Early Childhood Education*, 2(2), 105–115. <https://doi.org/10.31098/ijeiece.v2i2.409>

- Somroob, S., & Wattanakasiwich, P. (2017). Investigating student understanding of simple harmonic motion. *Journal of Physics: Conference Series*, 901(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/901/1/012123>
- Zhao, L., Wang, Y., & Ge, X. (2020). Online teaching course design and practice of college physics. *Proceedings - 2020 International Symposium on Advances in Informatics, Electronics and Education, ISAIEE* 2020, 272–275. <https://doi.org/10.1109/ISAIEE51769.2020.00067>

ARAH PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DAN PEMARTABATAN JATI DIRI BANGSA

Khaerudin Kurniawan
Universitas Pendidikan Indonesia
email: khaerudinkurniawan@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021
Reviewed : 18 November 2021
Accepted : 8 December 2021
Published : 15 December 2021

Abstrak

Pengajaran bahasa Indonesia berkaitan erat dengan permartaban jati diri bangsa. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dan fungsi pengajaran bahasa Indonesia yang tidak hanya menuntut siswa terampil berbahasa tetapi mampu menggerakkan segala kemampuannya melalui bahasa. Dalam artikel ini, dibahas beberapa pokok pikiran terkait dengan arah pengajaran bahasa Indonesia yaitu masalah kemultibahasaan, politik pengajaran bahasa Indonesia, pemakaian bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmiah, bahasa Indonesia sebagai alat perubahan sosial-politik, potensi bahasa Indonesia sebagai alat perubahan sosial-politik, dan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pokok bahasan ini dijabarkan menggunakan metode analisis deskripsi dengan telaah sumber rujukan yang relevan. Adapun simpulan yang dapat diambil adalah pengajaran bahasa Indonesia saat ini merupakan salah satu upaya dalam memartabatkan dan jati diri bangsa, termasuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) yang profesional.

Kata kunci: pengajaran bahasa Indonesia, jati diri bangsa

Pendahuluan

Pengajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik mampu mengungkapkan gagasannya mengenai masalah yang berkaitan dengan ilmu, teknologi, dan/atau budaya yang sedang dipelajarinya. Adapun keterampilan dasar yang harus dicapai peserta didik adalah

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis¹. Secara lebih luas, pengajaran bahasa Indonesia sangat berkaitan erat dengan bidang lain yang lebih kompleks.² Pengajaran itu difokuskan pada kemahiran menggunakan bahasa yang benar, jelas, efektif, dan sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi, dan alat adaptasi serta kontrol sosial.

Kenyataan menunjukkan, sekarang ini pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah kita belum mencapai hasil yang memuaskan. Di Indonesia, ada LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan), kurikulum bahasa silih berganti dan terus disempurnakan, buku pelajaran bahasa disayembarakan, dinilai, dan dipublikasikan melalui laman (*website*) secara gratis (buku sekolah elektronik), guru-guru bahasa dan sastra dilatih, dibina, dan ditingkatkan kualifikasinya. Namun, keluaran pendidikan bahasa Indonesia tetap dianggap di bawah mutu yang layak. Kondisi tersebut tentunya berdampak juga pada hasil belajar peserta didik³. Patut disayangkan bahwa pihak yang berwenang tidak mampu merancang, merencanakan, dan mendesain pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing, padahal kita hidup dalam masyarakat multikultural dan multibahasa.

Kemahiran berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan peserta didik sebenarnya akan memperkuat ketahanan budaya masyarakat

¹ Sarah, S. “*Pengaruh Model Pembelajaran dan Kecerdasan Intelektual terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Baku*” Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia 1, no.1 (2019): 82-96, hlm 83.

² Arifian, F. D. “*Pendekatan PAIKEM sebagai Solusi atas Permasalahan Pembelajaran Bahasa Indonesia*”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio 9, no. 2 (2017): 148-164, hlm 184.

Indonesia dalam menghadapi masuknya bahasa asing dalam era globalisasi. Pemakaian bahasa asing yang berlebihan dewasa ini dianggap sebagai akibat arus globalisasi. Selain itu, sebagian orang menganggap bahwa bahasa Indonesia merupakan penghambat proses komunikasi secara global⁴. Ini menjadi tantangan yang besar dalam mengimplementasikan pengajaran bahasa Indonesia di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu didesain kembali ihwal politik pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia lebih bermartabat dan berjati diri bangsa.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki tujuan dan fungsi yaitu sebagai lambang kebangsaan negara, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat komunikasi antardaerah dan antarkebudayaan. Adapun secara khusus, mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki tujuan dan fungsi seperti 1) meningkatkan dan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu dengan baik; 2) memberikan pendidikan sesuai kemampuan siswa; 3) memberikan dasar yang lebih ilmiah dalam pengajaran; 4) meningkatkan kemampuan siswa dengan berbagai media komunikasi secara lebih konkret; 5) memberikan pengetahuan yang bersifat langsung; dan 6) menyajikan pendidikan yang lebih luas.⁵ Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 memandatkan bahwa secara umum bahasa Indonesia

³ Kurniawan, M. S., Wijayanti, O., & Hawanti, S. “*Problematika dan Strategi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah Sekolah Dasar*”. Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD), 1, no. 1 (2017): hlm 65.

⁴ Annisa, P. “*Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi*”. osf.io, (2019): 1-12, hlm 5.

⁵ Rambe, R. N. K. “*Penerapan strategi index card match untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia*”. Jurnal tarbiyah, 25 no. 1, (2018): 93-124. hlm. 102.

digunakan sebagai bahasa resmi negara, pengantar pendidikan, sarana pengembangan, serta penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan juga media massa.⁶

Melihat fungsi mata pelajaran Bahasa Indonesia yang strategis itu, politik pengajaran bahasa Indonesia berkaitan pula dengan kedudukan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, etnis, golongan, dan budaya. Karena statusnya yang demikian itulah tidak mengherankan jika bahasa Indonesia sekaligus menjadi media untuk menyampaikan bahan ajar apa pun di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

Sebagai bahasa resmi (negara), bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan dan kenegaraan. Komunikasi yang diselenggarakan oleh badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara seperti DPR/DPD/MPR/Presiden dalam negara kesatuan Republik Indonesia mutlak menggunakan bahasa Indonesia. Peran ganda bahasa Indonesia tersebut membuat guru harus dapat berbahasa Indonesia demi tugas keguruannya. Di samping itu, menyebabkan diangkatnya guru bahasa Indonesia khusus untuk menyampaikan pelajaran yang disebut bahasa Indonesia itu. Bahkan dengan hadirnya UU No. 14/2005 tentang *Guru dan Dosen*, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang *Guru*, diharapkan proses pendidikan guru ke depan diselenggarakan secara profesional,

⁶ Putri, N. P. "Eksistensi bahasa indonesia pada generasi millennial." Widyabastra Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 5 no. 1, (2017): 45-49. hlm

yang pada gilirannya akan dihasilkan guru-guru (Bahasa dan Sastra Indonesia) yang memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian⁷.

Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimanakah arah dan politik pengajaran bahasa Indonesia di sekolah? Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, pengajaran bahasa Indonesia mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan akal budi serta menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan dan untuk memelihara hubungan kerja sama (interaksi, komunikasi, dan transaksi) antarpenerusnya.

Dijalankannya kedua misi itu akan melahirkan kebudayaan dan peradaban manusia dengan segala bentuknya. Dalam kaitannya dengan misi tersebut, bahasa Indonesia setakat ini merupakan bahasa yang seratus persen mampu menjalankan misinya. Dengan demikian, bahasa Indonesia juga mampu melahirkan berbagai bentuk kebudayaan dan peradaban yang berkadar keindonesiaan.

Di samping bahasa Indonesia, di tanah air kita ini hidup dan berkembang pula ratusan bahasa daerah. Sesuai dengan penjelasan Pasal 36, UUD 1945⁸, yang menyatakan bahwa bahasa daerah sebagai salah satu kebudayaan bangsa yang dipelihara dan digunakan oleh pemakainya dilindungi oleh negara. Hal itu mengisyaratkan bahwa bahasa-bahasa daerah itu perlu pula dipelihara dalam arti dibina dan terus dikembangkan.

Jika dihubungkan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah memberikan sumbangan yang berarti terhadap bahasa Indonesia, yaitu dalam hal pemerayaan kosakata. Eksistensi bahasa daerah dalam bahasa

45.

⁷ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang *Guru Dan Dosen*

⁸ Pasal 36, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Indonesia pun makin melimpah pemerayaan variasi kosakata bahasa Indonesia⁹. Sebaliknya, bahasa Indonesia pun memberikan sumbangan yang cukup pula terhadap kosakata bahasa daerah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa hanya bahasa-bahasa daerah yang “kuat” yang banyak memberikan sumbangan terhadap bahasa Indonesia. “Kuatnya” satu bahasa daerah, antara lain, ditentukan oleh jumlah penuturnya, perannya sebagai sarana pendukung utama kebudayaan kelompok etnis yang bersangkutan, dan perannya sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Bagaimanapun, bahasa daerah itu merupakan lambang jati diri dan lambang kebanggaan kelompok etnis pemakainya. Oleh karena itu, eksistensi bahasa daerah perlu dipertahankan, dikembangkan, dan diajarkan di sekolah.

Sebagai akibat dari adanya hubungan dengan dunia luar, bangsa kita juga mengenal bahasa asing. Perkenalan bangsa kita dengan bahasa asing sudah terjadi sejak dahulu kala. Masuknya bahasa asing itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat dan bahasa Indonesia. Dampak positif yang diperoleh adalah bertambahnya kosakata bahasa melalui penyerapan bahasa asing yang memang diperlukan karena kosakata asing itu belum ada dalam bahasa Indonesia dan sejalan dengan kebutuhan era pasar bebas saat ini¹⁰.

Dampak negatifnya terlihat, terutama dalam dasawarsa terakhir ini, pada masyarakat yang merasa bangga menggunakan bahasa asing secara sepotong-sepotong, alih-alih menggunakan bahasa Indonesia

⁹ Dhanawaty, N. M. “*Perlunya Penyerapan Unsur Sapaan Kekerabatan Bahasa Daerah yang Sedang Mengindonesia*”. Tutur: Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara, 3 no. 2, (2017): 132—140. hlm 133.

¹⁰ Munadzdzofah, O. “*Pentingnya Bahasa Inggris, China, dan Jepang Sebagai bahasa Komunikasi Bisnis di era Globalisasi*”. VOCATIO: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretari 1 No. 2: (2018). hlm 70.

secara utuh dalam berkomunikasi dengan kawan bicarannya. Bahasa Indonesia terkadang dinomorduakan dan bahasa asing dinormosatukan¹¹. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan nasional kita tetap mencantumkan mata pelajaran bahasa asing. Walaupun hasilnya sampai saat ini belum memuaskan, mata pelajaran itu tetap ditempatkan sebagai mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Dengan modal yang sedikit itu, peserta didik diharapkan dapat mengembangkannya sendiri melalui berbagai media dan jalur pendidikan lainnya.

Demikianlah keanekaragaman atau kebhinekaan bahasa yang ada dan digunakan dalam masyarakat kita. Hal itulah sebenarnya yang menimbulkan permasalahan pengajaran bahasa Indonesia di tengah pluralisme bahasa. Secara umum, masalah yang perlu kita tanggapi adalah: (1) bagaimanakah menyikapi keadaan kebahasaan dan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah yang cukup rumit itu, dan (2) bagaimanakah arah dan posisi pengajaran bahasa Indonesia yang berdimensi kemultibahasaan itu?

Metode

Analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam artikel ini menggunakan menggunakan metode analisis deskripsi. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis adalah mengumpulkan data pustaka yang relevan, mencatat bagian-bagian yang terpenting, kemudian mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Penggunaan metode ini sejalan dengan pendapat ahli yang mengatakan bahwa metode kualitatif bertujuan untuk memahami makna, memilah dan memilih data, dan mengoordinasikan

¹¹ Anto, P., Hilaliyah, H., & Akbar, T. "Pengutamakan Bahasa Indonesia: Suatu Langkah Aplikatif" *El Banar: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*. 2 no. 1: (2019). 17-24. hlm. 18

data¹². Terdapat beberapa bagian yang dideskripsikan dalam kajian ini yaitu: 1) masalah kemultibahasaan; 2) politik pengajaran bahasa Indonesia; 3) pemakaian bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmiah; 4) bahasa Indonesia sebagai alat perubahan sosial-politik; 5) potensi bahasa Indonesia sebagai alat perubahan sosial-politik; dan 6) pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.

Pembahasan

Masalah Kemultibahasaan

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kesetiaan masyarakat kita untuk berbahasa Indonesia masih lemah. Munculnya, generasi milenial membuat bahasa Indonesia dianggap kuno¹³. Hal ini ditunjukkan oleh keengganan kelompok masyarakat tertentu berbahasa Indonesia dalam kelompok karena ia merasa bahwa bahasa Indonesia kurang akrab. Ada pula keengganan itu disebabkan oleh anggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa formal, yang hanya digunakan dalam kesempatan tertentu. Inilah masalah kemultibahasaan yang kita hadapi dewasa ini.

Kini, bahasa Indonesia telah menjadi wahana komunikasi pengungkapan pikiran, penalaran, dan pendapat yang sangat ampuh. Di semua sektor, perkembangan kosakata meningkat dengan cepat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi pertama (1988) hanya memuat perbendaharaan kata sekira 72.000 entri. Dalam edisi kedua (1993) sudah memuat kosakata sebanyak 80.000 entri. Ini berarti dalam kurun waktu

¹² Sugiono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 248.

¹³ Arisandy, Desy, Dheka Prima Rizkika, dan Tri Disa Astika. "Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Generasi Milenial Di Era Industri" BAHASTRA Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 3 no. 2. (2019): 247-251. hlm 250.

lima tahun (1988—1993) terdapat tambahan kosakata sebanyak 8.000 entri. Dari tahun 1993 sampai sekarang (2021, atau selama 28 tahun), kosakata bahasa Indonesia terus berkembang¹⁴. Hal ini tampak dalam kosakata yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi V.

Arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi situasi kebahasaan di Indonesia. Tanpa batas-batas pengendalian yang jelas, “kompetisi” di antara ketiga bahasa itu (Indonesia, daerah, dan asing) akan merugikan bahasa yang berada pada posisi yang lemah. Oleh karena itu, perlu dirancang, direncanakan, dan direposisi kembali ihwal garis haluan pembinaan, pengembangan, dan politik pengajaran bahasa Indonesia secara tegas agar bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing itu memiliki posisi/kedudukan dan fungsi masing-masing dan saling menunjang.

Karena masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, kelompok etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Dengan bahasa ibu dan daerah yang berbeda-beda, maka penutur bahasa Indonesia memperlihatkan corak yang monolingual, bilingual, atau multilingual¹⁵. Sehubungan dengan maraknya pemakaian bahasa asing, misalnya, corak itu akan berubah menjadi multilingual pada kelompok penutur bahasa tertentu.

Penutur monolingual pada umumnya adalah mereka yang tinggal di pedalaman atau perdesaan terpencil dan termasuk ke dalam lapisan

¹⁴ Sudartomo Macaryus dan Die Bakti Wardoyo Putro, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Menuju Kelengkapan dan Kebenaran Informasi”. makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia, (PIBSI) XL 2018, hlm 673.

¹⁵ Nurcahyono. “Pendidikan Multikultural di Indonesia: Analisis Sinkronis dan Diakronis” *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2 no. 1. (2018): 105-115. hlm 106.

masyarakat yang tidak/kurang memperoleh pendidikan formal karena mereka hanya menguasai dan menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa daerahnya. Kelompok monolingual ini juga terdapat di kota-kota besar terutama generasi muda. Sebagai akibat dari begitu heterogennya masyarakat kota besar, ditambah pula oleh kemungkinan berbedanya kelompok etnis antara ibu dan ayah mereka, maka generasi muda di kota-kota besar juga termasuk ke dalam penutur yang monolingual. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia.

Adapun kelompok yang multilingual hampir dapat dipastikan terdapat pada golongan masyarakat yang terpelajar, sebab selain menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia, mereka juga menguasai salah satu atau beberapa bahasa asing. Dalam situasi kebahasaan yang demikian, kontak bahasa berlangsung antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kontak bahasa itu dapat mengakibatkan seseorang dapat diidentifikasi sebagai penutur yang monolingual, bilingual, atau multilingual sangat erat kaitannya, antara lain dengan tingkat pendidikan, latar belakang sosial, dan profesi yang bersangkutan.

Proses saling mempengaruhi ketiga bahasa itu (Indonesia, daerah, dan asing) berkorelasi dengan faktor “kuat lemahnya” bahasa yang bersangkutan. Kendatipun belum pernah dilakukan penelitian yang representatif mengenai hal itu, dapat dinyatakan bahwa secara potensial bahasa Indonesia dapat mempengaruhi bahasa daerah dan bahasa Indonesia pada gilirannya dapat dipengaruhi bahasa asing. Seperti kita amati sekarang, banyak peristilahan dan kosakata bahasa Inggris yang masuk ke dalam kosakata dan istilah bahasa Indonesia.

Politik Pengajaran Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan budaya bangsa memiliki sejarah perkembangan yang unik, yaitu lahir mendahului kemerdekaan kita¹⁶. Setelah itu, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai bahasa perjuangan politik kebangsaan. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai salah satu sarana untuk meletakkan dasar kesadaran bersama terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika kita refleksikan kembali ke masa lampau, dapat dibayangkan betapa beratnya perjuangan bahasa Indonesia, baik sebagai cerminan kehidupan budaya maupun sebagai sarana komunikasi sosial politik. Betapa tidak, bahasa Indonesia pada waktu itu harus bersaing dengan berbagai bahasa daerah yang tumbuh dan berakar dengan sangat kuat di berbagai suku bangsa. Beruntunglah “nasib” bahasa Indonesia karena pendiri republik ini berwawasan luas untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, maka diangkatlah bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mendapat kedudukan/posisi yang terhormat dan bermartabat setelah proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945-nya yang di antaranya menyebutkan bahwa “bahasa negara adalah bahasa Indonesia” (lihat Bab XV, pasal 36). Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga fungsi dan kedudukannya pun terus bertambah.

Seperti dinyatakan dalam Seminar Politik Bahasa Indonesia (1975), telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (persatuan) dan sebagai bahasa resmi (negara). Dalam

kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Adapun kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di dalam pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan (4) alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi¹⁷.

Setelah lebih 76 tahun Indonesia merdeka dan 93 tahun dikumandangkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dan menakjubkan di berbagai sektor kehidupan. Kini bahasa Indonesia telah menjadi wahana komunikasi pengungkapan pikiran, penalaran, dan pendapat yang sangat ampuh. Di semua sektor, perkembangan kosakata meningkat dengan cepat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi pertama (1988) hanya memuat perbendaharaan kata sekitar 72.000 lema (*entry*). Dalam edisi kedua (1993) sudah memuat kosakata sebanyak 80.000 lema. Ini berarti dalam kurun waktu 5 tahun terdapat penambahan kosakata sebanyak 8.000 lema. Dari tahun 1993 sampai dengan sekarang (2021 atau sekitar 28 tahun), bahasa Indonesia terus berkembang. Bahkan dalam edisi ketiga saja, KBBI memuat tidak kurang dari 100.000 lema. Demikian

¹⁶ Repelita, T. " *Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia (Ditinjau dari Prespektif Sejarah Bangsa Indonesia)*" Jurnal Artefak 5 no. 1. (2018). 45-48. hlm. 106.

¹⁷ Halim, A. "*Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia*" (1976): Politik Bahasa Nasional 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

juga pengaruhnya bahasa Indonesia telah berkembang ke mancanegara. Kini bahasa Indonesia telah diajarkan sebagai bahasa kedua (asing) di lebih 75 negara di dunia.

Jika pada akhir tahun 1920-an penutur bahasa Melayu (sebagai cikal bakal bahasa Indonesia) hanya berjumlah 4,9% di antara 30 juta orang penduduk. Sekarang ini, menurut sensus Badan Pusat Statistik (2010), kemajuan pemakai bahasa Indonesia sangat mengesankan. Di antara penduduk yang berusia lima tahun ke atas terlihat tiga kelompok. *Pertama*, anggota masyarakat yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kira-kira 79,5% dari jumlah penduduk Indonesia. *Kedua*, orang yang mengaku dapat berbahasa Indonesia tetapi tidak memakainya sebagai alat komunikasi sehari-hari berjumlah 19,9%. *Ketiga*, orang yang menggunakan bahasa asing berjumlah kurang lebih 0,3%¹⁸. Diproyeksikan oleh BPS, pada tahun 2010 (bersamaan dengan era perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik), semua orang Indonesia di atas lima tahun atau 215 juta orang (hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia sekarang) dapat memahami bahasa Indonesia dengan berbagai tingkat kemahiran. Yang menarik dari angka-angka tersebut adalah jumlah penduduk yang belum memahami bahasa Indonesia hampir “sama dan sebangun” dengan jumlah penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemakmuran.

Angka-angka statistik di atas menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kemahiran berbahasa Indonesia dengan tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia. Perolehan bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan komunikatif tercapai lewat pendidikan formal. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik yang

¹⁸ Hasil Sensus Badan Pusat Statistika

bersangkutan dapat memakai dan mengungkapkan ekspresinya dalam bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi situasi kebahasaan di Indonesia. Tanpa batas-batas pengendalian yang jelas, “kompetisi” di antara ketiga bahasa itu (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) akan merugikan bahasa yang berada pada posisi yang lemah. Oleh karena itu, perlu direncanakan dan direposisi kembali ihwal garis haluan, rencana strategis, dan politik pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara tegas agar bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing itu memiliki posisi/kedudukan yang jelas dan fungsi masing-masing yang saling menunjang.

Karena masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa ibu dan daerah yang berbeda-beda, maka penutur bahasa Indonesia memperlihatkan corak yang monolingual atau bilingual. Sehubungan dengan pemakaian bahasa asing, misalnya, corak itu akan berubah menjadi multilingual pada kelompok penutur tertentu. Jadi, sudah tidak asing lagi jika Indonesia disebut sebagai bangsa yang multikultural¹⁹.

Kelompok monolingual umumnya adalah mereka yang tinggal di pedalaman atau perdesaan terpencil dan termasuk ke dalam lapisan masyarakat yang tidak/kurang memperoleh pendidikan formal karena

¹⁹ Saddam, S., Mubin, I., & SW, D. E. M. “*Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural*”. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5 no.2. (2020): 136-145. hlm 137.

mereka hanya menguasai dan menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa daerahnya. Kelompok monolingual ini juga terdapat di kota-kota besar terutama generasi muda. Sebagai akibat begitu heterogennya masyarakat kota besar, ditambah pula oleh kemungkinan berbedanya kelompok etnis antara ibu dan ayah mereka, maka generasi muda di kota-kota besar juga termasuk ke dalam penutur yang monolingual. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia. Adapun kelompok yang multilingual hampir dapat dipastikan terdapat pada golongan masyarakat yang terpelajar sebab selain menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia, salah satu bahasa asing juga dikuasainya.

Dalam situasi kebahasaan yang demikian, kontak bahasa berlangsung antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kontak bahasa itu dapat mengakibatkan seseorang dapat diidentifikasi sebagai penutur yang monolingual, bilingual, atau multilingual, sangat erat kaitannya antara lain dengan tingkat pendidikan, latar belakang sosial, dan profesi yang bersangkutan. Pesatnya arus teknologi informasi dan komunikasi (infokom), mengakibatkan makin gencar dan intensifnya proses saling mempengaruhi di antara ketiga bahasa itu sehingga yang terjadi adalah bahasa yang “kuat” akan mempengaruhi bahasa yang “lemah”.

Proses saling mempengaruhi ketiga bahasa itu berkorelasi dengan faktor “kuat-lemahnya” bahasa yang bersangkutan. Walaupun belum pernah dilakukan penelitian yang representatif mengenai hal itu, dapat dinyatakan bahwa secara potensial bahasa Indonesia dapat mempengaruhi bahasa daerah dan bahasa Indonesia pada gilirannya dapat dipengaruhi oleh bahasa asing. Seperti kita amati sekarang, banyak

peristilahan dan kosakata serta istilah bahasa Inggris, misalnya, yang masuk ke dalam bahasa Indonesia.

Jika posisi tersebut kita kaitkan dengan bahasa Indonesia, pertanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya adalah seberapa banyak orang Indonesia yang dapat dilibatkan ke dalam pemenuhan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai sarana pemenuhan dan pengembangan peradaban modern menuju Indonesia baru yang bermartabat dan yang kita cita-citakan itu? Untuk itu, terlebih dahulu harus diketahui jumlah penduduk Indonesia yang dapat digolongkan sebagai penutur bahasa Indonesia yang betul-betul mahir berbahasa Indonesia.

Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Ilmiah

Para ilmuwan, khususnya yang berasosiasi dengan lingkungan kampus (perguruan tinggi) merupakan masyarakat ilmiah. Salah satu yang membedakan mereka dari masyarakat lain ialah penguasaan bahasa ragam ilmiah. Dapat dinyatakan bahwa bahasa komunikasi ilmiah adalah dialek sosial mereka. Tanpa penguasaan bahasa komunikasi ilmiah, sang ilmuwan tampak jinak dan kurang vokal²⁰.

Hakikat bahasa komunikasi ilmiah sekurang-kurangnya didukung oleh tiga variabel: (1) kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), (2) penguasaan bahasa, dan (3) pengetahuan umum yang luas. Penguasaan pengetahuan umum tampaknya lebih mudah dikejar. Tinggal ia membaca buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan akses melalui internet.

Sebaliknya, kemampuan berpikir kritis, berdebat, beradu argumentasi dalam bahasa komunikasi ilmiah tampaknya agak sulit

²⁰ Alwasilah, A.Ch. *Sosiologi Bahasa*. (Bandung: Angkasa, 1993) hlm. 41.

ditanamkan kepada kalangan masyarakat akademik. Masalahnya, paling tidak ada tiga hambatan kultural yang masih menghantui kalangan masyarakat akademik kita. Ketiga hambatan itu harus didobrak dan segera dilakukan transformasi, yaitu: (1) warisan kultural-edukasional, (2) kompetensi dan performansi linguistik, dan (3) masalah psikologis. Untuk memerangi ketiga hambatan tersebut perlu dilakukan upaya pembenahan pendidikan yang serius dan membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Pembenahan pendidikan bukan saja secara formal pada jenjang pendidikan dasar sampai universitas (perguruan tinggi), tetapi harus dimulai sejak dini, yakni pendidikan dalam keluarga (informal), dan pendidikan dalam masyarakat (nonformal).

Bahasa Indonesia sebagai bidang ilmu yang diajarkan sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah, sarana penalaran, dan berpikir kritis para peserta didik. Adapun secara umum tujuan pengajaran bahasa di satuan lembaga pendidikan antara lain adalah untuk mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia²¹. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa Indonesia saling bersinergi dengan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang secara otomatis akan memperoleh dampak pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi-informasi maju.

Hal itu merupakan kondisi yang memungkinkan bahasa Indonesia memperkaya konsep-konsep keilmuan baru yang belum terdapat dalam khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya dan teknologi akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan

²¹ Mulyana, A. T. *”Isu-isu kritis kebijakan bahasa dan pengajaran bahasa.”*

Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 4 no. 1, (2018): 1-7.
hlm. 4.

dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), termasuk bahasa dan sastra Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sekaligus berperan sebagai sarana berpikir kritis dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ipteks. Tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia dengan fungsi-fungsi tersebut, ipteks tidak akan tumbuh dan berkembang.

Di samping berfungsi sebagai alat komunikasi ilmiah, bahasa Indonesia juga bersifat terbuka (transparan). Adanya sifat keterbukaan bahasa Indonesia memungkinkan dirinya menjadi bahasa yang modern, bahasa yang fleksibel, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ipteks. Dampak keterbukaan itu tampak pada pertumbuhan dan perkembangan jumlah kosakata, istilah, dan konsep-konsep keilmuan baru dalam khasanah bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sebagai Alat Perubahan Sosial-Politik

Salah satu syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi, dan bahasa Indonesia tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak pernah terlepas dari kehidupan sosial-politik. Dalam konteks itulah terjadi persentuhan antara tingkah laku berbahasa dengan norma-norma sosial yang mengatur segala tingkah laku manusia.

Bahasa Indonesia adalah milik kelompok sosial yang sangat dibutuhkan, yang memungkinkan para anggotanya untuk saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja sama. Dapat dikatakan juga bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan maksud dan keinginan penutur. Selain itu, alat yang

paling efektif dalam melakukan komunikasi²². Dengan demikian, bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah salah satu perwujudan reaksi manusia terhadap tantangan-tantangan yang muncul akibat adanya interaksi sosial. Bahasa Indonesia merupakan respons verbal terhadap stimulus yang datang dari luar. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa dalam interaksi sosial, bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi tertentu (sebagai alat ekspresi diri, komunikasi, integrasi, dan adaptasi serta kontrol sosial).

Dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan kodrat kedua dari manusia Indonesia, di samping kodrat kemanusiaannya sebagai kodrat pertama. Bahasa Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di samping itu, bahasa Indonesia juga mampu berbuat tiga hal yang sangat *esensial-eksistensial* dalam kehidupan manusia.

Pertama, membuat manusia Indonesia mampu berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi di sini berarti berbagi pengalaman dengan orang lain dan mendengarkan pengalaman orang lain. *Kedua*, bahasa Indonesia merupakan landasan utama pada gambaran mental internal masyarakat Indonesia yang ditata dalam proses yang disebut berpikir. Yang dimaksud dengan kerangka berpikir di sini adalah bahasa Indonesia merupakan kerangka kerja penting bagi kemampuan manusia untuk melakukan penalaran dan proses kreatif. *Ketiga*, dengan bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses interaksi sosial. Tanpa bahasa, formulasi arah dan cita-cita perubahan sosial tidak mungkin terjadi. Dalam interaksi sosial itulah bahasa Indonesia memiliki

²² Gunawan, H. I., *Bahasa Indonesia: Lingua Franca Pencetak Karakter Negeri*. (Jawa Tengah, Penerbit CV. Pena Persada, 2020). hlm 1.

kekuatan untuk melakukan perubahan sosial. Dengan demikian, bahasa Indonesia mengandung daya pembebasan. Walaupun demikian, seperti halnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), pada umumnya bahasa Indonesia adalah sesuatu yang bersifat netral. Artinya, bahasa itu bisa menjadi baik atau buruk.

Bahasa Indonesia bisa menjadi baik jika dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membebaskan kesadaran manusia Indonesia dari keterbelengguannya. Sebaliknya, bahasa Indonesia bisa menjadi buruk jika dipakai untuk membelenggu, mengikat, dan menjajah kesadaran dan berpikir kritis pemakainya terutama jika bahasa Indonesia dipakai sebagai sarana manipulasi dan indoktrinasi (seperti tampak pada era orde baru).

Dengan demikian, bahasa Indonesia pada dasarnya terarah pada dua tujuan perubahan sosial-politik. *Pertama*, ke arah emansipasi, transformasi, kesadaran lewat konsistensi, dan lewat usaha untuk membuka selubung eufimisme sosial-politik yang cenderung membelenggu kesadaran dan cara berpikir penuturnya. *Kedua*, ke arah pembelengguan kesadaran manusia lewat manipulasi, indoktrinasi, dan kontrol sosial.

Bahasa Indonesia sebagai alat perubahan sosial-politik dapat dinyatakan sebagai berikut. Orang menggagas (merumuskan gagasan, pendapat, pikiran, dan lain-lain) dengan menggunakan kata-kata dan bahasa. Cita-cita pembebasan dan perubahan dirumuskan dalam dan melalui bahasa. Dengan demikian, dinamika pembebasan dan pembaharuan mengendap dalam kata.

Perlu diketahui, pengendapan itu bukanlah proses mematikan melainkan proses dinamika. Artinya, begitu dinamika itu terumuskan

dalam kata dan bahasa, dinamika itu tidak mati. Sebaliknya, pengendapan itu adalah proses dinamis dan menghidupkan. Begitu dinamika itu terumuskan dalam kata-kata dan bahasa, maka dinamika itu mentransformasi kata itu, sehingga kata dan bahasa itu menjadi hidup dan mempunyai daya ungkap untuk mendorong dan menggerakkan perubahan.

Oleh karena itu, realitas perubahan sosial-politik kiranya tidak mungkin tanpa bahasa. Dengan kata lain, bahasalah yang memungkinkan ada dan terjadinya gejolak dan perubahan sosial-politik. Dalam konteks yang aktual, perubahan sosial-politik dan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan, antara lain akibat adanya kata kunci *reformasi* dan kata-kata *kolusi*, *korupsi*, dan *nepotisme* (KKN). Kata-kata itu seolah-olah menjadi paham baru dalam konteks berpikir dan bertindak manusia Indonesia.

Ungkapan KKN (*korupsi*, *kolusi*, dan *nepotisme*) menjadi sangat populer karena menggambarkan secara “plastis” keadaan birokrasi, bisnis, pendidikan, bahkan hampir seluruh praktik hubungan sosial di masyarakat kita²³. Konotasi yang berkembang untuk ungkapan itu adalah “buruknya keadaan birokrasi kita” termasuk tidak dihormatinya pemisahan antara “urusan dinas dan urusan pribadi/keluarga/golongan”. KKN sendiri akhirnya memiliki konotasi negatif.

Ilustrasi di atas memperlihatkan bagaimana perkembangan dunia telah mempengaruhi perkembangan masyarakat dan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah perkembangan yang membawa kita pada perubahan sosial-politik yang kemudian mempengaruhi kehidupan bahasa Indonesia. Dalam suasana sosial-politik yang baru ini, lahir kata-kata

baru dengan makna yang baru pula, sedangkan kata dan ungkapan “sakit” seperti *pembangunan*, *repelita*, dan *orde baru* menjadi memiliki konotasi yang negatif. Kata dan ungkapan itu tenggelam dalam hiruk-pikuk unjuk rasa dan penjarahan. Semua itu memperlihatkan dinamika kehidupan bahasa Indonesia yang tidak terlepas dari dinamika sosial-politik.

Potensi Bahasa Indonesia sebagai Alat Perubahan Sosial-Politik

Ada beberapa sifat potensial yang dimiliki bahasa Indonesia sebagai alat perubahan sosial-politik, yaitu: (1) bahasa Indonesia sudah terbukti dapat mempersatukan bangsa yang majemuk, (2) bahasa Indonesia memiliki sifat demokratis, (3) bahasa Indonesia bersifat terbuka, dan (4) bahasa Indonesia sudah mulai mengglobal.

Pertama, sejak zaman perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia selalu tampil memainkan peranannya dan telah berhasil membangkitkan serta menggalang semangat kebangsaan (nasionalisme) dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Dalam era reformasi sekarang, bahasa Indonesia juga telah membuktikan kesanggupannya menjadi alat perubahan sosial. Kenyataan ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia baik sebagai bahasa persatuan (nasional) maupun sebagai bahasa negara (resmi) telah berfungsi secara efektif sebagai bahasa komunikasi perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki sifat demokratis. Ini sesuai dengan karakteristik manusia/masyarakat baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Artinya, bahasa Indonesia tidak mengenal tingkat-tingkat tutur. Bahasa Indonesia memiliki sifat

²³ Hoed, B.H. “*Kedudukan Bahasa Indonesia dan Tantangan Abad yang Akan Datang*”.

demokratis yang kuat terpadu dengan sistem sosial masyarakat Indonesia. Sifat demokratis bahasa Indonesia terwujud dalam kehidupan berbahasa masyarakat Indonesia, yakni suatu wujud kehidupan yang kurang menampilkan makna orang-seorang sebagai individu. Anjuran pemakaian kata “Bung” pada pemerintahan lama seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Syahrir, dan lain-lain merupakan wujud dari sifat demokratis bahasa Indonesia ini.

Bahasa yang bersifat demokratis dan merakyat akan semakin banyak penuturnya pada masa kini dan di masa depan. Hal ini telah dimiliki oleh bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia akan semakin digemari dan banyak penuturnya. Siapa saja yang sudah mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia, dia akan semakin menyukainya. Dengan sifat demokratis inilah bahasa Indonesia akan semakin banyak penuturnya dari negara-negara lain.

Ketiga, bahasa Indonesia bersifat terbuka (transparan). Artinya, bahasa ini dapat beradaptasi dengan bahasa-bahasa lain dan mudah menerima unsur-unsur bahasa asing, seperti unsur fonologi, morfologi, dan unsur semantik. Bahasa Indonesia dapat berkembang dengan pesat terutama di bidang kosakata, seperti ipteks, politik, bisnis, dan lain-lain karena sifatnya yang terbuka tadi. Kata-kata dan istilah dari bahasa Sansekerta, Cina, Jepang, Arab, Belanda, dan Inggris dan sebagainya begitu mudahnya terserap ke dalam bahasa Indonesia²⁴.

Bahasa Indonesia yang memiliki sifat terbuka akan cepat berkembang dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi pasar, sehingga penuturnya tidak terlalu sulit untuk

Jurnal Linguistik Indonesia. (2000). hlm 4.

²⁴ Meysitta, L. “Perkembangan Kosakata Serapan Bahasa Asing dalam KBBI.” BAPALA, 5 no. 2, (2018): 1–10. hlm 3.

menggunakannya terutama dalam komunikasi bisnis. Sifat terbuka yang dimilikinya merupakan satu potensi bahasa Indonesia pada masa kini dan masa depan, yang kelak diharapkan mampu membawa bahasa Indonesia menuju masyarakat Indonesia baru yang demokratis, egaliter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan sifat terbuka ini pula, diharapkan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang besar penuturnya menuju peradaban dan kebudayaan Indonesia modern.

Keempat, bahasa Indonesia sudah mulai mengglobal. Dewasa ini, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa asing yang populer dan digemari oleh bangsa lain. Ditemukan fakta menarik bahwa bahasa Indonesia sudah dipelajari lebih dari 45 negara. Selain itu, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua dan disejajarkan dengan bahasa Inggris²⁵. Jadi, sudah tidak diragukan lagi bahwa bahasa Indonesia juga memiliki eksistensi di negara orang.

Fakta di atas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dewasa ini sudah mulai mengglobal. Husen Abas mengatakan bahwa proses globalisasi bahasa Indonesia sedang berlangsung dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pertama yang diajarkan di sekolah menengah dan universitas di Australia. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Italia, Jepang, Korea Selatan, RRC, dan Rusia juga telah menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu mata kuliah di tingkat universitas²⁶.

²⁵ Rohimah, D. F. “*Internasionalisasi Bahasa Indonesia dan Internalisasi Budaya Indonesia melalui Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (Bipa)*”. An-Nas, 1 no. 2,(2018): 199-212. hlm 200.

Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

Ketika tingkat peradaban manusia sudah sedemikian maju dan tingkat perhubungan antarbangsa sudah sedemikian erat, maka luasnya pemakaian dan banyaknya jumlah pemakai bahasa Indonesia tidak dengan sendirinya merupakan jaminan bahwa bahasa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi salah satu bahasa modern di dunia. Keketatan persaingan yang multidimensional di antara bangsa-bangsa seharusnya menjadi pendorong dan sekaligus pemicu bagi tumbuhnya kesadaran kita bersama, masih perlu adanya upaya-upaya yang direncanakan secara matang agar bahasa Indonesia diberi peluang yang seluas-luasnya menjadi salah satu bahasa modern di dunia.

Salah satu peluang yang cukup terbuka di antaranya adalah pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Lewat dunia pendidikan, sudah sejak lama bahasa Indonesia diajarkan pada sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Bahasa Indonesia yang diajarkan di berbagai PT di luar negeri itu memperlihatkan tradisi yang berbeda-beda sebagai akibat tingkat kemajuan yang beragam. Di Australia, misalnya, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) tampak semakin semarak sehingga peluang yang amat potensial itu benar-benar dimanfaatkan dan dioptimalkan upaya pengembangannya agar bahasa

²⁶ Abas,H. Proses Kristalisasi Bahasa Melayu Tahap V: Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Komunikasi Luas di Kawasan Asia Tenggara, Makalah disampaikan pada Seminar Ilmiah dan Lustrum VII Fakultas Sastra Unhas Ujung Pandang, 1993.

Indonesia benar-benar mampu menjadi salah satu bahasa modern di dunia²⁷.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar memiliki potensi besar untuk menjadi tempat utama pemasaran barang dan jasa dari berbagai negara, apalagi dengan dimulainya perdagangan bebas di kawasan ASEAN (sejak Januari 2003). Bersamaan dengan mengalirnya barang dan jasa ke Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia dalam percaturan bisnis akan menjadi semakin penting. Orang-orang asing, yang demi keberhasilan transaksi bisnisnya perlu menguasai bahasa dan budaya Indonesia, akan semakin banyak. Di sisi lain, perkembangan industri di Indonesia yang semakin maju, termasuk industri pariwisata, juga akan meningkatkan jumlah orang asing yang terdorong untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Semakin banyaknya orang asing yang mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, juga dimungkinkan oleh kepentingan studi, misalnya, orang-orang asing yang akan studi di tingkat S-1, S-2, dan S-3, termasuk juga mereka yang ingin meraih profesi tertentu, misalnya, sebagai guru bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di negara mereka. Untuk itulah perlu dirancang ihwal diplomasi dan politik pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.

Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII (1998) merekomendasikan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pengajaran BIPA perlu mengembangkan program dan bahan ajar BIPA, termasuk metodologinya sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.

²⁷ Hardini, T. I., Setyarini, S., & Harto, S. "Indonesian assistant program in Australian schools: Recruitment and selection process". *Cakrawala Pendidikan*, 38 no. 2, 331-34. (2019). hlm. 331.

Demikian pula simpulan dan saran-saran KIPBIPA III di UPI, 1999 (ketika itu masih bernama IKIP Bandung) mencatat hal-hal berikut: (a) mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing tidaklah sederhana karena ia tidak saja mempersyaratkan berbagai pengetahuan dan keterampilan khusus seperti keakraban dengan sistem linguistik bahasa Indonesia, tetapi juga mempersyaratkan pengetahuan detail tentang aturan sosial penggunaan bahasa Indonesia dan metodologi pengajarannya, (b) mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing berarti mempelajari dan menghayati perilaku dan nilai budaya bangsa Indonesia, yang keberhasilannya mensyaratkan upaya sungguh-sungguh dan keterlibatan penuh, (c) pengajaran BIPA perlu dikembangkan secara profesional melalui berbagai kegiatan penelitian yang dipandu dengan kaidah-kaidah keilmuan yang baku, dan (d) pengajaran BIPA dicirikan oleh berbagai kekhasan, termasuk keunikan dalam metodologi pengajaran, bahan ajar, evaluasi hasil belajar, dan dukungan sistem yang diperlukannya²⁸.

Sampai sekarang, pelaksanaan Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dilakukan oleh siapa saja yang merasa sebagai penutur bahasa Indonesia atau oleh penutur asing yang telah mempelajari bahasa Indonesia. Kenyataan itu kurang tepat, karena untuk memiliki hak dan kemampuan mengajarkan bahasa Indonesia, seseorang seharusnya memiliki latar belakang ilmu pengetahuan dan keahlian berbahasa, sastra, dan budaya Indonesia yang diperolehnya dalam studi formal dan memiliki kewenangan sebagai pendidik Bahasa Indonesia melalui

²⁸ Alwasilah, A.Ch. dan Kholid A.Harras. (Penyunting, 2000). Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) III. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Pendidikan Profesi Guru Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing. Permasalahan seperti inilah yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Diksatrasia), walaupun para pengajar berlatar belakang formal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia cukup memadai. Permasalahan lain adalah belum adanya kurikulum, bahan ajar, fasilitas pendukung, dan kerja sama yang dapat diandalkan. Demikian juga Prodi Diksatrasia, yang memiliki kewenangan mengajarkan BIPA, sampai sekarang baru sebatas menerima “titipan” mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia di UPI, baik program Darmasiswa maupun orang asing yang mendaftarkan diri secara individual ke UPI untuk belajar bahasa Indonesia.

Di samping itu, variabel lain yang dipandang signifikan adalah bahwa pengajaran BIPA hendaknya memperlihatkan keterkaitan dengan konteks budayanya. Dengan mempertimbangkan variabel itu, maka kurikulum BIPA didesain dengan niat bukan saja untuk memberikan kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan, melainkan juga membekali para pembelajar dengan pemahaman terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Mereka perlu dibekali wawasan yang memadai ihwal kebhinnekatunggalikaan yang dikaitkan dengan aspek kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Mengingat prospek pengajaran BIPA yang semakin baik di masa depan, diperlukan manajemen program studi yang profesional. Salah satu alternatif manajemen yang dapat diupayakan dan dikembangkan adalah yang berpola kerja sama. Dengan pola kerja sama ini dimungkinkan diadakan koordinasi pengembangan dalam berbagai aspek (kualifikasi

pengajar, kurikulum, bahan ajar, sarana pendukung, dan lain-lain) – guna meningkatkan kualitas program BIPA.

Langkah pertama dalam hal jalinan kerja sama ini adalah diterbitkannya buku informasi dan *leaflet* berkaitan dengan pengajaran BIPA. Di dalam buku informasi dan *leaflet* tersebut berisi hal-hwal BIPA, seperti tujuan pengajaran, kurikulum, materi/bahan ajar yang dikemas dalam setiap jenjang pembelajaran, tenaga pengajar, mahasiswa, proses pembelajaran, media yang digunakan, penilaian, sampai dengan biaya per program atau jenjang.

Buku informasi dan *leaflet* tersebut seyogianya diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, mengingat banyak mahasiswa asing yang belajar di Prodi Diksatrasia berasal dari berbagai negara. Ketika para mahasiswa kembali ke negaranya diharapkan mereka dapat membawa buku informasi dan *leaflet* tersebut. Mereka dapat menginformasikan lebih jauh kepada sesama warga negara tempat mereka tinggal.

Penutup

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kepentingan dalam merancang arah dan politik pengajaran Bahasa Indonesia yang bermartabat dan jati diri bangsa, termasuk pengajaran BIPA yang profesional. Mudah-mudahan pokok-pokok pikiran ini dapat memotivasi kita untuk terus berpacu mengangkat citra dan martabat bahasa Indonesia di tengah percaturan dunia yang semakin mengglobal.

Satu hal yang menakjubkan seluruh dunia ialah keberhasilan bahasa Indonesia yang telah melancarkan integrasi nasional. Integrasi tidak saja terjadi secara horisontal di antara suku bangsa Indonesia tetapi

juga secara vertikal, antara berbagai lapisan masyarakat. Karena sifat bahasa Indonesia yang berciri demokratis, artinya tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa seperti beberapa bahasa daerah yang terkemuka, maka bahasa Indonesia dapat dipakai dengan leluasa antara golongan yang dituakan dengan yang lebih muda, antara golongan yang kuat dan yang lemah, antara atasan dan bawahan, antara pejabat negara dan rakyat biasa, dan sebagainya. Sebenarnya, tanpa disadari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara telah berhasil membuat kita bersikap lebih demokratis, terbuka, dan egaliter. Ini merupakan karakteristik masyarakat Indonesia baru yang kita cita-citakan.

Sikap berbahasa seperti itulah yang membuat orang Indonesia menemukan kembali jati diri dan kebangkitannya serta berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain yang telah maju. Ia dapat dengan bangga mengatakan bahwa orang Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan menjadi tuan di negerinya sendiri, yang mampu menggunakan bahasa nasionalnya sendiri untuk semua kepentingan sekarang ini. Setiap orang Indonesia, setiap unsur yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat perubahan sosial-politik, seperti institusi politik, lembaga pendidikan, pers, instansi pemerintah dan swasta, lembaga swadaya masyarakat, para pejabat, para pengusaha, para pedagang, pendek kata seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk menjadi unsur pengembang dan pemakai bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan benar sesuai dengan tuntutan zaman dan generasinya.

Daftar Pustaka

- Abas, H. (1993). "Proses Kristalisasi Bahasa Melayu Tahap V: Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Komunikasi Luas di Kawasan Asia Tenggara", *Seminar Ilmiah dan Lustrum VII* Fakultas Sastra Unhas Ujung Pandang.
- Alwasilah, A.Ch. dan Kholid A.Harras. (Penyunting, 2000). Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) *III*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwasilah, A.Ch. Sosiologi Bahasa. Bandung: Angkasa. 1985.
- Annisa, P. "Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi". *osf.io*, (2019): 1—12.
- Anto, P., Hilalayah, H., & Akbar, T. "Pengutamaan Bahasa Indonesia: Suatu Langkah Aplikatif". *El Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2, no. 1 (2019), 17—24.
- Arifian, F. D. "Pendekatan PAIKEM sebagai Solusi atas Permasalahan Pembelajaran Bahasa Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 9, no. 2 (2017): 148—164.
- Arisandy, Desy, Dheka Prima Rizkika, dan Tri Disa Astika. "Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Generasi Milenial Di Era Industri" *BAHAJTRA Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3, no. 2. (2019): 247—251.
- Badan Pusat Statistika 2010. Hasil Sensus Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia
- Dhanawaty, N. M. "Perlunya Penyerapan Unsur Sapaan Kekkerabatan Bahasa Daerah yang Sedang Mengindonesia". *Tutur: Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara*, 3, no 2, (2017), 132—140.
- Gunawan, H. I., Bahasa Indonesia: Lingua Franca Pencetak Karakter Negeri. Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada, 2020.
- Halim, A. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia" *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976.
- Hardini, T. I., Setyarini, S., & Harto, S. "Indonesian assistant program in Australian schools: Recruitment and selection process". *Cakrawala Pendidikan*, 38 no. 2, 2019): 331—34.
- Hoed, B.H. "Kedudukan Bahasa Indonesia dan Tantangan Abad yang Akan Datang", *Jurnal Linguistik Indonesia*. (2000).
- Kurniawan, M. S., Wijayanti, O., & Hawanti, S. "Problematika dan Strategi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah

- Sekolah Dasar”. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD)*, 1, no. 1 (2017): 65—73.
- Meysitta, L. “Perkembangan kosakata serapan bahasa asing dalam KBBI”. *BAPALA*, 5, no. 2. (2018). 1—10.
- Mulyana, A. T. ”Isu-isu kritis kebijakan bahasa dan pengajaran bahasa”. *Biomatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4, no. 1. (2018): 1—7.
- Munadzdzofah, O. “Pentingnya Bahasa Inggris, China, dan Jepang Sebagai bahasa Komunikasi Bisnis di era Globalisasi.” *VOCATIO: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretari*, 1, no 2. (2018), 58—73.
- Nurchayono, O. H. ”Pendidikan multikultural di Indonesia: Analisis sinkronis dan diakronis”. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2, no. 1 (2018): 105—115.
- Pasal 36, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Putri, N. P. “Eksistensi bahasa indonesia pada generasi millennial”. *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5, no. 2 (2017), 45—49.
- Rambe, R. N. K. “*Penerapan strategi index card match untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia*”. *Jurnal Tarbiyah*, 25 no. 1, (2018): 93—124.
- Repelita, T. ”Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia (Ditinjau dari Prespektif Sejarah Bangsa Indonesia).” *Jurnal Artefak*, 5, no. 1 (2018), 45—48.
- Rohimah, D. F. “Internasionalisasi Bahasa Indonesia dan Internalisasi Budaya Indonesia melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)”. *An-Nas*, 1 no. 2,(2018): 199-212.
- Saddam, S., Mubin, I., & SW, D. E. M. “Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural”. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5 no.2. (2020): 136—145.
- Sarah, S. “*Pengaruh Model Pembelajaran dan Kecerdasan Intelektual terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Baku. Diskursus*” *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 1, no.1 (2019): 82—96.
- Sudartomo Macaryus dan Die Bakti Wardoyo Putro, ”Kamus Besar Bahasa Indonesia Menuju Kelengkapan dan Kebenaran Informasi”. Makalah disampaikan pada *Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia*, (PIBSI) XL 2018.

Sugiono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2019.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PERAN PERGURUAN TINGGI MELALUI KKN TEMATIK MEMBANGUN DESA UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

Nama Penulis

Leni Anggraeni¹, Muhamad Saepul Akbar², Baeihaqi³,

Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: l_anggraeni@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021

Reviewed : 18 November 2021

Accepted : 8 December 2021

Published : 15 December 2021

Abstract

Educating the life of the nation became one of the goals of the Indonesian nation contained in the opening of the UUD NRI 1945. Since the outbreak of covid-19 has an impact on all fields, one of which is the field of education, the impact that arises can inhibit the achievement of the goal to educate the nation's generation. Learning during covid-19 is organized through online learning. The implementation of online learning encounters various obstacles. Various efforts to deal with online learning barriers have not found optimal strategies and implementations. The college as one of the educational institutions has the responsibility to contribute through the tri dharma of the college. KKN tematik membangun desa into a strategy and implementation of the role of universities to educate the life of the nation as an effort to overcome the impact of covid-19 in the field of education. This article uses a qualitative descriptive research method approach. Data collection methods use interviews, observations and documentation. The strategy of the role of universities through KKN tematik membangun desa shows the results of research that KKN tematik strategies used are mentoring strategies that are implemented individually or in limited groups, held in a controlled scope and populations targeted by KKN focused on teachers, students and parents. The implementation of the role of universities through KKN tematik membangun desa has a beneficial impact for teachers, students and parents of students accompanied by the emergence of spirit stimulus to carry out online learning. Strategy and implementation of the role of universities through KKN tematik membangun desa can be one of the efforts to overcome the impact of the Covid-19 pandemic in the field of education, so that the implementation of education in the Covid-19 pandemic continues without obstacles, so the goal to educate the life of the nation can be achieved.

Keywords: *Role, College, KKN Tematik Membangun Desa, Educating The Life of the Nation*

Abstrak

Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sejak mewabahnya covid-19 memberikan dampak yang berimbas kepada semua bidang salah satunya bidang pendidikan, dampak yang timbul mampu menghambat tercapai tujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Pembelajaran selama covid-19 diselenggarakan melalui pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring menemui berbagai hambatan. Berbagai upaya penanganan hambatan pembelajaran daring belum menemukan strategi dan implementasi yang optimal. Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi melalui *tri dharma* perguruan tinggi. KKN tematik membangun desa menjadi strategi dan implementasi peran perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai upaya penanggulangan dampak covid-19 pada bidang pendidikan. Artikel ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Strategi peran perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa menunjukkan hasil penelitian bahwa strategi KKN tematik yang digunakan adalah strategi pendampingan yang dilaksanakan secara individual atau kelompok terbatas, terselenggara pada ruang lingkup yang terkontrol dan populasi yang menjadi sasaran KKN yang terfokus pada guru, siswa dan orang tua. Implementasi peran perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa memberikan dampak yang bermanfaat bagi guru, siswa dan orang tua siswa yang disertai dengan munculnya stimulus semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring. Strategi dan implementasi peran perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa dapat menjadi salah satu upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 pada bidang pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan pada pandemi covid-19 tetap berlangsung tanpa hambatan, maka tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

Kata Kunci: Peranan, Perguruan Tinggi, KKN Tematik Membangun Desa, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Pendahuluan

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Amanat ini dimuat

pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat¹ serta menjadi salah satu tujuan dari negara Republik Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi proses yang tidak pernah berhenti karena proses ini berkaitan erat dengan bidang pendidikan. Pendidikan merupakan upaya nyata untuk memanusiakan manusia² dan Indonesia memiliki semboyan sekaligus menjadi orientasi dasar dalam menjalankan pendidikan. Semboyan ini diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi “*ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*” yang memiliki makna di depan, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan, di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan ide, dan di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan³.

Namun, pandemi Covid-19 yang merebak pada awal tahun 2020 di Indonesia telah memberikan dampak yang terasa di berbagai bidang kehidupan masyarakat salah satunya bidang pendidikan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan diberlakukannya *social distancing* yang berdampak pada pembelajaran yang dilaksanakan secara daring pada semua jenjang pendidikan. Pembelajaran daring di Indonesia masih menjadi sesuatu yang baru bagi institusi pendidikan dan tenaga pendidik, hal ini menuntut adanya proses adaptasi yang dilakukan secara cepat⁴. Tentunya, proses adaptasi ini menimbulkan berbagai permasalahan.

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.). Pembukaan Alinea IV

² Idrus L., “Analisis Psikologis Komparatif Pendekatan Pembelajaran Ki Hadjar Dewantara Dan Benjamin S. Bloom,” *DIDAKTIKA : Jurnal Kependidikan* 13, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30863/didaktika.v13i1.326>. Hal. 3

³ *ibid*

⁴ Rizqon H Syah, “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>. Hal. 3

Permasalahan yang dihadapi berkenaan pada variasi aspek berikut ini: *Pertama*, aspek teknologi menjadi media utama pembelajaran daring, namun sebagian besar tenaga pengajar dan siswa belum memiliki kecakapan yang mumpuni dalam teknologi⁵ khususnya pada penggunaan dan manajemen umum pembelajaran; *kedua*, aspek paradigma dan dinamika psikososial yang timbul khususnya pada peserta didik dan orang tuanya, aspek ini memicu peningkatan stress dan ketidakstabilan emosional yang terjadi pada interaksi sosial peserta didik dan orang tuanya⁶ akibat perubahan lokasi belajar dari sekolah menjadi rumah yang menuntut orang tua untuk terlibat pada proses pendampingan, pengawasan dan evaluasi pembelajaran peserta didik; *ketiga*, aspek ekonomi dan infrastruktur pun turut terlibat menghambat proses pembelajaran baik harus adanya sarana dan prasarana pembelajaran daring yang belum terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia serta belum meratanya infrastruktur listrik dan koneksi internet⁷, sehingga mendorong tingginya angka putus sekolah saat pandemi covid-19. Kompleksnya permasalahan pendidikan yang dihadapi pada pandemi Covid-19 dapat menghambat dan mengganggu proses untuk menjalankan salah satu amanat konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perguruan tinggi merupakan salah satu bagian dari institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi memiliki tiga tanggung jawab yang dikenal dengan *tri dharma* perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta

⁵ Ibid Hal 4

⁶ Yanti Rosdiana and Wahidyanti Rahayu Hastutiningtyas, "Reaksi Psikologis Anak Belajar Daring (Online) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Sumberejo 1 Purwosari Pasuruan," *Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33366/nn.v5i1.2256>. Hal. 4

⁷ Syah, Op.Cit Hal. 5

pengabdian kepada masyarakat⁸. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa⁹. Peranan perguruan tinggi yang cukup luas di kenal masyarakat yakni pengabdian kepada masyarakat melalui program kuliah kerja nyata (KKN). KKN yang dilakukan oleh perguruan tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan muatan dan beban pendidikan bagi mahasiswa serta mencapai nilai tambah yang lebih besar di perguruan tinggi¹⁰. Dengan dilaksanakannya KKN ini, dalam rangka mengembangkan kapasitas sosial dan kapasitas kepribadian mahasiswa. KKN memiliki dua bentuk yakni bentuk tematik dan reguler¹¹, KKN tematik merupakan program KKN yang telah memiliki agenda program kerja yang akan diterapkan di masyarakat, sedangkan KKN reguler belum memiliki agenda dan menyusun program setelah tiba di masyarakat.

Program KKN pada pandemi Covid-19 tetap diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi dengan bentuk dan penyesuaian program. Program KKN pada pandemi lebih banyak menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19¹². Bentuk penyelenggaraan KKN di berbagai

⁸ “Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (n.d.).Pasal 20 ayat 2

⁹ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi” (n.d.).Pasal 1 angka 11

¹⁰ Syardiansah Syardiansah, “Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa,” *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33884/jimupb.v7i1.915>. Hal. 2

¹¹ La Rangki, La Ode Alifariki, and Fitriani Dalla, “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Transmisi Covid 19 Melalui Program KKN Tematik Mahasiswa Universitas Halu Oleo,” *Journal of Community Engagement in Health* 3, no. 2 (2020): 9, <https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.78>. Hal. 4

¹² Dian Sulistyaningrum and Rosyid Ridlo Al Hakim, “Pendampingan Pembelajaran Siswa Melalui Teknologi Informasi Selama Pandemi Covid-19: Studi Kasus KKN

perguruan tinggi bersifat tematik dengan nama KKN tematik membangun desa yang dilaksanakan oleh mahasiswanya dan pada umumnya bergerak pada bidang kesehatan berbentuk sosialisasi pola hidup bersih dan gerakan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi)¹³ sedangkan ruang lingkup dan bentuk KKN tematik membangun desa yang diharapkan untuk membantu mengurai permasalahan covid-19 masih belum nampak khususnya pada bidang pendidikan. Perlunya bentuk strategi dan implementasi KKN tematik membangun desa yang dapat memfokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan pendidikan atau pembelajaran daring pada kondisi pandemi Covid-19 serta mampu terselenggara secara baik dengan peserta KKN dalam jumlah kecil atau individual.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang hendak dibahas adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana strategi perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? *Kedua*, bagaimana implementasi peran perguruan tinggi melalui melalui KKN tematik membangun desa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa?

Subjek penelitian ini adalah program KKN tematik membangun desa yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Perguruan Tinggi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal

Tematik Covid-19,” *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2020). Hal. 3

¹³ Rangki, Alifariki, and Dalla, “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Transmisi Covid 19 Melalui Program KKN Tematik Mahasiswa Universitas Halu Oleo.” Hal. 2

20 ayat 2 mengatur bahwa: “perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Pasal 24 ayat 2 mengatur: “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagai pusat pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”¹⁴. Ketiga aspek tri dharma perguruan tinggi tersebut dilaksanakan secara seimbang, serasi, dan terpadu dengan harapan lulusan nantinya menjadi orang yang kompeten, kompeten di bidangnya masing-masing, memiliki kemampuan melakukan penelitian dan bersedia berkontribusi untuk kepentingan kemanusiaan pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Untuk mengamalkan ilmu dan mengaplikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika maka diperlukan suatu wadah yang mendukung.

Peran perguruan tinggi dalam penyelenggaraan KKN tematik menjadi upaya nyata pembelajaran yang meningkatkan keterampilan sosial yang dimiliki oleh mahasiswa¹⁵. Keterampilan sosial adalah bentuk kemampuan seseorang untuk berani berinteraksi secara verbal, mampu mengekspresikan perasaan atau problematika yang sedang dihadapi sekaligus mengeksplorasi solusi secara adaptif, bertanggung jawab dan dipikirkan secara seksama. Hal ini perlu dikembangkan secara optimal bagi kemampuan mahasiswa melalui program KKN tematik, keterampilan sosial pun menjadi kemampuan yang erat berkaitan dengan proses menjalin kerjasama dalam kelompok, berinteraksi dengan teman

¹⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 2

¹⁵ Dina Khusniah, *Studi Perkembangan Kompetensi Sosial Dan Kompetensi Kepribadian Melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pada Mahasiswa Calon Guru Pai UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2016/2017, Pascasarjana IAIN Salatiga* (Salatiga, 2017). Hal. 34

sebayanya, menjalin pertemanan baru, menangani konflik, dan belajar bekerjasama¹⁶. Keterampilan sosial secara tidak langsung dapat diperoleh melalui program KKN tematik secara efektif dan efisien karena mahasiswa akan berinteraksi dengan berbagai kalangan dengan membawa sebuah agenda yang harus dilaksanakan dengan baik, tentunya dalam pelaksanaan mahasiswa dituntut untuk berkolaborasi.

KKN tematik menjadi perwujudan *service learning* di perguruan tinggi. *Service learning* sebagai lanjutan dari teori pembelajaran berbasis pengalaman¹⁷, menekankan bahwa adanya upaya baru yang dapat dilakukan pelajar di pendidikan tinggi untuk memperoleh pengalaman implementasi keilmuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya KKN tematik sebagai bentuk dari *service learning* berupaya memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di masyarakat, dengan mengikuti fase¹⁸: 1) pengalaman konkret; 2) pengamatan reflektif; 3) Konseptualisasi abstrak; dan 4) eksperimen aktif. Sehingga peran perguruan tinggi melalui KKN tematik memiliki dampak yang baik kepada mahasiswa, masyarakat dan institusi perguruan tinggi sebagai pembuktian *tri dharma* perguruan tinggi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada tata cara penggunaan alat dan teknik di bidang penelitian yang berorientasi pada paradigma ilmiah¹⁹. Penelitian kualitatif dipilih sebagai bentuk upaya

¹⁶ Syardiansah, Op.Cit. Hal 2

¹⁷ Maimoona Salam et al., "Service Learning in Higher Education: A Systematic Literature Review," *Asia Pacific Education Review*, 2019, <https://doi.org/10.1007/s12564-019-09580-6>. Hal. 3

¹⁸ ibid

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018). Hal, 52

menemukan gambaran yang jelas dan tepat mengenai strategi dan implementasi peran dari suatu program yang diselenggarakan instansi tertentu. Institusi yang dimaksud pada penelitian ini yakni perguruan tinggi. Penelitian kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan peranan perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penelitian mengenai KKN tematik pernah dilaksanakan oleh peneliti yang lain, dengan kesimpulan akhir penelitian sebagai berikut: *pertama*, penelitian yang berjudul upaya pencegahan dan penanggulangan transmisi covid-19 melalui program KKN tematik mahasiswa universitas Halu Oleo yang diunggah dalam *journal of community engagement in health* mendapatkan hasil²⁰ yakni masih banyaknya masyarakat yang kurang paham terhadap protokol kesehatan, oleh karena itu melalui pelaksanaan KKN tematik selama kurang lebih satu bulan, banyak hal yang dilakukan mulai dari pemberian video edukasi, pemasangan spanduk, pembagian masker, handsanitizer dan lain sebagainya. Setelah dilaksanakan KKN tematik, tingkat kesadaran masyarakat tentang penggunaan APD menjadi lebih tinggi dan masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga jarak, serta UMKM mendapatkan nilai ekonomis. Sehingga KKN tematik mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pada bidang kesehatan dan ekonomi, namun pelaksanaan bentuk program KKN tematik ini melibatkan kelompok besar yakni dengan jumlah anggota 27 orang dan rentan terhadap penularan Covid-19; *kedua*, penelitian yang diterbitkan di ANDASIH jurnal pengabdian kepada masyarakat yang berjudul pendampingan pembelajaran siswa melalui teknologi informasi selama pandemi covid-19: studi kasus KKN tematik covid-19 memiliki

²⁰ Rangki, Alifariki, and Dalla, Op.Cit Hal. 8

hasil penelitian bahwa pembelajaran menggunakan teknologi informasi masih belum memberikan dampak yang memuaskan dan harus diadakannya evaluasi metode pembelajaran²¹. Pada penelitian ini, pelaksanaan pendampingan pembelajaran melalui teknologi informasi pada KKN tematik Universitas Jenderal Soedirman berhasil dilakukan namun belum memberikan dampak yang memuaskan karena pelaksanaan pendampingan dilaksanakan secara daring sehingga diperlukan pendampingan yang berbentuk luring; dan *ketiga*, penelitian yang berjudul mitigasi dampak pandemi covid-19 melalui media sosial: laporan KKN tematik covid-19 2020 yang diterbitkan melalui jurnal *DEDIKASI: community service report* menyatakan hasil penelitian bahwa mitigasi dampak covid-19 memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dengan penekanan bentuk sosialisasi edukasi pentingnya masker kain²². Hasil penelitian KKN tematik Universitas Sebelas Maret tersebut, menjadi acuan bahwa sosialisasi secara langsung memberikan dampak yang baik, namun lingkup KKN tematik tersebut cukup besar yakni melibatkan dua kabupaten yakni Kebumen dan Magelang serta mitra KKN tematik menysasar populasi umum.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan mengenai KKN tematik pada kondisi covid-19 menunjukkan bahwa sebagian besar KKN tematik yang bergerak pada bidang kesehatan dapat dikategorikan berhasil, namun KKN tematik yang diterapkan melibatkan kelompok besar dan lingkup yang besar serta populasi yang di targetkan masih populasi umum. Sedangkan, pelaksanaan KKN tematik pada bidang pendidikan

²¹ Sulistyaningrum and Al Hakim, Op.Cit. Hal. 6

²² Cucuk Budiyanto et al., "Mitigasi Dampak Pandemi COVID-19 Melalui Sosialisasi: Laporan KKN Tematik COVID-19 2020," *DEDIKASI: Community Service Reports* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20961/dedikasi.v3i1.49094>. Hal. 6

dapat dikategorikan belum berhasil dan dibutuhkan evaluasi metode pembelajaran lebih lanjut. Sehingga diketahui bahwa diperlukannya penelitian lanjutan mengenai strategi dan implementasi KKN tematik sebagai peran perguruan tinggi yang mampu bergerak pada penyelesaian permasalahan pendidikan khususnya pembelajaran selama pandemi covid-19 yang dapat terselenggara dengan peserta KKN tematik dalam kelompok terbatas atau individual, terselenggara dengan lingkup yang terkontrol dengan populasi yang spesifik sehingga peran perguruan tinggi melalui KKN tematik dampaknya dapat dirasakan, khususnya sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu amanat konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah permasalahan pendidikan pada pandemi covid-19.

Metode

Penelitian mengenai strategi dan implementasi peran perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu teknik pengumpulan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, yang selanjutnya dianalisis faktor-faktor tersebut untuk mengetahui peranannya²³. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode pengolahan dengan cara menganalisis faktor yang berkorelasi dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Objek penelitian ini adalah mahasiswa dan mitra KKN tematik membangun desa UPI tahun 2020 dan 2021. Mitra KKN tematik membangun desa UPI adalah guru, siswa, orang tua siswa dan aparatur desa yang berada di lingkungan mahasiswa melaksanakan KKN tematik

²³ Moleong, Op.Cit. Hal 40

membangun desa UPI. Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive* dengan bantuan *key person*.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi²⁴. Metode wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai KKN tematik membangun desa UPI pada bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dirasakan baik oleh mahasiswa, guru, siswa, orang tua siswa dan aparat desa di lokasi KKN tematik membangun desa UPI. Informan yang di jadikan sebagai narasumber wawancara yakni sebagai berikut: 1) AN dan BR merupakan mahasiswa UPI yang mengontrak mata kuliah KKN tahun 2021; 2) ZU dan IN merupakan guru yang didampingi oleh mahasiswa KKN tematik membangun desa UPI yaitu AN dan BR; 3) CH dan JJ merupakan siswa yang mendapatkan pendampingan dari AN dan BR serta siswa dari ZU dan IN; 3) ER dan AS merupakan orang tua yang mendapatkan pendampingan dari AN dan BR serta ER adalah orang tua dari siswa CH dan AS adalah orang tua dari JJ; dan informan 4) RM dan KY merupakan aparat desa tempat penyelenggaraan KKN tematik membangun desa UPI.

Observasi adalah kegiatan pengamat yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Sedangkan metode dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung kegiatan penelitian, seperti data peserta KKN, lokasi KKN, kegiatan KKN, buku panduan KKN dan sebagainya. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan terdapat tiga aktivitas dalam penelitian

²⁴ Ibid

kualitatif yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*²⁵.

Pembahasan

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab bersama untuk peduli dan senantiasa ikut andil di dalamnya. Adanya pandemi covid-19 membuat proses pembentukan generasi penerus bangsa yang cerdas menjadi terhambat dengan diberlakukannya pembelajaran daring. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurai hambatan-hambatan yang dihadapi, namun masih diperlukan upaya lanjutan guna mengoptimalkan pembelajaran yang mampu mewujudkan generasi bangsa yang cerdas. Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab lebih untuk mengambil peran yang lebih besar untuk mengupayakan solusi dan penyelesaian hambatan yang ada.

Perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk kuliah kerja nyata (KKN) menjadi salah satu bentuk peran yang dapat diberikan guna mengurai berbagai hambatan yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 salah satunya hambatan yang terjadi pada bidang pendidikan. Namun, penyelenggara KKN pada pandemi covid-19 yang telah diselenggarakan masih belum dikatakan optimal, dengan adanya kelemahan pada jumlah peserta KKN yang harus memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan, serta ruang lingkup program dan populasi yang terfokus. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kelemahan yang pada strategi KKN pada bidang pendidikan, maka di rancang strategi baru yakni berbentuk KKN tematik membangun

²⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak, 2018.
Hal. 38

desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka pada masa pandemi (KKN tematik MDBPE-MBKM).

KKN tematik MDBPE-MBKM adalah KKN tematik membangun desa yang erfokus pada pendikan dan ekonomi. KKN tematik MDBPE-MBKM memiliki tiga tema diantara sebagai berikut: 1) membangun desa melalui bidang pendidikan; 2) membangun desa melalui peningkatan ekonomi masyarakat; dan 3) rekognisi program MBKM dan Puspresnas Kemdikbudristek. Tema KKN tematik MDBPE-MBKM yang digunakan dalam penelitian ini adalah membangun desa melalui bidang pendidikan. Uraian hasil penelitian mengenai KKN tematik MDBPE-MBKM, di uraikan sebagai berikut:

A. Strategi peran perguruan tinggi melalui KKN Tematik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Strategi yang di kembangkan dalam KKN tematik MDBPE-MBKM adalah strategi yang menekankan pada pelibatan populasi yang terfokus. Populasi yang dimaksud yakni pihak yang menjadi sasaran program kerja KKN tematik MDBPE-MBKM. Sasaran program penanggulangan dampak covid-19 KKN tematik MDBPE-MBKM dalam bidang pendidikan adalah: 1) guru sebanyak 2 orang; 2) siswa sebanyak 10 orang; dan 3) orang tua siswa sebanyak 10 orang. Sasaran tersebut merupakan pihak-pihak yang berada di dalam satu lingkungan baik TK/PAUD, SD/MI, TPA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Kursus dan PKBM.

Bentuk program penanggulangan dampak covid-19 KKN tematik MDBPE-MBKM dalam bidang pendidikan berupa beberapa kegiatan,

diantaranya sebagai berikut: 1) penguatan pembelajaran daring untuk semua mata pelajaran pada jenjang dasar dan menengah; 2) pendampingan pembelajaran daring siswa untuk semua mata pelajaran pada jenjang dasar dan menengah; 3) pendampingan orang tua dalam membimbing anak melalui pembelajaran daring untuk semua mata pelajaran pada jenjang dasar dan menengah; 4) mendesain, membuat, melengkapi dan menggunakan media pembelajaran daring untuk sasaran program dan jenjang pendidikan yang telah ditentukan; dan 5) membantu administrasi guru secara daring untuk sasaran program dan jenjang pendidikan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang telah dianalisis, ditentukan bahwa strategi yang tepat untuk melaksanakan program penanggulangan dampak covid-19 KKN tematik MDBPE-MBKM dalam bidang pendidikan, memiliki beberapa pendekatan strategi yang dapat digunakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dengan menggunakan dan membuat media sosial. Strategi ini merupakan strategi pencarian sasaran program, sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, pelatihan pembuatan dan penggunaan media sosial di dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata. Pembuatan media sosial diantaranya Whatsapp Grup, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube. Penggunaan media di dalam pelaksanaan adalah berbasis media sosial dengan jenis media sesuai dengan kesepakatan, baik yang dilakukan oleh Tim pelaksana, Dosen Pembimbing lapangan (DPL), mahasiswa, mitra dan sasaran program.
2. Dilaksanakan secara daring di lingkungan tempat tinggal mahasiswa atau wilayah yang telah ditentukan sesuai dengan

kesepakatan kelompok terbatas dalam satu dosen pembimbing lapangan. Strategi yang dimaksud adalah lingkungan rumah sekitar mahasiswa tinggal dan wilayah yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kelompok terbatas dengan satu dosen pembimbing lapangan serta merupakan lokasi kegiatan dan domisili sasaran program.

3. Memanfaatkan jejaring dengan mitra yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Strategi yang dimaksud adalah mahasiswa Dosen Pembimbing lapangan (DPL) dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program bidang pendidikan melakukan kerja sama dengan UPT Dinas Pendidikan. Dosen Pembimbing Lapangan dan atau tim pelaksana dalam pelaksanaan program mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program KKN dan masukan program sebagai bahan tindak lanjut.
4. Memanfaatkan jejaring media cetak, media online dan media elektronik. Strategi yang dimaksud adalah mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata dengan tema ini, Dosen Pembimbing lapangan (DPL) dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan/hasil program untuk menginformasikan ke masyarakat luas, Lembaga pemerintah/sosial melakukan kerja sama dengan media cetak, media online dan media elektronik.
5. Terintegrasi dengan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah. Strategi ini digunakan oleh mahasiswa pada koordinasi dengan guru dan kepala sekolah yang ada disekitar rumah dan melaksanakan program pendampingan bagi siswa yang kesulitan mengerjakan tugas pembelajaran daring dari guru dan menguatkan materi dan proses pembelajaran daring sesuai dengan jenjang

Pendidikan. Selain itu digunakan oleh DPL/Tim Pelaksana pada saat monitoring kegiatan mahasiswa.

6. Terintegrasi dengan program pemerintah daerah setempat di Bidang Pendidikan Berbasis Literasi. Strategi ini digunakan oleh Tim Pelaksana/DPL/mahasiswa peserta KKN di dalam melakukan koordinasi dalam melaksanakan Penanggulangan Dampak Covid-19 di Bidang Pendidikan Berbasis Literasi dengan menggunakan media sosial.

Berdasarkan pendekatan strategi yang dapat digunakan, terdapat pendekatan penerapan implementasi yang tepat untuk memaksimalkan pendekatan strategi yang dipilih. Pendekatan implementasi ini merupakan intisari dari hasil pengolahan observasi lapangan dan wawancara bersama RM dan KY selaku mitra UPI dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KKN tematik MDBPE-MBKM dalam bidang pendidikan, yang didapatkan hasil bahwa pendekatan implementasi program penanggulangan Covid-19 di dalam bidang pendidikan mencakup empat pendekatan, yakni sebagai berikut:

1. Individual. Pendekatan Individual yang dimaksud adalah 1) mahasiswa melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik secara individual di lokasi sekitar tempat tinggal. 2) mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan menggunakan media sosial atau media yang lain sesuai dengan protokol penanganan Pandemi Covid-19.
2. Kelompok terbatas. Pendekatan kelompok terbatas bukan kewajiban, jika diperlukan harus didasarkan pada program kegiatan yang dirancang. Syarat kelompok terbatas adalah: 1) mahasiswa berasal dari Dosen Pembimbing Lapangan yang sama

- (maksimal 5 orang mahasiswa) di dalam pelaksanaan program. 2) adanya rancangan kegiatan kolaborasi dengan tugas mahasiswa yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.
3. Kaderisasi. Pendekatan mahasiswa yang dilakukan secara individu atau kelompok terbatas dengan tujuan membentuk kader atau agen pembaharu untuk menindak lanjuti kegiatan yang sudah dilaksanakan.
 4. Kelembagaan. Pendekatan kelembagaan dimaksudkan mahasiswa baik secara individu atau kelompok terbatas melakukan koordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Membangun Desa melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi dalam Implementasi MBKM pada Masa Pandemi (KKN Tematik MDBPE-MBKM). Lembaga mitra yang perlu dikoordinasikan: 1) UPT Dinas Pendidikan; 2) Desa/Kelurahan; 3) TK/PAUD, SD/MI, TPA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Kursus dan PKBM.

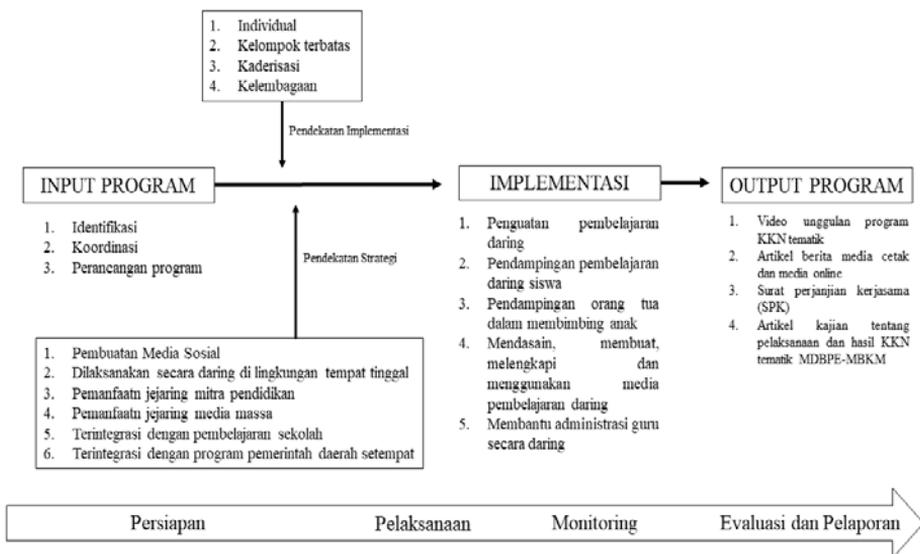
Pendekatan strategi dan pendekatan implementasi yang telah dijabarkan merupakan strategi yang mampu mengatasi kelemahan KKN tematik pada bidang pendidikan guna penanggulangan covid-19 yang selama ini dihadapi, diantaranya sebagai berikut: 1) jumlah pelibatan mahasiswa KKN untuk menjalankan program dapat terselenggara secara individual atau kelompok terbatas; 2) ruang lingkup program KKN mudah untuk dikontrol karena merupakan lingkungan mahasiswa KKn yang bertempat tinggal baik secara identifikasi, koordinasi, implementasi dan evaluasi; dan 3) populasi yang menjadi sasaran program KKN tematik lebih terfokus yakni kepada dua orang guru, sepuluh orang siswa dan sepuluh orang tua

yang berada di dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Pendekatan strategi dan pendekatan implementasi ini menjadi upaya penanggulangan dampak covid-19 pada bidang pendidikan. Sehingga proses pembelajaran mampu berjalan dengan lancar dan memberikan dampak nyata untuk proses pencerdasan generasi bangsa di saat pandemi covid-19 masih berlangsung.

B. Implementasi peran perguruan tinggi melalui KKN Tematik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Implementasi KKN Tematik MDBPE-MBKM dalam bidang pendidikan mengacu pada pendekatan strategi dan pendekatan implementasi yang telah dirancang. Proses pelaksanaan KKN Tematik MDBPE-MBKM terbagi dalam empat proses yakni: 1) persiapan, proses ini terdiri proses sosialisasi, rekrutmen, dan pengelompokan mahasiswa dan penentuan DPL; 2) Pelaksanaan, proses ini merupakan tahapan mahasiswa memulai melaksanakan program, dengan agenda kegiatan seperti pematangan perencanaan, koordinasi, dan implementasi program; 3) Monitoring, proses pemantauan pelaksanaan KKN yang dilaksanakan secara daring dan luring; dan 4) Evaluasi dan pelaporan, evaluasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap sosialisasi, pelaksanaan dan penyusunan laporan. Oleh karena itu evaluasinya mencakup evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses mencakup evaluasi pada tahapan proses yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa KKN. Sedangkan evaluasi hasil dilihat dari hasil-hasil KKN sebagai dampak dari pelaksanaan program KKN oleh mahasiswa sesuai dengan perencanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi evaluasi KKN tematik tahun 2020, maka berhasil ditentukan alur implementasi KKN Tematik MDBPE-MBKM pada bidang pendidikan sebagai upaya penanggulangan dampak Covid-19 yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan yang mampu mengakomodasi kepentingan khususnya proses mencerdaskan generasi bangsa, alur implementasi KKN Tematik MDBPE-MBKM dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 1. Alur Implementasi KKN Tematik MDBPE-MBKM

Merujuk pada gambar 1, alur menunjukkan bahwa implementasi diawali dengan bagian input program yang menjadi awalan bagi mahasiswa KKN untuk memulai program dengan melakukan kegiatan identifikasi sasaran dan lingkungan tempat pelaksanaan KKN, melaksanakan koordinasi dengan pihak yang akan dijadikan sasaran

dan mitra program, dan melakukan perancangan program sesuai hasil identifikasi. Setelah input program selesai, mahasiswa KKN akan menentukan pendekatan strategi dan pendekatan implementasi yang hendak digunakan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lingkungan pelaksanaan program KKN. Mahasiswa KKN dapat memilih lebih dari satu pendekatan strategi dan pendekatan implementasi untuk digunakan, karena setiap pendekatan memiliki karakteristik yang mampu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ketika bagian input program telah siap, maka bagian implementasi dapat dijalankan. Implementasi KKN Tematik MDBPE-MBKM sebagai penanggulangan dampak pandemi covid-19 pada bidang pendidikan, memiliki bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan pembelajaran daring untuk semua mata pelajaran di TK/PAUD, SD/MI, TPA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Kursus dan PKBM. Penguatan pembelajaran daring merupakan bentuk penguatan proses pembelajaran daring yang menekankan pada diskusi terarah serta pelaksanaan pembelajaran daring bersama antara guru dengan mahasiswa KKN. Adapun tahapan yang dilakukan adalah: 1) Identifikasi sekolah; 2) Koordinasi dengan DPL; 3) Berkomunikasi dengan guru dan kepala sekolah; 4) Membentuk kelompok diskusi bersama guru; 5) Melaksanakan diskusi untuk membahas penguatan pembelajaran dimulai dari perangkat pembelajaran; 6) memetakan lokasi siswa; 7) melaksanakan pembelajaran daring bersama guru; 8) dokumentasi dan inventarisasi kegiatan; dan 9) evaluasi, pelaporan serta rekomendasi.

2. Pendampingan pembelajaran daring siswa untuk semua mata pelajaran di TK/PAUD, SD/MI, TPA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Kursus dan PKBM

Bentuk pendampingan pembelajaran daring siswa menitikberatkan pada proses kegiatan kelompok belajar siswa yang didampingi oleh mahasiswa KKN di semua mata pelajaran. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan pendampingan pembelajaran daring adalah: 1) koordinasi dengan guru dan kepala sekolah; 2) inventarisasi materi, media dan strategi pembelajaran; 3) pemetaan lokasi siswa yang diutamakan satu lokasi atau desa dengan tempat tinggal mahasiswa KKN; 4) koordinasi dengan DPL; 5) berkomunikasi dengan siswa; 6) membentuk kelompok belajar siswa; 7) melaksanakan bimbingan belajar secara daring; 8) dokumentasi dan inventarisasi kegiatan; 9) membuat catatan perkembangan hasil belajar siswa; 10) membuat laporan dan persiapan bimbingan untuk kebutuhan siswa.

3. Pendampingan orang tua dalam membimbing anak melalui pembelajaran daring untuk semua mata pelajaran di TK/PAUD, SD/MI, TPA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Kursus dan PKBM

Berbeda dengan pendampingan kepada siswa, pendampingan orang tua siswa lebih memfokuskan pada manajemen peran yang harus dipahami oleh orang tua siswa di tengah pembelajaran daring yang sebagian besar orang tua masih kesulitan dalam mendampingi siswa untuk belajar. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) koordinasi dengan orang tua siswa; 2) identifikasi kebutuhan orang tua siswa; 3) koordinasi bersama DPL; 4) Komunikasi dan membentuk group diskusi bersama orang tua siswa; 5)

mendampingi orang tua yang melaksanakan perannya membimbing saat pembelajaran daring; 6) dokumentasi dan inventarisasi kegiatan; 7) evaluasi; 8) membuat catatan hasil pendampingan; dan 9) membuat laporan dan persiapan untuk pertemuan berikutnya.

4. Mendesain, membuat dan menerapkan media pembelajaran daring untuk sasaran program dan jenjang pendidikan yang telah ditentukan.

Bentuk kegiatan mendesain, membuat dan menerapkan media merupakan kegiatan kreasi yang dilakukan mahasiswa KKN. Kreasi yang dibuat mengenai pembelajaran tidak terlepas dari peran media sebagai sarana penguatan pembelajaran daring yang bermanfaat bagi guru, siswa dan orang tua siswa. Tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut: 1) identifikasi kebutuhan media pembelajaran; 2) berdiskusi dengan DPL; 3) mencari jaringan kemitraan; 4) membantu mendatangkan bantuan media sesuai kemampuan mahasiswa; 5) menggunakan media pembelajaran daring; 6) dokumentasi dan inventarisasi kegiatan; ; 7) evaluasi; 8) membuat catatan temuan; dan 9) membuat laporan dan persiapan untuk pertemuan berikutnya.

5. Membantu administrasi guru secara daring untuk sasaran program dan jenjang pendidikan yang telah ditentukan.

Administrasi pembelajaran ikut mengalami perubahan pada saat pandemi covid-19. Kegiatan perbantuan administrasi pembelajaran daring dilakukan sebagai upaya pendampingan kepada guru guna melakukan adaptasi terhadap administrasi yang ikut serta berubah. Tahapan yang dilakukan adalah: 1) identifikasi dan koordinasi

kebutuhan bantuan; 2) koordinasi dan bimbingan bersama DPL; 3) melaksanakan bantuan administrasi guru secara daring; 4) dokumentasi dan inventarisasi kegiatan; 5) evaluasi; 6) membuat catatan hasil pendampingan; dan 7) membuat laporan dan persiapan untuk pertemuan berikutnya.

Berbagai bentuk yang telah diimplementasikan oleh mahasiswa KKN maka akan menghasilkan *output* program yang berbentuk: 1) video kegiatan yang di unggah di kanal *youtube*; 2) artikel berita secara individu atau kelompok terbatas di media massa baik cetak maupun elektronik; 3) surat perjanjian kerjasama (SPK) antara desa atau mitra KKN dengan LPPM UPI; dan 4) *Book Chapter* pengabdian kepada masyarakat. *Output* program menjadi bukti fisik dan laporan untuk penilaian mahasiswa KKN selama kegiatan program KKN berlangsung serta *output* ini menjadi sarana publikasi kepada masyarakat luas bahwa peran perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa hadir ditengah masyarakat menjadi upaya nyata penanggulangan dampak covid-19 khususnya pada bidang pendidikan yang erat kaitannya dengan proses mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi objek penelitian, menunjukkan bahwa implementasi KKN Tematik MDBPE-MBKM dalam bidang pendidikan memberikan peran yang mampu menjadi upaya penanggulangan dampak covid-19 di dalam bidang pendidikan. Tahapan *input* program, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses identifikasi dan koordinasi menjadi penting untuk menentukan tindakan yang akan diterapkan, menurut BR dengan ditetapkannya lokasi KKN yang berada di lingkungan

tempat tinggal membantu proses pada tahapan ini karena mahasiswa telah mengetahui kondisi yang terjadi.

Pada tahapan implementasi program, dari lima bentuk program yang dijalankan memiliki peran dan dampak yang berbeda yang disesuaikan dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, program penguatan pembelajaran daring memberikan stimulus yang baik kepada guru, khususnya adanya wadah diskusi bagi guru. ZU dan IN mendapatkan manfaat dari penguatan pembelajaran daring ini, manfaat yang dirasakan yaitu terselesaikannya masalah teknis pembelajaran daring yang berkenaan dengan kecakapan teknologi, dengan adanya penguatan ini terjadi alih teknologi yang dibutuhkan oleh guru. Lalu, pada program pendampingan pembelajaran daring siswa dirasakan manfaat terbesarnya tentu oleh siswa. Hal ini diungkapkan oleh CH dan JJ bahwa kelompok belajar yang disediakan oleh mahasiswa KKN memudahkan untuk memahami pembelajaran pada mata pelajaran yang belum dipahami, karena konsep kelompok belajar yang ramah anak merupakan langkah tepat diterapkan dalam pendampingan pembelajaran daring²⁶ serta program ini berupaya sebagai fasilitator yang mampu memahami batasan tekanan pada pembelajaran sehingga mengurangi rasa stres yang dialami siswa saat pembelajaran daring.

Hasil yang nampak sama terjadi pada program pendampingan orang tua dalam membimbing anak melalui pembelajaran daring. Merujuk hasil wawancara bersama ER dan AS, pendampingan ini membuat orang tua lebih tertata dalam membimbing anak saat pembelajaran daring, AS mengungkapkan bahwa pemicu stres orang

²⁶ Rosdiana and Hastutiningtyas, Loc.Cit

tua saat anak belajar daring adalah menemukan pola yang tepat khususnya ketika anak mendapatkan tugas dan orang tua dibuat kebingungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Namun, pendapat lain datang dari AN selaku mahasiswa KKN yang mendampingi AS bahwa terdapat perbedaan cara komunikasi saat mendampingi orang tua, terkadang orang tua lebih banyak ingin menyerahkan tugas pembelajaran kepada guru sedangkan perlu diketahui bahwa orang tua memiliki andil peran yang besar dalam pembelajaran daring sehingga upaya penyadaran peran orang tua ini memerlukan waktu yang intensif. Pada program ini mahasiswa KKN dilatih kemampuan sosial yang mereka miliki dan kemampuan ini merupakan kemampuan yang dilatih mulai di dalam lingkungan keluarga²⁷ serta secara tidak langsung akan terbawa saat berkomunikasi dengan masyarakat atau khalayak umum.

Dampak yang dirasakan oleh guru, siswa dan orang tua siswa pada implementasi program mendesain, membuat, dan menerapkan media pembelajaran serta program membantu administrasi guru adalah adanya stimulus baik yang mendorong perbaikan pembelajaran daring. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru baik ZU dan IN mereka sependapat bahwa media dan administrasi pembelajaran yang dibantu oleh mahasiswa KKN lebih terarah dan sistematis serta menarik ketika diterapkan. Namun, BR mengungkapkan bahwa implementasi program ini bergantung pada kondisi yang ada di pembelajaran, karena setiap lingkungan pendidikan memiliki budaya dan pendekatan belajar yang berbeda sehingga diperlukan identifikasi program yang matang.

²⁷Welven Aida, Rina Ari Rohmah, and Ryan Prayogi, "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Keterampilan Sosial Mahasiswa," *Hirarki : Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30606/hirarki.v2i1.332>. Hal. 5

Implementasi program KKN Tematik MDBPE-MBKM pada bidang pendidikan memiliki dampak yang bermanfaat guna penanggulangan dampak covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya program berbasis pendampingan pembelajaran daring membentuk stimulus semangat belajar baik dari sisi guru, siswa dan orang tua siswa. Sehingga implementasi KKN Tematik MDBPE-MBKM pada bidang pendidikan menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan mampu berkontribusi dalam penanggulangan dampak covid-19 pada bidang pendidikan dengan target keberhasilan pembelajaran menjadi upaya nyata sebagai proses untuk mencerdaskan generasi bangsa.

Penutup

Terjadinya pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang serius pada bidang pendidikan yakni lahirnya generasi bangsa yang tidak cerdas. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai penanggulangan dampak covid-19 pada bidang pendidikan yakni adanya strategi dan implementasi peran perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa. Strategi yang dihasilkan adalah program KKN tematik membangun desa yang mengusung konsep pendampingan yang terfokus dan adanya bentuk strategi yang mampu mengupayakan pada pelibatan mahasiswa KKN yang dapat diselenggarakan secara individual atau kelompok terbatas, ruang lingkup KKN yang terkontrol karena diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal mahasiswa KKN dan populasi yang menjadi sasaran program KKN lebih terfokus pada guru, siswa, orang tua dan aparatur desa yang melingkupi pada bidang pendidikan. Implementasi yang dilaksanakan memberikan dampak yang bermanfaat bagi guru, siswa dan orang tua siswa dengan munculnya stimulus semangat ketika

pembelajaran daring. Strategi dan implementasi peran perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa dapat menjadi upaya nyata untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19 pada bidang pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan yang baik tetap terselenggara walaupun masih dalam kondisi pandemi covid-19 dan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dapat tercapai.

Rekomendasi, menemukan upaya penanggulangan dampak covid-19 pada bidang pendidikan harus diprioritaskan karena menyangkut generasi masa depan bangsa. Maka yang harus dilakukan adalah optimalisasi peran perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa dengan bentuk program yang lebih beragam namun terarah serta diperlukan penelitian lebih lanjut yang mampu mengukur dampak dari strategi dan implementasi perguruan tinggi melalui KKN tematik membangun desa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Daftar Pustaka

- Aida, Welven, Rina Ari Rohmah, and Ryan Prayogi. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Keterampilan Sosial Mahasiswa." *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30606/hirarki.v2i1.332>.
- Budiyanto, Cucuk, Ajeng Diah Priasnasari, Nicky Imadudin, and Ega Listianingsih. "Mitigasi Dampak Pandemi COVID-19 Melalui Sosialisasi: Laporan KKN Tematik COVID-19 2020." *DEDIKASI: Community Service Reports* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20961/dedikasi.v3i1.49094>.
- Khusniah, Dina. *Studi Perkembangan Kompetensi Sosial Dan Kompetensi Kepribadian Melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pada Mahasiswa Calon Guru Pai UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2016/2017. Pascasarjana IAIN Salatiga*. Salatiga, 2017.
- L., Idrus. "Analisis Psikologis Komparatif Pendekatan Pembelajaran Ki Hadjar Dewantara Dan Benjamin S. Bloom." *DIDAKTIKA: Jurnal Kependidikan* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30863/didaktika.v13i1.326>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rangki, La, La Ode Alifariki, and Fitriani Dalla. "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Transmisi Covid 19 Melalui Program KKN Tematik Mahasiswa Universitas Halu Oleo." *Journal of Community Engagement in Health* 3, no. 2 (2020): 9. <https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.78>.
- Rosdiana, Yanti, and Wahidyanti Rahayu Hastutiningtyas. "Reaksi Psikologis Anak Belajar Daring (Online) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SDN Sumberejo 1 Purwosari Pasuruan." *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33366/nn.v5i1.2256>.
- Salam, Maimoona, Dayang Nurfatimah Awang Iskandar, Dayang Hanani Abang Ibrahim, and Muhammad Shoaib Farooq. "Service Learning in Higher Education: A Systematic Literature Review." *Asia Pacific Education Review*, 2019. <https://doi.org/10.1007/s12564-019-09580-6>.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak, 2018.
- Sulistyaningrum, Dian, and Rosyid Ridlo Al Hakim. "Pendampingan Pembelajaran Siswa Melalui Teknologi Informasi Selama Pandemi Covid-19: Studi Kasus KKN Tematik Covid-19." *ANDASIH Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 2 (2020).

Syah, Rizqon H. “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>.

Syardiansah, Syardiansah. “Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa.” *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 7, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.33884/jimupb.v7i1.915>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (n.d.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (n.d.).

Redefinisi Makna Pendidikan

Vina Adriany

Universitas Pendidikan Indonesia

vina@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021

Reviewed : 18 November 2021

Accepted : 8 December 2021

Published : 15 December 2021

Abstract

Education in Indonesia is highly influenced by neoliberalism. This paradigm perceives education as merely individual responsibilities. At the same time, education as merely a form of economic activity. Even though, education without any doubt will affect the country's economic development, however the authors argue that over emphasis on the economic aspect will overlook other meanings of education. In this article, the authors assert that there are several impacts resulted from the neoliberal paradigms such as the reduction of human concept; emphasis on individualism over collective works; marginalization of critical thinking; ostracism of social justice; and isolation of social sciences and humanities. The authors further affirm that there is a need to redefine education so that it serves its purpose to humanize human. The authors also propose that education should become a space where critical thinking is promoted and empathy is flourished among both teacher and students.

Keywords: Education, neoliberalism, economization of education, and critical thinking

Abstrak

Pendidikan di tanah air dewasa ini banyak dipengaruhi oleh paradigma neoliberalisme. Paradigma ini melihat pendidikan sebagai tanggung jawab

individu belaka. Selain itu, pandangan neoliberalisme juga melihat pendidikan tidak lebih sebagai aktivitas ekonomi belaka. Meskipun pendidikan tidak bisa dinafikan secara memiliki dampak terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara, akan tetapi didalam artikel ini, penulis berargumen bahwa penekanan yang berlebihan terhadap aspek ekonomi akan mengabaikan makna lain dari pendidikan. Paling tidak terdapat beberapa dampak dari neoliberalisme di dunia pendidikan ini seperti tereduksinya nilai-nilai kemanusiaan; fokus kepada individualism; terabaikannya kemampuan berfikir kritis; terabaikannya isu-isu yang terkait dengan keadilan sosial; serta terpinggirkannya ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Penulis mengusulkan perlu adanya redefinisi makna pendidikan yang mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia. Selain itu penulis juga mengusulkan pendidikan perlu menjadi tempat yang dapat memperkuar kemampuan berfikir kritis dan mengembangkan empati baik di kalangan guru maupun peserta didik.

Kata kunci: Pendidikan, neoliberalisme, ekomisasi pendidikan, dan berfikir kritis.

Pendahuluan

Tujuan dari makalah ini adalah mencoba meredefinisi ulang makna pendidikan. Selama ini makna pendidikan seringkali berdasarkan kepada paradigma ekonomi. Paradigma ekonomi dalam konteks ini adalah paradigma yang memandang bahwa pendidikan merupakan investasi yang akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam ilmu ekonomi, investasi di bidang pendidikan menjadi bagian penting diskursus mengenai *human capital* dan kaitannya dengan pertumbuhan (Saefullah, 2001). Meskipun paradigma ekonomi ini barangkali penting untuk sebuah bangsa yang sedang membangun ekonominya, akan tetapi seringkali pendekatan ini juga mereduksi makna lain dari pendidikan. Selain itu

pandangan ekonomi di dunia pendidikan juga dapat membuat sistem pendidikan kita mengabaikan isu-isu sosial dan keadilan. Padahal sebagaimana dinyatakan Freire (1996) oleh tujuan pendidikan yang paling utama adalah justru membekali anak dengan kepekaan dan rasa empati terhadap berbagai persoalan ketidakadilan yang ada di sekitarnya.

Tulisan ini mencoba memberikan masukan kepada kebijakan dan juga penelitian terdahulu mengenai pendidikan di tanah air paling tidak melalui dua hal. Yang pertama, tulisan ini mencoba membahas kebijakan yang terkait dengan pendidikan secara lebih kritis. Meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang mengkritisi praktek pendidikan di tanah air (Setiarsih, 2017; Sholeh, 2017; Wattimena, 2018), akan tetapi penelitian yang secara spesifik mengkritisi pengaruh neoliberalisme di dunia pendidikan di tanah air masih sangat terbatas. Yang kedua meskipun ada beberapa studi yang terbatas mengenai dampak neoliberalisme di dunia pendidikan di Indonesia, akan tetapi studi yang terbatas tersebut kebanyakan menggunakan bahasa inggris (Adriany, 2017; Adriany & Saefullah, 2015; Saefullah, 2001; Wijaya Mulya, 2019; Wijaya Mulya & Sakhiyya, 2021). Penulis melihat perlu adanya kajian yang membahas isu neoliberalisme di dunia pendidikan dengan bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas. Diharapkan tulisan ini akan membuka lebih banyak kajian mengenai isu neoliberalisme di dunia pendidikan sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan pendidikan di negara ini.

Tulisan ini akan dibagi kedalam lima bagian. Bagian pertama berisikan latar belakang penulisan topik ini. Bagian kedua akan membahas mengenai paradigma ekonomi di dunia pendidikan. Bagian ketiga akan membahas mengenai dampak paradigma ekonomi di dunia pendidikan.

Bagian keempat akan menyajikan sebuah pandangan alternatif dalam mendefinisikan pendidikan dan bagian kelima akan menyajikan penutup. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan mengenai praktek pendidikan yang ada di tanah air.

Pandangan Ekonomi di Dunia Pendidikan

Pengaruh pandangan ekonomi terhadap dunia pendidikan sangatlah kuat (Besley & Peters, 2006; Davies & Bansel, 2007; Kaščák & Pupala, 2011). Hal ini juga tidak terlepas di Indonesia. Pandangan ekonomi terhadap pendidikan ini seringkali dipengaruhi oleh paradigma neoliberalisme. Neoliberalisme menurut Harvey (2007a, 2007b) adalah sebuah pendekatan yang meminimalisasi peran pemerintah didalam bidang sosial ekonomi dan secara perlahan mengalihkan peran pemerintah kepada pihak swasta dan individu.

Neoliberalisme pada awalnya merupakan sebuah pendekatan politik ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme, sistem masyarakat diasumsikan sebagai sebuah sistem yang bebas dan setara sehingga masyarakat dapat berkompetisi satu sama lain. Pemerintah hadir hanya untuk memberikan arahan dalam bentuk standard dan regulasi untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi dan praktek-praktek ekonomi dan politik yang dilakukan menjamin keadilan bagi semua orang. Akan tetapi dalam kenyataannya, masyarakat berada dalam sebuah kondisi yang sejak awal tidak setara. Struktur masyarakat di kita, sangat disayangkan masih terdiri dari hierarki-hierarki yang menempatkan masyarakat pada kelompok yang berbeda. Pengaruh neoliberalisme di dunia pendidikan juga terlihat dengan semakin meluasnya wacana

privatisasi pendidikan. Meskipun dalih yang sering dipakai dalam wacana ini adalah untuk memberikan pilihan ragam layanan pendidikan kepada masyarakat yang luas, akan tetapi tidak bisa dinafikan konsep privatisasi pendidikan semakin menguatkan pandangan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab individu dan bukan tanggung jawab negara. Padahal Pasal 31 Ayat 1, Undang-undang Dasar 1945 telah dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan”.

Salah satu konsep yang diusung oleh neoliberalisme adalah konsep *human capital*. Didalam perspektif *human capital* terdapat gagasan yang memandang pendidikan sebagai sebuah bentuk investasi. Konsep *human capital* pertama kali diperkenalkan oleh Gary S. Becker pada tahun 1960 dan Theodore W. Schultz di tahun 1961 (Saefullah, 2001). Teori ini melengkapi Solow's growth model yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara hanya ditentukan oleh Tenaga Kerja dan Modal (Solow, 1970). Teori *human capital* berkeyakinan bahwa investasi pada manusia dapat menyebabkan manusia menjadi lebih produktif dan dengan demikian kontribusinya terhadap perekonomian akan lebih baik dari sekedar kontribusi fisik (Saefullah, 2001). Sebagaimana dikemukakan oleh Heckman and Masterov (2007) bahwa setiap investasi yang dihasilkan di dunia pendidikan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dimasa yang akan datang. Meskipun secara sepintas tidak ada yang salah dengan pendapat ini, akan tetapi pandangan ini secara tidak langsung hanya melihat pendidikan sebagai aktivitas ekonomi saja. Individu dalam pandangan ini hanya dilihat sebagai makhluk ekonomi, diukur berdasarkan apa yang kelak akan dihasilkan pada masa yang akan datang.

Perspektif *human capital* ini biasanya berhubungan dengan pendekatan *link and match* di dunia pendidikan. Pendekatan ini awalnya digunakan di pendidikan vokasional untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat. Sehingga desain pembelajaran dan materi yang disampaikan dirancang dengan melihat kepada kehendak atau demand pasar. Pandangan *link and match* di dunia pendidikan ini sangatlah dipengaruhi oleh teori pragmatisme yang dikembangkan oleh Dewey (1998). John Dewey meyakini bahwa fungsi dari pendidikan adalah menyiapkan individu dengan pengalaman-pengalaman nyata yang diharapkan akan memperkaya pemahaman para peserta. Dengan demikian, siswa diharapkan akan memiliki kesiapan, keterampilan dan juga keahlian yang memadai ketika mereka lulus nanti dan karenanya siap memasuki dunia kerja.

Perspektif pragmatis dengan penekanan pada *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja ini bukanlah sebuah hal baru di dunia pendidikan. Pada jaman Orde Baru, pendekatan pendidikan di tanah air pun sangat diwarnai oleh pandangan ini. Saat itu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1990, Pasal 29 Ayat 2, pemerintah menginstruksikan siswa Sekolah Menengah Kejuruan menjadi tenaga siap kerja. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.

Sampai hari ini, pandangan pragmatism di dunia pendidikan masih sangat kuat sekali. Sejak terpilih sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim pun telah menyatakan bahwa program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan

diselaraskan dengan kebutuhan dunia dan Industri. Dengan mengusung konsep merdeka belajar, dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi diharapkan dapat mengembangkan prinsip-prinsip kampus merdeka yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk melakukan magang di berbagai industri. Bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen pun didorong untuk senantiasa aktif menjalankan kemitraan dengan sektor industri.

Ketika konsep merdeka belajar pertama kali digulirkan; dunia pendidikan, termasuk guru, murid, orang tua, dan akademisi menyambut dengan antusias. Konsep ini diyakini mampu membawa terobosan segar bagi pendidikan tanah air. Pada pidato yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya Riset dan Teknologi (saat itu masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Nadiem Makarim di peringatan Hari Guru Nasional Tanggal 25 November 2019, dijelaskan bahwa inti dari merdeka belajar adalah memberikan ruang kepada guru dan siswa untuk berkreasi dan berinovasi, tanpa dibebani oleh tugas-tugas administrasi dan tugas-tugas hafalan.

Konsep merdeka belajar sendiri diyakini bersumberkan dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan oleh Tuhan dalam keadaan merdeka (Surjomihardjo, 1986). Karenanya tujuan pendidikan pun haruslah mampu membebaskan dan memerdekakan manusia baik secara mental, pikiran, jiwa maupun raganya. Dalam hal ini pemikiran Ki Hadjar Dewantara dapat dikatakan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paolo Freire yang menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia (Freire, 1996). Sistem pendidikan yang ada di tanah air selama ini, dianggap terlalu

menitikberatkan kepada aspek hafalan semata, tanpa membekali peserta didik dengan keterampilan yang memadai. Pada saat yang sama, pelaksanaan pendidikan di tanah air juga dianggap terlalu kaku karena diatur oleh seperangkat standar yang acapkali menegasikan keberagaman berbagai layanan pendidikan. Dalam konteks negara Indonesia yang sangat multicultural baik dari segi bahasa, agama, etnisitas, budaya, dan status ekonomi; keberadaan standar pendidikan yang menghomogenkan keragaman praktek layanan pendidikan bisa menjadi sangat problematic.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sebagaimana telah dikemukakan tadi, implementasi dari konsep merdeka belajar ini justru lebih didorong oleh filofis pendidikan yang pragmatis, yang menekankan keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Salah satu hal yang paling terasa adalah di tingkat pendidikan tinggi dimana konsep merdeka belajar ini telah mendorong munculnya kebijakan “kampus merdeka”. Di website kampus merdeka (<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>), dinyatakan bahwa “kampus merdeka merupakan bagian dari kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat dengan cara terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan”. Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa penekanan pada *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia kerja menjadi sebuah luaran yang diharapkan muncul dari kegiatan tersebut. Tujuan utama dari program ini pada akhirnya adalah menghasilkan tenaga siap pakai di dunia kerja.

Persoalan dari Pandangan Ekonomi terhadap Pendidikan

Meskipun tidak ada yang menafikan kepentingan praktis pendidikan sebagai sebuah jenjang yang mempersiapkan kesiapan kerja, akan tetapi penekanan yang terlalu bertumpu pada hal ini, hanya akan menjadikan pendidikan tidak lebih sebagai sebuah aktivitas ekonomi saja. Paling tidak terdapat beberapa persoalan ketika aktivitas pendidikan hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi belaka:

1. Reduksi konsep manusia

Manusia didalam pendekatan ekonomisasi pendidikan seringkali dipandang sebagai makhluk ekonomi yang memikul beban ekonomi bukan hanya dirinya tapi juga negara. Didalam pandangan yang melihat manusia tidak lebih sebagai *human capital*, manusia, khususnya anak dianggap sebagai makhluk yang “*becoming*” (Uprichard, 2008). Pandangan yang menganggap anak sebagai sosok yang “*becoming*” seringkali menempatkan anak pada posisi yang dianggap belum sempurna, tidak lengkap (*incomplete*), dan dalam proses penyempurnaan sebagai orang dewasa (James & James, 2004). Konsep peserta didik sebagai makhluk yang “*becoming*” seringkali didorong oleh pandangan ideal mengenai apa yang menjadi tanggung jawab anak di masa yang akan datang. Sebagai contoh didalam wacana generasi emas, terdapat sebuah asumsi implisit yang menyatakan bahwa anak dikatakan sebagai generasi emas karena mereka diyakini menjadi bagian dari bonus demografi di tahun 2045 yang berkontribusi sebagai bagian dari generasi produktif yang akan meningkatkan pendapatan per kapita bangsa Indonesia. Meskipun pandangan ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi pandangan ini menegaskan

bahwa investasi pada anak dianggap penting karena anak-anak akan memberikan kontribusi ekonomi dimasa yang akan datang (Kašćák & Pupala, 2011). Pandangan ekonomi ini seringkali melupakan konsep anak sebagai “*being*” yang memiliki kebutuhan dan hak nya sendiri di masa kini (Davies, 2014). Penekanan terhadap masa depan seringkali mengabaikan hak anak di masa kini. Dalam situasi pandemic COVID-19 misalnya, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa anak-anak akan mengalami *learning loss* yang berdampak pada kerugian ekonomi sebuah negara (Kaffenberger, 2021). Orang dewasa seringkali lupa bahwa selama situasi COVID-19, yang paling penting adalah kesehatan fisik dan kesejahteraan mental anak (*children well-being*).

2. Penekanan kepada Individualisme

Pengaruh pandangan ekonomi di dunia pendidikan seringkali membuat pendidikan terjebak kepada penghargaan terhadap individualisme belaka. Pendidikan menjadi tempat yang mengajarkan anak dengan nilai-nilai kompetisi. Konsep *survival of the fittest* acapkali membuat peserta didik terjebak dengan persaingan antara sesama. Meskipun nilai-nilai kompetisi diperlukan untuk bersaing di dunia yang semakin global, akan tetapi nilai-nilai kemanusiaan lain seperti empati dan kasih sayang antar sesama menjadi terlupakan. Padahal seperti dinyatakan oleh Noddings (2002) tujuan pendidikan adalah menghasilkan individu yang memiliki sifat “*caring*”.

Konsep *caring* sendiri diyakini bisa menjadi sebuah bentuk resistansi terhadap paradigma neoliberalisme. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, paradigma neoliberalisme sangat menekankan kepada nilai ekonomi dari sebuah kegiatan. Manusia hanya dihargai sejauh mana dia bisa berkontribusi secara ekonomi. Konsep *caring* menempatkan manusia kembali kemanusiaannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Freire (1996, p. 70) “untuk merubah dunia, kita perlu *memanusiakannya (to transform the world is to humanize it)*”. Manusia dihargai bukan karena apa yang dihasilkannya tetapi karena semua sisi kemanusiaanya.

Dalam konteks Indonesia, konsep *caring* sesungguhnya sangat dekat maknanya dengan konsep gotong royong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dalam konsep gotong-royong, tidak ada yang kepentingan individu, yang ada hanyalah kepentingan kelompok saja. Sayangnya sebagaimana telah dikemukakan, sistem pendidikan kita sering dibangun berdasarkan nilai-nilai kompetisi yang membuat individu bertarung satu sama lain. Adanya sistem ranking (yang walaupun telah perlahan-lahan dihapuskan) membuat peserta didik berorientasi kepada pencapaian individu, yang sayangnya seringkali diperoleh dengan cara-cara yang tidak jujur. Pada tahun 2013 misalnya, pernah disinyalir terjadi praktek-praktek mencotek didalam pelaksanaan Ujian Nasional (Aprillatu, 2013).

3. Pengabaian makna lain pendidikan

Penekanan kepada tujuan pendidikan seringkali membuat kita mengabaikan makna lain dari pendidikan. Paling tidak terdapat dua hal yang berpotensi dimarginalkan ketika pendidikan hanya dilihat semata-mata sebagai aktivitas ekonomi. Yang pertama akan diabaikan adalah proses berfikir kritis (*critical thinking*), dan yang kedua adalah isu keadilan sosial.

Kemampuan berfikir kritis tidak bisa dinafikan merupakan sebuah hal penting didalam proses pendidikan. Smith and Szymanski (2013) menjelaskan bahwa berfikir kritis merupakan bagian dari *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*. Pithers and Soden (2000, p. 238) mendefinisikan proses berfikir kritis sebagai kemampuan untuk

identify questions worth pursuing, being able to pursue one's questions through self-directed search and interrogation of knowledge, a sense that knowledge is contestable and being able to present evidence to support one's arguments.

Bila melihat dari definisi tersebut, maka tidak diragukan lagi kemampuan berfikir kritis menekankan kepada kemampuan untuk menganalisa segala informasi yang diterima secara kritis. Sementara apabila pendidikan diarahkan untuk mencetak tenaga kerja yang siap diterima oleh pasar dan industri, maka acapkali peserta didik justru diarahkan untuk menjadi sosok yang patuh, taat kepada aturan dunia kerja, taat kepada pimpinan, dan memiliki

loyalitas penuh. Sebagaimana dinyatakan oleh Beckman and Cooper (2004) bahwa pandangan ekonomisasi pendidikan telah menormalisasi pendidikan menjadi institusi yang alih-alih mengajarkan kemampuan untuk mengkritisi dan mempertanyakan praktek-praktek dan wacana dominan di tanah air, malah mengajarkan kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan, dan konformitas terhadap permintaan pasar. Hal ini tergambarkan dari desain kurikulum, pilihan mata kuliah, dan ketersediaan buku-buku teks yang lebih menekankan kepada skill/ keahlian yang terkait dengan bagaimana melakukan sesuatu, ketimbang mempertanyakan kenapa sesuatu itu harus dilakukan (Graupe & Steffestun, 2018).

Meskipun dewasa ini pendidikan sering menekankan pentingnya *High Order Thinking Skills (HOTS)*, akan tetapi nampaknya hal ini baru diterjemahkan kedalam penekanan kepada soal-soal ujian. Soal-soal ujian seringkali diminta untuk menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang memuat komponen *HOTS*. Akan tetapi sejatinya kemampuan berfikir kritis bukanlah sesuatu yang dapat dibentuk pada saat ujian saja. Akan tetapi yang justru lebih penting adalah memastikan bahwa proses pengajaran dan pembelajaran yang ada justru membuka ruang agar siswa mampu berfikir kritis dan memiliki keberanian untuk mempertanyakan materi yang mereka terima. Ketika pembelajaran lebih banyak bersifat hafalan serta menekankan kepada keterampilan perilaku saja, maka pendidikan hanya akan menghasilkan robot semata.

Pengabaian kemampuan berfikir kritis pada dunia pendidikan ini akan memiliki dampak yang cukup signifikan. Saat ini di situasi dimana perkembangan informasi berjalan melalui cepat di dunia maya dan melalui media sosial, masyarakat kita seringkali dibingungkan dengan adanya berita-berita hoax. Tanpa adanya kemampuan berfikir kritis, berita-berita hoax ini akan dengan mudah diterima oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bagaimana penyebaran berita hoax ini memiliki hubungan dengan semakin dinormalisasinya perilaku kejahatan di sekitar kita (Astrini, 2017; Prasetyo, 2018). Selain itu berita-berita hoax juga ternyata berpotensi meningkatkan radikalisme dan intoleransi di kalangan masyarakat (Abdullah & Nasionalita, 2018; Hidayat, Widyaningrum, & Sarjito, 2021; Subagyo, 2020). Pada akhirnya kebiasaan mengkonsumsi budaya hoax akan semakin mengikis budaya berfikir kritis dan ilmiah di kalangan masyarakat (Megawati, 2018).

Hal kedua yang dimarginalkan dari pendekatan ekonomi di dunia pendidikan adalah semakin terpinggirkannya isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial (*social justice*). Padahal sebagai negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sila kelima dari Pancasila menegaskan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kondisi ideal dimana masyarakat akan memiliki posisi yang setara dan memiliki akses serta partisipasi yang sama kedalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan (Enns & Sinacore, 2005; Gewirtz, 1998; Solehuddin & Adriany, 2017). Didalam perspektif

keadilan sosial, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan tidak ada satu orang pun yang berhak dikecualikan hak nya karena latar belakang agama, budaya, jenis kelamin, ethnistas, dan status ekonomi.

Peran pendidikan sendiri dari sudut pandang keadilan sosial sendiri menurut Marilyn Cochran-Smith di dalam Sensoy and DiAngelo (2009, hal. 350) adalah:

one that "actively address[es] the dynamics of oppression, privilege, and isms, [and recognizes] that society is the product of historically rooted, institutionally sanctioned stratification along socially constructed group lines that include race, class, gender, sexual orientation, and ability [among others]. Working for social justice in education means guiding students [and often being guided by students] in critical self-reflection of their socialization into this matrix of uneuql relationships and its implications, analysis of the mechanisms of oppression, and the ability to challenge these hierarchies."

Definisi keadilan sosial yang dikemukakan oleh Marilyn Cochran-Smith tersebut, paling tidak menekankan kepada beberapa hal. Yang pertama pendidikan haruslah memberikan kesadaran kepada peserta didik akan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Yang kedua, berangkat dari kesadaran tersebut, maka pendidikan harus haruslah memberikan keberanian kepada peserta didik untuk mempertanyakan ketidakadilan yang ada, dan yang terakhir pendidikan haruslah membekali peserta didik dengan semangat untuk merubah ketidakadilan menjadi sebuah keadilan.

Saat ini masih disayangkan, bahwa perspektif keadilan sosial di dunia pendidikan semakin terpinggirkan. Alih-alih menjadikan pendidikan dan lembaga pendidikan sebagai instrument untuk mencapai kesetaraan dan keadilan seosial, pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Francis and Mills (2011) seringkali menjadi lembaga yang terus menerus “*produce and reproduce inequalities*”. Institusi pendidikan menjadi tempat yang memproduksi ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial. Dari mulai semakin maraknya lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan biaya fantastis yang sangat mahal sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah hingga isu ketidaksetaraan gender dan kekerasan seksual yang masih ada dunia pendidikan kita, hal ini semakin menegaskan bagaimana pendidikan masih belum memiliki perspektif keadilan sosial.

Pengabaian isu keadilan sosial ini pada akhirnya hanya akan memperkuat kesenjangan yang ada di masyarakat. Meskipun Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di dunia (The World Bank, 2021), akan tetapi Indonesia juga tercatat sebagai negara yang memiliki kesenjangan sosial yang cukup tinggi, dimana gap antara masyarakat kelas menengah ke atas dan menengah kebawah sangat lebar (Yusuf, Sumber, & Rum, 2014). Meskipun akses dan partisipasi masyarakat ke layanan pendidikan terus meningkat (Ustama, 2009), akan tetapi hal ini tidak serta merta diiringi dengan peningkat mobilitas sosial khususnya mobilitas sosial secara status

ekonomi (Zamhari, 2018). Meskipun akses masyarakat kelas menengah ke bawah semakin terbuka, akan tetapi akses mereka terhadap pekerjaan yang dapat meningkatkan status sosial ekonomi mereka masihlah terbatas. Pendidikan karenanya belum sepenuhnya dapat menghilangkan isu kesenjangan sosial ini.

4. Marginalisasi ilmu-ilmu sosial humaniora

Penekanan aspek ekonomi pada pendidikan juga memiliki potensi untuk memarginalkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Sebagai contoh didalam kebijakan kampus merdeka, secara tegas tertera program yang menekankan kemitraan antara perguruan tinggi dengan sektor industri. Meskipun kebijakan ini tidak secara spesifik memarginalkan ilmu-ilmu sosial humaniora, akan tetapi secara tradisi keilmuan istilah industri akan lebih mudah terakses untuk bidang-bidang ilmu eksakta.

Penekanan kepada nilai ekonomi juga dapat dilihat dari model-model penelitian yang dikembangkan di tanah air. Penelitian biasanya diarahkan untuk mengembangkan model-model yang berorientasi kepada hak patent sehingga dapat menjadi *income generating unit*. Skema penelitian seperti ini tidak dinafikan lagi lebih memberikan ruang kepada ilmi-ilmu eksata yang memang diarahkan untuk menghasilkan teknologi tepat guna. Sementara pada ilmu-ilmu sosial humaniora, tradisi keilmuan yang ada lebih mengarah kepada dekonstruksi wacana dominan atau menghasilkan sebuah wacana alternatif. Penekanan kepada produk yang *tangible* atau terukur kembali menegaskan kuatnya pengaruh

neoliberalisme di dunia pendidikan sehingga kualitas sebuah riset pun dilihat dari seberapa jauh penelitian bisa memberikan keuntungan secara ekonomi (Besley & Peters, 2006). Padahal meskipun ilmu sosial tidak mengeluarkan luaran yang terukur dan dapat menghasilkan *income generating unit*, bukan berarti tidak memiliki peran penting dalam masyarakat. Yang paling terasa adalah ilmu sosial membantu kita untuk lebih memahami perilaku masyarakat berikut perubahan sosial yang ada di sekitarnya. Sejarah menunjukkan bahwa banyak sekali penemuan-penemuan penting dalam kehidupan manusia yang hanya berakhir membawa kerusakan karena tidak disertai dengan pemahaman yang utuh tentang manusia (Penders, 2017).

Redefinisi Makna Pendidikan

Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas, penulis telah mencoba menguraikan beberapa persoalan yang muncul sebagai akibat dari pengaruh neoliberalisme di dunia pendidikan. Dalam bagian ini, penulis mencoba mengajukan pentingnya redefinisi makna pendidikan agar pendidikan tidak terjebak menjadi semata-mata aktivitas ekonomi belaka.

Paling tidak ada dua hal yang coba diusulkan oleh penulis. Yang pertama agar pendidikan dapat kembali kepada fungsinya sebagai proses yang dapat memanusiakan manusia, maka pendidikan nasional perlu menitikberatkan kepada penguatan kemampuan berfikir kritis. Kemampuan berfikir kritis ini tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang superficial belaka. Dia tidak bisa ditanamkan hanya dengan menyisipkan kepada soal-soal ujian atau assessment di akhir, akan tetapi dia perlu

menjadi sebuah nilai, sebuah proses yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan.

Salah satu hal mendasar yang perlu dilakukan untuk membangun daya berfikir kritis peserta didik adalah dengan memberikan materi pelajaran atau kegiatan yang sesuai dengan konteks budaya dimana mereka berada. Sebagaimana dikemukakan oleh del Carmen Salazar (2013, hal. 138)

the reality of the learner is crucial to the development of a humanizing pedagogy and is inclusive of the sociohistorical, sociocultural, and sociopolitical contexts of students' lives inside and outside of school.

Konteks sosial budaya menjadi sebuah prasyarat bagi individu untuk mampu berfikir kritis. Karena dengan mengenali masalah yang ada di sekitarnya, maka individu akan termotivasi untuk melakukan perubahan. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang membuat peserta didik lekat dengan konteks budayanya dan pada saat yang sama mampu menghargai nilai-nilai multikultural dan keberagaman. Beberapa praktek pendidikan yang dianggap baik di dunia seperti pendidikan di negara New Zealand atau Kanada justru berawal dari penghargaan terhadap budaya masyarakat lokal atau indigenous (Ball, 2004; Tesar, 2015) Sebagaimana dikemukakan oleh Bautista and Ayala (2000, hal. 278-279):

The process by which individuals achieve a deepening awareness of the sociopolitical and economic realities that shape their lives and their capacity to transform them. In addition, it refers to processes whereby individuals come to better understand possible linkages between the macropolitical, economic, and social variables and micro classroom instruction.

Kemampuan berfikir kritis juga dapat dikembangkan apabila lembaga pendidikan dapat menjadi tempat yang aman dimana siswa merdeka untuk mengajukan pertanyaan tanpa rasa takut. Sehingga merdeka belajar bagi siswa tidak hanya dimaknai sebagai kemerdekaan untuk memiliki pengalaman di dunia kerja, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya justru kemerdekaan untuk mempertanyakan wacana dominan yang ada disekitarnya. Lembaga pendidikan perlu menjadi tempat yang memperkenalkan nilai-nilai demokratis dan nilai-nilai kesetaraan tanpa melupakan nilai-nilai karakter bangsa. Sekolah perlulah menjadi tempat dimana siswa dapat menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut didalam United Nation Conventions of Children Right yang menjamin hak peserta didik untuk bersuara.

Yang kedua, pendidikan perlulah dimaknai sebagai sebuah proses untuk menumbuhkan rasa empati atau *caring* dikalangan peserta didik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pendekatan ekonomi di dunia pendidikan telah membuat peserta didik dipaksa untuk berkompetisi satu sama lain. Prestasi individu menjadi segalanya. Meskipun anak-anak Indonesia perlu diberikan kemampuan untuk bisa bersaing di tataran global, tapi hal ini harus dilakukan dengan semangat kolaborasi (Kemp, 2013; Williams, Prestage, & Bedward, 2001). Tidak hanya itu peserta didik pun dijejali dengan kurikulum yang terlalu gemuk sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial.

Konsep *caring* ini bukan hanya menjadi sebuah semangat yang harus ditanamkan pada peserta didik, akan tetapi konsep ini pun harus menjadi bagian integral dari kompetensi guru. Sebagaimana dikemukakan oleh del Carmen Salazar (2013, hal. 140) dalam pendidikan yang menekankan kepada aspek *caring*, guru akan memastikan untuk:

- 1) Mendengarkan suara dan kebutuhan peserta didik.
- 2) Mencoba mengenali sisi personal dari seorang siswa dan berusaha memahami lingkungan rumah dimana anak tersebut berada.
- 3) memahami kesulitan yang dialami siswa baik kesulitan karena masalah bahasa atau budaya.
- 4) Menunjukkan kebaikan, kesabaran, dan penghormatan terhadap peserta didik
- 5) Mementingkan kesejahteraan mental peserta didik, termasuk kebutuhan emosi, sosial, dan akademik.
- 6) Menciptakan dukungan didalam dan luar sekolah.
- 7) Menghargai suara dan peran orang tua.
- 8) Mengijinkan siswa menggunakan bahasa ibu mereka
- 9) Memfasilitasi hubungan siswa dengan lingkungannya.

Penutup

Makalah ini mencoba mengkaji definisi dan praktek pendidikan yang ada di tanah air. Hasil dari analisis literatur yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bagaimana praktek pendidikan di tanah air sangat diwarnai oleh paradigma neoliberalisme yang sangat menekankan kepada nilai-nilai ekonomi. Meskipun tidak dinafikan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan ekonomi, akan tetapi penekanan pada hal ini membuat

pendidikan cenderung melupakan hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya.

Makalah ini merupakan sebuah refleksi agar pendidikan di tanah air dapat dikembalikan kepada fungsinya sebagai sebuah proses untuk memanusiakan manusia dan menyadarkan peserta didik akan persoalan sosial yang ada disekitarnya. Untuk itu perlu ada kajian yang lebih mendalam dari aspek kebijakan untuk melihat peran yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong humanisasi pendidikan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. N., & Nasionalita, K. (2018). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Pelajar Mengenai HOAX. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 6(1), 120.
- Adriany, V. (2017). Neoliberalism and practices of early childhood education in Asia. *Policy Futures in Education*, 16(1), 3-10. doi:10.1177/1478210317739500
- Adriany, V., & Saefullah, K. (2015). Deconstructing Human Capital Discourse in Early Childhood Education in Indonesia. In T. Lightfoot-Rueda, R. L. Peach, & N. Leask (Eds.), *Global Perspectives on Human Capital in Early Childhood Education: Reconceptualizing Theory, Policy, and Practice* (pp. 159-179). New York: Palgrave Macmillan US.
- Aprillatu, P. D. (2013, 27 April 2013). Ketika menyontek berjemaah jadi tradisi Ujian Nasional. *Merdeka*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketika-menyontek-berjemaah-menjadi-tradisi-ujian-nasional.html>
- Astrini, A. (2017). Hoax dan Banalitas Kejahatan (Studi Pustaka tentang fenomena hoax dan keterkaitannya dengan Banalitas Kejahatan). *Transformasi*, 2(32).
- Ball, J. (2004). As if Indigenous knowledge and communities mattered: Transformative education in First Nations communities in Canada. *American Indian Quarterly*, 454-479.
- Bautista, A., & Ayala, E. S. (2000). *Immigrant voices: In search of educational equity*: Rowman & Littlefield.
- Beckman, A., & Cooper, C. (2004). Globalisation, the new managerialism and education: Rethinking the purpose of education in Britain. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 2(2), 1-15.
- Besley, A. C., & Peters, M. A. (2006). Neoliberalism, performance and the assessment of research quality. *South African Journal of Higher Education*, 20(6), 814-832. doi:doi:10.10520/EJC37299
- Davies, B. (2014). *Listening to children: Being and becoming*: Routledge.
- Davies, B., & Bansel, P. (2007). Neoliberalism and education. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 20(3), 247-259.
- del Carmen Salazar, M. (2013). A humanizing pedagogy: Reinventing the principles and practice of education as a journey toward liberation. *Review of Research in Education*, 37(1), 121-148.

- Dewey, J. (1998). *The essential Dewey: Pragmatism, education, democracy* (Vol. 1): Indiana University Press.
- Enns, C. Z. E., & Sinacore, A. L. (2005). *Teaching and Social Justice: Integrating Multicultural and Feminist Theories in the Classroom*. Washington: American Psychological Association.
- Francis, B., & Mills, M. (2011). Schools as damaging organisations – instigating a dialogue concerning alternative models of schooling. *Pedagogy, Culture & Society*.
- Freire, P. (1996). *Pedagogy of the Opressed*. London: Penguin Books Ltd.
- Gewirtz, S. (1998). Conceptualizing social justice in education: mapping the territory. *Journal of Education Policy*, 13(4), 469-484. doi:10.1080/0268093980130402
- Graupe, S., & Steffestun, T. (2018). “The market deals out profits and losses”–How Standard Economic Textbooks Promote Uncritical Thinking in Metaphors. *JSSE-Journal of Social Science Education*, 17(3), 5-18.
- Harvey, D. (2007a). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press Inc.
- Harvey, D. (2007b). Neoliberalism as creative destruction. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 610(21), 22-44.
- Heckman, J. J., & Masterov, D. V. (2007). The Productivity Argument for Investing in Young Children*. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 29(3), 446-493. doi:10.1111/j.1467-9353.2007.00359.x
- Hidayat, N., Widyaningrum, N., & Sarjito, A. (2021). LITERASI DIGITAL DAN BELA NEGARA: SEBUAH UPAYA UNTUK MENCEGAH HOAX DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 32-41.
- James, A., & James, A. L. (2004). *Constructing Childhood*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Kaffenberger, M. (2021). Modelling the long-run learning impact of the Covid-19 learning shock: Actions to (more than) mitigate loss. *International Journal of Educational Development*, 81, 102326.
- Kašćák, O., & Pupala, B. (2011). Governmentality-neoliberalism-education: The risk perspective. *Journal of Pedagogy/Pedagogický časopis*, 2(2), 145-158.
- Kemp, A. T. (2013). Collaboration vs. individualism: what is better for the rising academic?

- Megawati, F. (2018). *KEBIJAKAN HUMAS KEMENTRIAN KESEHATAN RI DALAM MENCEGAH BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus: Berita Hoax Produk Kangen Water)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
- Noddings, N. (2002). *Educating moral people: A caring alternative to character education*: ERIC.
- Penders, B. (2017). Marching for the myth of science: A self-destructive celebration of scientific exceptionalism. *EMBO reports*, 18(9), 1486-1489.
- Pithers, R. T., & Soden, R. (2000). Critical thinking in education: a review. *Educational Research*, 42(3), 237-249. doi:10.1080/001318800440579
- Prasetyo, A. B. (2018). *Strategi Berpikir Kritis Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Jamaah Masjid Gunungsari Indah Surabaya (Studi Deskriptif tentang kemampuan berpikir kritis para pengguna smartphone ketika menerima berita Hoax)*. Universitas Airlangga,
- Saefullah, K. (2001). *Human Capital and Economic Growth in Indonesia: Long Run and Short Run Analysis for the Period of 1970-2000*. (Master of Economics). International Islamic University Malaysia, Malaysia.
- Sensoy, O., & DiAngelo, R. (2009). Developing social justice literacy: An open letter to our faculty colleagues. *Phi Delta Kappan*, 90(5), 345-352.
- Setiarsih, A. (2017). Diskursus pendidikan kritis (critical pedagogy) dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 76-85.
- Sholeh, M. (2017). Kajian Kritis Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 36-55.
- Smith, V. G., & Szymanski, A. (2013). Critical thinking: More than test scores. *International Journal of Educational Leadership Preparation*, 8(2), 16-25.
- Solehuddin, M., & Adriany, V. (2017). Kindergarten Teachers' Understanding on Social Justice: Stories From Indonesia. *SAGE Open*, 7(4), 2158244017739340. doi:10.1177/2158244017739340
- Solow, R. M. (1970). *Growth theory. An exposition*. Paper presented at the Growth theory. An exposition.

- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 10-24.
- Surjomihardjo, A. (1986). *Ki Hajar Dewantara dan taman siswa dalam sejarah Indonesia modern*: Penerbit Sinar Harapan.
- Tesar, M. (2015). Te Whāriki in Aotearoa New Zealand: Witnessing and resisting neoliberal and neo-colonial discourses in early childhood education. In V. Pacini-Ketchabaw & A. Taylor (Eds.), *Unsettling the Colonial Places and Spaces of Early Childhood Education* (pp. 98-113). New York & Oxon: Routledge.
- The World Bank. (2021). The World Bank in Indonesia: Overview. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>
- Uprichard, E. (2008). Children as ‘Being and Becomings’: Children, Childhood and Temporality. *Children & Society*, 22(4), 303-313. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2007.00110.x>
- Ustama, D. D. (2009). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1-12.
- Wattimena, R. A. (2018). Pedagogi Kritis. *Universitas*, 28(2), 180-199.
- Wijaya Mulya, T. (2019). Contesting the neoliberalisation of higher education through student–faculty partnership. *International Journal for Academic Development*, 24(1), 86-90.
- Wijaya Mulya, T., & Sakhiyya, Z. (2021). ‘Leadership is a sacred matter’: women leaders contesting and contextualising neoliberal meritocracy in the Indonesian academia. *Gender and Education*, 33(7), 930-945.
- Williams, A., Prestage, S., & Bedward, J. (2001). Individualism to collaboration: The significance of teacher culture to the induction of newly qualified teachers. *Journal of education for teaching*, 27(3), 253-267.
- Yusuf, A. A., Sumber, A., & Rum, I. A. (2014). Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993–2013. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 243-254.
- Zamhari, A. (2018). Pengaruh Pendidikan terhadap Mobilitas Sosial. *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 127-140.

PENGOKOHAN KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI PENDIDIKAN SENI DI ERA SOCIETY 5.0

Yuliawan Kasmahidayat

Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: kasmahidayat@upi.edu

Article History:

Received : 12 November 2021

Reviewed : 18 November 2021

Accepted : 8 December 2021

Published : 15 December 2021

Abstract

Changes in the pattern of people's lives tend to choose a new culture that is more practical, causing the national culture to be "forgotten". The analysis of this article is based on the philosophy of aesthetic science in building a creative thinking behavior system through understanding the characteristics of ethnic, racial, cultural, and religious diversity as a "challenge". Aiming as a transfer of knowledge and transfer of value in the absorption and adoption of the industrial era 4.0 and society 5.0, creating a synthesis of new civilizations in order to open "opportunities". Building a method of analyzing the millennial generation as an asset in "transforming data into information" which is meaningful as an effort to strengthen national culture in the future. Following the trend of the industrial revolution 4.0 and society 5.0, it demands that art education must be able to adapt. Understanding the strategic role of art education in facing the era of society 5.0. Researchers raised case studies of learning arts and culture education at the Bangkok Indonesia School as well as literature studies on the concept of society 5.0 with the SWOT analysis method to describe the results of learning art education in exploring "unique potential" into "personal aesthetics" as a form of strategy for strengthening national cultural values. through art education in the era of society 5.0. The importance of "personal aesthetics" with national values that can "capture the momentum of civilization" and make "leaps" in the development of future science based on strengthening national culture.

Keywords : National Culture, National Values, Personal Aesthetics, Nationalist Strategy, Higher Education, Regulatory Drivers

Abstrak

Perubahan pola kehidupan masyarakat cenderung memilih kebudayaan baru yang lebih praktis, menyebabkan kebudayaan nasional “*terlupakan*”. Analisis artikel ini berbasis filsafat ilmu estetika dalam membangun sistem perilaku berpikir kreatif melalui pemahaman karakteristik ragam etnik, ras, budaya, dan agama menjadi “*tantangan*”. Bertujuan sebagai *transfer knowledge* dan *transfer value* dalam penyerapan serta pengadopsian era industri 4.0 dan *society 5.0*, mencipta sintesis peradaban baru dalam rangka membuka “*peluang*”. Membangun metode menganalisis generasi *millennial* sebagai aset dalam “pengubahan data menjadi informasi” yang bermakna sebagai upaya pengokohan kebudayaan nasional di masa depan. Mengikuti *trend* revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*, menuntut Pendidikan seni harus mampu beradaptasi. Memahami peran strategis Pendidikan seni dalam menghadapi era *society 5.0*. Peneliti mengangkat kajian studi kasus pembelajaran Pendidikan seni budaya di Sekolah Indonesia Bangkok serta kajian studi literatur mengenai konsep *society 5.0* dengan metode analisa *SWOT* untuk menggambarkan hasil dari pembelajaran Pendidikan seni dalam menggali “*potensi unik*” menjadi “*personal estetik*” sebagai bentuk strategi pengokohan nilai kebudayaan nasional melalui Pendidikan seni di era *society 5.0*. Pentingnya “*personal estetik*” penerapan “*model estetik*” bernilai kebangsaan yang dapat “menangkap momentum peradaban” dan membuat “lompatan” pengembangan ilmu pengetahuan masa depan berbasis pengokohan kebudayaan nasional.

Kata Kunci : Kebudayaan Nasional, Nilai Kebangsaan, Personal Estetik, Strategi Nasionalis, Perguruan Tinggi, Pendorong Regulasi, Model Estetik.

Pendahuluan

Perubahan pola kehidupan masyarakat saat ini bercenderung untuk memilih kebudayaan baru yang lebih praktis. Hal tersebut dapat menyebabkan kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal “*terlupakan*”. Upaya untuk terus menghidupkan nilai-nilai yang terdapat Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ruh dalam arus perubahan pola kehidupan masyarakat, menjadikan satu hal yang harus terus ditumbuh-kembangkan.

Pancasila sebagai *saripati* nilai-nilai luhur budaya bangsa dari sebelum para *Founding Fathers* merumuskannya, telah tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa sejatinya menjadi pengawal utama dalam pengembangan personal estetik berisi tentang nilai dan norma dalam diri masyarakatnya. Tatanan nilai dan norma dalam diri setiap manusia, terkait erat dengan tatanan nilai dan norma yang telah ditanamkan dan dijalankan oleh leluhurnya.

Pola arus informasi yang begitu cepat dalam kehidupan masyarakat saat ini, menjadikan nilai-nilai luhur terkikis hingga terlupakan. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki kecenderungan untuk memilih kebudayaan baru yang lebih praktis. Pentingnya nilai dan norma dalam Pancasila sebagai identitas, menentukan capaian tujuan yang sama serta menghindari konflik horizontal antar ragam etnik, ras, budaya, dan agama dalam menghadapi tantangan terhadap revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*.

Selain daripada nilai dan norma dalam Pancasila, kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas suatu daerah harus tetap dilestarikan untuk mempertahankan nilai dan norma yang sudah tertanam sejak dahulu. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat multikultural atau beragam mulai dari suku bangsa, ras, hingga agama akan menghasilkan perbedaan yang dapat dijadikan ciri khas dan keunikan masing-masing daerah tersebut. Kebudayaan ini lebih mengarah kepada istilah kearifan lokal yang dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. (Kemdikbud, 2016). Secara khusus,

kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau suku tertentu yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal diajarkan secara turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya dalam bentuk benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*), misalnya bahasa, sastra, kesenian, upacara, adat istiadat dan sebagainya. Selain itu kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama yang bersifat menjaga dan melestarikan alam. Menurut Prof. Nyoman Sirtha dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.

Berdasarkan sejarah, masing-masing masyarakat dan suku memiliki kearifan lokal yang menjadi ciri khas dan menunjukkan identitas pada suku tersebut. Misalnya, suku Batak kental dengan keterbukaan, suku Jawa nyaris identik dengan kehalusan, suku Sunda dengan *someahnya* (kelembutannya), suku Madura memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletan.

Suku Madura secara kondisi geografis dan topografi pada dasarnya lekat dengan budaya masyarakat hidraulis (air) karena letak pulaunya yang terpisah dari Jawa dan mempunyai laut yang cukup luas serta kondisi lahan yang tandus, maka orang Madura lebih banyak menggantungkan hidup pada laut sehingga merekapun berpola kehidupan bahari yang penuh dengan tantangan. Inilah yang kemudian melahirkan perilaku sosial yang bercirikan keberanian tinggi, menjunjung tinggi martabat dan harga diri, berjiwa keras, dan ulet dalam hidup. Sifat ulet dalam bertahan hidup dan menjaga martabat

membuat orang Madura cukup disegani dalam pergaulan dengan masyarakat suku bangsa lain. Suku Madura diidentikan dengan Islam yang telah merasuk kuat menjadi inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika.

Selanjutnya berbicara tentang filosofi hidup masyarakat Suku Sunda yaitu *Soméah Hade ka Sémah*, artinya ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu dan membahagiakan orang meskipun belum dikenal (Hendriana & Setiyadi, 2018). Masyarakat Suku Sunda juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan yang direpresentasikan melalui penggunaan bahasa seperti *punten* dan *mangga* pada perilaku komunikasi dan kesehariannya.

Hasil penelitian penulis yang dilakukan di Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) beberapa waktu lalu, serta kajian studi referensi mengenai konsep *society 5.0* dengan metode analisa SWOT, digunakan untuk menggambarkan hasil dari pembelajaran Pendidikan seni. Menggali “*potensi unik*” menjadi “*personal estetik*” sebagai bentuk strategi pengokohan nilai kebudayaan nasional melalui Pendidikan seni di era *society 5.0*.

Pentingnya “*personal estetik*” bernilai kebangsaan yang dapat “menangkap momentum-momentum peradaban” dan membuat “lompatan-lompatan” pengembangan ilmu pengetahuan masa depan berbasis pengokohan kebudayaan nasional.

Metode

Membangun metode dalam menganalisis serta memposisikan generasi *millenial* sebagai aset dalam pengubahan data, menjadi informasi yang bermakna sebagai upaya pengokohan kebudayaan

nasional di masa depan. Metode analisis revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* dan metode *mix inspiration* berbasis filsafat ilmu estetika, dengan tahapan pengolahan: kesadaran bahasa hati, kesadaran logika rasa, kesadaran kreativitas dalam kerja kreatif, kesadaran dalam kompleksitas pengalaman di kehidupan sekitar dalam membangun persepsi-persepsi baru “mengidentifikasi “*potensi unik*” menjadi “*personal estetik*” dengan metode analisa SWOT menjadi fundamnt perubahan data menjadi informasi melalui Pendidikan seni. Paparan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif hasil merupakan uraian yang digunakan untuk menganalisis kedalaman bahasan.

Pembahasan

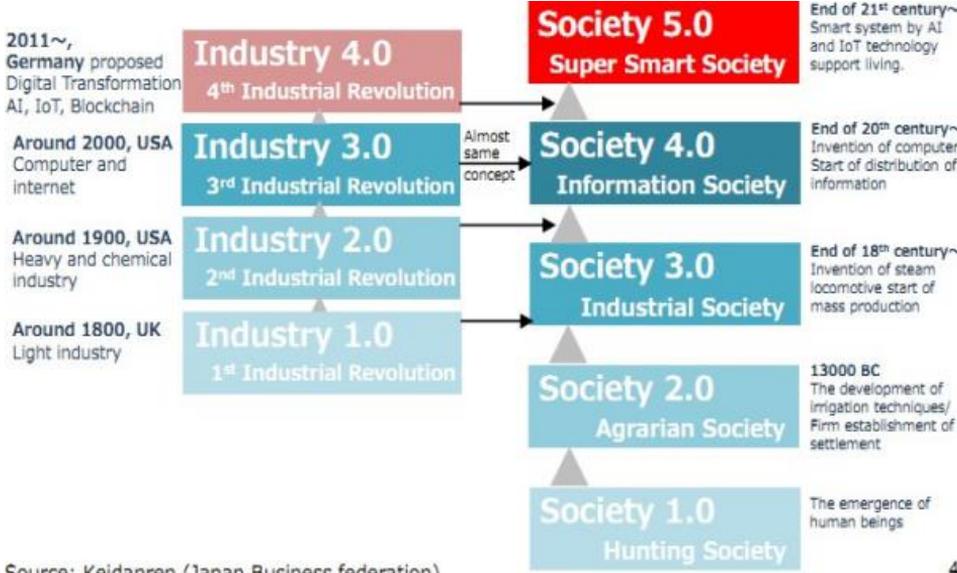
Pembahasan pola kehidupan masyarakat melalui nilai kearifan lokal dan nilai luhur dalam Pancasila, disandingkan dengan trend dalam pembahasan revolusi industry 4.0 dan society 5.0 dengan analisis SWOT. Desain Kegiatan Pembelajaran Seni Budaya serta, Nilai Luhur dalam Pembelajaran di Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) sebagai model Personal Estetik. Pengokohan Kebudayaan Nasional berbasis Filsafat Ilmu Estetika, bernilai potensi unik menjadi Personal Estetik dalam menggali “*potensi unik*” menjadi “*personal estetik*” sebagai bentuk strategi pengokohan nilai kebudayaan nasional melalui Pendidikan seni di era society 5.0 yakni sebagai berikut:

Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Trend di era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*, menuntut pendidikan seni untuk dapat beradaptasi dalam menghadapi beberapa trend yang sedang berkembang. Salah satu upaya yang bisa dilakukan

adalah dengan memahami peran serta strategi pembelajaran pendidikan seni dalam menghadapi era *society* 5.0 untuk meningkatkan produktifitas nilai-nilai luhur.

Strategi dalam era *society* 5.0 ditawarkan oleh Keidanren, sebuah federasi bisnis Jepang. Menurut Dr. Masahide Okamoto; 2019: *Society* 5.0 adalah representasi perkembangan masyarakat kelima. Perkembangan tersebut dimulai dari masyarakat yang memiliki pola berburu (*Society* 1.0), berlanjut ke era pertanian (*society* 2.0), era industri (*society* 3.0), dan masuk di era informasi (4.0).



Source: Keidanren (Japan Business federation)

Gambar 1. Ilustrasi Perkembangan Society 4.0
Di Jepang, implementasi *society* 5.0 dijelaskan dalam gambar 2 dengan adanya beberapa teknologi drone serta *artificial intelligence* yang digunakan untuk pengiriman barang, kemudian perawatan medis yang terintegrasi, *autonomus vehicles* atau pengkondisian kendaraan tanpa awak. Terdapat robot-robot dan sensor yang yang dimaksimalkan untuk sistem inspeksi dan pemeliharaan infrastruktur.

Namun terdapat hal yang membedakannya yakni pada nilai orientasi dari konsep *Industry 4.0* dan *Society 5.0* bahwa revolusi *Industry 4.0* fokus terhadap pengoptimalan teknologi dan sistem informasi untuk produktivitas dan proses bisnis. Sedangkan *Society 5.0* fokus terhadap pengoptimalan teknologi untuk kebutuhan kemanusiaan.



Gambar 4. Perkembangan Era Industry menuju Society

Strategi melalui hubungan antara *Society 5.0* dengan SDGs bahwa bentuk konsep *Autonomus Driving*, *Construction Disaster Management*, *Agriculture*, *Manufacture*, serta *Health/Medical* yang dikembangkan di Era *Society 5.0* secara prinsip mengarah pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang memastikan kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua kalangan dan berbagai usia.

Analisis SWOT merupakan analisa yang digunakan sebagai perbandingan antara faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*). Berikut ini adalah hasil analisa SWOT dari nilai luhur kebudayaan nasional :

Threatment (Ancaman)

1. Perubahan pola kehidupan masyarakat yang bercenderung untuk memilih kebudayaan baru yang lebih praktis, menyebabkan kebudayaan nasional terlupakan.
2. Kemunculan era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* dan ketidaksiapan tatanan nilai luhur masyarakat.
3. Arus informasi yang tak terkendali memungkinkan terjadinya konflik horizontal antar ragam etnik, ras, budaya, dan agama di Indonesia.

Opportunity (Peluang)

1. Indonesia merupakan salah satu negara pendukung tercapainya Pembangunan berkelanjutan (SDGs)
2. Perguruan tinggi di Indonesia merupakan wadah untuk bertumbuhnya inovasi dan teknologi berbasis riset / penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Berkembangnya trend revolusi Industri yang ditandai dengan adanya konsep *Smart City* yang di dalamnya terdapat konsep *Smart Campus*.

Weakness (Kelemahan)

1. Pancasila sebagai *saripati* nilai-nilai luhur budaya bangsa kini mulai terkikis.
2. Pancasila sebagai ideologi bangsa sejatinya menjadi pengawal utama dalam pengembangan personal estetik.

Strength (Kekuatan)

Pentingnya “*personal estetik*” bernilai kebangsaan yang dapat

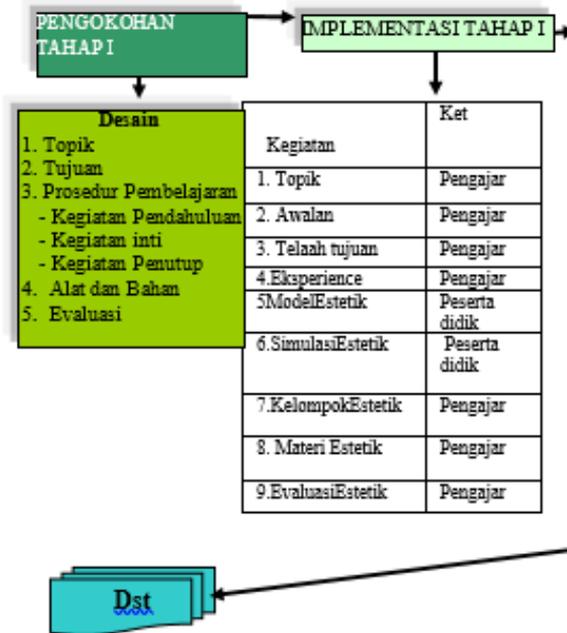
“menangkap momentum-momentum peradaban” dan membuat “lompatan-lompatan” pengembangan ilmu pengetahuan masa depan berbasis pengokohan kebudayaan nasional yang terkandung dalam Pancasila: nilai estetik tentang Ketuhanan, nilai estetik tentang kemanusiaan, nilai estetik tentang persatuan, nilai estetik tentang kerakyatan, dan nilai estetik tentang keadilan. Adapun Strategi nilai estetik yang bisa dilakukan berdasarkan analisa SWOT:

Tabel 1 Matriks Analisa SWOT Strategi Nilai Luhur dalam Pengembangan Personal Estetik

	<p>STRENGTH (S) Pentingnya <i>“personal estetik”</i> bernilai kebangsaan yang dapat “menangkap momentum-momentum peradaban” dan membuat “lompatan-lompatan” pengembangan ilmu pengetahuan masa depan berbasis pengokohan kebudayaan nasional yang terkandung dalam Pancasila: nilai estetik tentang Ketuhanan, nilai estetik tentang kemanusiaan, nilai estetik tentang persatuan, nilai estetik tentang kerakyatan, dan nilai estetik tentang keadilan.</p>	<p>WEAKNESS (W) Pancasila sebagai <i>saripati</i> nilai-nilai luhur budaya bangsa kini mulai terkikis. Pancasila sebagai ideologi bangsa sejatinya menjadi pengawal utama dalam pengembangan personal estetik.</p>
<p>OPPORTUNITIES (O) Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hak untuk mendukung tercapainya Pembangunan berkelanjutan (SDGs)</p>	<p>STRATEGI SO <i>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</i> Filsafat ilmu estetika dengan tahapan pengolahan: kesadaran bahasa hati, kesadaran logika rasa, kesadaran kreativitas dalam kerja kreatif, kesadaran dalam kompleksitas pengalaman di kehidupan disekitar dalam membangun persepsi-persepsi baru” mengidentifikasi <i>“potensi unik”</i> menjadi <i>“personal estetik”</i>.</p>	<p>STRATEGI WO <i>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</i> Pentingnya <i>“personal estetik”</i> bernilai kebangsaan yang dapat “menangkap momentum-momentum peradaban” dan membuat “lompatan-lompatan” pengembangan ilmu pengetahuan masa depan berbasis pengokohan kebudayaan nasional yang terkandung dalam Pancasila: nilai estetik tentang Ketuhanan, nilai estetik tentang kemanusiaan, nilai estetik tentang persatuan, nilai estetik tentang kerakyatan, dan nilai estetik tentang keadilan.</p>
<p>THREATS (T) Perubahan pola kehidupan masyarakat yang beracenderungan untuk memilih kebudayaan baru yang lebih praktis, menyebabkan kebudayaan nasional terupayakan. Munculnya era <i>revousi industri 4.0</i> dan <i>society 5.0</i> dan ketidaksiapan tatanan nilai luhur masyarakat. Arus informasi yang tak terkendali memungkinkan terjadinya konflik horizontal antar ragam etnik, ras, budaya, dan agama di Indonesia.</p>	<p>STRATEGI ST <i>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk Mengatasi ancaman</i> Peningkatkan kualitas Pancasila: nilai estetik tentang Ketuhanan, nilai estetik tentang kemanusiaan, nilai estetik tentang persatuan, nilai estetik tentang kerakyatan, dan nilai estetik tentang keadilan. Penerapan nilai dalam Pancasila di rumah, masyarakat dan sekolah.</p>	<p>STRATEGI WT <i>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</i> Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi seni dan budaya luar negeri dalam membangun persepsi-persepsi baru” mengidentifikasi <i>“potensi unik”</i> menjadi <i>“personal estetik”</i>.</p>

Desain Kegiatan Pembelajaran SIB

Desain kegiatan yang digunakan merujuk pada model tindakan kelas peserta didik sebagaimana dikemukakan oleh Elliot dalam Hopkins (1993:49) yang membagi kegiatan penelitian tindakan sebagai berikut:



Gambar 4. Kegiatan Penelitian Tindakan

Kegiatan dilaksanakan di Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) dengan variabel pembelajaran: variabel bebas (X): model pembelajaran estetik dan variabel terikat (Y): kemampuan desain dan simulasi model estetik.

Adapun unsur-unsur dalam *potensi unik* yaitu sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan dan kemauan dan konsepsi diri. *Potensi* tersebut tidak akan muncul begitu saja tanpa diterapkan melalui proses pendidikan yang panjang untuk memunculkan personal estetik sebagai karakter kebudayaan nasional.

Pendidikan di dalam *potensi unik* adalah usaha sadar terencana yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, sekolah maupun orang tua sebagai pendidik untuk membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam berinteraksi kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Terdapat 18 nilai pembentuk pendidikan yakni; religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat / komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab.

Nilai-Nilai Luhur dalam Pembelajaran Seni Budaya di SIB sebagai Model Personal Estetik

Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui pembelajaran seni budaya yang diterapkan di kalangan siswa SMP SIB, menggunakan konsep pembelajaran yang lebih mengarahkan pada konsep yang berkaitan dengan nilai estetik, kebenaran, dan keindahan dalam tari Tor-Tor. Hasil analisis tersebut mencakup pemahaman nilai, cita rasa, sikap dan standar yang terlibat dalam pengalaman dan penilaian siswa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tari Tor-Tor (Kasmahidayat, 2020:14)

Kedalaman nilai dalam tari Tor-Tor yang dipahami oleh siswa SIB, dapat dikembangkan dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang diambil dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Sesanti Bhineka Tunggal Ika. Analisis mendalam mengenai nilai yang terkandung dalam beragam bentuk seni di Nusantara ini, terkait dengan ke-14 nilai kebangsaan yaitu: 1) Nilai religius, 2) Nilai kekeluargaan, 3) Nilai keselarasan, 4) Nilai kerakyatan, 5) Nilai keadilan, 6) Demokrasi, 7)

Kesamaan derajat, 8) Ketaatan hukum, 9) Kesatuan Wilayah, 10) Persatuan bangsa, 11) Kemandirian, 12) Toleransi, 13) Keadilan dan 14) Gotong royong.

Esensi dari pendidikan seni, manakala diterapkan dengan tepat akan menyentuh langsung kedalaman perasaan setiap orang yang terlibat dalam pembelajaran. Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Manusia memiliki perasaan yang dapat membentuk tata nilai dan krama dalam menjalani pola hidupnya, baik hubungan antara manusia satu dengan lainnya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai yang terbentuk dari ketiga hubungan tersebut mengokohkan beragam nilai positif dalam diri manusia tersebut.

Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan adalah: 1) Nilai religius, 2) Nilai kemanusiaan, 3) Nilai produktivitas, 4) Nilai keseimbangan, 5) Nilai demokrasi, 6) Nilai kesamaan derajat dan 7) Nilai ketaatan hukum.

Bahwa nilai religius dapat kita temui di antaranya dalam tarian yang bertajuk upacara dan diperuntukkan dalam kegiatan keagamaan, seperti banyak kita jumpai di pulau Bali. Beberapa tarian yang mengandung nilai religious di Bali seperti : Tari Pendet, tarian ini merupakan tari pembuka dalam setiap upacara besar di pura, penarinya adalah wanita yang menari dengan membawa sesajen sehingga dikenal juga sebagai tari penyambutan para Dewa yang turun ke Bumi, dalam kreasinya tari pendet juga menjadi tarian yang sering ditampilkan untuk penyambutan tamu-tamu penting. Kedua adalah Tari Sanghyang seperti Sanghyang Deadari, Sanghyang Jaran, Sanghyang Deling, Sanhyang

Janger, Sanghyang Kidan dan lainnya. Tarian ini merupakan warisan jaman pra-Hindu yang mana penarinya *trans* atau kesurupan. Dipentaskan pada hari-hari tertentu dengan tujuan menolak bala dan memohon berkat. Selanjutnya adalah Tari Barong seperti Barong Ket, Barong Landung, Barong Bangkal, Barong Brutuk, Barong Gajah. Tarian yang sering kita temukan di sejumlah pura adalah Barong Ket. Pakaian barong tersebut berbentuk seperti singa, macan dan naga dihiasi dengan ornamen seni termasuk pernak-pernik ditarikan oleh 2 orang.

Secara umum, kedalaman nilai dalam tari-tarian di Bali berisi kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai saling menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga akan terbina kerukunan hidup yang hakiki. Analisis lebih mendalam terbentuknya nilai saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.

Beragam tarian di Nusantara yang di dalamnya mengandung nilai kemanusiaan berisi; mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai, mengembangkan sikap tenggangrasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional maka harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Bahwa nilai produktivitas berisi: perlindungan terhadap masyarakat dalam berkegiatan menuju kemakmuran, sarana dan prasarana yang mampu mendukung masyarakat sehingga menjadi kreatif dan produktif dan terciptanya Undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Bahwa nilai keseimbangan, kekompakan, adab, persaudaraan, persatuan dan kekompakan di antaranya dapat kita amati dalam tari Saman di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Analisis kandungan nilai lebih mendalam berupa menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, tidak memaksakan kehendak, toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan serta keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani.

Bahwa nilai demokrasi berisi: 1) Kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti setiap warga negara memiliki hak kebebasan yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. 2) Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut: rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemahaman atas perbedaan dalam keberagaman, dan tumbuhnya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.

Bahwa nilai kesamaan derajat berisi: setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nilai ketaatan hukum berupa setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Termasuk lembaga-lembaga penegak hukum juga wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Untuk meminimalisir demoralisasi serta permasalahan di atas diperlukan upaya penanaman nilai-nilai agama dan nilai kebangsaan. Penanaman nilai tersebut memerlukan waktu yang panjang melalui proses pendidikan baik formal maupun non formal, melalui kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Pembelajaran Seni Budaya di SIB menjelaskan upaya-upaya penanaman nilai kebangsaan untuk pengokohan peserta didik, yang dapat dilakukan tidak hanya oleh Program Studi Seni yang terdapat di berbagai Perguruan Tinggi termasuk Universitas Pendidikan Indonesia saja, tetapi oleh seluruh instansi terkait, serta berbagai komunitas khususnya yang bergerak di bidang pembelajaran, pengembangan, dan pelestarian seni baik secara formal maupun non formal.

Pengokohan Kebudayaan Nasional Berbasis Filsafat Ilmu Estetika Bernilai Potensi Unik menjadi Personal Estetik

Pengokohan kebudayaan nasional strategi penguatan nilai luhur berbasis pendidikan seni dengan cara menghidupkan nilai kebangsaan yang inovatif berdasarkan kemajuan *science* dan teknologi. Hal ini sebagai upaya kongkret untuk “menangkap moment-moment peradaban” melihat dan merasakan perubahan-perubahan tatanan kehidupan yang berdampak pada pola kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat, melalui tahapan:

1. Tahapan Pengolahan

Pengokohan nilai luhur melalui pengolahan pendidikan seni sebagai pengokohan serta penyeimbang atas realitas yang dihadapi keluarga, sekolah, dan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Bahwa pengembangan pendidikan seni sebagai upaya untuk mencipta persepsi baru melalui tahapan-tahapan pengolahan: kesadaran bahasa hati, kesadaran logika

rasa, kesadaran kreativitas dalam kerja kreatif, kesadaran dalam kompleksitas pengalaman sebagai media untuk mendidik “selera” tentang aspek nilai-nilai nyata dalam lingkungan kehidupan di sekitarnya untuk menampilkan esensi nilai luhur pada nilai keaslian lingkungannya.

2. Tahapan Penguatan

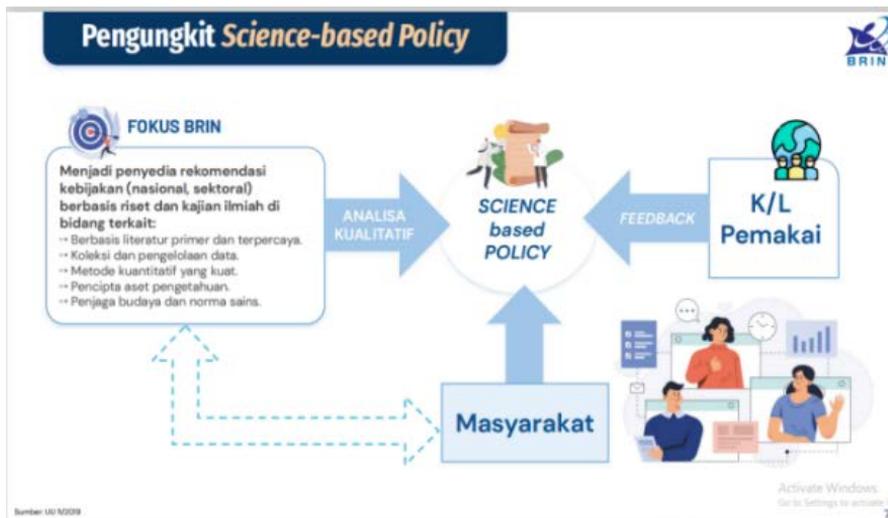
Pengolahan nilai luhur melalui penguatan pendidikan seni sebagai penguatan serta penyeimbang atas realitas yang dihadapi keluarga, sekolah dan masyarakat sehari-hari. Bahwa pengembangan pendidikan seni sebagai upaya untuk mencipta peningkatan pemahaman yang terbarukan melalui tahapan-tahapan penguatan nilai kebangsaan berupa: 1) Nilai religius, 2) Nilai kekeluargaan, 3) Nilai keselarasan, 4) Nilai kerakyatan, 5) Nilai keadilan, 6) Demokrasi, 7) Kesamaan derajat, 8) Ketaatan hukum, 9) Kesatuan Wilayah, 10) Persatuan bangsa, 11) Kemandirian, 12) Toleransi, 13) Keadilan dan 14) Gotong-royong.

3. Tahapan Pengokohan

Pengembangan pendidikan seni sebagai penguatan penyeimbang atas realitas yang dihadapi keluarga, sekolah dan masyarakat sehari-hari. Bahwa pengembangan pendidikan seni adalah upaya untuk mencipta persepsi baru melalui tahapan-tahapan pengembangan berupa: dokumentasi dan pengarsipan, peningkatan dan pengembangan kemampuan inovasi kreator, dukungan terhadap ekspresi, apresiasi, eksperimentasi & eksplorasi ide, revitalisasi, Penguatan Institusi dan Instansi Terkait Fasilitasi jejaring dan kolaborasi kreatif sebagai media untuk mendidik “selera” tentang aspek nilai-nilai nyata dalam lingkungan

kehidupan disekitarnya untuk menampilkan esensi nilai keluarga, sekolah dan masyarakat pada nilai keaslian lingkungannya.

Hasil pengokohan kebudayaan nasional melalui pendidikan seni sebagai pengungkit *scienc base policy*. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengembangan ilmu pendidikan seni menjadi penyedia rekomendasi kebijakan (nasional, sektoral) berbasis riset dan kajian ilmiah di bidang terkait. Berikut ini adalah pengungkit *science base policy*:



Gambar 5. Pengungkit Science-based Policy
Dok Sumber UU 2019. Ristek BRIN

Sebagai penguatan penyeimbang atas realitas yang dihadapi masyarakat kekinian. Bahwa pengembangan pendidikan seni adalah upaya untuk mencipta persepsi baru melalui tahapan-tahapan nilai luhur sebagai pencipta aset pengetahuan, penjaga budaya dan norma *sains* sebagai pengungkit *science base policy* tentang aspek nilai-nilai kolaborasi antara fokus BRIN, *science based policy* dan masyarakat sebagai pemakai.

Model Pembelajaran Aesthetic

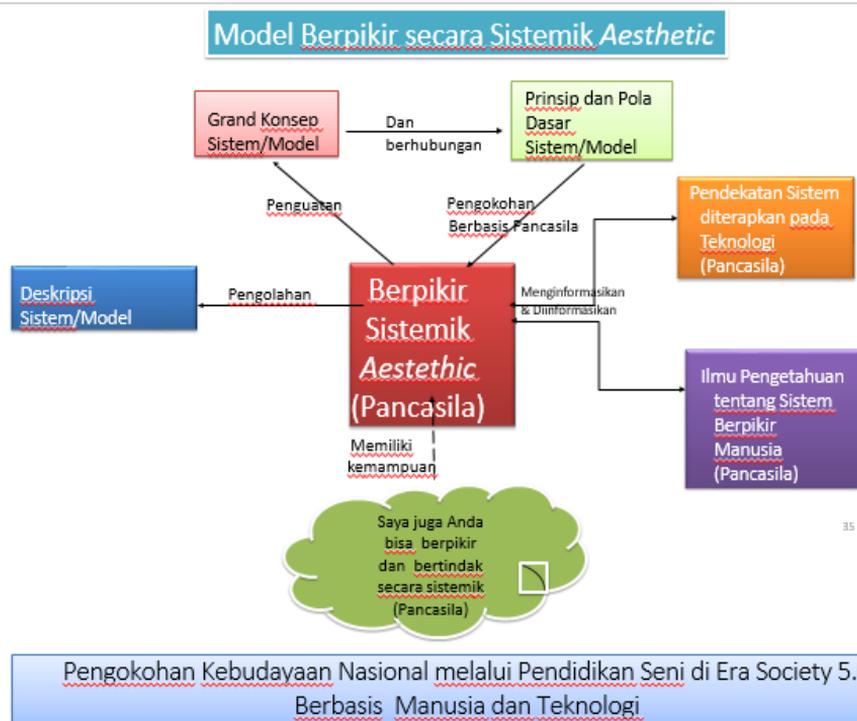
Model pembelajaran aesthetic merupakan model yang dapat diterapkan dalam pola perilaku atau pola budaya masyarakat, untuk mencapai pengokohan kebudayaan nasional. Pendidikan seni merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam model ini. Secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y.

Variabel (X)

1. Model Estetik Menggunakan Teks Pancasila (Teks-Aesthetic)
2. Model Estetika Menggunakan Gubahan Seni Terapan: Tari, Musik, Rupa, Teater (Sensasi-Aesthetic)
3. Model Estetik Menggunakan Empati dan Simpati (Logical Rasa-Aesthetic)
4. Model Estetik Menggunakan Gambar (Visual-Aesthetic)
5. Model Estetik dalam Memahami Ruang Tubuh (Bodily Space-Aesthetic)
6. Model Estetik dalam Interaksi Sosial Budaya (Interaksi-Aesthetic)
7. Model Estetik dalam memahami Diri Sendiri (Diri-Aesthetic)
8. Model Estetik Memahami Lingkungan (Lingkungan-Aesthetic)

Variabel (Y)

Berdasarkan pengklasifikasian dan penerapan dua variabel tersebut, diperoleh hasil berupa pengokohan kebudayaan nasional melalui pendidikan seni di era society 5.0 berbasis manusia dan teknologi.



Penutup

Nilai luhur kebangsaan menjadi sumber pengkokohan kebudayaan nasional melalui pendidikan seni berupa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan, yang begitu beragam merupakan warisan nilai luhur masyarakat yang seharusnya menjadi wawasan kebangsaan peserta didik.

Wawasan dan nilai nilai kebangsaan ini seharusnya tertanam kepada keluarga, peserta didik di sekolah, serta masyarakat di seluruh Indonesia. Sejalan dengan pendapat Geoffrey Leech (1983) tentang kesantunan sebagai strategi untuk menghindari konflik. Menurut Geoffrey Leech; ada enam maksim kesantunan (*politeness maxims*) yang diajukan oleh Leech adalah sebagai berikut: 1. Maksim kebijaksanaan (*tact*); 2. Maksim kedermawanan (*generosity*); 3. Maksim

pujian (*approbation*); 4. Maksim kerendahanhatian (*modesty*); 5. Maksim kesetujuan (*agreement*); 6. Maksim simpati (*sympathy*).

Dibutuhkan kerja keras dan usaha secara masif oleh seluruh *stakeholder* sehingga wawasan kebangsaan semakin baik dan ketahanan nasional semakin tangguh di kalangan peserta didik. Artikel ini belum mengungkap secara lengkap 8 (delapan) model estetika estetik. Oleh karenanya diperlukan penelitian lanjutan secara mendalam, khususnya penerapan 8 (delapan) model estetika, pengaruhnya terhadap pengokohan budaya nasional bagi masyarakat secara luas. Untuk mencapai sasaran diperlukan upaya elaborasi yang lebih kuat dengan berbagai konstitusi. Bagaimanapun pendidikan seni penting kaitannya dengan pembangunan empati.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, F., & Ibda, H. (2019). Konsep Dan Aplikasi Literasi Baru Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0. CV. Pilar Nusantara
- Al Faruqi, U. (2019). "Future Service in Industry 5.0". *Jurnal Sistem Cerdas*, 2(1), 67-79
- al-Fikri, H. M., Yuniarsih, Y., & Wulandari, T. "Inculcating National Values for Students' Character Building of the Faculty of Social and Political Sciences Sangga Buana University through Campus Extracurricular Program." Makalah disampaikan pada Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Vol. 4, No. 4, pp. 115-119).
- Baginda, M. (2018). "Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Karakter pada Pendidikan Dasar dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10(2).
- Farichah, U., Rakhmawati, A., & Wardani, N. E. (2020). "Kesantunan Berbahasa Jawa Pada Percakapan Ganjar Pranowo Dalam Unggahan Instagram Pada Masa Pandemi Covid-19." Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Riksa Bahasa (pp. 227-235).
- Handayani, N. N. L., & Muliastri, N. K. E. (2020, December). "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)." Makalah disampaikan pada Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya (No. 1, pp. 1-14).
- Hartono, Y. (2017). "Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(01).
- Kahar, M. I., Cika, H., Afni, N., & Wahyuningsih, N. E. (2021). "Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0 Di Masa Pandemi Covid 19." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(1), 58-78.
- Kasmahidayat, Yuliawan. (2020). "Pembelajaran Tari Tor-Tor Bagi Siswa Sekolah Indonesia Bangkok Dengan Pendekatan Estetika Melayu." Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian. Bandung: Dep. Pendidikan Seni Tari FPSD UPI.
- Nisak, Z. (2013). "Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif." *Jurnal Ekbis*, 9(2), 468-476
- Putri, D. P. (2018). "Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital." *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 37-50.

- Rukmana, A. Y., Harto, B., & Gunawan, H. (2021). “Analisis Analisis Urgensi Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship) dan Peranan Society 5.0 dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Kewirausahaan.” *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 13(1), 8-23.
- Setiawan, D., & Lenawati, M. (2020). “Peran Dan Strategi Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Society 5.0.” *Journal of Computer, Information System, & Technology Management*. Online ISSN, 2615-7357.
- Yati, Surya. (2019). “Nilai-Nilai Filosofis dalam Tari Saman (Study kasus Kabupaten Gayo Lues)”. Skripsi-Thesis. Banda Aceh: UIN Ar-Rainy.